



Pemerintah
Kabupaten Kebumen

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025-2045





SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional, yang disusun secara sistematis dan terpadu dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan;
- b. bahwa untuk memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi dan arah kebijakan nasional, perlu disusun rencana pembangunan jangka panjang daerah kurun waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 maka diperlukan pengaturan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

dan

BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025-2045.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan Nasional yang memuat visi, misi dan arah pembangunan untuk jangka waktu 20 tahun, terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut RPJPD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang memuat visi, misi dan arah pembangunan untuk jangka waktu 20 tahun, terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.

7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen yang memuat visi, misi dan arah pembangunan Daerah untuk jangka waktu 20 tahun, terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen yang memuat penjabaran dari visi, misi dan program Bupati untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, dengan berpedoman pada RPJPD.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan bagi Perangkat Daerah.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
13. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
14. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
15. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
16. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
17. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaan dalam kurun waktu tertentu.

BAB II

RPJPD

Pasal 2

- (1) RPJPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 20 (dua puluh) tahun ke depan terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045 dalam bentuk visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok Pembangunan Daerah.
- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD yang memuat Visi, Misi dan Program Bupati.
- (3) RPJPD dituangkan dalam 4 (empat) tahapan pembangunan jangka menengah daerah 5 (lima) tahunan yaitu:
 - a. RPJMD Tahap I Tahun 2025–2029;
 - b. RPJMD Tahap II Tahun 2030–2034;

- c. RPJMD Tahap III Tahun 2035–2039; dan
 - d. RPJMD Tahap IV Tahun 2040–2045.
- (4) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dijabarkan dalam RKPD.
- (5) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 3

- (1) Dokumen RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- a. BAB I Pendahuluan;
 - b. BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - c. BAB III Permasalahan dan Isu Strategis;
 - d. BAB IV Visi dan Misi Daerah;
 - e. BAB V Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok; dan
 - f. BAB VI Penutup.
- (2) Dokumen RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

RPJPD Tahun 2025-2045 disusun dengan berpedoman pada:

- a. RPJPN;
- b. RPJPD Provinsi Jawa Tengah;
- c. RTRW; dan
- d. RPPLH.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PERUBAHAN RPJPD

Pasal 6

- (1) Perubahan RPJPD dapat dilakukan apabila:
- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.

- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun.
- (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, RPJMD Tahun 2021-2026 masih tetap berlaku sampai dengan disusunnya RPJMD tahap selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 12 Agustus 2024
BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 12 Agustus 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

EDI Rianto

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2024 NOMOR 11
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN, PROVINSI JAWA
TENGAH : (11-196/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,


AKHMAD HARUN, S.H.

Pembina Tk. I

NIP 19690809 199803 1 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025-2045

I. UMUM

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah bagian penting dari tugas pemerintah daerah dalam merumuskan visi, misi, dan program pembangunan jangka panjang. Hal ini didasarkan pada amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. RPJPD merupakan bagian integral dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan harus konsisten dengan Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) serta berbagai kebijakan pembangunan nasional lainnya. RPJPD disusun untuk mengarahkan pembangunan Daerah agar sesuai dengan visi pembangunan nasional, serta mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai rencana dan program pembangunan sektoral.

Adapun untuk ketentuan mengenai tata cara penyusunan RPJPD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.

Penyusunan RPJPD ini selain berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2024-2044 yang memberikan gambaran kondisi dan pemanfaatan ruang di Kabupaten Kebumen, juga berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen Tahun 2023-2053.

Penyusunan RPJPD juga didasarkan pada pemetaan kebutuhan dan potensi daerah, termasuk analisis masalah, tantangan, peluang, serta aspirasi dan harapan masyarakat. Proses penyusunan RPJPD melibatkan konsultasi publik dan partisipasi aktif masyarakat, termasuk melalui forum-forum dialog, diskusi kelompok, dan mekanisme partisipatif lainnya. Penyusunan RPJPD didasarkan pada analisis data dan informasi seperti data sosial ekonomi, kondisi lingkungan, dan perkembangan pembangunan sebelumnya.

RPJPD memberikan arahan strategis bagi Pemerintah Daerah dalam mengarahkan pembangunan secara berkelanjutan, serta memberikan dasar bagi penyusunan rencana tindak lanjut yang lebih rinci. Dengan demikian, penyusunan RPJPD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045 merupakan instrumen penting dalam mengarahkan pembangunan Daerah menuju visi dan tujuan yang kita inginkan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 219

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA

PANJANG DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

TAHUN 2025-2045



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2025-2045

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 11 TAHUN
2024 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025-2045.....
DAFTAR ISI i
DAFTAR TABEL iii
DAFTAR GAMBAR v
BAB I Pendahuluan I-1
 1.1. Latar Belakang I-1
 1.2. Dasar Hukum..... I-11
 1.3. Hubungan Antar Dokumen..... I-16
 1.4. Maksud dan Tujuan I-18
 1.5. Sistematika I-18

BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah II-1
 2.1. Aspek Geografi dan Demografi II-1
 2.1.1 Geografi II-1
 2.1.2 Demografi II-25
 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-28
 2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi II-28
 2.2.2 Kesejahteraan Sosial Budaya II-50
 2.3. Aspek Daya Saing II-52
 2.3.1 Daya Saing Ekonomi Daerah II-53
 2.3.2 Daya Saing Sumber Daya Manusia II-55
 2.3.3 Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah..... II-57
 2.3.4 Daya Saing Iklim Investasi..... II-59
 2.4. Aspek Pelayanan Umum II-61
 2.5. Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025 II-63
 2.6. Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan
 Publik II-66
 2.6.1 Analisis Proyeksi Demografi II-66
 2.6.2 Analisis Proyeksi Kebutuhan Sarana Prasarana..... II-69
 2.7. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah..... II-74

BAB III Permasalahan dan Isu Strategis III-1
 3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah III-1
 3.1.1 Permasalahan Pembangunan Daerah pada Aspek
 Geografi dan Demografi III-1
 3.1.2 Permasalahan Pembangunan Daerah pada Aspek
 Kesejahteraan Masyarakat III-5

3.1.3 Permasalahan Pembangunan Daerah pada Aspek Daya Saing.....	III-14
3.1.4 Permasalahan Pembangunan Daerah pada Aspek Pelayanan Umum	III-16
3.2. Isu Strategis	III-18
3.2.1 Isu Strategis Global.....	III-18
3.2.2 Isu Startegis Nasional	III-21
3.2.3 Isu Strategis Wilayah Jawa	III-22
3.2.4 Isu Strategis Jawa Tengah	III-24
3.2.5 Isu Lingkungan Strategis Kabupaten Kebumen	III-24
3.2.6 Isu Strategis Kabupaten Kebumen	III-25
 BAB IV Visi dan Misi Daerah	 IV-1
4.1. Visi Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045	IV-1
4.2. Sasaran Visi Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045.....	IV-4
4.3. Misi Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045.....	IV-6
 BAB V Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok.....	 V-1
5.1. Arah Kebijakan Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045	V-1
5.2. Sasaran Pokok Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045	V-8
 BAB VI Penutup	 VI-1
6.1. Kaidah Pelaksanaan	VI-1
6.2. Pembiayaan Pembangunan	VI-4

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Rata-Rata Capaian Kinerja RPJPD Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025	I-4
Tabel 1.2	Hasil Proyeksi Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tanpa Upaya Tambahan	I-5
Tabel 1.3	Hasil Proyeksi Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Dengan Upaya Tambahan	I-6
Tabel 2.1	Risiko Bencana Kabupaten Kebumen	II-6
Tabel 2.2	Distribusi Potensi Daya Dukung Air Kabupaten Kebumen	II-11
Tabel 2.3	Distribusi Potensi Daya Dukung Pangan Kabupaten Kebumen	II-12
Tabel 2.4	Tabel Kelas Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Pangan Kabupaten Kebumen.....	II-14
Tabel 2.5	Tabel Perbandingan Kondisi Eksisting Tahun 2022 serta Proyeksi Tahun 2030 dan 2045 Daya Dukung Pangan Kabupaten Kebumen	II-14
Tabel 2.6	Tabel Kelas Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Air Kabupaten Kebumen.....	II-16
Tabel 2.7	Tabel Perbandingan Kondisi Eksisting Tahun 2022 serta Proyeksi Tahun 2030 dan 2045 Daya Dukung Air Kabupaten Kebumen.....	II-16
Tabel 2.8	Tabel Kelas JLH Pengatur Tata Air Kabupaten Kebumen	II-17
Tabel 2.9	Cekungan Air Tanah Kabupaten Kebumen	II-18
Tabel 2.10	Tabel Tingkat Kerentanan terhadap Perubahan Iklim di Kabupaten Kebumen.....	II-20
Tabel 2.11	Tabel Keadaan Flora dan Fauna Kabupaten Kebumen ...	II-21
Tabel 2.12	Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Kebumen 2018-2023.....	II-23
Tabel 2.13	Capaian Pengelolaan Sampah Kabupaten Kebumen 2019-2023.....	II-23
Tabel 2.14	Capaian Akses Sanitasi Aman dan Akses Air Minum Aman Kabupaten Kebumen 2019-2023.....	II-25
Tabel 2.15	Capaian Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2019-2023.....	II-32
Tabel 2.16	Perbandingan Indeks Harga Konsumen dan Inflasi di 6 Kota Lokasi Survei Biaya Hidup di Jawa Tengah Tahun 2023.....	II-35
Tabel 2.17	Capaian Indeks Desa Membangun Kabupaten Kebumen Tahun 2017-2023	II-37
Tabel 2.18	Capaian Kinerja Partisipasi Pendidikan Menurut Kelompok Usia dan Jenjang Pendidikan Kabupaten Kebumen Tahun 2019-2023.....	II-41
Tabel 2.19	Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Kabupaten Kebumen Tahun 2019-2023.....	II-42
Tabel 2.20	Capaian Kinerja Pencegahan dan Penanganan Kasus Tuberculosis Kabupaten Kebumen, Tahun 2018-2023...	II-45
Tabel 2.21	Derajat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019-2023 (%)	II-62
Tabel 2.22	Capaian Indikator Urusan Pengawasan Kabupaten Kebumen Tahun 2019-2023.....	II-63
Tabel 2.23	Rata-rata Capaian Kinerja RPJPD Kabupaten Kebumen 2005-2025.....	II-64
Tabel 2.24	Rata-rata Capaian Kinerja RPJPD Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Capaian Kinerja Sampai dengan	

	Tahun 2022) Seluruh Tahapan Jangka Menengah (Periodisasi RPJMD Kabupaten Kebumen)	II-64
Tabel 2.25	Hierarki Fungsi dan Orde Kota	II-78
Tabel 2.26	Indikasi Program Rencana Pola Ruang Kabupaten Kebumen.....	II-81
Tabel 2.27	Indikasi Program Pusat Pertumbuhan Wilayah Kabupaten Kebumen.....	II-84
Tabel 2.28	Pusat Kegiatan dan Indikasi Program Sistem Jaringan Transportasi.....	II-86
Tabel 4.1	Perumusan Visi Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045	IV-1
Tabel 4.2	Sasaran Visi, Indikator dan Target Kabupaten Kebumen 2025-2045.....	IV-6
Tabel 4.3	Perumusan Misi Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045	IV-7
Tabel 5.1	Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045.....	V-6
Tabel 5.2	Visi, Sasaran Visi, Misi, Sasaran Pokok dan Arah Pembangunan RPJPD Kabupaten Kebumen 2025-2045.	V-22

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Tahapan Penyusunan RPJPD Kabupaten Kebumen	I-3
Gambar 1.2	Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Berdasarkan Ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017.....	I-17
Gambar 1.3	Hubungan Dokumen Perencanaan Daerah RPJPD dengan RPJMD Berdasarkan Ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017.....	I-18
Gambar 2.1	Peta Administrasi Kabupaten Kebumen	II-2
Gambar 2.2	Peta Topografi Kabupaten Kebumen (RTRW 2024-2044) ..	II-2
Gambar 2.3	Peta Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Kebumen	II-3
Gambar 2.4	Peta Bahaya Banjir Kabupaten Kebumen	II-4
Gambar 2.5	Peta Bahaya Longsor Kabupaten Kebumen	II-4
Gambar 2.6	Peta Kerentanan Gelombang Ekstrem dan Abrasi Kabupaten Kebumen.....	II-5
Gambar 2.7	Daftar Desa Terdapat Kawasan Hutan	II-9
Gambar 2.8	Grafik Indeks Ketahanan Pangan, 2018-2023	II-9
Gambar 2.9	Peta Status Daya Dukung Air Kabupaten Kebumen	II-10
Gambar 2.10	Peta Status Daya Dukung Pangan Kabupaten Kebumen ..	II-12
Gambar 2.11	Peta JLH Penyedia Pangan Kabupaten Kebumen	II-14
Gambar 2.12	Peta JLH Penyedia Air Kabupaten Kebumen	II-15
Gambar 2.13	Peta JLH Pengatur Tata Air Kabupaten Kebumen.....	II-17
Gambar 2.14	Peta Cekungan Air Tanah Kabupaten Kebumen	II-18
Gambar 2.15	Peta Kawasan Hutan Kabupaten Kebumen	II-19
Gambar 2.16	Grafik Persentase Luasan Kawasan Kumuh yang Tertangani, 2019-2023.....	II-25
Gambar 2.17	Grafik Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, 2018-2023.....	II-25
Gambar 2.18	Grafik Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Kebumen Menurut Kecamatan 2022	II-26
Gambar 2.19	Grafik Jumlah Penduduk Kabupaten Kebumen Menurut Kelompok Umur, 2010	II-27
Gambar 2.20	Grafik Jumlah Penduduk Kabupaten Kebumen Menurut Kelompok Umur, 2022	II-27
Gambar 2.21	Grafik Jumlah Penduduk Kabupaten Kebumen Menurut Kelompok Usia Belum Produktif, Produktif, dan Tidak Produktif, 2010-2022	II-27
Gambar 2.22	Grafik Penduduk Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Kebumen Tahun 2023	II-28
Gambar 2.23	Grafik Pengangguran Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Kebumen Tahun 2023.....	II-28
Gambar 2.24	Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kebumen, 2005-2023.....	II-29
Gambar 2.25	Grafik Nilai Tukar Petani (NTP), 2011-2022	II-30
Gambar 2.26	Grafik Nilai Tukar Nelayan (NTN), 2016-2022	II-30
Gambar 2.27	Grafik Kontribusi Sektor Industri Pengolahan dalam PDRB ADHB, 2018-2023.....	II-31
Gambar 2.28	Grafik Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan dalam PDRB ADHK (Persen), 2013-2023.....	II-31
Gambar 2.29	Grafik Tingkat <i>Return on Asset</i> (ROA) BUMD, 2013-2023.	II-32
Gambar 2.30	Grafik Realisasi Investasi, 2011-2023	II-33
Gambar 2.31	Grafik Jumlah Kunjungan Wisatawan, 2011-2023	II-34
Gambar 2.32	Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Kebumen 2007-2023.....	II-34
Gambar 2.33	Grafik PDRB Per Kapita Kabupaten Kebumen, 2011-2023	II-35

Gambar 2.34	Grafik Inflasi Tahunan Purwokerto Tahun 2020-2023	II-36
Gambar 2.35	Grafik IHK Tahunan Purwokerto Tahun 2020-2023	II-36
Gambar 2.36	Grafik Laju Indeks Implisit PDRB Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2023	II-36
Gambar 2.37	Grafik Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kebumen, 2011-2023	II-38
Gambar 2.38	Grafik Usia Harapan Hidup, 2010-2023	II-39
Gambar 2.39	Grafik Rata-Rata Lama Sekolah, 2010-2023	II-39
Gambar 2.40	Grafik Harapan Lama Sekolah, 2010-2023,.....	II-39
Gambar 2.41	Grafik Pengeluaran per Kapita, 2010-2023	II-39
Gambar 2.42	Grafik Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut Pendidikan Terakhir Ditamatkan, 2022-2023	II-40
Gambar 2.43	Grafik Rata-rata Kemampuan Literasi dan Numerasi Siswa SD dan SMP Berdasarkan Hasil Asesmen Nasional, Kabupaten Kebumen 2022-2023.....	II-42
Gambar 2.44	Grafik <i>Stunting</i> dan Gizi Buruk, 2017-2023	II-43
Gambar 2.45	Grafik Angka Morbiditas, 2013-2023.....	II-45
Gambar 2.46	Grafik Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan, 2016-2023	II-46
Gambar 2.47	Grafik Kematian Ibu dan Bayi, 2013-2023	II-46
Gambar 2.48	Grafik Indeks Gini Kabupaten Kebumen, 2011-2023	II-47
Gambar 2.49	Grafik Distribusi Pendapatan, 2018-2023	II-48
Gambar 2.50	Grafik Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kebumen, 2005-2023.....	II-49
Gambar 2.51	Grafik Indeks Ketahanan Pangan, 2018-2023	II-49
Gambar 2.52	Grafik Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) Tahun 2020-2023 (%). ..	II-50
Gambar 2.53	Grafik Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga), 2016-2023.....	II-50
Gambar 2.54	Grafik Indeks Ketimpangan Gender, 2013-2023.....	II-50
Gambar 2.55	Grafik Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan, 2016-2023.....	II-51
Gambar 2.56	Grafik Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK), 2018-2022.....	II-51
Gambar 2.57	Grafik Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Kebumen, 2023.....	II-52
Gambar 2.58	Grafik Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Kebumen Menurut Pilar IDSD, 2023.....	II-53
Gambar 2.59	Grafik Skor Pilar Stabilitas Ekonomi Makro, 2023	II-54
Gambar 2.60	Grafik Skor Pilar Pasar Produk, 2023.....	II-54
Gambar 2.61	Grafik Skor Pilar Sistem Keuangan, 2023.....	II-55
Gambar 2.62	Grafik Skor Pilar Ukuran Pasar, 2023	II-55
Gambar 2.63	Grafik Skor Pilar Kesehatan, 2023	II-56
Gambar 2.64	Grafik Skor Pilar Keterampilan, 2023	II-57
Gambar 2.65	Grafik Skor Pilar Pasar Tenaga Kerja, 2023.....	II-57
Gambar 2.66	Grafik Skor Pilar Infrastruktur, 2023	II-58
Gambar 2.67	Grafik Skor Pilar Adopsi TIK, 2023	II-59
Gambar 2.68	Grafik Skor Pilar Institusi, 2023.....	II-60
Gambar 2.69	Grafik Skor Pilar Dinamika Bisnis, 2023	II-60
Gambar 2.70	Grafik Skor Pilar Kapabilitas Inovasi	II-61
Gambar 2.71	Grafik Indeks Reformasi Birokrasi, 2019-2023.....	II-61
Gambar 2.72	Grafik Kependudukan Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2045.....	II-66
Gambar 2.73	Grafik Piramida Penduduk Kabupaten Kebumen Tahun 2020.....	II-66

Gambar 2.74	Grafik Piramida Penduduk Kabupaten Kebumen Tahun 2045.....	II-67
Gambar 2.75	Grafik Distribusi Penduduk Menurut Kelompok Umur Produktif dan Tidak Produktif Kabupaten Kebumen Tahun 2045.....	II-67
Gambar 2.76	Grafik Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio/DR) Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2045.....	II-68
Gambar 2.77	Grafik Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio) Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2045.....	II-69
Gambar 2.78	Grafik Kebutuhan Luas Kavling Minimum Seluruh Keluarga Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2045.....	II-70
Gambar 2.79	Grafik Kebutuhan Air Penduduk Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045	II-71
Gambar 2.80	Grafik Kebutuhan Listrik Kabupaten Kebumen 2025-2045	II-72
Gambar 2.81	Grafik Proyeksi Persampahan Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045.....	II-72
Gambar 2.82	Grafik Kebutuhan Pengelolaan Sampah Permukiman Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045	II-73
Gambar 2.83	Grafik Kebutuhan Fasilitas Kesehatan Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045	II-73
Gambar 2.84	Grafik Kebutuhan Fasilitas Pendidikan Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045	II-74
Gambar 2.85	Peta Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen.....	II-76
Gambar 2.86	Peta Rencana Sistem Pusat Permukiman Kabupaten Kebumen	II-77
Gambar 2.87	Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Kebumen	II-80
Gambar 2.88	Peta Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Kebumen ...	II-83
Gambar 2.89	Peta Rencana Sistem Jaringan Transportasi Kabupaten Kebumen	II-85

BAB I

Pendahuluan

Kabupaten Kebumen merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang berada pada bagian selatan. Kebumen awalnya merupakan salah satu kabupaten dari Kerajaan Mataram Islam dengan nama Kabupaten Panjer. Pada zaman Kerajaan Mataram Islam, Kabupaten Kebumen (Panjer) mempunyai peran penting dalam melawan kolonialisme Belanda dengan membantu penyediaan dan perbekalan pasukan Sultan Agung Raja Mataram Islam dalam menyerang Batavia. Nama Kebumen berasal dari kata *Ki-Bumi-An* yang merupakan tempat padepokan/pondok yang dibangun oleh Kiai Pangeran Bumidirjo. Kiai Pangeran Bumidirjo adalah adik Sultan Agung Hanyokro Kusumo yang melarikan diri ke Kebumen karena bersitegang dengan Raja Mataram Islam kala itu yaitu Sunan Amangkurat I.

Secara yuridis formal, sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2018 tentang Hari Jadi Kebumen, telah ditetapkan Hari Jadi Kabupaten Kebumen pada hari Selasa Wage tanggal 1 Suro atau 21 Agustus 1629. Hal ini didasarkan pada peristiwa sejarah pada saat Kiai Bodronolo membantu penyediaan dan perbekalan pasukan Sultan Agung dalam menyerang Batavia. Hari Jadi tersebut merupakan momentum sejarah yang memiliki makna mendalam dan mendasar sebagai titik tolak dalam pelaksanaan pembangunan dan sekaligus pendorong untuk meningkatkan kreativitas dan atraktivitas guna mewujudkan otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kabupaten Kebumen memiliki Luas Wilayah 1.281,11 km² atau 133,409,96 hektar terbagi dalam 26 kecamatan serta 449 desa dan 11 kelurahan. Kondisi wilayah Kabupaten Kebumen berupa daerah pantai dan pegunungan dan sebagian besar merupakan dataran rendah. Kabupaten Kebumen terletak pada 109°22' - 109°50' Bujur Timur 7°27' - 7°50' Lintang Selatan, dengan batas administrasi sebagai berikut:

- a. Sebelah Barat : Kabupaten Cilacap dan Banyumas
- b. Sebelah Timur : Kabupaten Purworejo
- c. Sebelah Utara : Kabupaten Wonosobo dan Banjarnegara
- d. Sebelah Selatan : Samudera Indonesia.

1.1. Latar Belakang

Pembangunan Kabupaten Kebumen selama dua puluh tahun dilaksanakan berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang daerah atau RPJPD Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025, yang dijabarkan dalam empat tahapan RPJMD. Saat ini RPJPD Tahun 2005-2025 telah memasuki tahap akhir dan akan berakhir pada tahun 2025.

RPJPD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045 perlu segera disusun sesuai Tahapan Penyusunan RPJPD, sebagai pedoman perencanaan 20 tahun mendatang. Dalam upaya menjaga keberlanjutan kinerja pembangunan daerah Kabupaten Kebumen seiring akan berakhirnya tahapan RPJPD Tahun 2005-2025, maka Pemerintah Kabupaten Kebumen harus segera menyusun dan menetapkan RPJPD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 tahun. Kinerja Pemerintah Kabupaten Kebumen harus dapat mendukung pencapaian kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, RPJP Kabupaten Kebumen harus selaras dengan RPJP Provinsi maupun Nasional. Berdasarkan

Pasal 263 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, RPJPD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045 merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka Panjang untuk 20 tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD serta Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Kebumen Tahun 2024-2044. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045 disusun melalui pendekatan (1) politik, (2) teknokratik, (3) partisipatif, (4) atas-bawah (top-down), (5) bawah-atas (bottom up), dan (6) orientasi substansi secara Tematik-Holistik, Integratif dan Spasial (THIS).

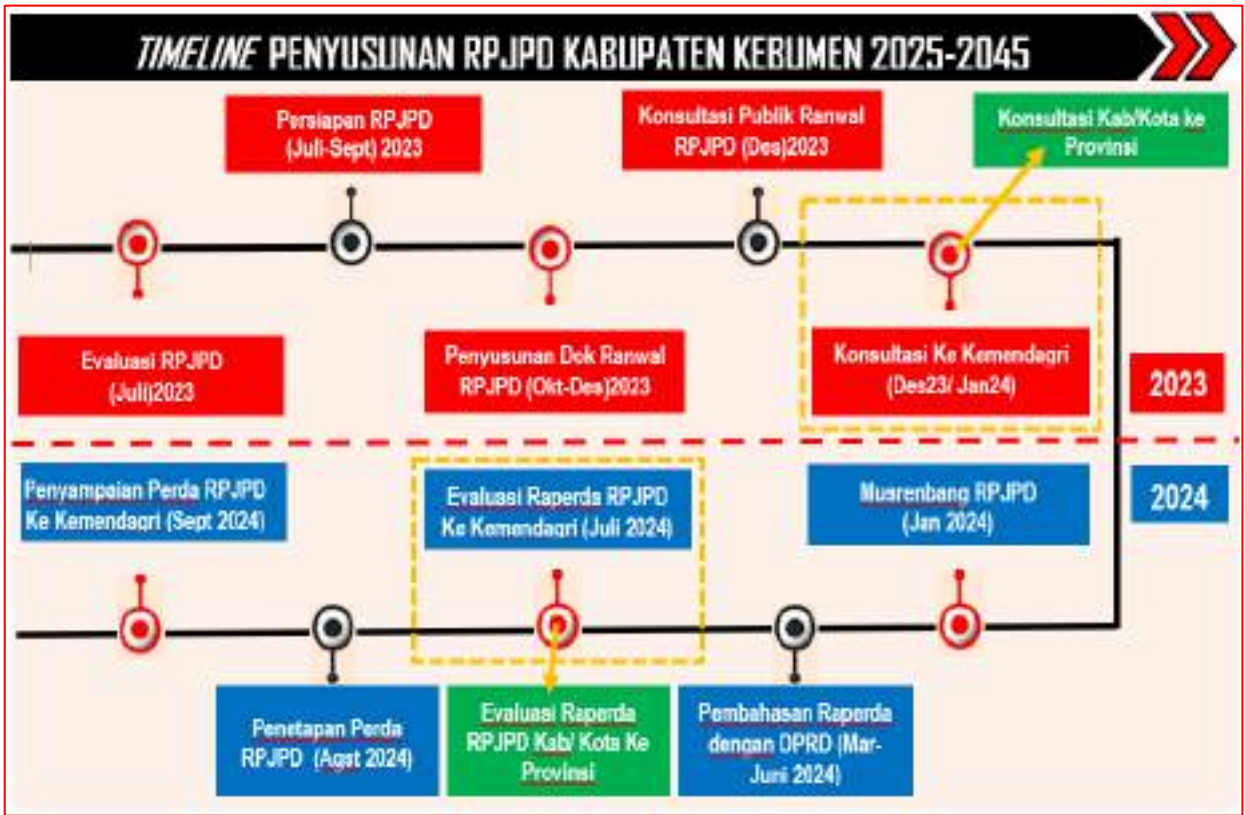
Penyusunan RPJPD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045 secara teknis disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Namun demikian ketentuan teknis penyusunan RPJPD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045 pada tahun 2024 mempedomani ketentuan terbaru, berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 dan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: 600.1/176/SJ dan Nomor: 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045.

Sementara itu, penyusunan RPJPD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045 juga mendasari Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 000.7/0002940 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045. Penyelarasan yang dilakukan terdiri dari penyelarasan visi, sasaran visi, misi, periode dan tema RPJPD, sasaran pokok dan arah pembangunan, serta keharusan menggunakan Indikator Utama Pembangunan (IUP) yang ditetapkan oleh Provinsi Jawa Tengah termasuk *baseline* Tahun 2025 dan target akhir periode di Tahun 2045. Penetapan IUP kabupaten/kota adalah dalam kerangka mendukung pencapaian visi, misi, sasaran pokok pembangunan daerah masing-masing kabupaten/kota dan Provinsi Jawa Tengah. Penetapan IUP adalah sebagai alat ukur pencapaian kinerja pembangunan jangka panjang daerah, yang ditetapkan selaras dengan sasaran pokok dan arah pembangunan. Penetapan IUP kabupaten/kota merujuk pada indikator hasil penyelarasan dengan IUP RPJPD Provinsi Jawa Tengah untuk kabupaten/kota dan dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan dan analisis masing-masing kabupaten/kota dalam rangka mengukur pencapaian kinerja pembangunan daerah. Selanjutnya melalui surat Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah Nomor 000.7/1030 tentang Tindak Lanjut Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 000.7/0002940 Tanggal 18 Mei 2024 tentang Penyelarasan RPJPD Kabupaten/Kota dengan RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045, dilakukan pemutakhiran beberapa metadata, *baseline* Tahun 2025 serta target Tahun 2045 untuk beberapa indikator.

Penyusunan RPJPD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045 perlu mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja RPJPD periode sebelumnya dengan memperhatikan isu-isu strategis yang akan dihadapi (Internasional, Nasional,

Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Kabupaten Kebumen), sinergitas antar sektor dan antar wilayah serta penjangkaran aspirasi yang mengemuka sebagai hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Proses penyusunan RPJPD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045 disusun melalui enam tahapan yaitu: (1) Persiapan Penyusunan, (2) Penyusunan Rancangan Awal, (3) Penyusunan Rancangan, (4) Pelaksanaan Musrenbang; (5) Perumusan Rancangan Akhir, dan (6) Penetapan Peraturan Daerah. Berikut bagan rencana penyusunan RPJPD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045.



Gambar 1.1.
Tahapan Penyusunan RPJPD Kabupaten Kebumen

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 saat ini sudah memasuki tahapan keempat dan akan segera berakhir. Dengan demikian, maka perlu disusun RPJPD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045 yang akan menjadi pedoman dalam perumusan visi, misi, dan program calon kepala daerah serta menjadi dasar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJPD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045 perlu segera disusun sesuai Tahapan Penyusunan RPJPD yang merupakan kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen sebagai pedoman perencanaan 20 tahun mendatang.

Refleksi Pembangunan Dua Dekade Kinerja Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 tergolong tinggi, namun demikian dalam menghadapi tantangan 20 tahun ke depan masih perlu memperhatikan pembangunan sumberdaya manusia. Pemerintah Kabupaten Kebumen telah melaksanakan berbagai kebijakan strategis dalam mewujudkan target capaian pembangunan jangka panjang daerah. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam negeri Nomor 600.2.1/1570/SJ tentang Penyusunan Evaluasi Terhadap Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025, hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 menunjukkan capaian kinerja pelaksanaan sasaran pokok sebesar 84,63 persen, termasuk dalam predikat kinerja “Tinggi”. Kondisi ini merupakan rata-rata capaian kinerja

berdasarkan evaluasi pencapaian sasaran pokok RPJPD Kabupaten Kebumen tahun 2005-2025 per tahapan jangka menengah sesuai periodisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen, yaitu: (1) Periodisasi Tahun 2006-2010 sebesar 79,50 persen; (2) Periodisasi Tahun 2010-2015 sebesar 81,87 persen; (3) Periodisasi Tahun 2016-2021 sebesar 88,44 persen; dan (4) Periodisasi Tahun 2021-2026 sebesar 88,72 persen.

Tabel 1.1.
Rata-Rata Capaian Kinerja RPJPD Kabupaten Kebumen
Tahun 2005-2025

Predikat Kinerja	Interval Nilai Capaian Kinerja	Jumlah Indikator Pencapaian Sasaran Pokok RPJPD (Periodisasi RPJMD Kabupaten Kebumen)			
		2006-2010	2010-2015	2016-2021	2021-2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sangat Tinggi (ST)	91% ≤ 100%	84	110	74	82
Tinggi (T)	76% ≤ 90%	18	15	6	18
Sedang (S)	66% ≤ 75%	18	8	6	3
Rendah (R)	51% ≤ 65%	7	5	3	3
Sangat Rendah (SR)	≤ 50%	25	24	5	8
Tdh	Tidak Dihitung	7	14	0	0
Jumlah Indikator		159	176	94	114
Rata-rata Capaian Kinerja (%)		78,79	82,60	91,18	89,67
Rata-rata Capaian Kinerja RPJPD Kabupaten Kebumen 2005-2005 (%)		85,56			
Status		Tinggi			

Sumber: Laporan Evaluasi Terhadap Hasil Pelaksanaan RPJPD Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025, 2023

Gubernur Jawa Tengah memberikan rekomendasi melalui Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 050/28 Tahun 2023 tentang Rekomendasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025, bahwa pembangunan Kabupaten Kebumen tahun 2025-2045 perlu memperhatikan upaya-upaya strategis untuk pembangunan sumber daya manusia, khususnya untuk meningkatkan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan penanggulangan kemiskinan baik dari sisi peningkatan pendapatan maupun pengurangan beban masyarakat miskin untuk menurunkan angka kemiskinan. Selain itu pemerintah daerah juga harus menitikberatkan pada aspek ekonomi, infrastruktur, dan lingkungan hidup serta tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Skenario Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Kabupaten Kebumen dikategorikan dalam indikator Tanpa Upaya Tambahan sejumlah 15 indikator dan yang termasuk dalam indikator Dengan Upaya Tambahan sejumlah 75 indikator. Indikator-indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang belum tercapai diproyeksi sampai dengan tahun 2045, kemudian hasil proyeksi pada tahun 2030 dibandingkan dengan target pada peraturan presiden Nomor 111 Tahun 2022. Apabila proyeksi pada tahun 2030 mencapai target maka indikator tersebut termasuk dalam indikator tanpa upaya tambahan. Hasil capaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Kebumen diproyeksikan di tahun 2030 dan dibandingkan dengan target maka terdapat 15 indikator Tanpa Upaya Tambahan. Artinya indikator tersebut sudah sesuai target di tahun 2030. Secara lengkap hasil proyeksi indikator TPB Tanpa Upaya Tambahan seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.2.
Hasil Proyeksi Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
Tanpa Upaya Tambahan

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2022	TARGET Perpres 111/ 2022	Laju	2025	2029	2030	2034	2039	2045
1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Progra m Keluarga Harapan.	%	85	Turun	. -5	71	52	48	24	1	-
1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	%	96,84	100	1,92	100	100	100	100	100	100
2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	PPH	90	95,2	1,00	93,00	97,00	98,00	100,00	100,00	100,00
5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	%	NA	Turun	(0,003)	0	0	0	0	0	0
6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	%	92,42	100	1,36	96,49	100	100	100	100	100
6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	Indeks	54,49	Naik	-0,55	Turun	Turun	Turun	Turun	Turun	Turun
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	%	5,79	Naik	0,06	6,0	6,2	6,3	6,6	7,0	7,3
8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	%	61,65	Naik	2,05	67,8	76,0	78,0	88,3	98,5	108,7
8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	Orang	9	Naik	0,25	9,75	10,75	11,00	12,25	13,50	14,75
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	%	6,84	8,1	0,26	7,6	8,7	8,9	10,3	11,6	12,9

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2022	TARGET Perpres 111/ 2022	Laju	2025	2029	2030	2034	2039	2045
9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur	%	30,37	Naik	0,72	32,5	35,4	36,2	39,8	43,4	47,0
9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.	%	0,14	Naik	0,02	0,2	0,3	0,3	0,4	0,5	0,6
11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	Indeks	102,05	Turun 30%	-9,6	Turun	Turun	Turun	Turun	Turun	Turun
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	%	14,81	Naik	1,08	18,04	22,34	23,41	28,79	34,16	39,54
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	%	96,6	Naik	6,24	100	100	100	100	100	100

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045, 2024

Indikator-indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan tahun eksisting yang belum tercapai, belum dilaksanakan dan belum ada data dilakukan proyeksi sampai dengan tahun 2045. Kemudian hasil proyeksi tahun 2030 dibandingkan dengan target pada Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022. Apabila hasil proyeksi tidak mencapai target, maka dikategorikan sebagai indikator dengan upaya tambahan. Terdapat 75 indikator dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang memerlukan upaya tambahan. Artinya indikator-indikator tersebut diproyeksikan sampai dengan tahun 2030 belum mencapai target Perpres 111/2022. Sehingga indikator dengan upaya tambahan nantinya akan dijadikan rekomendasi dalam arah kebijakan dan sasaran pokok. Secara lengkap hasil proyeksi indikator TPB Dengan Upaya Tambahan seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.3.
Hasil Proyeksi Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
Dengan Upaya Tambahan

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2022	TARGET Perpres 111/ 2022	Laju	PROYEKSI					
						2025	2029	2030	2034	2039	2045
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	%	16,41	6	-0,27	15,62	14,56	14,29	12,97	11,64	10,32
11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Rp	76.560.347.500	Turun	18.975.665.000	Naik	Naik	Naik	Naik	Naik	Naik
1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh	Rp	Rp1.030.085.935	Naik	-29.005.770.955	Turun	Turun	Turun	Turun	Turun	Turun

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2022	TARGET Perpres 111/ 2022	Laju	PROYEKSI					
						2025	2029	2030	2034	2039	2045
	pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.										
3.3.4.(a)	Persentase kabupaten/ kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	%	NA	Naik	0	35	35	35	35	35	35
3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	Orang	2	Turun	0	2	2	2	2	2	2
3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	%	32,38	8,7	-1,25	28,64	23,65	22,41	16,17	9,94	3,71
3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	%	23,68	21,8	7,59	Naik	Naik	Naik	Naik	Naik	Naik
3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).	%	2,38	2,28	0,01	2,43	2,49	2,50	2,58	2,65	2,73
3.8.1.(a)	Unmet need pelayanan kesehatan.	%	15,98	9,91	-0,18	15,44	14,72	14,54	13,64	12,74	11,84
3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	%	32,38	8,7	-1,25	28,64	23,65	22,41	16,17	9,94	3,71
4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	%	109,27	114,09	0,39	110,43	111,98	112,37	114,31	116,25	118,18
4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	%	91,75	106,94	0,45	93,09	94,87	95,31	97,54	99,76	101,99
4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	%	7,85	8,8	0,13	8,23	8,74	8,87	9,51	10,15	10,78
4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	%	46,38	72,77	3,06	55,56	67,80	70,86	86,16	101,46	116,76
4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa	%	115	Naik	0	115	115	115	115	115	115

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2022	TARGET Perpres 111/ 2022	Laju	PROYEKSI					
						2025	2029	2030	2034	2039	2045
	disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).										
5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	Jum lah	2	16	0	2	2	2	2	2	2
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	%	22	22,52	0,00	22	22	22	22	22	22
5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	%	15,98	9,9	-0,18	15,44	14,72	14,72	13,64	12,74	11,84
6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	%	12,06	100	0,92	14,82	18,50	19,42	24,02	28,62	33,22
6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	%	92,63	Naik	0	92,63	92,63	92,63	92,63	92,63	92,63
6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	%	0	Ada	-	-	-	-	-	-	-
6.4.1.(b)	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.	Kegiata n	Belum Dilaksanaka n	Ada	-	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6.5.1.(a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	RPDAST	Belum Dilaksanaka n	Ada	-	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2022	TARGET Perpres 111/ 2022	Laju	PROYEKSI					
						2025	2029	2030	2034	2039	2045
6.5.1.(c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	Jaringa n	NA	Ada	-	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6.5.1.(g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	Kegiata n	Belum Dilaksana n	Ada	-	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
7.2.1*	Bauran energi terbarukan.	%	NA	16	-	Terdat a	Terdat a	Terdat a	Terdat a	Terdata	Terdat a
8.1.1.(a)	PDB per kapita.	%	24	50	0,47	25,1	27,0	27,5	29,8	32,2	34,5
8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	%	26,79	51	0,67	28,8	31,5	32,2	35,5	38,9	42,2
8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	%	0,04	25	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	%	5,92	4	-0,08	5,70	5,40	5,32	4,95	4,57	4,20
8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata.	Rp	5.508.485.578	Naik	- 989.563.343	Turun	Turun	Turun	Turun	Turun	Turun
8.10.1.(a)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).	%	800	Turun	0	800	800	800	800	800	800
8.10.1.(b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	%	0,04	Naik	0	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
11.3.2.(b)	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.	%	Belum Dilaksana n	Ada	-	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	%	60,51	80	2,15	66,95	75,54	77,69	88,43	99,17	100,00
11.7.1.(a)	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.	%	17%	Naik	0,00	17	17	17	17	17	17
12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	Perusah aan	1	Naik	0	1	1	1	1	1	1
12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	Produk	NA	Naik	-	Terdat a	Terdat a	Terdat a	Terdat a	Terdata	Terdat a
12.8.1.(a)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar	Fasilitas	50	Naik	-	50	50	50	50	50	50

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2022	TARGET Perpres 111/ 2022	Laju	PROYEKSI					
						2025	2029	2030	2034	2039	2045
	Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.										
15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	%	34,7	Naik	0,00	34,7	34,7	34,7	34,7	34,7	34,7
15.6.1*	Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata.	Dokumen	Belum Dilaksanakan	Ada		-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	%	0,0065	Turun	62	Naik	Naik	Naik	Naik	Naik	Naik
16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	%	12	Naik	-6	Turun	Turun	Turun	Turun	Turun	Turun
16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	%	0,008	Turun	-0,0009	0,006	0,002	0,001	0,000	0,000	0,000
16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	Indeks	3,34	4	-0,48	Turun	Turun	Turun	Turun	Turun	Turun
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	%	22	Naik	0,00	22	22	22	22	22	22
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	%	0,40	12	0,01	0,42	0,45	0,46	0,50	0,54	0,57
17.17.1.(a)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	Proyek	Belum Dilaksanakan	ADA	-	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
17.17.1.(b)	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek,	Proyek	Belum Dilaksanakan	ADA	-	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2022	TARGET Perpres 111/ 2022	Laju	PROYEKSI					
						2025	2029	2030	2034	2039	2045
	dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).										
17.18.1.(d)	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.	%	50	Naik	0	50	50	50	50	50	50
17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	%	32,69	-4,35		Turun	Turun	Turun	Turun	Turun	Turun

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045, 2024

1.2. Dasar Hukum

- Dasar hukum penyusunan RPJPD Kabupaten Kebumen tahun 2025-2045 sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
14. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
15. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.6634);
38. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana dimutakhirkan beberapa kali terakhir melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 211);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2023-2053 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 208);

51. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 – 2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 210);
52. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
53. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: 600.1/176/SJ dan Nomor: 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045; dan
54. Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 000.7/0002940 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045.

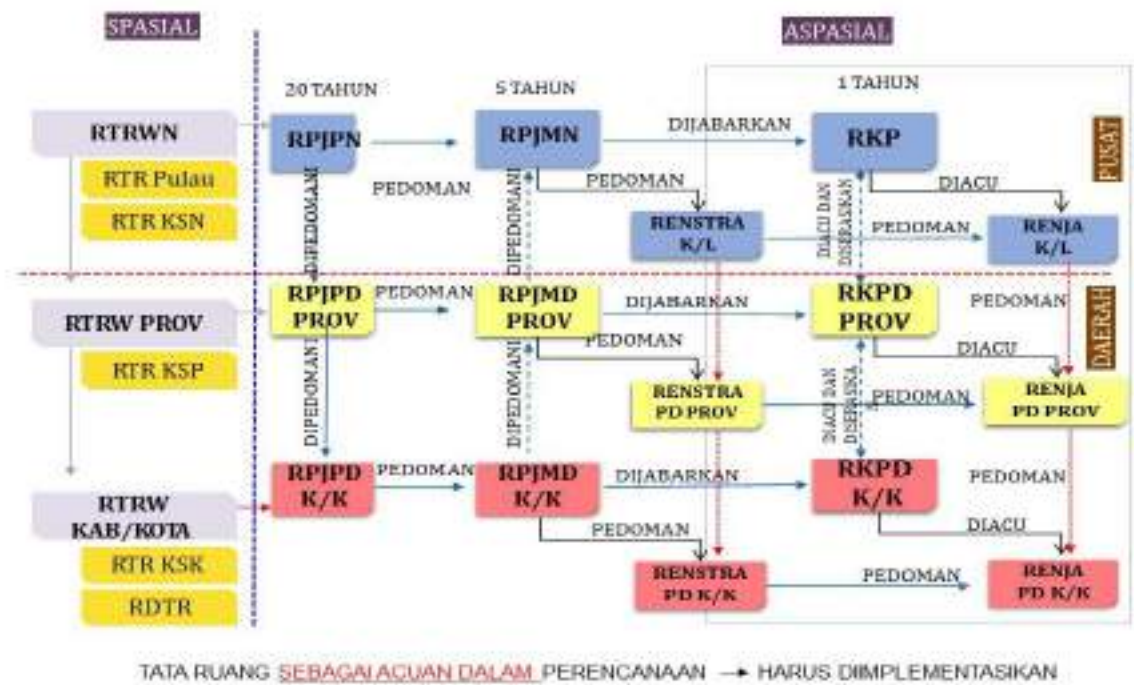
1.3. Hubungan Antar Dokumen

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Pasal 159 menyatakan bahwa sinkronisasi kebijakan dengan rencana pembangunan lainnya dilaksanakan dalam penyusunan RPJPD, RPJMD, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sinkronisasi kebijakan dengan perencanaan pembangunan lainnya dilakukan dengan penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah lainnya, serta sinkronisasi kebijakan pembangunan nasional dan daerah, pembangunan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, serta pembangunan antar daerah. Penelaahan tersebut sesuai dengan Pasal 160 mengandung makna bahwa:

1. Memedomani RPJPN dalam penyusunan RPJPD dilakukan dengan cara menyelaraskan sasaran utama, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah dengan nasional;
2. Memedomani RTRW dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD dilakukan dengan cara penyelarasan antara sasaran, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang maupun jangka menengah daerah dengan tujuan, kebijakan dan strategi, serta indikasi program utama rencana struktur ruang, rencana pola ruang wilayah, dan rencana kawasan strategis kabupaten;
3. Mengintegrasikan sasaran utama, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah dengan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) yang memuat rencana: (a) pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam; (b) pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup; (c) pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan (d) adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
4. Memperhatikan RPJPD daerah lainnya dalam penyusunan RPJPD dilakukan dengan cara menyelaraskan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah dengan daerah lainnya;
5. Memedomani RPJPD dalam penyusunan RPJMD dilakukan dengan cara menyelaraskan sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah;
6. Memedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dalam penyusunan RPJMD dilakukan dengan cara menyelaraskan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan sasaran, agenda pembangunan, strategi, arah pengembangan wilayah, dan program strategis nasional dengan memperhatikan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah;

- Memedomani RPJMD provinsi dalam penyusunan RPJMD kabupaten/kota dilakukan dengan cara menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota dengan visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, dan program pembangunan jangka menengah daerah, serta prioritas untuk bidang pembangunan dan pembangunan kewilayahan sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah;
- Memperhatikan RPJMD daerah lain dalam penyusunan RPJMD dilakukan dengan cara menyelaraskan strategi dan arah kebijakan jangka menengah daerah dengan daerah lainnya;
- Memperhatikan dokumen rencana strategis kementerian/lembaga dalam penyusunan dokumen rencana strategis perangkat daerah dilakukan dengan cara menyelaraskan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam dokumen rencana strategis kementerian/lembaga untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional;
- Memedomani Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dilakukan dengan cara menyelaraskan tema, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan dengan prioritas pembangunan daerah; dan
- Memedomani RKPD provinsi dalam penyusunan RKPD kabupaten/kota dilakukan dengan cara menyelaraskan prioritas pembangunan daerah provinsi dengan daerah kabupaten/kota.

Berikut bagan hubungan RPJPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah lainnya berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.



Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2023

Gambar 1.2.
Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Berdasarkan Ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 juga menjelaskan hubungan antara RPJPD dan RPJMD (Gambar 1.3). Penyusunan dokumen RPJMD selain menerjemahkan tujuan dari visi dan misi kepala daerah terpilih, juga perlu mempertimbangkan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah.



Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2023

Gambar 1.3.
Hubungan Dokumen Perencanaan Daerah RPJPD dengan RPJMD Berdasarkan Ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan RPJPD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045 adalah memberikan arah dalam pencapaian visi daerah yang akan dicapai daerah selama 20 tahun ke depan.

Tujuan penyusunan RPJPD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045 adalah:

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah jangka panjang dan menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar fungsi pemerintah daerah dan pemerintah pusat;
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan dalam rangka pembangunan daerah serta terwujudnya proses optimalisasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah; dan
3. Menjadi pedoman dalam menyusun RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Kebumen dan dokumen perencanaan pembangunan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Selain itu, RPJPD juga menjadi pedoman penyusunan visi, misi, dan program calon bupati serta wakil bupati pada periode berkenaan.

1.5. Sistematika

Sesuai dengan ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, dokumen RPJPD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045 disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas mengenai isi dokumen secara keseluruhan meliputi: latar belakang penyusunan dokumen, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen (RPJPN/D sekitar, RTRWN/P/KK), sistematika penulisan, serta maksud dan tujuan penyusunan dokumen RPJPD Provinsi/Kabupaten/Kota.

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah, menjelaskan gambaran umum tentang kondisi wilayah sebagai salah satu pertimbangan dalam perumusan kebijakan RPJPD yang meliputi: aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah, evaluasi hasil RPJPD Tahun 2005-2025, proyeksi demografi dan kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik, dan pengembangan pusat pertumbuhan wilayah.

Bab III Permasalahan dan Isu Strategis, menjelaskan permasalahan yang dirumuskan dari Bab II, Laporan KLHS RPJPD 2025-2045, ataupun hasil penjarangan aspirasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, serta menjelaskan isu strategis sesuai konteks (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Bab IV Visi dan Misi Daerah, menjelaskan dan menjabarkan visi, sasaran visi dan misi daerah berdasarkan permasalahan dan isu strategis secara terukur dan spesifik yang akan dicapai selama pada akhir periode pembangunan daerah, serta memperhatikan arahan penyalarsan visi, sasaran visi dan misi pembangunan jangka panjang Nasional 2025-2045 serta arahan penyalarsan visi, sasaran visi dan misi pembangunan jangka panjang Provinsi Jawa Tengah 2025-2045.

Bab V Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok, menjelaskan Arah Kebijakan pembangunan jangka Panjang untuk menjelaskan keterhubungan Sasaran Pokok dengan pentahapan pembangunan dilakukan pada tiap lima tahun selama 4 periode, serta memperhatikan arahan penyalarsan arah pembangunan daerah, arah kebijakan transformasi, dan Indikator Utama Pembangunan (IUP) pembangunan jangka panjang Nasional 2025-2045 serta arahan penyalarsan arah pembangunan daerah, arah kebijakan transformasi, dan IUP pembangunan jangka panjang Provinsi Jawa Tengah 2025-2045. Sasaran Pokok merupakan kuantifikasi (penargetan IUP) visi dan misi pada akhir periode tahun ke-20.

Bab VI Penutup, menjelaskan ketentuan perencanaan menjelang akhir periode perencanaan RPJPD serta menjelaskan kaidah pelaksanaan RPJPD dalam RPJMD selama 4 Periode ke depan.

BAB II

Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Geografi

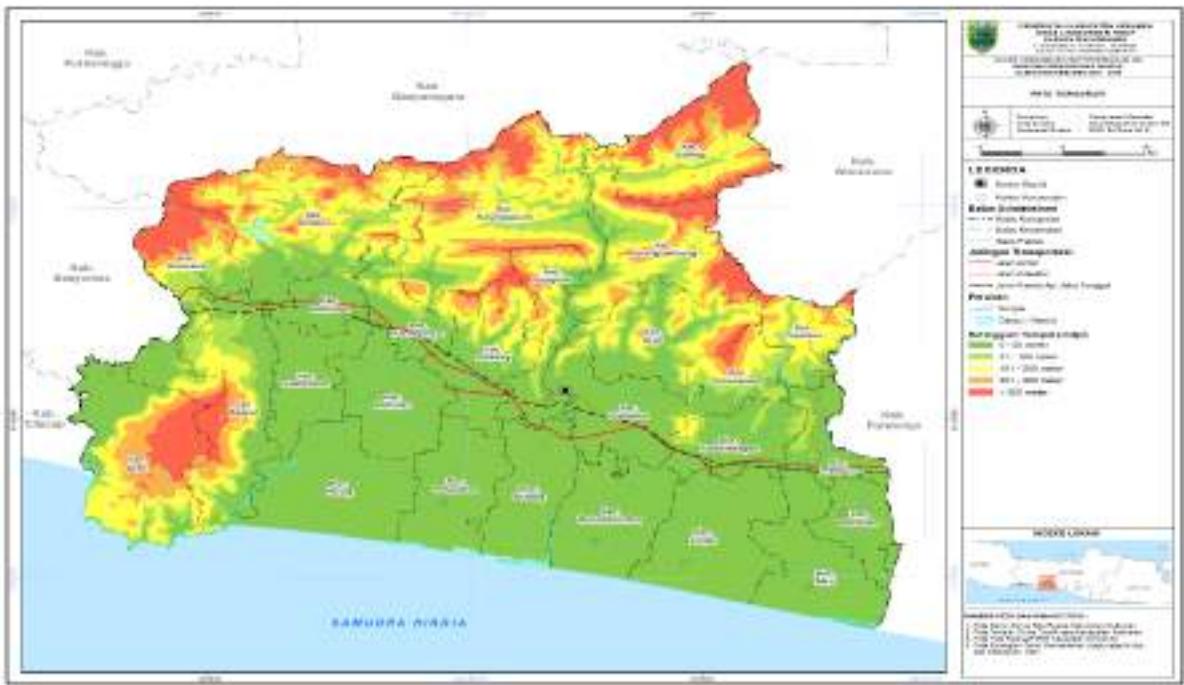
Kabupaten Kebumen merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang terletak di pesisir selatan Pulau Jawa, memiliki karakteristik yang unik dan menjadi kawasan penting sejalan dengan perkembangan kawasan di sekitarnya. Wilayah Kabupaten Kebumen terletak di posisi 109°33'- 09°50' Bujur Timur dan 7°27'-7°50' Lintang Selatan dengan luas wilayah mencapai 1.281,11 km², dan memiliki garis pantai sepanjang 57,5 km² mulai dari Kecamatan Mirit sampai dengan Kecamatan Ayah. Secara administratif, sebelah utara Kabupaten Kebumen berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara dan Wonosobo, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Cilacap dan Banyumas, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Purworejo, serta sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Pembagian wilayah Kabupaten Kebumen terdiri dari 26 kecamatan, 449 desa dan 11 kelurahan dengan jumlah Rukun Warga (RW) sebanyak 1.991 dan 7.208 Rukun Tetangga (RT). Sementara itu, jika dilihat dari sisi jarak antara Kabupaten Kebumen ke Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah memang relatif jauh (mencapai 162 km), namun demikian dengan perkembangan Yogyakarta *Internasional Airport* di Kulon Progo dan Pelabuhan Laut Tanjung Intan di Cilacap telah menjadikan Kabupaten Kebumen memiliki posisi yang sangat strategis untuk berbagai kegiatan investasi dan ekonomi yang lain. Hal ini sesuai dengan arah Wilayah Pengembangan Kebumen-Purworejo (WP Keburejo) yang diarahkan mewujudkan perkotaan Kebumen sebagai pusat kegiatan wilayah. Potensi aglomerasi Keburejo utamanya interaksi Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen dengan Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di selatan. Kawasan Prembun berpotensi menjadi pusat perdagangan agrobisnis tanaman pangan (padi) dan hortikultura dari kecamatan sekitar, mengingat hasil bumi daerah sekitar dapat terakumulasi di Prembun dan selanjutnya dapat didistribusikan ke kota tujuan. Hubungan perdagangan dengan kecamatan Kutoarjo dapat dilakukan dimana kedua daerah mempunyai kesamaan komoditi baik pertanian dan hortikultura. Dengan adanya jalur jalan nasional maka arus perdagangan barang dan orang dapat berjalan dengan baik. Selain itu, keberadaan stasiun Kutoarjo dan Prembun juga dapat mendorong keluar masuk barang dan pergerakan ekonomi ke berbagai wilayah. Dengan rencana dibangunnya jalur jalan tol Cilacap-Yogyakarta membuka peluang angkutan barang masuk dan keluar dari Prembun dan Kutoarjo melalui exit tol di Purworejo. Kerjasama antar daerah dapat dilakukan baik sektor kebutuhan dasar, pendidikan, sarana kesehatan, industri dan transportasi. Uraian tentang keunikan Kabupaten Kebumen di atas semakin mempertegas bahwa Kabupaten ini memiliki modal yang sangat besar untuk membangun di masa yang akan datang.



Sumber: Perda No 1 Tahun 2024, RTRW 2024-2044, 2024

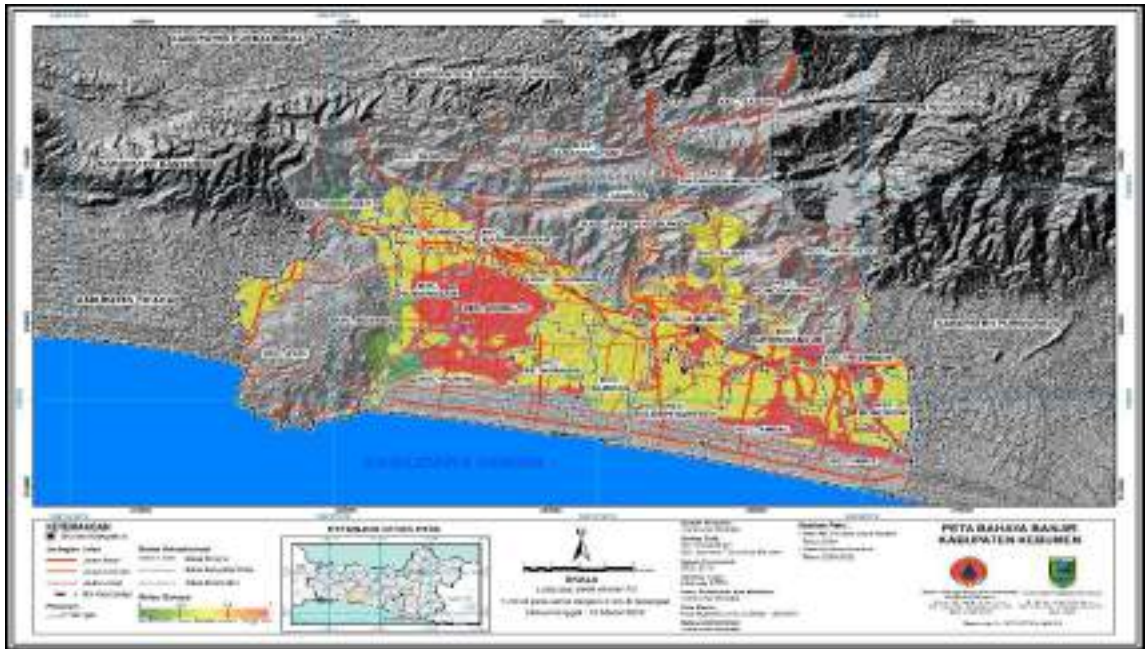
Gambar 2.1
Peta Administrasi Kabupaten Kebumen

Wilayah Kabupaten Kebumen 61 persen berada pada ketinggian 0-997,5 meter yang memiliki resiko bencana alam tinggi. Wilayah Kabupaten Kebumen 61 persen berada pada ketinggian 0-997,5 meter dengan karakteristik wilayah berupa pesisir, dataran rendah, dan kawasan perbukitan. Kemiringan tanah di Kabupaten Kebumen dikelompokkan dalam 4 (empat) tingkatan, yaitu: (1) Kemiringan 0-2 persen seluas 66.953,16 ha atau 52,26 persen; (2) Kemiringan 2-15 persen seluas 5.944,37 hektar (ha) atau 4,64 persen; (3) Kemiringan 15-40 persen seluas 21.919,37 ha atau 17,11 persen; dan (4) Kemiringan lebih dari 40 persen seluas 33.294,6 ha atau 25,99 persen. Berdasarkan peta topografi Kabupaten Kebumen, kemiringan lereng wilayah Kabupaten Kebumen dikelompokkan dalam 5 kelas yaitu agak curam, curam, datar, landai, dan sangat curam. Pada wilayah utara Kabupaten Kebumen berada pada topografi sangat curam, sementara di bagian Tengah dan Selatan relatif datar dan landai karena merupakan wilayah pesisir.



Sumber: Perda No 1 Tahun 2024, RTRW 2024-2044, 2024

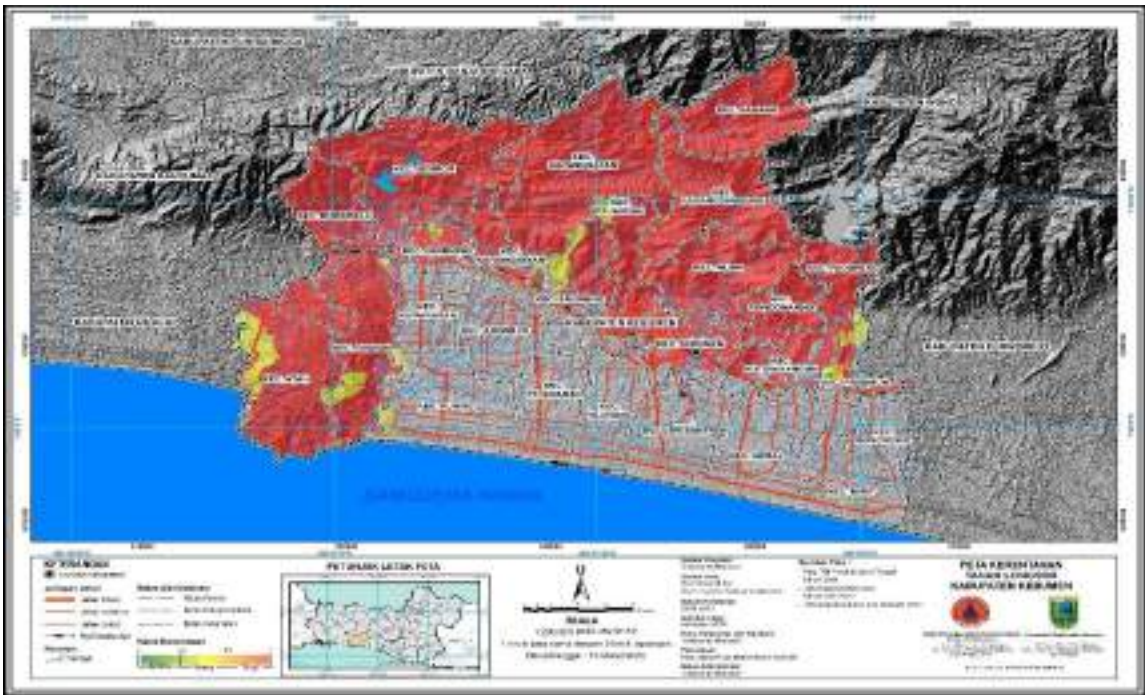
Gambar 2.2
Peta Topografi Kabupaten Kebumen (RTRW 2024-2044)
II-2



Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025

Gambar 2.4
Peta Bahaya Banjir Kabupaten Kebumen

Berdasarkan topografi wilayah, Kebumen bagian utara cenderung terjal dan sangat terjal sehingga bencana tanah longsor menjadi prioritas dalam kesiapsiagaan dan penanganan bencana. Berdasarkan potensi bencana wilayah Kabupaten Kebumen dibagi menjadi 3 kategori yaitu bahaya longsor dengan klasifikasi tinggi dengan luasan 38.589,87 ha atau 30,1 persen, bahaya longsor dengan klasifikasi sedang dengan luasan 24.663,87 ha atau 19,3 persen, dan bahaya longsor dengan klarifikasi rendah dengan luasan 64.857,75 ha atau 50,6 persen dari luas Kabupaten Kebumen. Ancaman bencana longsor banyak terjadi pada wilayah kecamatan yang memiliki topografi perbukitan dengan lereng yang terjal seperti di Kecamatan Alian, Sadang, Rowokele, Ayah, Buayan, Sempor, Padureso dan Karanggayam. Bencana tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Kebumen Tahun 2022 yaitu di Desa Argopeni, Kecamatan Ayah. Bencana ini menimpa permukiman penduduk dengan kerugian mencapai Rp240 Juta dan 2 (dua) orang meninggal dunia.



Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025

Gambar 2.5
Peta Bahaya Longsor Kabupaten Kebumen

Ancaman bencana lainnya yaitu gelombang ekstrem dan abrasi di wilayah pesisir. Wilayah di Kabupaten Kebumen dengan potensi bahaya tinggi bencana gelombang ekstrem dan abrasi mencapai 620,18 ha atau 0,48 persen, wilayah dengan bahaya sedang mencapai 280,74 ha atau 0,22 persen sedangkan wilayah dengan bahaya rendah luasannya mencapai 479,79 ha atau 0,37 persen dari total wilayah Kabupaten Kebumen. Berdasarkan data kejadian gelombang pasang dan abrasi, wilayah pesisir Kabupaten Kebumen yang terdampak bencana gelombang ekstrem dan abrasi antara lain Kecamatan Mirit, Ambal, Buluspesantren, Klirong, Petanahan, Puring, Buayan, dan Ayah. Warga terdampak paling banyak adalah nelayan dan pedagang yang ada di sekitar pantai.



Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025

Gambar 2.6
Peta Kerentanan Gelombang Ekstrem dan Abrasi Kabupaten Kebumen

Bahaya gelombang ekstrim dan abrasi berorientasi pada wilayah pesisir yang berhadapan langsung dengan laut. Kejadian gelombang tinggi antara 4-6 meter terjadi di Pantai Selatan Kebumen pada Agustus 2022, tepatnya di wilayah Pantai Suwuk dan Setrojenar. Kejadian ini mengakibatkan 100 bangunan semi permanen mengalami kerusakan. Namun, tidak mengakibatkan korban jiwa.

Kondisi topografi Kabupaten mengakibatkan riwayat nyata kebencanaan yang telah terjadi dan menimbulkan kerugian di wilayah Kabupaten Kebumen. Sejak tahun 2013, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menerbitkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI). Dalam indeks risiko, tingkat kebencanaan dinilai berdasarkan komponen penyusunnya, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas pemerintah dalam menghadapi bencana. Berdasarkan hasil kajian risiko bencana nasional Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022-2026 menunjukkan tingkat risiko multibahaya Kabupaten Kebumen pada kategori tinggi untuk kelas bahaya, kategori sedang untuk kelas kerentanan, kategori tinggi untuk untuk kelas kapasitas dan kategori sedang untuk kelas risiko. IRBI Kabupaten Kebumen tahun 2023 yaitu 110,78, angka ini meningkat (lebih buruk) dibandingkan tahun 2022 pada angka 102,5. Dari ketiga komponen pembentuk IRBI, untuk menurunkan risiko bencana dapat diupayakan dengan menurunkan komponen kerentanan dan peningkatan komponen kapasitas dalam penanggulangan bencana. Kapasitas daerah Kabupaten Kebumen dalam mengelola bahaya atau ancaman bencana dan kerentanan yang ditunjukkan dengan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) mencapai 0,90 (2023). Namun, kondisi

IKD stagnan selama 2022-2023 sehingga Kabupaten Kebumen perlu memaksimalkan peningkatan 71 indikator penilaian Indeks Kapasitas Daerah.

Tabel 2.1
Risiko Bencana Kabupaten Kebumen

No.	Uraian	Kelas Bahaya	Kelas Kerentanan	Kelas Kapasitas	Kelas Risiko
1	Tingkat Risiko Bencana Banjir	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
2	Tingkat Risiko Bencana Banjir Bandang	Tinggi	Sedang	Tinggi	Sedang
3	Tingkat Risiko Bencana Cuaca Ekstrim	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
4	Tingkat Risiko Bencana Gelombang Ekstrim dan Abras	Tinggi	Sedang	Tinggi	Sedang
5	Tingkat Risiko Bencana Gempabumi	Sedang	Sedang	Tinggi	Sedang
6	Tingkat Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan	Sedang	Rendah	Tinggi	Rendah
7	Tingkat Risiko Bencana Kekeringan	Sedang	Sedang	Tinggi	Sedang
8	Tingkat Risiko Bencana Tanah Longsor	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
9	Tingkat Risiko Bencana Tsunami	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
10	Tingkat Risiko Bencana Pandemi dan Wabah Penyakit	Rendah	Rendah	Sedang	Rendah
11	Tingkat Risiko Bencana Kegagalan Teknologi	Rendah	Rendah	Tinggi	Rendah
12	Tingkat Risiko Bencana Covid-19	Tinggi	Rendah	Tinggi	Rendah
13	Tingkat Risiko Bencana Likuefaksi	Tinggi	Sedang	Tinggi	Sedang
14	Tingkat Risiko Multibahaya	Tinggi	Sedang	Tinggi	Sedang

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025

Kabupaten Kebumen tersusun dari batuan Pra-Tersier, batuan tertua di Pulau Jawa berumur lebih dari 119 juta tahun. Kabupaten Kebumen secara geologi merupakan salah satu daerah di Pulau Jawa yang tersusun dari batuan Pra-Tersier dengan kondisi geologi yang sangat kompleks. Batuan Pra-Tersier merupakan batuan tertua di Pulau Jawa berumur lebih dari 119 juta tahun. Berdasarkan Peta Geologi Lembar Kebumen dapat diketahui bahwa batuan di daerah ini mulai dari yang tertua (Paleosen) hingga termuda (Pliosen). Kompleks Melange Luk Ulo yang tersusun dari bongkah-bongkah batuan Pra-Tersier dengan massa dasar serpih hitam (berumur Kapur Atas). Formasi Karangambung yang tersusun dari batu lempung bersisik dengan bongkah batu gamping, konglomerat, batu pasir, batu gamping dan basal (berumur Eosen), serta formasi ini terdapat pula batu gamping terumbu yang berupa olistolit. Formasi Totogan yang tersusun dari breksi dengan komponen batu lempung, batu pasir, batu gamping dan basal (berumur Oligo-Miosen). Formasi Waturanda yang tersusun dari batu pasir kasar, makin ke atas berubah menjadi breksi dengan komponen andesit, basal dan massa dasar batu pasir tuf, serta formasi ini terdapat anggota tuf yang tersusun dari perselingan tuf kaca, tuf kristal, batu pasir gampingan, dan napal tufaan (berumur Miosen Awal). Formasi Penosogan yang tersusun dari perselingan batu pasir gampingan, batu lempung, tuf, napal dan kalkarenit (berumur Miosen Tengah). Diabas ialah batuan beku intrusi hasil aktivitas vulkanik (Miosen Tengah). Formasi Halang yang tersusun dari perselingan batu pasir, batu gamping, napal dan tuf dengan sisipan breksi (berumur Pliosen). Formasi Peniron yang tersusun dari breksi dengan komponen andesit, batu lempung, batu gamping, serta massa dasar batu pasir tufan bersisipan tuf. Endapan Pantai yang berupa pasir lepas dan Alluvium yang berupa lempung, lanau,

pasir, kerikil dan kerakal. Adanya batuan pra-tercier yang juga merupakan batuan tertua di Pulau Jawa utamanya memberikan potensi ilmiah geologi dan pariwisata. Selain itu, dengan riset eksplorasi yang mendalam, batuan pra-tercier kemungkinan memiliki potensi sumber daya logam dan mineral, bahan bangunan (seperti marmer dan granit), sumber daya energi hingga geothermal. Tantangan dalam mengeksplorasi potensi batuan pra-tercier adalah diperlukan teknologi yang canggih dan investasi yang sangat besar, dimana eksplorasi juga memerlukan waktu yang cukup lama serta tidak selalu mendapatkan hasil yang diinginkan sehingga tidak memberikan keuntungan/profit ketika dieksploitasi. Selain aktivitas eksplorasi dan ekstraksi batuan Pra-Tersier dapat memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, termasuk deforestasi, erosi, pencemaran air, dan gangguan habitat. Keberadaan batuan tertua di Jawa menjadi warisan geologi bernilai internasional. Hal ini telah diakui oleh Persatuan Ahli Geologi Dunia (IUGS) dalam penilaiannya terhadap dossier/proposal Geopark Kebumen ke UNESCO Global Geopark.

Geopark Kebumen dengan luas kawasan 1.160,6872 KM² meliputi 22 kecamatan, 374 Desa dengan mempunyai morfologi yang bervariasi mulai dari perbukitan, lembah, pedataran sampai pantai. Terdapat 42 *geosite*, 7 *biosite* dan 19 *culturesite* yang berada dalam kawasan Geopark Kebumen yang perlu dikembangkan dengan prinsip konservasi, edukasi, dan pembangunan perekonomian masyarakat, termasuk mengembangkannya sebagai destinasi pariwisata yang berkelanjutan. Potensi pariwisata di Kabupaten Kebumen, khususnya dengan keberadaan Geopark Kebumen, hingga saat ini belum dimanfaatkan secara optimal sebagai tulang punggung perekonomian. Peningkatan ekonomi melalui upaya *value creation* area-area konservasi masih relatif minim dilakukan, meski potensi tersebut sangat besar. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten telah berupaya mendorong Kawasan Geopark Kebumen, selain ditetapkan sebagai Geopark Nasional pada saat ini sedang dilakukan assesment menjadi Unesco Global Geoapark (Geopark Internasional), juga dilakukan melalui dukungan RTRW Kabupaten Kebumen, dan juga kebijakan kepariwisataan di dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Provinsi (Ripparprov). Berdasarkan Perpres 9/2019, Pengembangan Taman Bumi (Geopark) adalah tata kelola Geopark guna mewujudkan pelestarian Warisan Geologi (*Geoheritage*), Keragaman Geologi (*Geodiversity*), Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*), dan Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*) yang dilakukan bersama-sama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemangku Kepentingan melalui tiga pilar pengembangan yakni konservasi, edukasi dan pembangunan ekonomi masyarakat. Mengusung visi "**Terwujudnya Kawasan Geopark Global Kebumen dengan Keragaman Geologi, Hayati, dan Budaya yang Berkelanjutan Demi Kesejahteraan Masyarakat**", memandu upaya menuju pengembangan geopark yang tidak hanya memiliki nilai geologi, tetapi juga mengutamakan keseimbangan ekosistem, pendidikan, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pengembangan geopark adalah untuk menstimulasi kegiatan ekonomi dalam tataran pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut akan memberikan dampak langsung kepada daerah dalam bentuk peningkatan mutu kehidupan manusia dan lingkungan di wilayah tersebut. Konsep Geopark mengupayakan suatu perubahan dalam pola pikir masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dari eksploitasi menjadi konservasi dengan diambil manfaatnya. Dengan terwujudnya Geopark Nasional di Kabupaten Kebumen, maka peluang untuk menciptakan sebuah gerbong penarik perekonomian wilayah menjadi sangat terbuka.

Wilayah Kabupaten Kebumen memiliki sumber air permukaan dan air tanah. Kondisi hidrologi wilayah Kabupaten Kebumen memiliki sumber air permukaan dan air tanah, serta terdapat tiga cekungan air tanah (Cekungan Air Tanah Banyumudal, Cekungan Air Tanah Kebumen Purworejo, dan

Cekungan Air Tanah Kroya). Selain itu, Wilayah Kabupaten Kebumen dilalui oleh sungai/kali yang membentuk Daerah Aliran Sungai/DAS (Sungai Ijo, Luk Ulo, Telomoyo, dan Wawar). Kondisi hidrologi dan geografi berupa Cekungan Air Tanah (CAT) dan Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Kebumen berpotensi terjadinya banjir di Kecamatan Adimulyo, Kecamatan Puring, Kecamatan Ayah, dan Kecamatan Bonorowo. Selain sungai, tanah dengan mata air melimpah berada di 16 kecamatan (Kecamatan Buayan, Pejagoan, Sruweng, Ayah, Rowokele, Kutowinangun, Prembun, Karanggayam, Karanganyar, Kebumen, Alian, Padureso, Karangsambung, Sadang, Sempor, dan Poncowarno). Potensi mata air terbesar berada di Kecamatan Buayan dengan jumlah 37 mata air. Potensi air baku terdapat di DAS Wawar, DAS Luk Ulo, DAS Telomoyo, DAS Ijo, dan Mata Air.

Kabupaten Kebumen memiliki beragam kawasan budidaya. Kawasan budidaya di Kabupaten Kebumen terdiri dari kawasan budidaya pertanian dan kawasan budidaya non-pertanian dengan peruntukan meliputi: (1) kawasan hutan produksi; (2) kawasan hutan rakyat; (3) kawasan pertanian; (4) kawasan perikanan; (5) kawasan pertambangan dan energi; (6) kawasan peruntukkan industri; (7) kawasan pariwisata; (8) kawasan permukiman; dan (9) kawasan pertahanan dan keamanan. Berdasarkan analisis citra satelit bagi dasar penyusunan Perda No 1 Tahun 2024, RTRW 2024-2044 di Kabupaten Kebumen pada tahun 2019, luasan budidaya seluas 120.695,42 ha dengan luas lahan produktif 59.723,48 ha (49,48 persen) dan tersebar di 26 kecamatan. Kecamatan Adimulyo, Puring, dan Bonorowo memiliki persentase luas wilayah produktif yang paling besar karena topografi wilayahnya terletak di daerah datar yang banyak memiliki sawah atau ladang. Meskipun demikian, Kecamatan Rowokele, Sadang, dan Padureso memiliki persentase luas wilayah produktif yang paling kecil karena topografi wilayahnya berupa pegunungan dengan sedikit sawah atau ladang, tetapi memiliki banyak hutan yang dapat dijadikan sebagai kawasan lindung. Kabupaten Kebumen memiliki beragam kawasan budidaya berupa wilayah yang dimanfaatkan secara terencana dan terarah sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi kehidupan manusia.

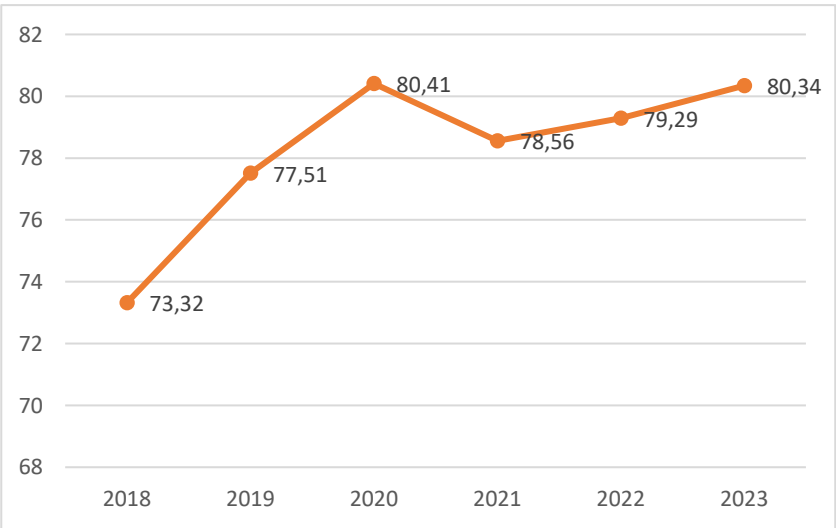
Kabupaten Kebumen memiliki desa yang terdapat kawasan hutan sebanyak 93 desa di 12 Kecamatan, yaitu 15 desa di Kecamatan Ayah, 11 desa di Kecamatan Buayan, 5 desa di Kecamatan Rowokele, 12 desa di Kecamatan Sempor, 3 desa di Kecamatan Karanganyar, 19 desa di Kecamatan Karanggayam, 10 desa di Kecamatan Karangsambung, 7 desa di Kecamatan sadang, 1 desa di Kecamatan Alian, 5 desa di Kecamatan Sruweng, 2 desa di Kecamatan Pejagoan, dan 3 desa di Kecamatan Padureso.

No.	Kecamatan	Desa		
1.	Ayah	1. Karangduwur	5.	Karanggegar
		2. Argopuri		
		3. Kalijoh		
		4. Ayah		
		5. Argosari		
		6. Candirenggo		
		7. Wangunweni		
		8. Tilogosari		
		9. Kalibangkang		
		10. Jatielar		
		11. Watukele		
		12. Satri		
		13. Jitung		
		14. Banjararjo		
		15. Pesi		
		16. Karangtengah		
2.	Buayan	17. Wonodadi	6.	Karanggijem
		18. Tugu		
		19. Banyumudal		
		20. Jiladi		
		21. Adisoma		
		22. Pangkajene		
		23. Pokusari		
		24. Rogodadi		
		25. Buayan		
		26. Sikayu		
		27. Wonoharjo		
		28. Griyanti		
		29. Wagipandan		
		30. Bedisari		
		31. Kalisari		
3.	Rowokele	32. Tunjungsoto	7.	Karangumbar
		33. Sempor		
		34. Kedungjati		
		35. Bonosari		
4.	Sempor	36. Sempang	8.	Seding
		37. Donorojo		
		38. Kerteng		
		39. Jatinegara		
			9.	Alur
			10.	Grawing
			11.	Prajagan
			12.	Padurejo

Sumber: SHP Peta Kawasan Hutan BPKHTL XI Yogyakarta, 2023

Gambar 2.7
Daftar Desa Terdapat Kawasan Hutan

Memaksimalkan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan budidaya pertanian menjadi penting dalam peningkatan ketahanan pangan di Kabupaten Kebumen. Ketahanan pangan di Kabupaten Kebumen secara umum baik aspek produksi, distribusi, dan konsumsi masuk dalam kategori mantap. Hal ini ditunjukkan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) dengan kecenderungan meningkat, semula 73,32 persen (2018) menjadi 80,34 persen (2023). Pengelolaan dan pemanfaatan kawasan budidaya pertanian memperhatikan rencana pola ruang wilayah sesuai RTRW menjadi penting dalam peningkatan pencapaian dimensi IKP pada aspek ketersediaan pangan, aspek keterjangkauan pangan, dan aspek pemanfaatan pangan. Kondisi IKP menunjukkan meningkatnya kualitas konsumsi pangan, pengendalian volatilitas harga pangan, dan sistem pemanfaatan areal pertanian.



Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen, IKP diterbitkan oleh Kementerian Pertanian mulai tahun 2018, diolah

Gambar 2.8
Grafik Indeks Ketahanan Pangan, 2018-2023

Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen. Perhitungan status daya dukung dan daya tampung air didasarkan selisih ketersediaan air permukaan dan kebutuhan terhadap air (Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan SK.146/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2023 tentang Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional). Perhitungan ketersediaan air diinventarisasi dari klasifikasi karakteristik bentang alam, karakteristik vegetasi alami, dan kelas penutupan lahan, sedang kebutuhan air diinventarisasi dari kebutuhan air per kapita, kebutuhan air untuk lahan melalui KHL (Kebutuhan Air untuk Hidup Layak) bagi kebutuhan air domestik dan kebutuhan air domestik untuk tiap grid (Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2009), serta Penggunaan air untuk kegiatan ekonomi berbasis lahan yang diperhitungkan meliputi kelas lahan persawahan, perkebunan, kebun campuran, dan tegalan.

Daya dukung air di Kabupaten Kebumen masih dalam kondisi surplus. Kondisi daya dukung air di Kabupaten Kebumen sebesar 256.063.179,02 m³/tahun masih lebih banyak jika dibandingkan dengan kebutuhannya. Tahun 2023 ketersediaan air dipenuhi dari waduk Wadaslintang dengan kapasitas sebesar 388,72 juta m³, waduk Sempor dengan kapasitas 38,04 juta m³ dan sungai Bogowonto untuk pengairan lahan seluas 4.200 ha. Kebijakan pemerataan air dari sumber air baku telah dilaksanakan melalui pembangunan embung dan perbaikan saluran irigasi tersier, serta pemeliharaan saluran dengan melibatkan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), Gabungan Petani Pemakai Air (GP3A) dan Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air (IP3A). Meskipun ada surplus kapasitas, namun jika ditinjau di masing-masing wilayah masih terdapat kecamatan yang defisit air seperti di Kecamatan Ambal, Buluspesantren, Kuwarasan, Puring, Mirit, dan Petanahan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa distribusi air di Kabupaten Kebumen masih belum merata ke semua wilayah.



Sumber: KLHS RPJPD Kab. Kebumen Tahun 2025-2045, 2023

Gambar 2.9
Peta Status Daya Dukung Air Kabupaten Kebumen

Tabel 2.2
Distribusi Potensi Daya Dukung Air Kabupaten Kebumen Tahun 2023

No	Kecamatan	Ketersediaan (m ³ /tahun)	Kebutuhan (m ³ /tahun)	Selisih (m ³ /tahun)	Status
1	Adimulyo	65.863.553,57	75.171.960,41	-9.308.406,84	Terlampau
2	Alian	81.157.431,23	66.157.826,04	14.999.605,19	Belum Terlampau
3	Ambal	79.402.995,96	91.852.837,84	- 12.449.841,88	Terlampau
4	Ayah	93.884.744,31	44.137.442,48	49.747.301,83	Belum Terlampau
5	Bonorowo	35.851.352,33	39.546.273,25	-3.694.920,91	Terlampau
6	Buayan	86.877.208,17	49.934.523,07	36.942.685,11	Belum Terlampau
7	Buluspesantren	65.620.146,73	76.556.401,52	- 10.936.254,79	Terlampau
8	Gombong	27.933.822,53	26.169.458,94	1.764.363,59	Belum Terlampau
9	Karanganyar	41.167.499,51	32.240.189,87	8.927.309,64	Belum Terlampau
10	Karanggayam	149.364.801,43	110.044.218,11	39.320.583,32	Belum Terlampau
11	Karangsambung	88.989.464,94	74.886.754,94	14.102.710,00	Belum Terlampau
12	Kebumen	60.410.919,79	55.869.112,70	4.541.807,09	Belum Terlampau
13	Klirong	55.417.481,50	56.938.800,36	-1.521.318,86	Terlampau
14	Kutowinangun	43.934.729,87	37.285.478,87	6.649.251,00	Belum Terlampau
15	Kuwarasan	45.239.803,43	49.310.904,60	-4.071.101,18	Terlampau
16	Mirit	59.908.490,70	64.380.173,51	-4.471.682,81	Terlampau
17	Padureso	34.246.005,01	21.631.994,35	12.614.010,66	Belum Terlampau
18	Pejagoan	41.580.745,71	30.062.832,75	11.517.912,96	Belum Terlampau
19	Petanahan	53.143.785,41	60.042.893,13	-6.899.107,72	Terlampau
20	Poncowarno	30.741.991,13	27.953.099,68	2.788.891,45	Belum Terlampau
21	Prembun	26.975.980,44	25.343.215,48	1.632.764,96	Belum Terlampau
22	Puring	71.735.494,75	86.374.355,64	- 14.638.860,88	Terlampau
23	Rowokele	62.212.938,37	42.369.302,49	19.843.635,89	Belum Terlampau
24	Sadang	82.022.198,66	43.039.561,13	38.982.637,53	Belum Terlampau
25	Sempor	131.184.862,00	83.431.236,57	47.753.625,43	Belum Terlampau
26	Sruweng	52.112.847,78	40.187.268,53	11.925.579,25	Belum Terlampau
	Total	1.666.981.295,29	1.410.918.116,27	256.063.179,02	Belum Terlampau

Keterangan: Perhitungan status daya dukung dan daya tampung air didasarkan selisih ketersediaan dan kebutuhan total dengan ketentuan:

- Apabila selisih <0 maka dikategorikan “terlampau” artinya kebutuhan terhadap air melebihi atau melampaui ketersediaan air permukaan yang ada; dan
- Apabila selisih >0 maka dikategorikan “belum terlampau” artinya kebutuhan terhadap air masih di bawah ketersediaan air permukaan

Sumber: KLHS RPJPD Kab. Kebumen Tahun 2025-2045, 2023

Daya dukung pangan di Kabupaten Kebumen masih dalam kondisi surplus. Daya dukung pangan dihitung berdasarkan rasio perbandingan kebutuhan beras terhadap produksi beras. Daya dukung pangan di Kabupaten

Kebumen masih surplus mencapai 140.751,40 ton/tahun. Jika dilihat di masing-masing wilayah kecamatan di Kabupaten Kebumen masih dalam kondisi surplus pangan, artinya ketersediaan pangan lebih besar jika dibandingkan kebutuhannya. Salah satu kebijakan yang sudah dilakukan adalah melalui penyediaan lumbung pangan petani.



Sumber: KLHS RPJPD Kab. Kebumen Tahun 2025-2045, 2023

Gambar 2.10
Peta Status Daya Dukung Pangan Kabupaten Kebumen

Tabel 2.3
Distribusi Potensi Daya Dukung Pangan Kabupaten Kebumen Tahun 2023

No	Kecamatan	Ketersediaan (m ³ /tahun)	Kebutuhan (m ³ /tahun)	Selisih (m ³ /tahun)	Status
1	Adimulyo	11.409,74	4.510,72	6.899,02	Belum Terlampaui
2	Alian	10.820,77	3.667,63	7.153,13	Belum Terlampaui
3	Ambal	13.665,24	5.577,49	8.087,75	Belum Terlampaui
4	Ayah	12.770,94	7.046,30	5.724,65	Belum Terlampaui
5	Bonorowo	6.135,37	2.561,78	3.573,60	Belum Terlampaui
6	Buayan	12.189,43	5.303,24	6.886,19	Belum Terlampaui
7	Buluspesantren	11.189,44	5.230,34	5.959,10	Belum Terlampaui
8	Gombong	4.555,79	2.569,14	1.986,65	Belum Terlampaui
9	Karanganyar	5.611,78	2.720,35	2.891,43	Belum Terlampaui
10	Karanggayam	19.368,31	4.435,53	14.932,77	Belum Terlampaui
11	Karangsambung	12.021,26	3.042,71	8.978,56	Belum Terlampaui
12	Kebumen	9.625,55	5.327,63	4.297,92	Belum Terlampaui

No	Kecamatan	Ketersediaan (m ³ /tahun)	Kebutuhan (m ³ /tahun)	Selisih (m ³ /tahun)	Status
13	Klirong	9.239,42	5.182,24	4.057,19	Belum Terlampaui
14	Kutowinangun	6.864,68	3.645,89	3.218,78	Belum Terlampaui
15	Kuwarasan	7.756,75	3.605,25	4.151,49	Belum Terlampaui
16	Mirit	10.082,95	4.799,81	5.283,14	Belum Terlampaui
17	Padureso	4.210,87	1.713,25	2.497,62	Belum Terlampaui
18	Pejagoan	5.550,07	3.270,10	2.279,97	Belum Terlampaui
19	Petanahan	9.075,38	4.582,01	4.493,38	Belum Terlampaui
20	Poncowarno	4.242,78	1.990,76	2.252,02	Belum Terlampaui
21	Prembun	4.307,33	2.128,46	2.178,87	Belum Terlampaui
22	Puring	12.280,01	5.925,42	6.354,58	Belum Terlampaui
23	Rowokele	8.153,24	4.725,66	3.427,58	Belum Terlampaui
24	Sadang	10.438,54	1.813,19	8.625,35	Belum Terlampaui
25	Sempor	15.675,93	4.454,35	11.221,58	Belum Terlampaui
26	Sruweng	7.322,43	3.983,36	3.339,08	Belum Terlampaui
	Total	244.564,00	103.812,60	140.751,40	Belum Terlampaui

Keterangan:
 Perhitungan status daya dukung pangan didasarkan selisih ketersediaan dan kebutuhan total dengan ketentuan:

- Apabila selisih <0 maka dikategorikan “terlampaui” artinya kebutuhan terhadap pangan melebihi atau melampaui ketersediaan pangan yang ada; dan
- Apabila selisih >0 maka dikategorikan “belum terlampaui” artinya kebutuhan terhadap pangan masih di bawah ketersediaan pangan.

Sumber: KLHS RPJPD Kab. Kebumen Tahun 2025-2045, 2023

Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Berbasis Jasa Lingkungan Hidup (JLH) Penyedia Pangan, menunjukkan Kabupaten Kebumen masih mempunyai lahan yang potensial terhadap penyediaan pangan. Pangan merupakan kebutuhan dasar bagi setiap makhluk hidup untuk dapat bertahan hidup selain air. Hal ini membuat ketersediaan pangan di suatu wilayah merupakan hal yang penting dan harus selalu terjamin ketersediaannya. Alam diciptakan terdiri dari berbagai ekosistem yang memberikan bermacam-macam manfaat bagi makhluk hidup. Salah satu manfaat ini adalah penyediaan bahan pangan, yakni segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati baik tumbuhan maupun hewan yang dapat diperuntukan bagi konsumsi manusia. Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Pangan (JLHP) merupakan hasil pangan dari hutan (tanaman dan hewan), hasil pertanian dan perkebunan serta hasil peternakan serta perikanan, dengan tujuan untuk peningkatan kualitas lingkungan untuk mendukung penyediaan pangan.

Jasa lingkungan hidup penyedia pangan di Kabupaten Kebumen didominasi oleh kelas rendah 39,36 Persen atau seluas 52.511,06 Ha, dan terdapat 27,33 Persen berada pada kelas sangat tinggi kondisi tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Kebumen masih mempunyai lahan yang potensial terhadap penyediaan pangan. Sementara itu juga terdapat 9,61 Persen yang berada pada kelas sangat rendah, kondisi tersebut menunjukkan bahwa sekitar

12.818,46 Ha yang tidak potensial terhadap penyediaan pangan. Jika disandingkan dengan penggunaan lahan maka kelas rendah berada pada wilayah yang sudah terbangun/permukiman, sementara untuk kelas tinggi berada pada penggunaan lahan sawah, dan perkebunan. Penggunaan lahan dan kondisi bentang alam merupakan faktor penentu kelas jasa lingkungan hidup.

Tabel 2.4
Tabel Kelas Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Pangan
Kabupaten Kebumen

Kelas JLH	Luas (Ha)	Persentase (%)
Sangat Rendah	12.818,46	9,61
Rendah	52.511,06	39,36
Sedang	15.722,38	11,78
Tinggi	15.902,38	11,92
Sangat Tinggi	36.459,46	27,33
Total	133.168,75	100,00

Sumber: KLHS RPJPD Kab. Kebumen Tahun 2025-2045, 2023



Sumber: KLHS RPJPD Kab. Kebumen Tahun 2025-2045, 2023

Gambar 2.11
Peta JLH Penyedia Pangan Kabupaten Kebumen

Kondisi daya dukung pangan di Kabupaten Kebumen diproyeksikan akan turun menjadi 1,56 di tahun 2045 dari 2,36 di tahun 2022. Kondisi ini dipengaruhi oleh penurunan luas lahan pertanian di Kabupaten Kebumen, meskipun kondisinya masih surplus tetapi perlu upaya untuk meningkatkan daya dukung pangan, mengingat pertanian merupakan sektor unggulan di Kabupaten Kebumen. Terdapat dua skenario daya dukung pangan yaitu dengan meningkatkan ketersediaan pangan melalui peningkatan produktivitas dan indeks penanaman. Berikut ditampilkan rincian perhitungan skenario daya dukung pangan.

Tabel 2.5
Tabel Perbandingan Kondisi Eksisting Tahun 2022 serta Proyeksi
Tahun 2030 dan 2045 Daya Dukung Pangan Kabupaten Kebumen

Rincian	2022	2030	2045
Business As Usual (Indeks Penanaman 1,5 dan Produktivitas 5,6 Ton/Ha)			
Ketersediaan (Ton/Tahun)	244.564,00	199.498,22	199.498,22
Kebutuhan (Ton/Tahun)	103.812,61	115.151,18	127.563,15
Selisih (Ton/Tahun)	140.751,40	84.347,04	71.935,07
Daya Dukung Pangan	2,36	1,73	1,56

Rincian	2022	2030	2045
Skenario 1 (Produktivitas 6 Ton/Ha)			
Ketersediaan (Ton/Tahun)	244.564,00	211972,22	211972,22
Kebutuhan (Ton/Tahun)	103.812,60	114.032,47	127.563,15
Selisih (Ton/Tahun)	140.751,40	97.939,75	84.409,07
Daya Dukung Pangan	2,36	1,86	1,66
Skenario 2 (Produktivitas 6 Ton/Ha +Indeks Penanaman 1,8)			
Ketersediaan (Ton/Tahun)	244.564,00	249.533,17	249.533,17
Kebutuhan (Ton/Tahun)	103.812,60	114.032,47	127.563,15
Selisih (Ton/Tahun)	140.751,40	135.500,70	121.970,02
Daya Dukung Pangan	2,36	2,19	1,96

Sumber: KLHS RPJPD Kab. Kebumen Tahun 2025-2045, 2023

Jasa Lingkungan Hidup (JLH) Penyedia Air, menunjukkan ketersediaan air di Kabupaten Kebumen sangat kecil. Daya dukung daya tampung lingkungan hidup berbasis jasa lingkungan penyedia air bersih berkaitan dengan segala sumber air permukaan, air tanah, ataupun air hujan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Penyediaan jasa air bersih bergantung pada beberapa faktor di antaranya curah hujan, lapisan tanah dan jenis batuan yang dapat menyimpan air, bentang lahan, tutupan lahan, serta tutupan vegetasi. Ekosistem mampu menyediakan air, baik yang berasal dari air permukaan maupun air tanah (termasuk kapasitas penyimpanannya). Jasa lingkungan sebagai penyedia air sangat dipengaruhi oleh kondisi curah hujan dan lapisan tanah atau lapisan batuan yang dapat menyimpan air (akuifer), serta faktor yang dapat mempengaruhi sistem penyimpanan air tanah seperti ekoregion (bentang alam). Wilayah yang memberikan Jasa lingkungan tinggi bagi penyediaan air adalah pada daerah tangkapan air yang memiliki daya resap tinggi untuk menampung air dan masih banyak terdapat lahan yang berpotensi tinggi dan sangat tinggi bagi penyediaan air.

Lingkungan penyedia air Kabupaten Kebumen didominasi oleh kelas sedang 60,23 Persen atau 80.356,17 Ha, dan kelas tinggi rendah sebesar 27,56 Persen atau seluas 36.771,89 Ha. Sementara itu jasa lingkungan penyedia air di Kabupaten Kebumen yang berada pada kelas tinggi dan sangat tinggi persentasenya sangat kecil. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan air di Kabupaten Kebumen sangat kecil, mengingat jumlah ketersediaan air permukaan/sungai yang ada di Kabupaten Kebumen jumlahnya relatif kecil. Berikut ditampilkan grafik persentase kelas jasa lingkungan hidup penyedia air Kabupaten Kebumen.



Sumber: KLHS RPJPD Kab. Kebumen Tahun 2025-2045, 2023

Gambar 2.12
Peta JLH Penyedia Air Kabupaten Kebumen

Tabel 2.6
Tabel Kelas Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Air Kabupaten Kebumen

Kelas JLH	Luas (Ha)	Persentase (%)
Sangat Rendah	14.796,11	11,09
Rendah	36,771,89	27,56
Sedang	80.356,17	60,23
Tinggi	655,45	0,49
Sangat Tinggi	834,12	0,36
Total	133.168,75	100,00

Sumber: KLHS RPJPD Kab. Kebumen Tahun 2025-2045, 2023

Meskipun kondisi daya dukung air pada tahun eksisting sampai dengan tahun rencana masih surplus, tetapi pemerintah Kabupaten Kebumen juga bisa melakukan peningkatan daya dukung air, yaitu dengan menekan kebutuhan air untuk kegiatan pertanian melalui kegiatan intermittent atau perairan berselang. Mengingat kebutuhan air untuk pertanian di Kabupaten Kebumen sangat tinggi maka diperlukan upaya untuk penghematan penggunaan air untuk pertanian. Penggunaan air untuk kegiatan pertanian di Kabupaten Kebumen mencapai 88% sementara untuk kegiatan domestik hanya 12%. Skenario penghematan air untuk pertanian di Kebumen dihitung menggunakan 80% kebutuhan air untuk pertanian sehingga daya dukung air di tahun 2045 bisa meningkat. Jika dihitung dengan business as usual atau tanpa upaya intervensi maka daya dukung air di tahun 2029 mencapai 1,48 dan di tahun 2045 menjadi 1,46. Sementara itu Ketika dilakukan penghematan air untuk pertanian maka daya dukung air tahun 2030 meningkat menjadi 1,72 dan di tahun 2045 menjadi 1,70. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya upaya intermitten pada kegiatan pertanian bisa menaikkan daya dukung air. Berikut ditampilkan rincian perhitungan daya dukung air di Kabupaten Kebumen.

Tabel 2.7
Tabel Perbandingan Kondisi Eksisting Tahun 2022 serta Proyeksi Tahun 2029 dan 2045 Daya Dukung Air Kabupaten Kebumen

Rincian	2022	2029	2045
Business As Usual			
Ketersediaan (m3/tahun)	1.666.981.295,29	1.727.803.929,43	1.727.803.929,43
Kebutuhan (m3/tahun)	1.410.918.116,27	1.171.304.408,75	1.185.527.144,82
Selisih (m3/tahun)	256.063.179,02	556.499.520,68	542.276.784,60
Daya Dukung Air	1,18	1,48	1,46
Skenario Intermitten			
Ketersediaan (m3/tahun)	1.666.981.295,29	1.727.803.929,43	1.727.803.929,43
Kebutuhan (m3/tahun)	1.410.918.116,27	1.004.452.745,97	1.014.651.545,97
Selisih (m3/tahun)	256.063.179,02	723.351.183,46	713.152.383,46
DDA	1,18	1,72	1,70

Sumber: KLHS RPJPD Kab. Kebumen Tahun 2025-2045, 2023

Jasa Lingkungan Hidup (JLH) Pengatur Air, menunjukkan pengatur tata air Kabupaten Kebumen didominasi pertanian lahan kering. Jasa lingkungan pengaturan tata air dan banjir berkaitan dengan kemampuan ekosistem dalam pengaturan tata air meliputi penyimpanan air, pengendalian banjir, serta pemeliharaan ketersediaan air. Jasa lingkungan pengaturan tata air dan banjir sangat dipengaruhi oleh kondisi fisiografi wilayah serta tutupan lahan. Semakin rapat tutupan lahan, maka potensi pengaturan tata aliran air dan banjir akan semakin baik karena keberadaan tumbuhan dapat menjadi penyimpan cadangan air dari proses hidrologi. Selain itu kondisi kelerengan juga menjadi penentu potensi tata aliran air dan banjir yang berkaitan dengan kemiringan lereng suatu wilayah. Kondisi kelerengan terutama berkaitan

dengan potensi ancaman banjir akibat aliran ataupun limpasan air permukaan. Kawasan bencana salah satunya bencana banjir dapat dipengaruhi oleh kondisi kemampuan lingkungan dalam memberikan Jasa lingkungan berupa pengaturan tata aliran air dan banjir. Kondisi tata aliran air yang baik kemungkinan akan dapat mengurangi potensi kerawanan bencana banjir pada suatu wilayah.

Kondisi jasa lingkungan pengatur tata air pada tahun 2022 didominasi oleh kelas sedang sebesar 55,68 persen atau setara dengan 74.283,22 Ha. Sementara itu untuk JLH kelas tinggi sebesar 2,81 persen atau 3.742,51 Ha. Pada kelas sangat tinggi sebesar 0,93 persen atau 1.238,22 Ha. Hal ini disebabkan oleh penggunaan lahan di Kabupaten Kebumen didominasi oleh pertanian lahan kering. Akan tetapi juga terdapat 40,56 persen dari total luas wilayah di Kabupaten Kebumen berada pada kelas rendah. Wilayah dengan kelas rendah dipengaruhi oleh tipe penggunaan lahan berupa permukiman/lahan terbangun dan sawah.

Tabel 2.8
Tabel Kelas JLH Pengatur Tata Air Kabupaten Kebumen

Kelas JLH	Luas (Ha)	Persentase (%)
Sangat Rendah	36,07	0,03
Rendah	54.112,99	40,56
Sedang	74.283,22	55,68
Tinggi	3.742,51	2,81
Sangat Tinggi	1.238,22	0,93
Total	133.168,75	100,00

Sumber: KLHS RPJPD Kab. Kebumen Tahun 2025-2045, 2023



Sumber: KLHS RPJPD Kab. Kebumen Tahun 2025-2045, 2023

Gambar 2.13
Peta JLH Pengatur Tata Air Kabupaten Kebumen

Risiko Bencana Kabupaten Kebumen termasuk daerah risiko bencana sedang. Hal ini tercermin dari Nilai indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Kebumen tercatat mengalami penurunan sejak tahun 2019 – 2022. Tercatat IRB Kabupaten Kebumen sebesar 131,45 (2019) mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi 110,78 (2023), menggolongkan Kabupaten Kebumen kedalam daerah dengan risiko bencana sedang. Kejadian bencana pada tahun 2022 di Kabupaten Kebumen berupa tanah longsor, angin, dan banjir yang tersebar di 15 kecamatan dan beberapa desa/kelurahan.

Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam, menunjukkan Kabupaten Kebumen mempunyai potensi Sumber Daya Mineral, Sumber Daya Air berupa Cekungan Air tanah (CAT) dan non CAT, serta Sumber Daya Hutan. Kondisi sumber daya alam untuk mendukung kegiatan pembangunan berhubungan dengan sumber daya mineral atau pertambangan. Kabupaten Kebumen memiliki potensi bahan tambang yang dapat mendukung kegiatan pembangunan. Meskipun demikian pemanfaatannya tidak serta merta dapat dilakukan kegiatan pertambangan karena pertimbangan lokasinya dan penggunaan lahan di atasnya. Bahan tambang yang berada pada kawasan hutan lindung di sebelah selatan tentunya dapat berpotensi menimbulkan dampak lingkungan dan bencana jika tidak bijak dalam pengelolaannya. Beberapa potensi sumber daya mineral di Kabupaten Kebumen yaitu andesit intrusi, andesit boulder, basalt, breksi, diabas, gabro, batugamping, kalsit, dolomit, zeolite, bentonite, kaolin, lempung, pasir dan karakal, pasir besi, tras, mangan, phosfat, amrmer, talk, serpentin, asbestos, emas.

Cekungan Air Tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis, seperti pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan Air Tanah berlangsung. Kabupaten Kebumen mempunyai potensi Cekungan Air Tanah (CAT) yaitu CAT Kroya, Banyumudal, dan CAT Kebumen-Purworejo. Jika dilihat berdasarkan persebarannya maka potensi CAT tersebut berada di bagian Tengah dan Selatan Kabupaten Kebumen. Semntara itu di bagian utara Kebumen merupakan wilayah non CAT. Sehingga di Kabupaten Kebumen terdapat dua waduk yang berada di wilayah utara yaitu waduk Sempor dan waduk Wadaslintang. Fungsi waduk tersebut yaitu untuk meningkatkan ketersediaan air baku di Kabupaten Kebumen terutama di wilayah utara.

Tabel 2.9
Cekungan Air Tanah Kabupaten Kebumen

Cekungan Air Tanah	Luas (Ha)	Cakupan (%)
CAT Kroya	2.404,64	3,44
CAT Banyumudal	6.961,48	9,97
CAT Kebumen-Purworejo	60.440,13	86,58
Total	69.806,25	100

Sumber: KLHS RPJPD Kab. Kebumen Tahun 2025-2045, 2023



Sumber: KLHS RPJPD Kab. Kebumen Tahun 2025-2045, 2023

Gambar 2.14
Peta Cekungan Air Tanah Kabupaten Kebumen

Kabupaten Kebumen masih mempunyai sumber daya hutan yang tersebar di beberapa wilayah. Kabupaten Kebumen memiliki sumber daya hutan lindung 3.819,81 Ha, hutan produksi tetap 664,88 Ha, hutan produksi terbatas 13.077,29 Ha dan area penggunaan lain mencapai 115.847,98 Ha. Lokasi hutan di Kabupaten Kebumen mayoritas berada di wilayah utara yaitu di Kecamatan Sadang, Kecamatan Karanggayam, Kecamatan Sempor, Kecamatan Karangsambung. Sementara itu di wilayah Selatan terdapat Kawasan hutan di Kecamatan Ayah. Berikut ditampilkan peta Kawasan hutan di Kabupaten Kebumen.



Sumber: KLHS RPJPD Kab. Kebumen Tahun 2025-2045, 2023

Gambar 2.15
Peta Kawasan Hutan Kabupaten Kebumen

Adaptasi Perubahan Iklim, menunjukkan sebagian besar wilayah kecamatan Kabupaten Kebumen termasuk kerentanan sedang, serta risiko banjir dan kekeringan sedang. Tingkat kerentanan terhadap iklim ditentukan oleh indikator yang mempengaruhi keterpaparan, sensitivitas, dan kapasitas adaptasi suatu sistem. Ketiga faktor tersebut berubah menurut waktu sejalan dengan kegiatan pembangunan dan upaya-upaya adaptasi. Tingkat keterpaparan dan tingkat sensitivitas dapat dicerminkan oleh kondisi biofisik dan lingkungan, serta sosial-ekonomi. Untuk mendukung pengurangan risiko dan dampak iklim tersebut, Dirjen Pengendalian Iklim melalui Direktorat Adaptasi iklim mengembangkan Sistem Informasi Indeks dan Data Kerentanan Iklim (SIDIK) yang menyajikan data informasi kerentanan iklim di seluruh Indonesia untuk mendukung kebijakan pembangunan oleh pemerintah pusat dan daerah dalam upaya perencanaan adaptasi serta pengurangan risiko dan dampak iklim. Saat ini SIDIK memanfaatkan data sosial ekonomi, demografi, geografi, dan lingkungan infrastruktur dari PODES. Sebagian besar wilayah di Kabupaten Kebumen pada tingkat kerentanan sedang (skor 3), hanya terdapat satu wilayah yaitu di Kecamatan Adimulyo dengan Tingkat kerentanan tinggi (skor 5). Begitu juga dengan risiko banjir dan kekeringan hanya di kecamatan Adimulyo yang mempunyai risiko tinggi (skor 5).

Tabel 2.10
Tabel Tingkat Kerentanan terhadap Perubahan Iklim
di Kabupaten Kebumen

Kecamatan	Kerentanan	Risiko Banjir	Risiko Kering
Ayah	3	3	3
Buayan	3	3	3
Puring	3	3	3
Petanahan	3	3	3
Klirong	3	3	3
Buluspesantren	3	3	3
Ambal	3	3	3
Mirit	3	3	3
Bonorowo	3	3	3
Prembun	3	3	3
Padureso	3	3	3
Kutowinangun	3	3	3
Alian	3	3	3
Poncowarno	3	3	3
Kebumen	3	3	3
Pejagoan	3	3	3
Sruweng	3	3	3
Adimulyo	5	5	5
Kuwarasan	3	3	3
Rowokele	3	3	3
Sempor	3	3	3
Gombong	3	3	3
Karanganyar	3	3	3
Karanggayam	3	3	3
Sadang	3	3	3
Karangsambung	3	3	3

Sumber: KLHS RPJPD Kab. Kebumen Tahun 2025-2045, 2023

Pemerintah Kabupaten Kebumen mendukung komitmen penurunan emisi Nasional. Isu perubahan iklim saat ini telah menjadi bagian dari Pembangunan Indonesia, terutama sejak pemerintah telah berkomitmen untuk menurunkan emisi 26% dengan upaya sendiri dan 41% dengan bantuan internasional. Upaya penurunan emisi nasional ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dan peran serta pemerintah daerah untuk bersama-sama memerangi ancaman perubahan iklim global. Dalam upaya mengurangi emisi GRK nasional, sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Presiden Nomor 61 tahun 2011 tentang Inventarisasi Gas Rumah Kaca nasional maka provinsi dan kabupaten/kota juga diwajibkan untuk melakukan inventarisasi gas rumah kaca. Sebagai salah satu kabupaten yang peduli dengan isu perubahan iklim, Kabupaten Kebumen telah menyusun dokumen profil emisi GRK tahun 2023 sebagai dokumen inventarisasi GRK yang pertama, yang meliputi empat sektor yaitu sektor energi, sektor IPPU (*Industrial Processes and Product Use*), sektor AFOLU/pertanian dan sektor limbah sebagai penghasil/penyerap emisi, serta NANDUR WIT nggo ANAK PUTU (Program 1 Anak 2 Pohon dan 1 Nikah 2 Pohon diharapkan dengan program ini O2 yang dihasil dapat mengurangi emisi GRK), SAE BANGET (Program Desa Mandiri Energi dengan Pengembangan Energi Alternatif, melalui penggantian lampu LPJU menjadi Solar cell), SADE MAS (Program “Sampah Komoditas Ekonomi Masyarakat dalam meningkatkan kinerja persampahan dengan optimalisasi system manajemen pengelolaan persampahan), GERTAK LIMPAH (GERakan SerenTAK PeduLI Mandiri dalam pengelolaan sampah mandiri), BAPER (Program Bantuan Alat Mesin Pertanian berupa traktor, pompa air, pembuat pupuk organik, mesin perahu tempel) dan pembuatan pupuk organik menggantikan pupuk anorganik penyumbang emisi GRK.

Selain itu, metode perhitungan emisi telah disesuaikan dengan pedoman inventarisasi gas rumah kaca yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) tahun 2017. Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia. Hal ini

dapat diamati dengan adanya perubahan pola, intensitas atau pergeseran parameter utama iklim seperti curah hujan, suhu, kelembaban, angin, tutupan awan dan penguapan. Perubahan iklim berdampak pada ekosistem dan manusia di seluruh bagian benua dan samudra di dunia. Perubahan iklim dapat menimbulkan resiko besar bagi kesehatan manusia, keamanan pangan, dan pembangunan ekonomi. Mitigasi perubahan iklim adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca sebagai bentuk upaya penanggulangan dampak perubahan iklim. Pada tahun 2023 Kabupaten Kebumen berhasil menurunkan emisi GRK sebesar 146.155,91 tonCO₂eq.

Potensi Keanekaragaman Hayati, menunjukkan Kabupaten Kebumen mempunyai potensi keanekaragaman hayati terutama pada Kawasan bentang alam karst Gombang. Hutan karst Gombang merupakan salah satu deretan hutan karst yang ada di Indonesia. Hutan yang terletak lebih kurang 44 km di sebelah barat daya Kota Kebumen dan sekitar 23 km sebelah selatan kota Gombang tepatnya pada posisi 109–110° bujur timur dan 7–8° lintang selatan. Hutan ini memiliki keunikan pada bentang alam serta kekayaan jenis tumbuhannya. Jumlah keanekaragaman hayati jenis flora di Kabupaten Kebumen sebanyak 382 spesies flora yang terbagi ke dalam 102 famili dan 204 spesies fauna yang tercakup dalam 103 famili. Jenis fauna ini terbagi ke dalam 178 spesies fauna terestrial dengan jumlah famili sebanyak 84 dan 26 spesies fauna akuatik dengan jumlah famili sebanyak 19. Keberadaan jenis flora dan fauna tersebut pada umumnya mudah dijumpai di desa-desa di wilayah studi, kecuali untuk beberapa spesies. Berikut rincian keanekaragaman hayati (keadaan flora dan fauna) yang ada di Kabupaten Kebumen.

Tabel 2.11
Tabel Keadaan Flora dan Fauna Kabupaten Kebumen

Golongan	Nama Spesies		Status			
	Nama Latin	Nama Lokal	Endemik	Terancam	Dilindungi	Tidak Dilindungi
Mamalia	<i>Muntiacus muntjac</i>	Kijang muncak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
	<i>Panthera pardus melas</i>	Macan tutul	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
	<i>Prionailurus bengalensis</i>	Kucing kuwuk	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
	<i>Manis javanica</i>	Trenggiling	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
	<i>Hystrix javanisa</i>	Landak jawa	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
	<i>Nycticebus javanicus</i>	Kukang jawa	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
Aves	<i>Gallus gallus</i>	Ayam Hutan	Tidak	Ya	Tidak	Tidak
	<i>Ictinateus malayensis</i>	Elang Hutan	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
	<i>Haliaeetus leucogaster</i>	Elang laut perut-putih	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
	<i>Nisaetus bartelsi</i>	Elang jawa	Tidak	Tidka	Ya	Tidak
	<i>Spilornis cheela</i>	Elang ular bido	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
	<i>Accipiter trivirgatus</i>	Elang alap jambul	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
	<i>Himantopus himantopus</i>	Gagang bayam belang	Tidak	Tidka	Ya	Tidak
	<i>Falco moluccensis</i>	Alap-alap sapi	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
	<i>Lonchura oryzivora</i>	Gelatik jawa	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
	<i>Zosterops flavus</i>	Kacamata jawa	Tidak	Tidka	Ya	Tidak
	<i>Otus angelinae</i>	Celepuk jawa	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
Malacostraca	<i>Sylla serrate</i>	Kepiting	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
	<i>Portunus pelagicus</i>	Rajungan	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
	<i>Panulirus homarus</i>	Lobster hijau	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
	<i>Panulirus polyphafus</i>	Lobster bambu	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
	<i>Panulirus pencillatus</i>	Lobster batu	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
	<i>Panulirus longipes</i>	Lobster merah	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
	<i>Panulirus ornatus</i>	Lobster mutiara	Tidak	Tidak	Ya	Tidak

Golongan	Nama Spesies		Status			
	Nama Latin	Nama Lokal	Endemik	Terancam	Dilindungi	Tidak Dilindungi
Pisces	<i>Anguilla spp.</i>	Sidat	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
Reptil	<i>Crocodylus porosus</i>	Buaya muara	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
	<i>Chelonia mydas</i>	Penyu hijau	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
	<i>Lepidochelys olivacea</i>	Penyu lekang	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
	<i>Dermochelys coriacea</i>	Penyu belimbing	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
	<i>Troides helena</i>	Kupu-kupu raja Helena	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
Flora yang Dilindungi	<i>Aerides odorate</i>	Anggrek asam	Tidak	Ya	Ya	Tidak
	<i>Dalbergia latifolia</i>	Sonokeling	Tidak	Ya	Ya	Tidak
	<i>Nypa fruticans</i>	Nipah	Tidak	Ya	Ya	Tidak
	<i>Pteroppermum javanicum</i>	Bayur	Tidak	Ya	Ya	Tidak
	<i>Alstonia scholaris</i>	Pulai	Tidak	Ya	Ya	Tidak
	<i>Antidesma bunius</i>	Buni	Tidak	Ya	Ya	Tidak
	<i>Archidendron pauciflorum</i>	Jengkol	Tidak	Ya	Ya	Tidak
	<i>Artocarpus elasticus</i>	Terap	Tidak	Ya	Ya	Tidak
	<i>Baccaurea dulcis</i>	Gowok	Tidak	Ya	Ya	Tidak
	<i>Baccaurea racemose</i>	Kepundung	Tidak	Ya	Ya	Tidak
	<i>Chrysophyllum cainito</i>	Sawo kenitu	Tidak	Ya	Ya	Tidak
	<i>Cinnamomum iners</i>	Kiteja	Tidak	Ya	Ya	Tidak
	<i>Crescentia cujete</i>	Buah maja	Tidak	Ya	Ya	Tidak
	<i>Ctnometra cauliflora</i>	Nam-nam	Tidak	Ya	Ya	Tidak
	<i>Ficus variegata</i>	Gondang putih	Tidak	Ya	Ya	Tidak
	<i>Flocuurtia rukam</i>	Rukem	Tidak	Ya	Ya	Tidak
	<i>Garcinia renghas</i>	Mundu	Tidak	Ya	Ya	Tidak
	<i>Inocarpus fagifer</i>	Rengas	Tidak	Ya	Ya	Tidak
	<i>Nauclea orientalis</i>	Gayam	Tidak	Ya	Ya	Tidak
	<i>Pangium edule</i>	Klepu	Tidak	Ya	Ya	Tidak
	<i>Sandoricum koetjape</i>	Kluwek	Tidak	Ya	Ya	Tidak
	<i>Pavona spp.</i>	Kecapi	Tidak	Ya	Ya	Tidak
	<i>Favia spp.</i>	Terumbu Karang	Tidak	Ya	Ya	Tidak
	<i>Favites spp.</i>	Terumbu Karang	Tidak	Ya	Ya	Tidak
	<i>Goniastrea spp.</i>	Terumbu Karang	Tidak	Ya	Ya	Tidak

Sumber: KLHS RPJPD Kab. Kebumen Tahun 2025-2045, 2023

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Kebumen termasuk dalam kategori sedang.

IKLH merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini tercermin Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Kebumen kecenderungan meningkat semula 71,61 (2018) menjadi 74,37 (2023). IKLH Tahun 2023 termasuk predikat kategori baik (dalam batas70<IKLH≤80), Pencapaian IKLH Kabupaten Kebumen pada tahun 2023 tidak terlepas dari pencapaian Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan/Indeks Kualitas Lahan (IKTL/IKL) dimana IKA cenderung menurun tetapi naik setelah dikonversi dengan metode IKA INA semula 56,67 (2018) menjadi 71,40 (2023). IKU cenderung flutuatif semula 87,83 (2018) menjadi 86,08 (2023) dan seperti IKU IKTL juga cenderung flutuatif semula 70,66 (2018) menjadi 57,81 (2022). Perubahan perhitungan IKLH dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sejak Tahun 2023. Metode perhitungan IKA yang baru

dihitung dengan menggunakan rumus baru yang disebut IKA-INA. Metode IKA INA mengacu pada NSF-WQI (National Sanitation Foundation Water Quality Index). Sementara itu, parameter untuk perhitungan IKU mengalami perubahan dengan adanya penambahan parameter baru yaitu Particulate Matter 2.5 mikron (PM 2.5). Sedangkan rumus perhitungan IKL mengalami perubahan yaitu semua kelas tutupan lahan (23 kelas tutupan lahan) diperhitungkan dalam menentukan besarnya nilai IKL.

Tabel 2.12
Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
Kabupaten Kebumen 2018-2023

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023 (perhitungan baru)
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	71,61	73,80	73,92	64,43	68,17	67,16	74,37
Indeks Kualitas Air (IKA)	56,67	63,33	57,69	52,37	54,49	51,82	71,40
Indeks Kualitas Udara (IKU)	87,83	88,44	90,72	91,22	90,94	90,41	86,08
Indeks Kualitas Tutupan Lahan / Indeks Kualitas Lahan (IKTL/IKL)	70,66	70,66	70,66	37,86	49,53	50,63	57,81

Keterangan:
Penyelenggaraan perhitungan IKLH sejak tahun 2023 mengalami beberapa perubahan, yaitu:

- a. Metode perhitungan IKA dihitung dengan menggunakan rumus baru yang disebut IKA-INA. Metode IKA INA mengacu pada NSF-WQI (National Sanitation Foundation Water Quality Index).*
- b. Parameter untuk perhitungan IKU mengalami perubahan dengan adanya penambahan parameter baru yaitu Particulate Matter 2.5 mikron (PM 2.5).*
- c. Rumus perhitungan IKL/IKTL mengalami perubahan yaitu, semua kelas tutupan lahan (23 kelas tutupan lahan) diperhitungkan dalam menentukan besarnya nilai IKL.*

Sumber: OPD Urusan Lingkungan Hidup, diolah

Pengelolaan Sampah. Capaian pengelolaan sampah Kabupaten Kebumen meningkat. Dilihat dari seberapa banyak sampah yang tangani oleh pemerintah daerah dan pengurangan sampah dibagi dengan timbulan sampah dalam satu tahun, semula 51,51 persen (2019) menjadi 52,45 persen (2023). Nilai capaian ini masih belum optimal dibandingkan dengan target yang ditetapkan dimana sampah harus terangkut 100 persen. Pemerintah Kabupaten Kebumen terus meningkatkan upaya pengurangan limbah, pemulihan sumber daya, atau pengurangan dampak lingkungan. Program yang dilakukan antara lain peningkatan unit penampungan sampah seperti TPS (Tempat Penampungan Sementara), TD (Transfer Depo), TPST (Tempat Pemrosesan Sampah Terpadu), TPS3R (Tempat Pengolahan Sampah 3R – Reduce Reuse Recycle), TPA (Tempat Pemrosesan Akhir), dan Bank Sampah.

Tabel 2.13
Capaian Pengelolaan Sampah Kabupaten Kebumen 2019-2023

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	39,55	37,38	37,16	21,34	52,45
Timbulan Sampah (ton/tahun)	148.386,62	148.846,66	167.590,85	169.013,40	176.363,85
Pendauran Ulang Sampah (ton/tahun)	23.349,36	19.758,18	26.214,03	32.789,78	75.952,82
Pengolahan Sampah (ton/tahun)	35.335,65	35.879,50	36.065,65	3.328,00	16.543,63
Pemosresan Akhir Sampah (ton/tahun)	49.567,00	35.040,00	54.020,00	98.984,35	36.857,70

Sumber: OPD Urusan Lingkungan Hidup, diolah

Pemantapan Infrastruktur Daerah memperhatikan Rencana struktur ruang, pola ruang, dan kawasan strategis dalam Perda No 1 Tahun 2024, RTRW 2024-2044 Kabupaten Kebumen.

Kebijakan pemantapan infrastruktur daerah harus memedomani kebijakan pengembangan struktur wilayah dalam rangka mendukung pengembangan sistem pusat permukiman dan jaringan prasarana wilayah. Selain itu, juga harus memperhatikan kebijakan pengembangan pola ruang wilayah yang terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budidaya sebagai upaya mewujudkan tertib tata ruang. Pemantapan infrastruktur di prioritaskan pada kawasan strategis yang memiliki pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. Kemantapan infrastruktur dilihat dari Indeks Infrastruktur Daerah yang dibentuk dari 3 indikator infrastruktur, yaitu Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum, Indeks Infrastruktur Perumahan dan Indeks Infrastruktur Perhubungan. Indeks Infrastruktur Daerah tahun 2022 sebesar 55,57 persen meningkat pada tahun 2023 menjadi 64 persen. Pencapaian indikator pembentuk Indeks Infrastruktur Daerah selama 2 tahun terakhir (2022-2023) mengalami peningkatan, yaitu Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum dari 57,89 persen (2022) menjadi 57,95 persen (2023); Indeks Infrastruktur Perumahan dari 35,26 persen (2022) menjadi 58,70 persen (2023); dan Indeks Infrastruktur Perhubungan dari 73,55 persen (2022) menjadi 75,3 persen (2023). Kebijakan pemantapan infrastruktur sebagai kegiatan pemanfaatan penataan ruang juga harus dikendalikan agar jangan sampai meningkatkan risiko bencana banjir, banjir bandang, gempa bumi, tsunami dan tanah longsor. Untuk itu kebijakan pemantapan infrastruktur harus memperhatikan ketentuan khusus kawasan rawan bencana yang telah tercantum pada RTRW 2024-2044 Kabupaten Kebumen.

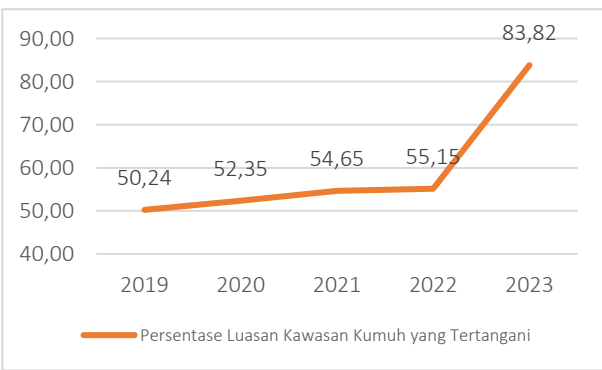
Pemenuhan jaringan irigasi dalam mendukung produktivitas kawasan budidaya pertanian di Kabupaten Kebumen. Kabupaten Kebumen memiliki kawasan budidaya pertanian. Luasan kawasan budidaya mencapai angka 120.695,42 ha dengan luas lahan produktif sebesar 59.723,48 ha (49,48 persen) dan tersebar di 26 kecamatan (berdasarkan analisis citra satelit bagi dasar penyusunan Perda No 1 Tahun 2024, RTRW 2024-2044 di Kabupaten Kebumen, 2023). Peningkatan produktivitas kawasan budidaya pertanian perlu didukung oleh penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi berupa jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier dimana luasan irigasi kewenangan Kabupaten Kebumen 10.539 ha dan Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi dalam kondisi baik tahun 2023 sebesar 78,71 persen, sehingga capaian indeks kinerja sistem irigasi kewenangan Kabupaten Kebumen pada tahun 2023 sebesar 57,42.

Peningkatan Kondisi jalan mantap untuk pemenuhan sistem jaringan jalan sesuai Perda No 1 Tahun 2024, RTRW 2024-2044 dalam rangka peningkatan konektivitas intra dan antar wilayah Kabupaten Kebumen. Jaringan jalan yang berkualitas meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas ekonomi dan sosial masyarakat secara merata. Proporsi jalan kondisi mantap di Kabupaten Kebumen meningkat semula 51,74 persen (2015) menjadi 73,96 persen (2023).

Keselamatan dan keamanan lalu lintas perlu ditingkatkan. Angka kecelakaan di Kabupaten Kebumen cenderung meningkat sebesar 39,77 persen (2022), semula jumlah kecelakaan sebanyak 356 kejadian (2018) naik menjadi 895 kejadian (2022). Korban meninggal akibat kecelakaan per tahun rata-rata kurang lebih 130 korban dimana pada tahun 2022 mencapai angka 148 korban. Pemerintah Kabupaten Kebumen berkomitmen meningkatkan keselamatan dan keamanan lalu lintas dengan pemasangan rambu-rambu sebanyak 2.636 unit, APILL 64 unit dan LPJU yang terpasang 5.037 unit

(2022). Berdasarkan data pada Tahun 2023 menunjukkan persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan kabupaten sebesar 75,3 persen.

Pembangunan wilayah Kabupaten Kebumen masih menghadapi masalah permukiman kumuh dan penyediaan akses hunian layak, serta pemenuhan akses terhadap sanitasi dan air minum yang aman. Seiring dengan perkembangan jumlah penduduk tahun 2022 mencapai 1.376.825 orang (2022) dengan laju pertumbuhan penduduk mencapai 1,11 persen (2020-2022) dan kepadatan penduduk di Kabupaten Kebumen mencapai 1.075 jiwa/km². Kondisi luasan kawasan kumuh yang tertangani meningkat tercermin dari Persentase luasan kawasan kumuh yang tertangani dari 50,24 persen (2019) menjadi 83,82 persen (2023). Luasan kawasan kumuh yang belum tertangani tahun 2023 masih seluas 288,12 ha dari semula 343,72 Ha (SK Bupati Kebumen No. 663/385 Tahun 2020). Walaupun demikian, rumah tangga yang memiliki akses hunian layak pada tahun 2023 telah mencapai 93,4 persen.



Sumber: OPD Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, diolah

Gambar 2.16
Grafik Persentase Luasan Kawasan Kumuh yang Tertangani, 2019-2023



Sumber: OPD Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, diolah

Gambar 2.17
Grafik Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, 2018-2023

Masyarakat Kabupaten Kebumen belum seluruhnya mendapatkan akses sanitasi aman dan air minum perpipaan hingga tahun 2023. Berdasarkan data menunjukkan rumah tangga yang telah mengakses sanitasi aman dan air minum aman lambat, dimana akses sanitasi aman pada tahun 2023 masih sebesar 2,02 persen dan akses air minum aman sebesar 26,74 persen.

Tabel 2.14
Capaian Akses Sanitasi Aman dan Akses Air Minum Aman Kabupaten Kebumen 2019-2023

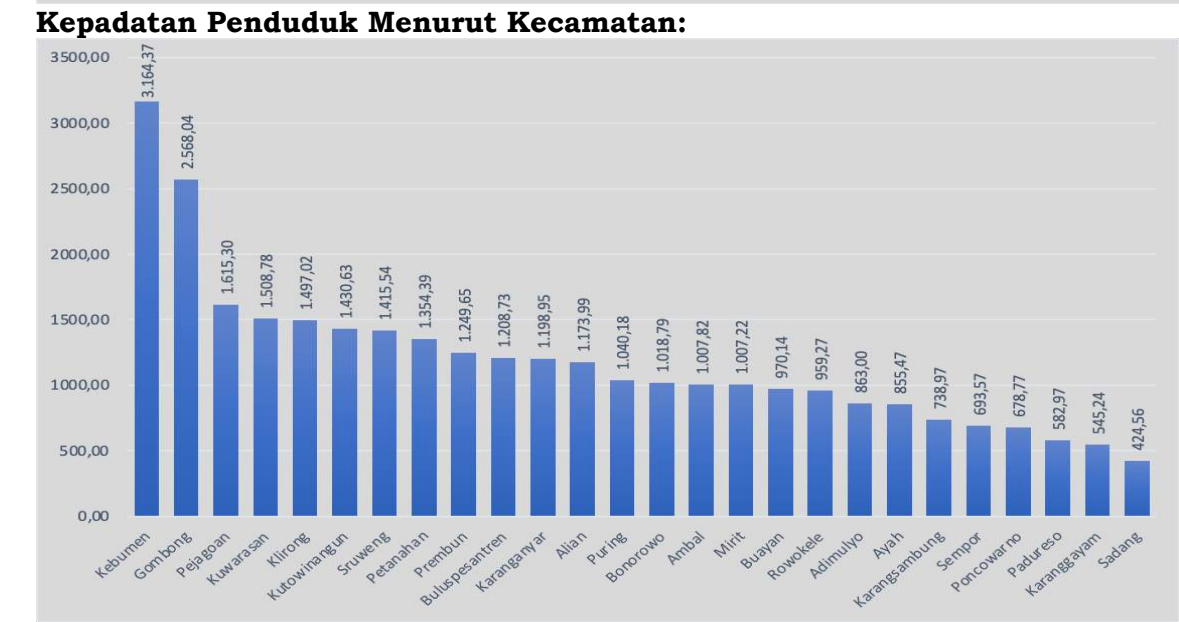
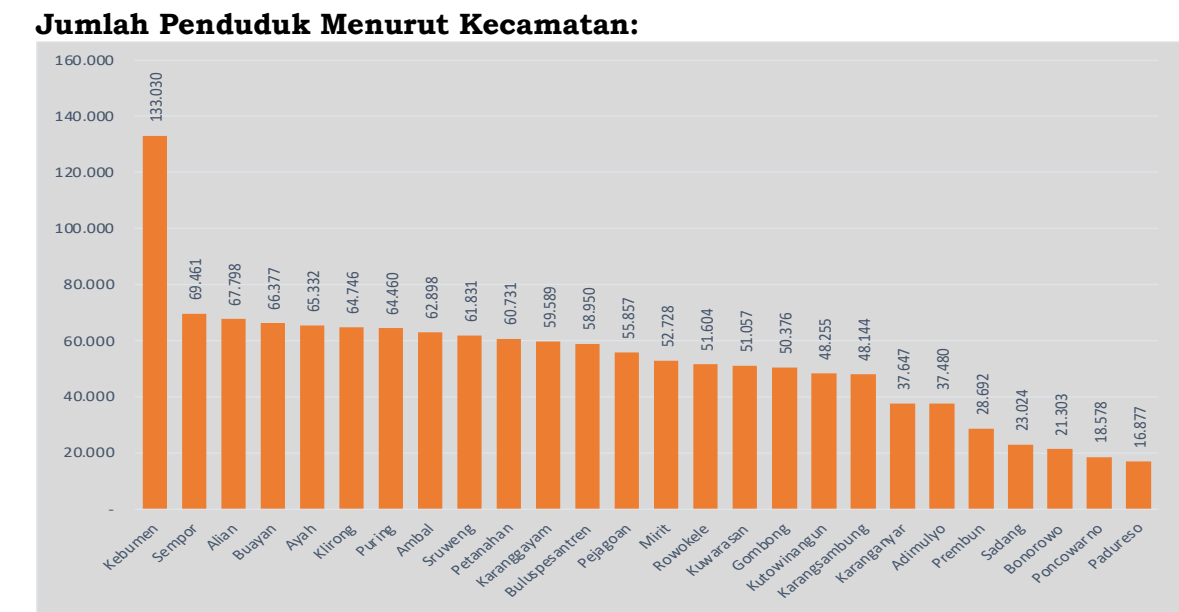
Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Akses Sanitasi Aman (%)	3,02	2,80	2,94	2,43	2,02
Akses Air Minum Aman (%)	15,94	17,54	19,05	19,64	26,74

Sumber: OPD Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, diolah

2.1.2. Demografi

Data kependudukan sebagai dasar pembangunan daerah Kabupaten Kebumen. Jumlah penduduk Kabupaten Kebumen mengalami peningkatan semula sebanyak 1.167.092 orang (2011) menjadi 1.376.825 orang (2022) dengan komposisi penduduk perempuan sebanyak 679.386 orang (49,34 persen) dan penduduk laki- laki sebanyak 697.439 orang (50,66 persen). Rasio jenis kelamin meningkat semula 99,22 persen (2011) menjadi 102,66 persen (2022). Kondisi ini menunjukkan bahwa terdapat 103 penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan.

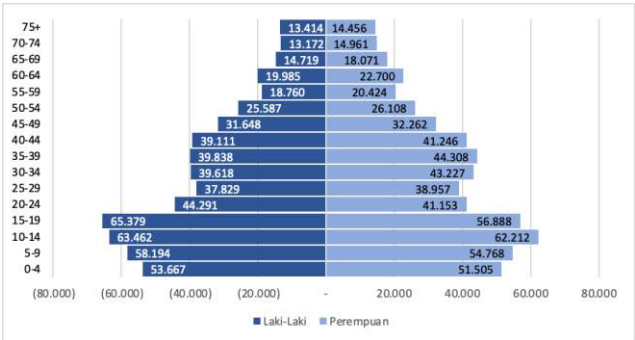
Jumlah penduduk Kabupaten Kebumen terkonsentrasi pada wilayah perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Kebumen meningkat mencapai 1,63 persen (2011-2022). Kepadatan penduduk di Kabupaten Kebumen mencapai 1.075 jiwa/km² (2022) dengan kepadatan tertinggi berada di Kecamatan Kebumen sebesar 3.164 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Sadang sebesar 424 jiwa/km². Wilayah perkotaan di Kabupaten Kebumen memiliki kecenderungan lebih padat dibandingkan wilayah perdesaan. Hal tersebut menunjukkan sebaran penduduk di Kabupaten Kebumen terkonsentrasi di wilayah perkotaan untuk memperoleh kesempatan ekonomi.



Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

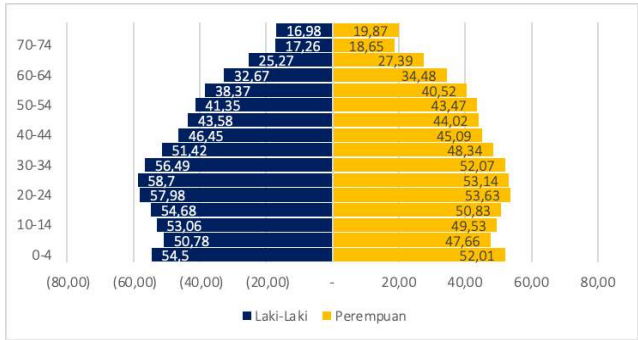
Gambar 2.18
Grafik Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Kebumen Menurut Kecamatan Tahun 2022

Kabupaten Kebumen mengalami *ageing population*. Komposisi penduduk Kabupaten Kebumen berdasarkan kelompok umur menunjukkan terjadinya *ageing population* dimana proporsi penduduk berusia 65 tahun ke atas meningkat semula 7,64 persen (2010, Gambar 2.22) menjadi 9,42 persen (2022, Gambar 2.22). Program-program berbasis *population responsive* perlu menjadi perhatian sehingga penduduk berusia 65 tahun ke atas dapat produktif lebih lama dan memberikan sumbangsih bagi pembangunan ekonomi Kabupaten Kebumen.



Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

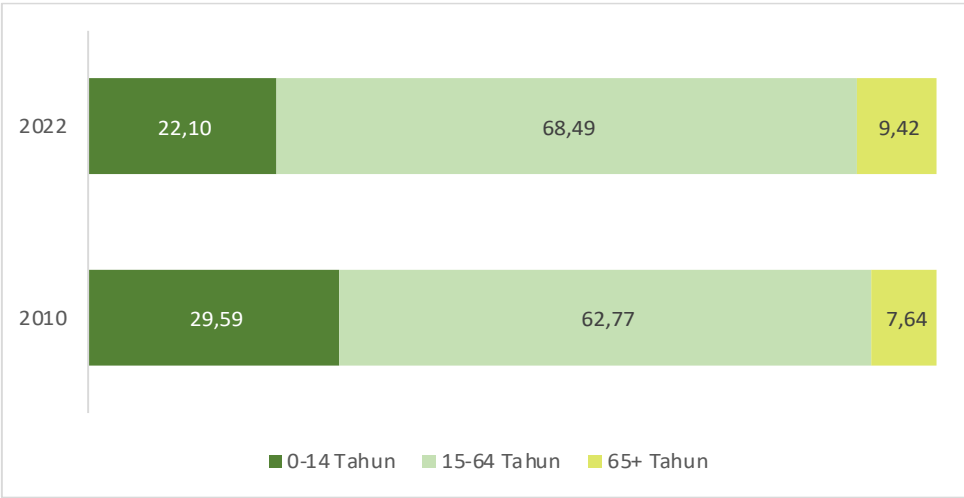
Gambar 2.19
Grafik Jumlah Penduduk Kabupaten Kebumen Menurut Kelompok Umur, 2010



Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Gambar 2.20
Grafik Jumlah Penduduk Kabupaten Kebumen Menurut Kelompok Umur, 2022

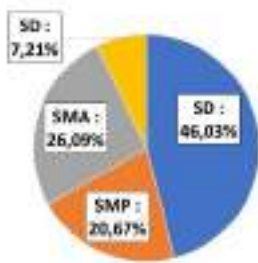
Beban ketergantungan penduduk belum produktif dan tidak produktif terhadap usia produktif meningkat. Kondisi proporsi penduduk berusia 65 tahun ke atas meningkat, sedangkan proporsi penduduk berusia 0-14 tahun (usia muda) Kabupaten Kebumen menurun semula 29,59 persen (2010) menjadi 22,10 persen (2022) dimana keduanya menjadi pembentuk komponen penduduk usia non produktif yang secara agregat meningkat. Dimana, proporsi penduduk berusia 15-64 tahun (usia produktif) Kabupaten Kebumen juga meningkat, semula 62,77 persen (2010) menjadi 68,48 persen (2022). Berdasarkan kondisi tersebut, rasio ketergantungan Kabupaten Kebumen menunjukkan penurunan, semula 59,32 persen (2010) menjadi 45,70 persen (2022), mengindikasikan setiap 100 orang penduduk usia produktif menanggung 46 orang penduduk usia tidak produktif.



Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

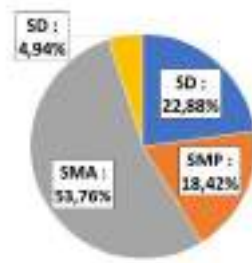
Gambar 2.21
Grafik Jumlah Penduduk Kabupaten Kebumen Menurut Kelompok Usia Belum Produktif, Produktif, dan Tidak Produktif, 2010-2022

Penduduk berumur 15 tahun ke atas yang termasuk angkatan kerja Kabupaten Kebumen sebanyak 813.172 orang (2023) dimana 771.582 orang bekerja dan 41.590 orang pengangguran. Penduduk bekerja sebagian besar masih berpendidikan SD sedangkan pengangguran sebagian besar berpendidikan SMA. Penduduk bekerja menurut tingkat pendidikan didominasi oleh penduduk berpendidikan SD sebesar 46,03 persen, berpendidikan SMA sebesar 26,09 persen, berpendidikan SMP sebesar 20,67 persen, dan berpendidikan perguruan tinggi sebesar 7,21 persen. Selain itu, pengangguran Kabupaten Kebumen didominasi oleh penduduk berpendidikan SMA sebesar 53,76 persen dan hanya 4,94 persen penduduk berpendidikan perguruan tinggi.



Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Gambar 2.22
Grafik Penduduk Bekerja Menurut
Tingkat Pendidikan
di Kabupaten Kebumen Tahun 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Gambar 2.23
Grafik Pengangguran Menurut
Tingkat Pendidikan
di Kabupaten Kebumen Tahun 2023

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

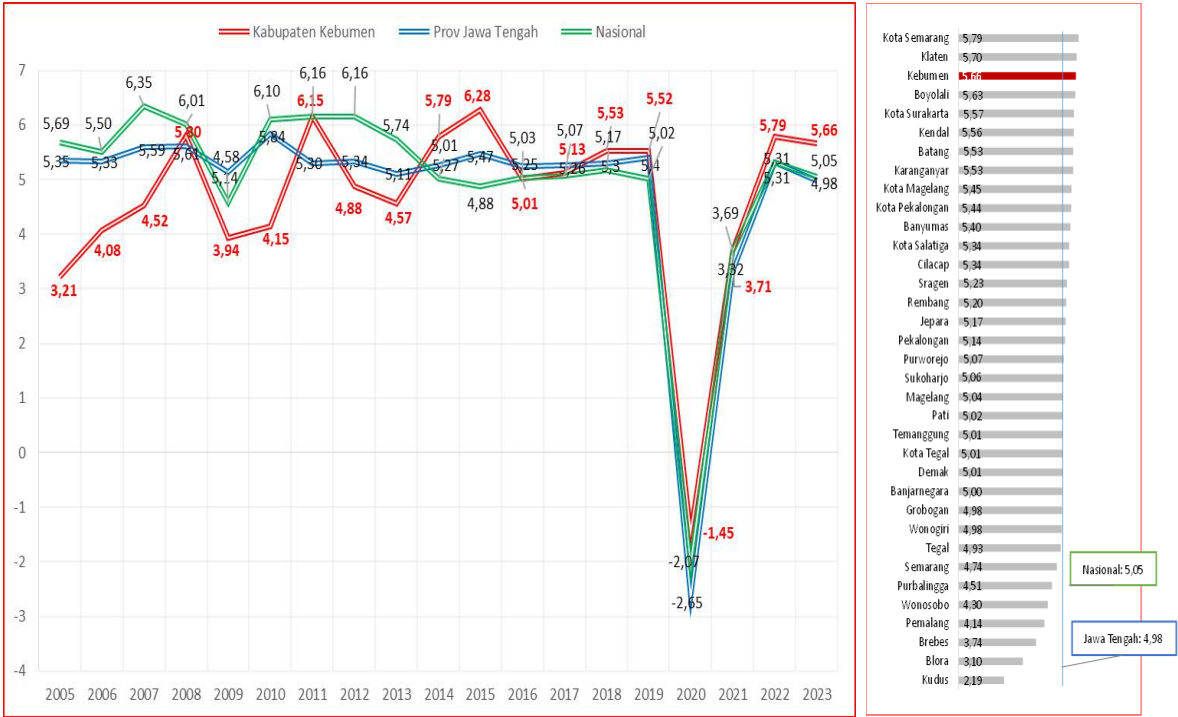
2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kebumen meningkat. Tinjauan ekonomi Kabupaten Kebumen dapat terlihat Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Kebumen mengalami peningkatan semula Rp 13.766.060,95 juta (2011) menjadi Rp 35.763.804,43 juta (2023). Naiknya nilai PDRB ADHB dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha dan adanya inflasi yang terkendali. Distribusi PDRB Kabupaten Kebumen menurut lapangan usaha dalam setahun terakhir, masih didominasi oleh Industri Pengolahan sebesar 22,24 persen; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 20,03 persen; dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 14,67 persen. Selain itu, distribusi terendah terjadi pada lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang yakni sebesar 0,04 persen. Pada tahun 2023, produk yang dikonsumsi sebagian besar masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, yang ditunjukkan melalui Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 73,52 persen. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) memberikan kontribusi sebesar 18,82 persen sedangkan kontribusi Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 7,71 persen. Hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam menyerap produk domestik tidak terlalu besar. Produk Kebumen diperdagangkan ke luar daerah, baik ke luar negeri, ke provinsi lain maupun ke kabupaten lain di Indonesia. Meskipun demikian, impor mempunyai peran yang relatif besar karena permintaan domestik masih harus dipenuhi oleh produk dari impor. Perdagangan Kebumen yang direpresentasikan oleh transaksi ekspor dan impor menunjukkan bahwa nilai ekspor selalu lebih rendah dari nilai impor. Perdagangan Kebumen selalu menunjukkan posisi defisit 4-9 persen selama lima tahun terakhir. Komponen Net Ekspor Barang dan Jasa yang terus mengalami kontraksi meskipun besarnya terus berkurang menggambarkan bahwa ekonomi Kabupaten Kebumen sangat tergantung pada pengeluaran konsumsi rumah tangga.

Berdasarkan data PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tahun 2010, nilai PDRB Kabupaten Kebumen naik semula Rp 13.068.985,50 juta (2011) menjadi Rp.22.638.895,33 juta (2023). Kenaikan PDRB ADHK 2010 murni disebabkan oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha, tidak dipengaruhi inflasi. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2023 Kabupaten Kebumen mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 5,66 persen. Pada tahun 2020 ekonomi Kabupaten Kebumen sempat mengalami kontraksi 1,45 persen akibat pandemi COVID-19. Keberhasilan program Jaminan Pengaman Sosial

Stimulus COVID-19 bagi penduduk terdampak COVID-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) telah ditempuh pemerintah melalui kebijakan fiskal dan moneter yang komprehensif dan merata di seluruh wilayah kabupaten/kota se-Indonesia termasuk Kabupaten Kebumen mampu mengatasi berbagai tekanan perekonomian regional dan nasional pada masa pandemi COVID-19.

Berdasarkan rilis data oleh BPS menunjukkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen pada Tahun 2023 yang mencapai 5,66 persen jauh lebih baik jika dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,05 persen dan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah sebesar 4,98 persen. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen Tahun 2023 ini bahkan menduduki peringkat ketiga tertinggi seluruh Jawa Tengah.



Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

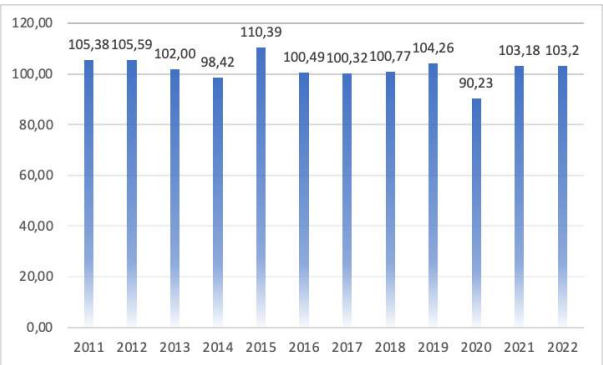
Gambar 2.24
Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kebumen, 2005-2023

Analisis *Location Quotient (LQ)* dimana jika $LQ \geq 1$ (sektor basis), bermakna bahwa sektor tersebut sudah mampu memenuhi kebutuhan permintaan pasar di dalam wilayah dan juga diekspor ke luar wilayah, serta jika $LQ < 1$ (sektor non-basis), bermakna bahwa sektor tersebut hanya mampu memenuhi kebutuhan permintaan di dalam wilayah menunjukkan bahwa 7 lapangan usaha merupakan sektor basis, yaitu Jasa Pendidikan; Jasa lainnya; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Transportasi dan Pergudangan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Sedangkan 10 lapangan usaha lainnya merupakan sektor non basis, yaitu Pertambangan dan Penggalan; Industri Pengolahan; Informasi dan Komunikasi; Pengadaan Listrik dan Gas; Konstruksi; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Real Estate; Jasa Perusahaan; dan Jasa Keuangan dan Asuransi.

Lapangan usaha yang mendominasi kontribusi PDRB ADHB Kabupaten Kebumen, yaitu Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor berdasarkan analisis LQ merupakan sektor basis. Namun produktivitas sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dirasa masih belum maksimal padahal potensi sektor ini sangat besar untuk dikembangkan di Kabupaten Kebumen. Usaha pada sektor

pertanian, kehutanan, dan perikanan dianggap tidak mampu menjamin kesejahteraan petani sehingga minat generasi muda pada sektor ini semakin menurun, serta didominasi dari penduduk dengan usia 50 tahun keatas. Berdasarkan BPS tahun 2023, petani di Kabupaten Kebumen dengan usia 55-64 tahun sebanyak 60.209 kk dan usia 65 keatas sebanyak 50.274 kk dari total 213.276 kk atau 50,80 persen.

Tingkat kesejahteraan petani dapat dilihat dari Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN). TPT dan NTN merupakan salah satu indikator tingkat kesejahteraan petani dengan mengukur kemampuan tukar produk (komoditas) yang dihasilkan/dijual petani/nelayan dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan petani/nelayan baik untuk proses produksi (usaha) maupun untuk konsumsi rumah tangga. Nilai Tukar Petani/NTP (Gambar 2.28) dan Nilai Tukar Nelayan/NTN (Gambar 2.29) di Kabupaten Kebumen menurun, NTP semula 105,38 persen (2011) menjadi 103,20 persen (2022) sedangkan NTN semula 195 persen (2016) menjadi 170 persen (2022).



Sumber: OPD Urusan Pertanian

Gambar 2.25
Grafik Nilai Tukar Petani (NTP), 2011-2022



Sumber: OPD Urusan Kelautan dan Perikanan

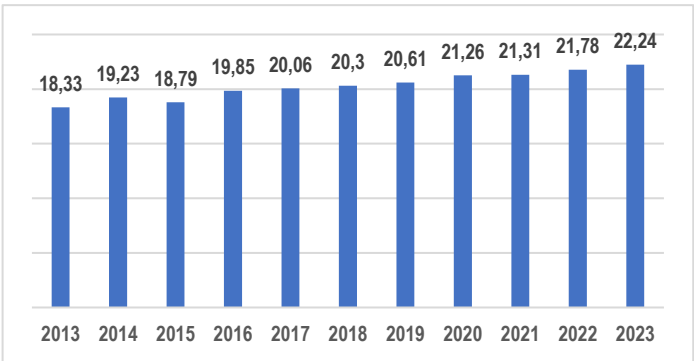
Gambar 2.26
Grafik Nilai Tukar Nelayan (NTN), 2016-2022

Analisis tipologi klassen menunjukkan lima lapangan usaha merupakan sektor yang Tumbuh Cepat, Berdaya Saing, yaitu Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; Real Estate; dan Konstruksi. Empat lapangan usaha merupakan sektor yang Tumbuh Cepat, Tak Berdaya Saing, yaitu Informasi dan Komunikasi; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Lima lapangan usaha merupakan sektor yang Tumbuh Lambat, Berdaya Saing, yaitu Jasa lainnya; Industri Pengolahan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; dan Pertambangan dan Penggalian/ Mining and Quarrying. Tiga lapangan usaha yang merupakan sektor yang Tumbuh Lambat, Tak Berdaya Saing, yaitu dan Jasa Perusahaan; Jasa Pendidikan; dan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan.

Analisis sektor ekonomi unggulan, menunjukkan tiga lapangan usaha merupakan Sektor Unggulan (Basis, Maju/Progresif) atau sektor dengan kontribusi dan pertumbuhan terhadap PDRB di atas rata-rata provinsi, yaitu Jasa lainnya; Transportasi dan Pergudangan; dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Empat lapangan usaha merupakan Sektor Potensial (Basis, Mundur) atau sektor dengan kontribusi terhadap PDRB di atas rata-rata provinsi namun pertumbuhan terhadap PDRB di bawah rata-rata provinsi, yaitu Jasa Pendidikan; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Enam lapangan usaha merupakan Sektor Berkembang (Non Basis, Maju/Progresif) atau sektor dengan kontribusi terhadap PDRB di bawah rata-rata provinsi tetapi

pertumbuhan terhadap PDRB di atas rata-rata provinsi, yaitu Real Estate; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Konstruksi; Pengadaan Listrik dan Gas; Informasi dan Komunikasi; dan Industri Pengolahan. Empat lapangan usaha merupakan Sektor Terbelakang (Non Basis, Mundur) atau sektor dengan kontribusi dan pertumbuhan terhadap PDRB di bawah rata-rata provinsi, yaitu Jasa Keuangan dan Asuransi; Jasa Perusahaan; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; dan Pertambangan dan Penggalan.

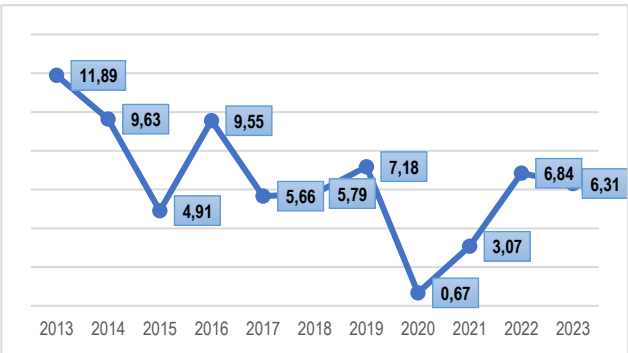
Pembangunan bidang perindustrian berpotensi menjadi penopang pertumbuhan ekonomi dan penyedia lapangan kerja di Kabupaten Kebumen. Kontribusi sektor industri pengolahan dalam PDRB ADHB meningkat semula 18,33 persen (2013) menjadi 22,24 persen (2023). Sementara jika dilihat dari pertumbuhan sektor industri pengolahan cenderung fluktuatif, sempat menyentuh pertumbuhan yang tinggi di tahun 2013 sebesar 11,89 persen pada Tahun 2013 dan pertumbuhan terendah di tahun 2020 yaitu hanya sebesar 0,67%. Sejak tahun 2020, sektor industri pengolahan cenderung terus tumbuh hingga mencapai 6,31 persen pada tahun 2023. Namun demikian, sektor industri pengolahan belum menjadi lapangan usaha utama bagi tenaga kerja di Kabupaten Kebumen. Penduduk Kabupaten Kebumen yang bekerja di sektor industri pengolahan hanya sebesar 29,95 persen masih dibawah sektor jasa sebesar 41,32 persen dan masih lebih tinggi dibandingkan bekerja di sektor pertanian sebesar 28,72 persen.



Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Gambar 2.27

Grafik Kontribusi Sektor Industri Pengolahan dalam PDRB ADHB (Persen), 2013-2023

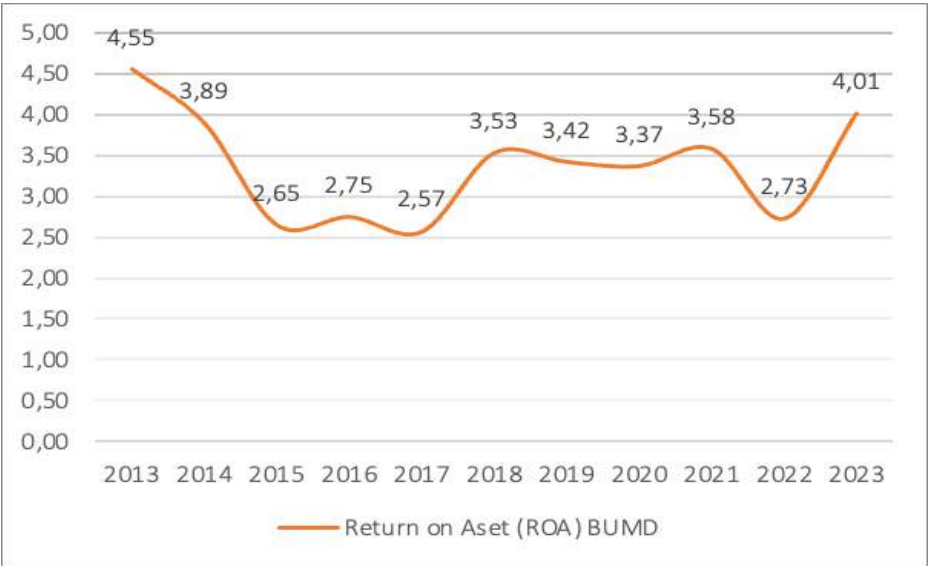


Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Gambar 2.28

Grafik Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan dalam PDRB ADHB (Persen), 2013-2023

Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen dapat mengembangkan sektor industri pengolahan melalui pengembangan BUMD. Pengembangan industri juga dapat diintervensi langsung oleh Pemerintah Daerah melalui BUMD. Pada tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Kebumen telah meluncurkan BUMD baru yaitu Aneka Usaha Kebumen Jaya yang bergerak di beberapa sektor usaha. Tingkat *Return on Asset* (ROA) BUMD Kabupaten Kebumen tahun 2023 telah mencapai 4,01 persen.



Sumber: Sekretariat Daerah, diolah

Gambar 2.29
Grafik Tingkat Return on Asset (ROA) BUMD, 2013-2023

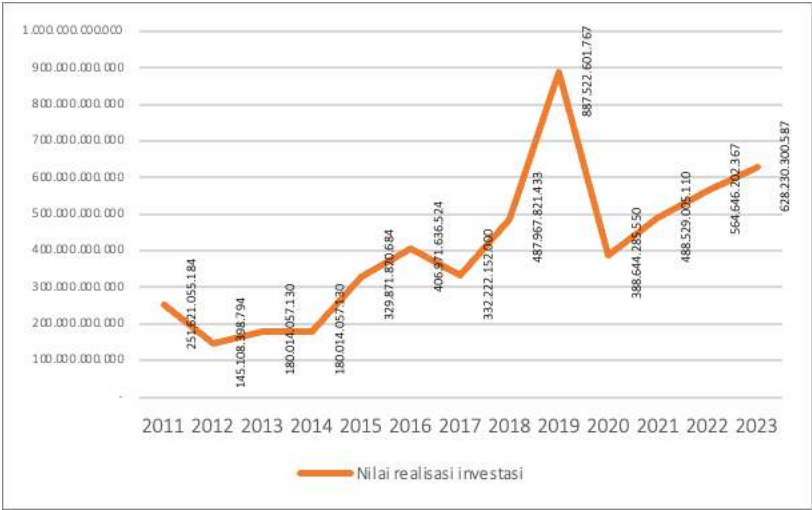
Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan koperasi untuk meningkatkan produktivitas ekonomi. Kewirausahaan dalam UMKM dan Koperasi di Kabupaten Kebumen terus meningkat. Persentase koperasi aktif berfluktuatif dari 84 unit pada Tahun 2019 menjadi 90 unit di Tahun 2023 dengan total omset meningkat signifikan dari Rp.461.458.055,- pada Tahun 2019 menjadi Rp.180.283.160.378,- pada Tahun 2023. Sementara itu jumlah UMKM juga terus meningkat dari 45.715 unit pada Tahun 2019 menjadi 46.095 unit pada Tahun 2023 dengan UMKM yang naik kelas dari 31 unit pada Tahun 2019 menjadi 1.047 unit di Tahun 2023. Dalam upaya mendukung pengembangan UMKM serta menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukkseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Kebumen telah menerbitkan Surat Edaran Bupati Kebumen Nomor 975/1433 tanggal 18 Juli 2022 tentang Penyelenggaraan Perdagangan melalui Sistem Elektronik untuk Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Toko Daring dan Katalog Elektronik Lokal di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen. Etalase lokal pada e-Katalog Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Pemkab Kabupaten Kebumen telah dilakukan sejak Juli 2022.

Tabel 2.15
Capaian Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2019-2023

No	Uraian Kinerja	2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase koperasi aktif (%)	84	87,11	92,36	92,66	90
2	Omset Koperasi (Rp 000)	461.458.055	507.951.289	543.426.605	288.892.274	180.283.160.378
3	Omset per koperasi (Rp 000)	1.675.719	1.455.703	1.430.070	789.323	498.019.780
4	Usaha Mikro dan Kecil (unit)	45.715	46.460	46.100	46.100	46.095
5	Jumlah usaha mikro dan kecil yang dibina (unit)	2.744	5.500	250	1.450	1.460
6	Usaha Mikro dan Kecil yang naik kelas (unit)	31	76	35	1.044	1.047

Sumber : Disperindag 2023

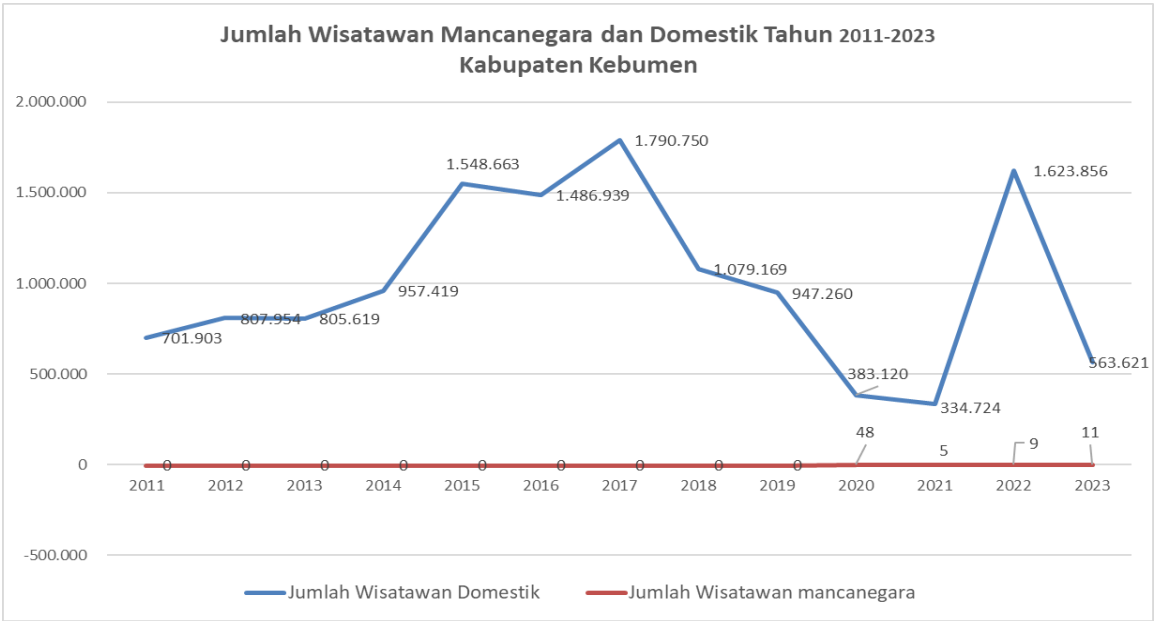
Peningkatan pembangunan bidang penanaman modal dalam rangka pertumbuhan ekonomi. Nilai realisasi investasi Kabupaten Kebumen cenderung meningkat hingga tahun 2019 mencapai Rp. 887.522.601.767. Akan tetapi, tahun 2020 sebagai akibat terjadinya pandemi COVID-19 nilai investasi menurun hingga mencapai Rp. 388.644.285.550 dan kembali meningkat pada tahun 2023 mencapai Rp. 628.230.300.587. Pemerintah Kabupaten Kebumen berupaya untuk meningkatkan iklim investasi dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal. Perda ini mengatur pemberian insentif berbentuk pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah, dan/atau retribusi daerah. Meskipun demikian, implementasi Perda Nomor 1 tahun 2019 belum efektif sehingga perlu dilakukan penyelarasan dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan lainnya. Sementara itu berdasarkan data BPS menunjukkan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) secara nominal juga meningkat dari Rp. 6.022.328,52 juta (2021) menjadi Rp. 6.729.204,56 juta (2023), akan tetapi proporsinya terhadap total PDRB justru menurun dari 20,37% pada tahun 2021 menjadi 18,82% pada Tahun 2023. Upaya peningkatan akses permodalan di Lembaga keuangan oleh dunia usaha di Kabupaten Kebumen juga harus dilakukan. Pada Tahun 2023 menunjukkan proporsi kredit terhadap PDRB di Kabupaten Kebumen mencapai 17,99 persen. Namun sebelumnya juga perlu upaya peningkatan simpanan dana pihak ketiga atau Tabungan Masyarakat Kebumen di Lembaga perbankan dan keuangan. Pada tahun 2023 proporsi total dana pihak ketiga terhadap PDRB mencapai sebesar 17,29 persen.



Sumber: OPD Urusan Penanaman Modal, diolah

Gambar 2.30
Grafik Realisasi Investasi, 2011-2023

Pembangunan bidang pariwisata untuk pengembangan investasi sebagai pusat pertumbuhan baru terus ditingkatkan. Jumlah kunjungan wisatawan domestik Tahun 2011 sebesar 701.903 orang mengalami peningkatan sampai pada Tahun 2018 sebesar 1.079.169 orang tetapi mulai mengalami penurunan di Tahun 2019 sebesar 947.260 orang karena wabah COVID-19. Pada Tahun 2022 sudah mengalami kenaikan kembali sebesar 1.623.856 orang. Dari data BPS menunjukkan terdapat 11 wisatawan mancanegara mengunjungi Kabupaten Kebumen pada Tahun 2023 meningkat jika dibandingkan Tahun 2021 sebanyak 5 orang dan tahun 2022 sebanyak 9 orang. Secara nominal PDRB Seri 2010 Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) sektor penyediaan akomodasi makan dan minum terus meningkat dari Rp.311.021,57 Juta pada Tahun 2014 menjadi Rp.695.284,13 Juta pada Tahun 2023.



Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Gambar 2.31
Grafik Jumlah Kunjungan Wisatawan, 2011-2023

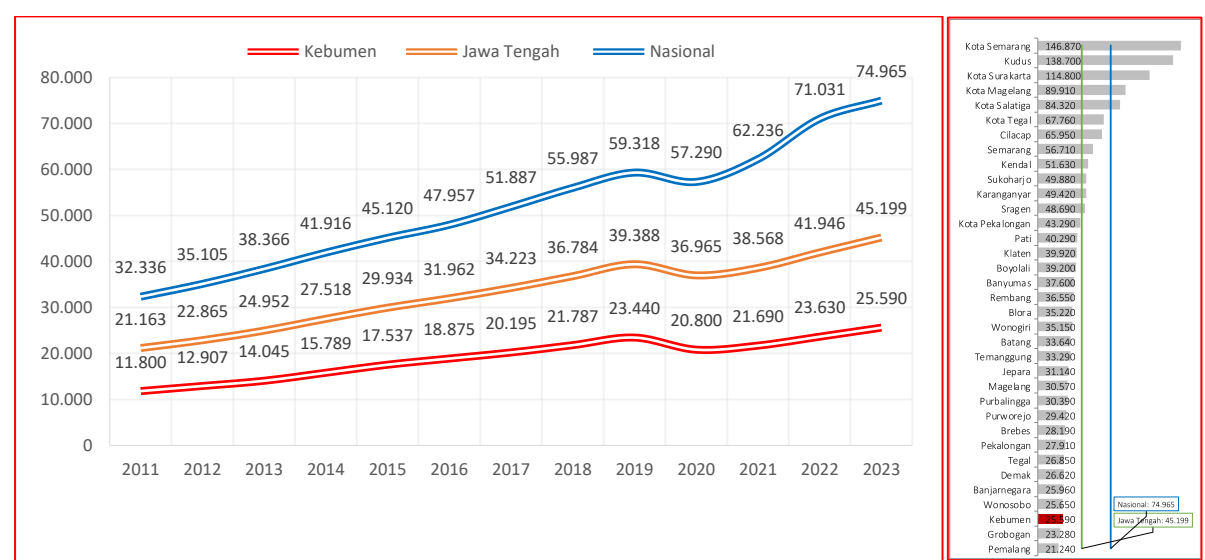
Pembangunan bidang ketenagakerjaan Kabupaten Kebumen harus terus ditingkatkan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen. Proporsi penduduk berusia 15-64 tahun (usia produktif) Kabupaten Kebumen meningkat semula 63,77 persen (2011) menjadi 68,49 persen (2022). Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) yang mencerminkan kesempatan kerja yang tersedia bagi penduduk usia kerja di Kabupaten Kebumen juga meningkat dari 70,35 persen (2011) menjadi 74,54 persen (2023). Namun Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Kebumen mengalami kenaikan dari 2011 sebesar 4,73 persen menjadi 5,11 persen pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan kenaikan proporsi penduduk usia produktif tidak sebanding dengan kenaikan TPAK sehingga angka TPT masih tinggi. Pemerintah Kabupaten Kebumen berupaya meningkatkan kesempatan kerja diantaranya melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota di dalam maupun luar negeri. Upaya ini berhasil meingkatkan jumlah tenaga kerja yang ditempatkan dari semula 21,44 persen (2018) menjadi 82,48 persen (2022).



Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Gambar 2.32
Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Kebumen, 2007-2023

PDRB per kapita Kabupaten Kebumen mengalami kenaikan. Nilai PDRB per kapita Kabupaten Kebumen atas dasar harga berlaku sejak tahun 2011 hingga 2023 mengalami kenaikan dari semula Rp 11.800 ribu (2011) menjadi Rp 25.590 ribu (2022). Posisi relatif PDRB per kapita Kabupaten Kebumen berada di bawah rata-rata Jawa Tengah (Rp 45.199 ribu) dan Nasional (Rp 74.965 ribu), serta menempati posisi lebih rendah dari Cilacap (Rp 65.590 ribu), Banyumas (Rp 37.600 ribu), Purbalingga (Rp 30.390 ribu), dan Banjarnegara (Rp 25.960 ribu). Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini dipengaruhi peningkatan produksi sektor dominan pembentuk PDRB ADHB yaitu tingginya kontribusi Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) dan faktor inflasi.



Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Gambar 2.33
Grafik PDRB Per Kapita Kabupaten Kebumen, 2011-2023

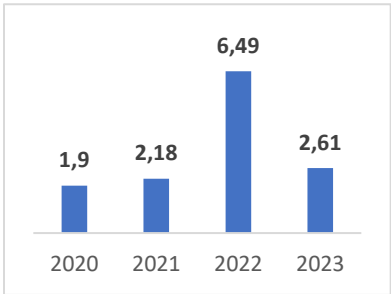
Inflasi Kota Purwokerto merupakan representatif inflasi Kabupaten Kebumen. Nilai PDRB ADHB Kabupaten Kebumen salah satunya dipengaruhi adanya inflasi. Pada Tahun 2023 gabungan enam kota di Jawa Tengah mengalami Inflasi sebesar 2,89 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 116,62. Semua kota tercatat mengalami inflasi dengan inflasi tertinggi terjadi di Kota Tegal sebesar 3,28 persen diikuti oleh Kota Surakarta sebesar 3,20 persen, Kota Kudus sebesar 2,96 persen, Kota Semarang sebesar 2,84 persen, Kota Cilacap sebesar 2,69 persen; dan terendah di Kota Purwokerto sebesar 2,61 persen. Secara umum laju inflasi di Tahun 2023 relatif menurun jika dibandingkan Tahun 2022. Sementara itu, IHK tertinggi terjadi di Kota Surakarta pada 118,52; disusul Kota Tegal pada 118,46; Kota Purwokerto pada 117,08; Kota Cilacap pada 116,49; Kota Kudus pada 116,47 dan terendah di Kota Semarang pada 116,05. Dikarenakan inflasi Kabupaten Kebumen tidak dihitung oleh BPS, maka sebagai representatif menggunakan inflasi di kota terdekat yaitu Purwokerto.

Tabel 2.16
Perbandingan Indeks Harga Konsumen dan Inflasi di 6 Kota Lokasi Survei Biaya Hidup di Jawa Tengah Tahun 2023

Lokasi Survei Biaya Hidup (SBH)	IHK	Inflasi
Gabungan 6 Kota di Jawa Tengah	116,62	2,89
Cilacap	116,49	2,69
Purwokerto	117,08	2,61
Kudus	116,47	2,96
Kota Surakarta	118,52	3,2
Kota Semarang	116,05	2,84
Kota Tegal	118,46	3,28

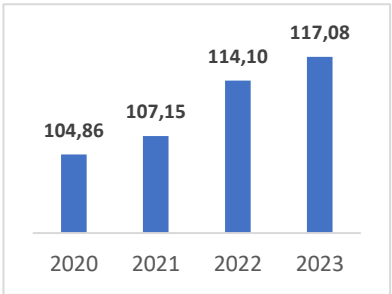
Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Perkembangan inflasi Kabupaten Kebumen dari representatif inflasi Purwokerto menunjukkan tingkat inflasi tahun ke tahun (Desember 2023 terhadap Desember 2022) sebesar 2,61 persen meningkat dibandingkan tingkat inflasi tahun ke tahun (Desember 2020 terhadap Desember 2019) sebesar 1,9 persen. Inflasi terjadi karena adanya Indeks Harga Konsumen (IHK) tahun ke tahun (Desember 2023 terhadap Desember 2022) sebesar 117,08 meningkat dibandingkan Indeks Harga Konsumen (IHK) tahun ke tahun (Desember 2020 terhadap Desember 2019) sebesar 104,86 pada Desember 2023.



Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

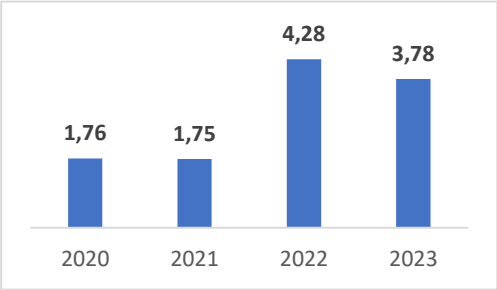
Gambar 2.34
Grafik Inflasi Tahunan
Purwokerto Tahun
2020-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Gambar 2.35
Grafik IHK Tahunan
Purwokerto Tahun
2020-2023

Sebagai perbandingan berdasarkan PDRB deflator, data Laju Indeks Implisit PDRB Kabupaten Kebumen pada Tahun 2023 sebesar 3,78 yang menunjukkan perubahan harga. Berbeda dengan perhitungan inflasi secara umum yang biasanya menggunakan IHK dan IHP (Indeks Harga Produsen), sebagai perbandingan perhitungan inflasi secara deflator ini menunjukkan perubahan harga seluruh sektor PDRB mencakup semua barang dan jasa dalam perekonomian baik harga bahan baku, produk setengah jadi, produk akhir, dan layanan/jasa.



Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Gambar 2.36
Grafik Laju Implisit PDRB
Kabupaten Kebumen Tahun
2020-2023

Pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen dimulai dari Keberhasilan Pembangunan Desa. Ukuran keberhasilan pembangunan Desa sesuai Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun, yaitu Indeks Desa Membangun (IDM) yang merupakan Indeks Komposit dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Indeks Desa Membangun menggambarkan kemandirian desa berdasarkan konsepsi bahwa desa maju mandiri mengedepankan pembangunan berkelanjutan di seluruh aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan saling mengisi dalam

menjaga potensi desa untuk menyejahterakan kehidupan desa (Ditjen Kemendes PDTT, 2020).

Selanjutnya pada Rapat Terbatas Presiden Republik Indonesia pada tahun 2019 disetujuinya Indeks Desa. Sekretariat Kabinet melalui surat No.B.0308/Seskab/PMK/06/2023 pada tanggal 20 Juli 2023 mengingatkan kembali amanat Presiden pada tahun 2019 mengenai penggunaan Indeks Desa sebagai indeks tunggal dalam mengukur status kemajuan dan kemandirian desa. Menindaklanjuti hal ini, Kementerian PPN/Bappenas menginisiasi Penyempurnaan Indeks Desa pada tahun 2023-2024 bersama Kementerian Desa PDTT, Sekretariat Kabinet, Kemenko PMK, Kementerian Dalam Negeri, BPS, dan Kementerian Keuangan hingga disepakati penggunaan Indeks Desa (penyempurnaan) sebagai indeks tunggal capaian pembangunan desa. Indeks Desa tersebut telah diluncurkan secara resmi pada tanggal 4 Maret 2024 untuk selanjutnya dipergunakan dalam seluruh dokumen perencanaan nasional serta daerah, menggantikan seluruh indikator pembangunan desa lainnya.

Namun hingga saat ini terdapat dua indeks perkembangan desa yakni: (1) Indeks Desa (ID) berbasis data Potensi Desa (Podes) BPS dan dikelola Kementerian PPN/Bappenas bersama BPS; dan (2) Indeks Desa Membangun (IDM) yang menggunakan data dari tingkat desa dan dikelola Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT). Perbedaan antara ID dan IDM pada: (1) Sumber data; (2) Dimensi; (3) Indikator; (4) Metode Perhitungan; (5) Mekanisme verifikasi data; dan (6) Pemanfaatan Data.

Sesuai surat Direktur Pembangunan Regional Kementerian PPN/Bappenas No,T-04777/Dt.2.2/PP.02.01/03/2024 tanggal 20 Maret 2024 perihal Penyampaian Informasi Mengenai Indikator Persentase Desa Mandiri dalam RPJPD 2025-2045 disampaikan bahwa Arah kebijakan Pembangunan Desa dalam RPJPN 2025-2045 berada dalam Indonesia Emas (IE) 8: Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan, dengan indikator Persentase Desa Mandiri. Persentase Desa Mandiri merupakan perbandingan antara jumlah desa dengan status pembangunan mandiri dibandingkan dengan total jumlah desa di tingkat nasional maupun provinsi/kabupaten/kota. Status pembangunan desa ditetapkan berdasarkan data capaian pembangunan desa yang bersumber dari Indeks Desa (bukan Indeks Desa Mandiri/IDM ataupun Indeks Pembangunan Desa/IPD). Untuk itu selanjutnya pada perencanaan Tahun 2025-2045 capaian Pembangunan desa akan diukur menggunakan Indeks Desa.

Namun demikian berdasarkan IDM Kabupaten Kebumen tahun 2023 terdapat 60 desa mandiri atau 13,36 persen pada tahun 2023.

Tabel 2.17
Capaian Indeks Desa Membangun
Kabupaten Kebumen Tahun 2017-2023

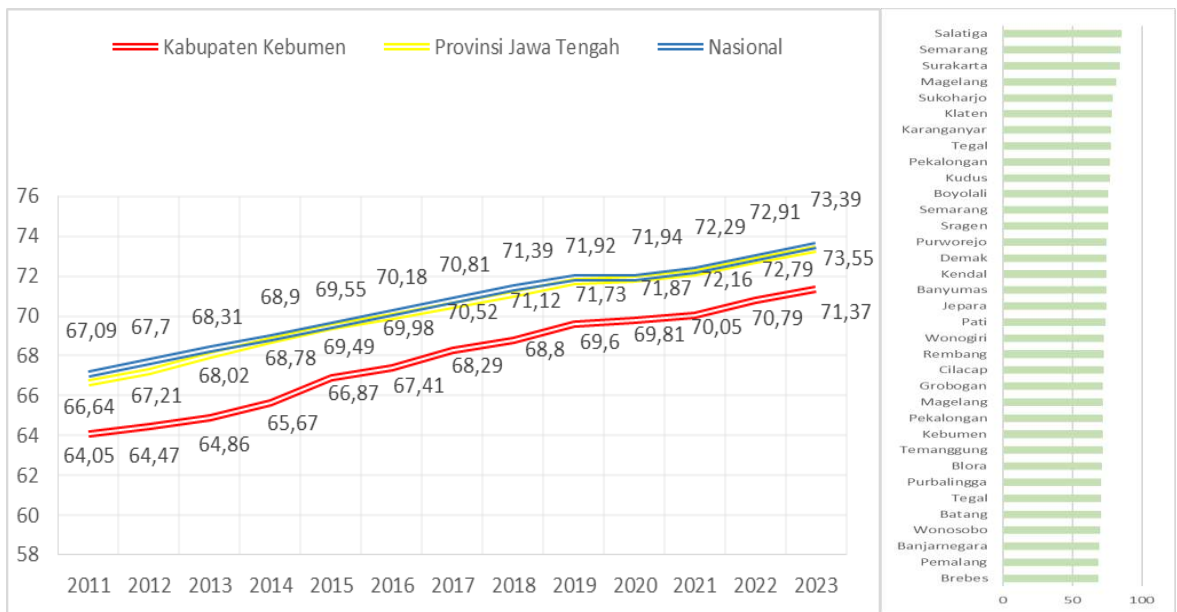
Indikator	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Desa Membangun (IDM)							
Desa Mandiri	1	1	1	1	1	5	60
Desa Maju	19	53	69	90	123	194	261
Desa Berkembang	253	327	357	348	319	250	128
Desa Tertinggal	176	66	22	10	6	-	-
Desa Sangat Tertinggal	2	2	-	-	-	-	-
Persentase Desa Mandiri							
IDM	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	1,11	13,36

Keterangan:

*) Data dukung untuk proyeksi Indeks Desa tersedia dalam hasil Potensi Desa 2019, 2020, dan 2021. Sementara itu pada Tahun 2022 dan 2023 BPS tidak merilis Potensi Desa dikarenakan adanya Automatic Adjustment pada prioritas anggaran. Pada Tahun 2024, akan dimulai kembali rilis Potensi Desa sebagai bahan perhitungan Indeks Desa.

Sumber: OPD Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, diolah

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten mengalami perbaikan dan tumbuh lebih baik. Konsep pembangunan manusia pertama kali diperkenalkan pada tahun 1990 oleh *United Nation Development Programme* (UNDP). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar yaitu mencakup umur yang panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*); pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). IPM Kabupaten Kebumen dari tahun 2011 ke tahun 2023 mengalami peningkatan yang relatif baik, yaitu semula 64,05 (2011) menjadi 71,37 (2023).

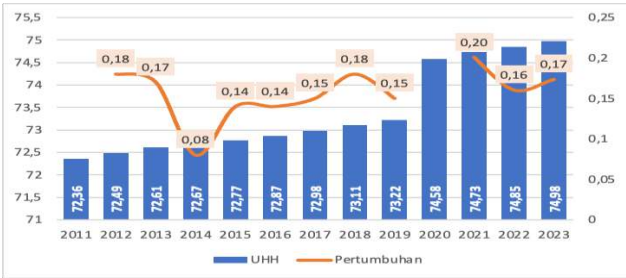


Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Gambar 2.37
Grafik Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten Kebumen, 2011-2023

Meskipun IPM Kebumen terus meningkat, pertumbuhan IPM empat tahun terakhir didominasi dengan perlambatan capaian terutama pada tahun 2020 seiring dengan penyebaran COVID-19 yang semakin luas dan kemudian diikuti dengan pembatasan kegiatan di berbagai bidang. Memasuki tahun 2021 hingga tahun 2023 seluruh dunia mulai beradaptasi dengan kondisi pandemi yang ada. Dimulai dengan peningkatan vaksinasi dan pengenalan kebiasaan baru yang terdiri dari pengetatan protokol kesehatan hingga penerapan *work from home* untuk penduduk bekerja dan *school from home* untuk penduduk yang masih berada di bangku sekolah. Seiring dengan penyebaran COVID-19 yang semakin terkendali dan kegiatan ekonomi yang mulai pulih, IPM Kabupaten mengalami perbaikan dan tumbuh lebih baik pada tahun 2021 hingga 2023.

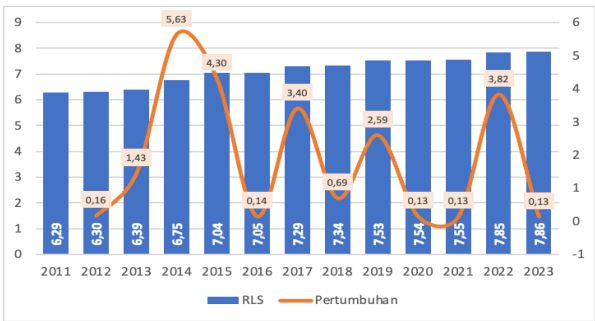
Peningkatan IPM Kabupaten Kebumen terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Dimensi umur panjang dan hidup sehat diukur dengan harapan hidup saat lahir. Harapan hidup saat lahir (Usia Harapan Hidup/UHH) menunjukkan derajat kesehatan suatu negara dimana semakin tinggi harapan hidup saat lahir suatu negara, maka semakin tinggi pula derajat kesehatan suatu negara. Capaian UHH mengalami peningkatan, yaitu semula 72,36 tahun (2011) menjadi 74,98 tahun (2023) meningkat jika dibandingkan dengan 2011 (72,36 tahun) yang mengindikasikan anak yang baru lahir pada tahun 2022 diharapkan dapat hidup hingga mendekati 74 tahun. Banyak faktor yang mempengaruhi pencapaian ini, diantaranya angka kematian (mortalitas) dan angka kesakitan (morbiditas), serta sumber daya dalam sistem kesehatan, seperti jumlah dokter, lama rawat inap, tingkat imunisasi, level edukasi, dan teknologi. Selain itu, pengeluaran per kapita sebulan untuk kesehatan juga erat kaitannya dengan derajat kesehatan penduduk.



Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

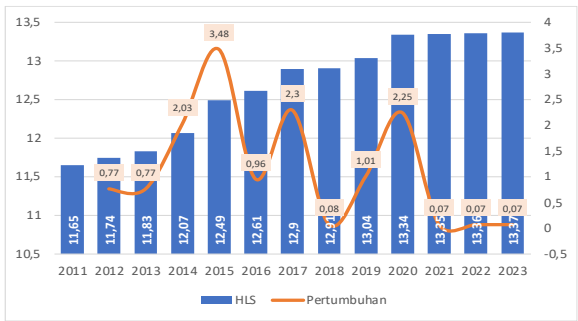
Gambar 2.38
Grafik Usia Harapan Hidup, 2010-2023

Dimensi pengetahuan dalam pembentukan IPM disusun dari rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Kedua indikator ini memiliki tren meningkat. Rata-rata lama sekolah penduduk 25 tahun ke atas semula 6,29 tahun (2011) menjadi 7,86 tahun (2023). Angka ini dapat diinterpretasikan bahwa rata-rata penduduk berusia 25 tahun ke atas telah menyelesaikan pendidikan hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP) kelas VIII. Harapan lama sekolah di Kabupaten Kebumen semula 11,65 tahun (2011) menjadi 13,37 tahun (2023), mengindikasikan penduduk usia 7 tahun ke atas diharapkan dapat menyelesaikan pendidikan hingga level perguruan tinggi tahun pertama dengan kondisi aksesibilitas pendidikan yang meningkat.



Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

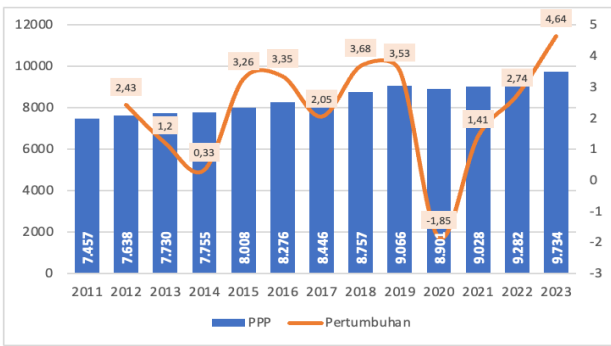
Gambar 2.39
Grafik Rata-Rata Lama Sekolah, 2010-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Gambar 2.40
Grafik Harapan Lama Sekolah, 2010-2023

Dimensi standar hidup layak yang diwakili oleh indikator pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan menggambarkan kemampuan daya beli masyarakat selama periode tertentu. Capaian pengeluaran riil per kapita memiliki tren meningkat sebelum pandemi COVID-19 menyebar. Pada tahun 2020 turun menjadi Rp 8.901 ribu. Namun, secara umum sejak 2011 hingga 2023 meningkat semula Rp 7.457 ribu menjadi Rp 9.734 ribu.

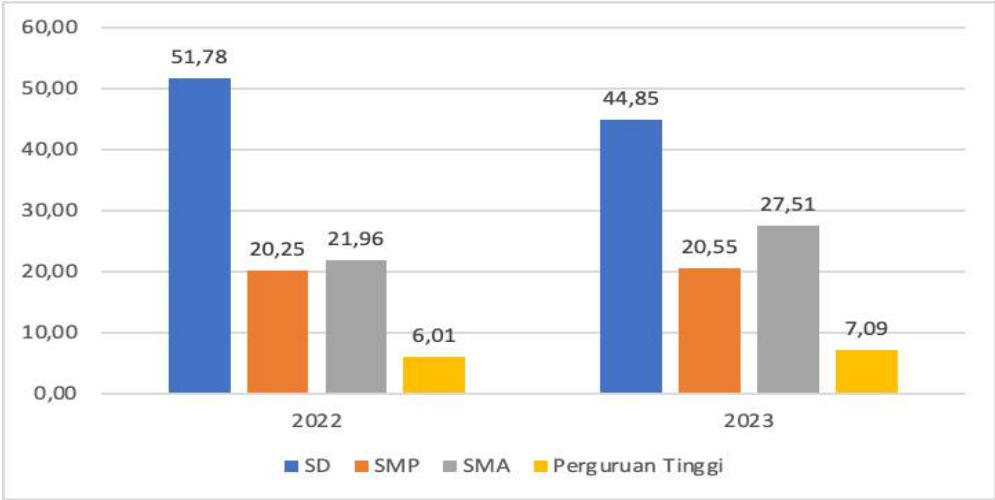


Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Gambar 2.41
Grafik Pengeluaran per Kapita, 2010-2023

Pembangunan pendidikan untuk meningkatkan RLS dan HLS dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Kebumen. Pencapaian RLS yang meningkat semula 6,29 tahun (2011) menjadi 7,86 tahun (2023) dan pencapaian HLS yang meningkat semula 11,65 tahun (2011) menjadi 13,37 tahun (2023), mengindikasikan meningkatnya pendidikan penduduk usia 15 tahun ke atas yang termasuk angkatan kerja, serta meningkatnya partisipasi dan kualitas pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan kesetaraan.

Pendidikan Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang termasuk Angkatan Kerja Harus Terus Ditingkatkan. Berdasarkan hasil Susenas 2023 sebagian besar penduduk usia 15 tahun ke atas yang termasuk angkatan kerja telah memiliki ijazah tertinggi tingkat pendidikan dasar yaitu SD (44,85 persen) dan SMP (20,55 persen). Dilihat perkembangannya selama tahun 2022-2023, persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang termasuk angkatan kerja yang menamatkan pendidikan SMP, SMA dan perguruan tinggi mengalami peningkatan, yaitu pendidikan SMP dari 20,25 persen menjadi 20,55 persen; pendidikan SMA dari 21,96 persen menjadi sebesar 27,51 persen; dan perguruan tinggi dari sebesar 6,01 persen menjadi sebesar 7,09 persen. Sedangkan persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang termasuk angkatan kerja yang menamatkan pendidikan SD mengalami penurunan dari 51,78 persen (2022) menjadi 44,85 persen (2023).



Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Gambar 2.42
Grafik Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas
Yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut Pendidikan Terakhir
Ditamatkan, 2022-2023

Partisipasi Pendidikan Harus Dimulai Sejak Dini. Hal ini tercermin dari tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun pada tingkat pendidikan PAUD semula sebesar 31,8 persen (2013) menjadi 82,57 persen (2023). Namun, partisipasi masyarakat Kabupaten Kebumen akan pentingnya pendidikan terhadap anak pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah pertama kecenderungan menurun. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi pada pendidikan dasar semula 113,8 persen (2013) menjadi 108,92 persen (2023) dan tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi pada pendidikan menengah pertama semula 117,54 persen (2013) menjadi 95,25 persen (2023). Pada kedua kelompok umur tersebut masih terdapat penduduk yang tidak sedang mengikuti pendidikan formal akibat putus sekolah atau bahkan tidak/belum pernah sekolah, dimana Angka Putus Sekolah SD/MI sebesar 0,0083 persen dan SMP/MTs sebesar 0,12 persen. Kedua kelompok umur tersebut merupakan kelompok umur wajib belajar 9 tahun. Kondisi ini pencapaiannya didukung pelaksanaan pendidikan kesetaraan yang terus ditingkatkan,

dimana tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan mencapai 100 persen setiap tahunnya dari tahun 2013 hingga tahun 2023.

Tabel 2.18
Capaian Kinerja Partisipasi Pendidikan Menurut Kelompok Usia dan
Jenjang Pendidikan Kabupaten Kebumen
Tahun 2019-2023

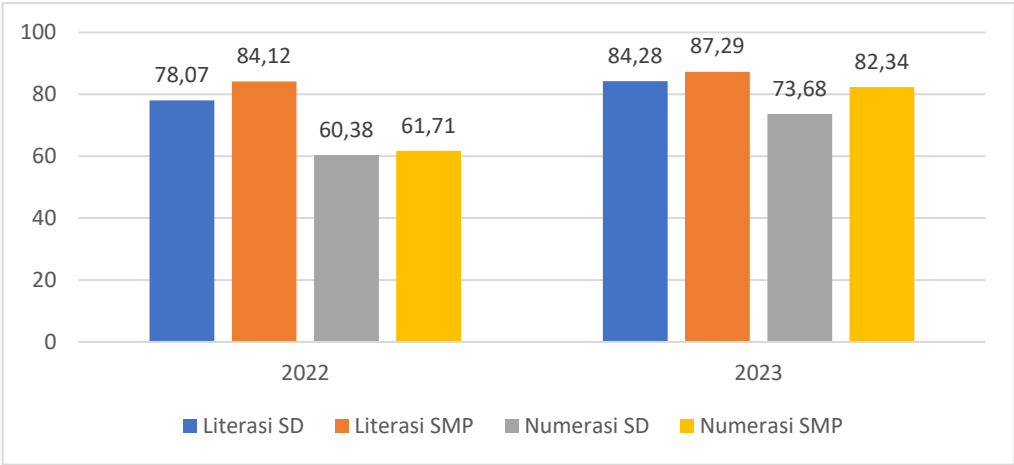
Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	31,8	54,83	58,78	61,59	64,81	40	41	41,38	44,86	47,85	82,57
Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	113,8	108,18	106,19	101,28	99,97	97	110	108,57	107,92	108,17	108,92
Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	117,5 4	98,86	98,93	98,92	98,06	97	90	90,69	92,67	71,75	95,25
Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Angka Putus Sekolah SD/MI	n/a	n/a	0,08	0,06	0,07	0	0	0,06	0,09	0,005 9	0,008 3
Angka Putus Sekolah SMP/MTs	n/a	n/a	0,34	0,35	0,26	0	0	0,16	0,3	0,016	0,12

Sumber: OPD Urusan Pendidikan, diolah, 2024

Kemampuan Literasi dan Numerasi Siswa SD dan SMP dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan Harus Terus Ditingkatkan. Dalam Upaya meningkatkan produktivitas sumber daya manusia maka sektor pendidikan juga harus dapat menghasilkan lulusan yang memiliki kualitas tingkat

II-41

kecerdasan yang unggul. Kualitas kecerdasan siswa sekolah dapat diukur berdasarkan kemampuan literasi membaca dan numerasi yang menjadi dasar dalam pengembangan kemampuan analitikal nantinya. Berdasarkan data Rapor Pendidikan pada Tahun 2022 dan 2023 menunjukkan kemampuan literasi membaca siswa SD dan SMP di Kabupaten Kebumen meningkat, yaitu Siswa SD dari sebesar 78,07 persen menjadi 84,28 persen dan siswa SMP dari sebesar 84,12 persen menjadi 87,29 persen. Kemampuan numerasi siswa SD dan SMP juga menunjukkan peningkatan, yaitu siswa SD dari 60,38 persen menjadi 73,68 persen dan siswa SMP dari 61,71 persen menjadi sebesar 82,34 persen. Berdasarkan rapor Pendidikan tahun 2023 tersebut menunjukkan kemampuan numerasi siswa SD di Kabupaten Kebumen masih di bawah kompetensi minimum karena masih di bawah 75 persen, sementara untuk kemampuan literasi siswa SD dan SMP, serta numerasi siswa SMP berada di atas kategori kompetensi minimum.



Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Gambar 2.43
Grafik Rata-rata Kemampuan Literasi dan Numerasi Siswa SD dan SMP Berdasarkan Hasil Asesmen Nasional, Kabupaten Kebumen 2022-2023

Pembangunan bidang perpustakaan dalam rangka peningkatan literasi masyarakat Kabupaten Kebumen terus ditingkatkan. Selama 5 tahun terakhir, kinerja urusan perpustakaan di Kabupaten Kebumen terus menunjukkan tren kenaikan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah koleksi buku di perpustakaan yang meningkat dari 34.074 buku pada tahun 2019 menjadi 48.844 buku pada tahun 2023. Jumlah kunjungan ke perpustakaan mengalami peningkatan dari 137.771 orang di tahun 2019 menjadi 290.339 pada tahun 2023. Kinerja urusan perpustakaan pada tahun 2023 mengalami kenaikan yang cukup baik, capaian kunjungan perpustakaan mengalami tren naik menjadi 290.339 pengunjung. Hal ini disebabkan adanya berbagai kegiatan inovasi diantaranya kegiatan bunda literasi, Duta Literasi serta pameran buku dan *community fair*. Idealnya Pustakawan di Kabupaten Kebumen berjumlah 506 (lima ratus enam orang) sesuai dengan Rekomendasi Perpustakaan Nasional RI. Capaian kinerja urusan perpustakaan di Kabupaten Kebumen pada tahun 2019-2023 selengkapnya tersaji pada Tabel berikut:

Tabel 2.19
Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Kabupaten Kebumen Tahun 2019-2023

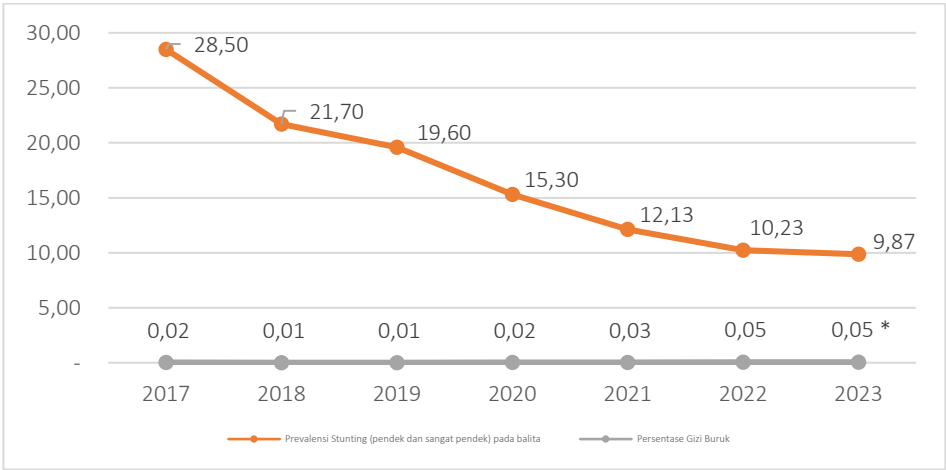
No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Perpustakaan	801	801	993	998	1.003
2	Perpustakaan Daerah	1	1	1	1	1

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
3	Perpustakaan Sekolah	929	877	889	889	889
4	Perpustakaan Desa/Kelurahan	84	70	85	88	93
5	Perpustakaan Tempat Ibadah/ Umum Masyarakat	17	17	18	18	18
6	Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 tahun	142.833	59.073	270.777	287.364	290.339
7	Jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani	974.580	974.580	975.977	976.676	978.074
8	Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah	24.497	26.229	27.242	27.742	28.897
9	Jumlah koleksi buku yang tersedia di Perpustakaan	38.561	38.561	45.844	46,844	48.844

Sumber: OPD Urusan Perpustakaan, diolah

Keberhasilan peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang kesehatan untuk meningkatkan UHH di Kabupaten Kebumen ditandai dengan perilaku penduduk dan lingkungan yang sehat, kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, secara adil dan merata, serta derajat kesehatan yang tinggi. Pencapaian Angka Harapan Hidup (AHH) yang meningkat semula 72,36 tahun (2011} menjadi 74,98 tahun (2023). Peningkatan AHH juga mengindikasikan bahwa penduduk kelompok umur tua (65 tahun keatas) meningkat semula 8,74 persen (2011) (2020) menjadi 9,42 persen (2022) sehingga menunjukkan terjadinya *ageing population*.

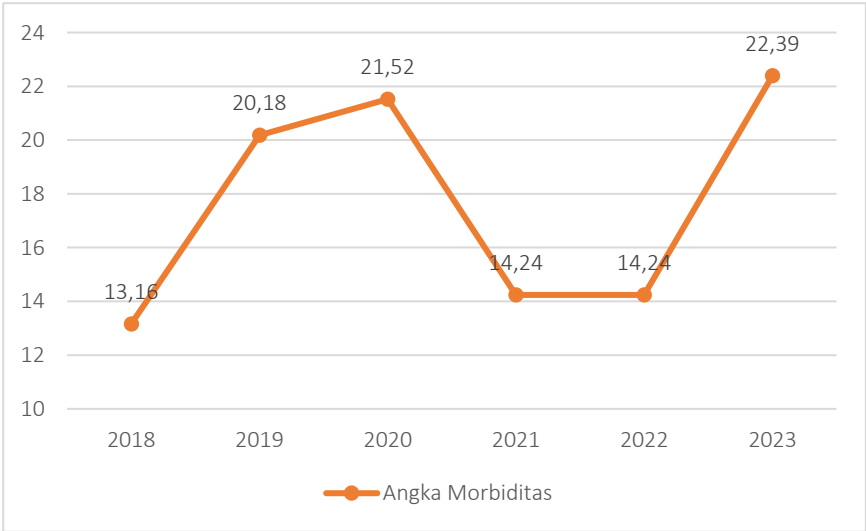
Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang kesehatan melalui penurunan stunting. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita di Kabupaten Kebumen mengalami penurunan semula 28, 5 persen (2017) menjadi 9,87 persen (2023). Penanganan balita gizi buruk yang merupakan salah satu pelayanan bidang kesehatan Pemerintah Kabupaten Kebumen menunjukkan hasil yang beragam. Persentase gizi buruk Kabupaten Kebumen kecenderungan fluktuatif dari 0,17 persen (2011), turun menjadi 0,02 persen (2017), dan naik kembali menjadi 0,05 persen (2023). Intervensi yang diberikan sangat mempengaruhi perkembangan seorang anak dan akan berpengaruh selama kehidupannya.



Sumber: OPD Urusan Kesehatan, diolah
 Keterangan: *) data tahun sebelumnya

Gambar 2.44
Grafik Stunting dan Gizi Buruk, 2017-2023

Kondisi kesehatan yang buruk akan berdampak pada kualitas sumber daya manusia di bidang kesehatan. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Blum (1974), bahwa derajat kesehatan penduduk suatu negara dapat diukur dari angka kematian (mortalitas) dan angka kesakitan (morbiditas). Angka kesakitan (morbiditas) merupakan indikator penting yang digunakan untuk penilaian dan perencanaan program yang bertujuan untuk menurunkan kesakitan dan kematian di suatu wilayah. Angka kesakitan adalah persentase penduduk yang menderita sakit terhadap total penduduk. Menderita sakit adalah mengalami keluhan kesehatan dan terganggunya pekerjaan, sekolah, atau kegiatan sehari-hari (tidak dapat melakukan kegiatan secara normal seperti bekerja, sekolah, atau kegiatan sehari-hari sebagaimana biasanya). Angka Kesakitan di Kabupaten Kebumen dari tahun 2018 hingga tahun 2023 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2018 berada pada angka 13,16 persen mengalami kenaikan pada tahun 2019 pada angka 20,19 persen dan tahun 2020 pada angka 21,52 persen. Terjadi penurunan pada tahun 2021 pada angka 14,24 dan kembali naik pada tahun 2022 pada angka 23,02 sedangkan tahun 2023 turun sedikit pada angka 22,39. Angka kesakitan mencakup kasus penyakit menular langsung, penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I), kejadian luar biasa, penyakit menular bersumber binatang dan penyakit tidak menular. Penyakit Menular masih menjadi permasalahan kesehatan masyarakat di Kabupaten Kebumen. Beberapa penyakit menular langsung yang masih banyak terjadi di Indonesia adalah Tuberculosis, Pneumonia, HIV, Diare dan Kusta. Sedangkan penyakit menular yang bersumber binatang antara lain demam berdarah dengue, Malaria, Filariasis. Globalisasi memberi dampak pada peningkatan mobilitas manusia dan hewan lintas negara serta perubahan gaya hidup manusia. Hal tersebut bisa mempercepat proses penyebaran wabah atau penularan penyakit yang bisa menjadi ancaman keamanan Kesehatan. Penyakit Tidak Menular (PTM) adalah penyebab kematian nomor 1 di dunia. Penyakit Tidak Menular ini dapat ditandai oleh penyakit penyakit yang muncul akibat gaya hidup yang kurang baik seperti penyakit jantung, stroke, kanker, diabetes melitus, cedera dan penyakit paru obstruktif kronik serta penyakit kronik lainnya. PTM juga merupakan 63% penyebab kematian di seluruh dunia dengan membunuh 36 juta jiwa per tahun (WHO, 2010). Di Indonesia sendiri, penyakit menular masih merupakan masalah kesehatan penting dan dalam waktu bersamaan morbiditas dan mortalitas PTM semakin meningkat. Hal tersebut menjadi beban ganda dalam pelayanan kesehatan, sekaligus tantangan yang harus dihadapi dalam pembangunan bidang kesehatan di Indonesia. Peningkatan PTM berdampak negatif pada ekonomi dan produktivitas bangsa. Pengobatan PTM seringkali memakan waktu lama dan memerlukan biaya besar. Beberapa jenis PTM merupakan penyakit kronik dan/atau katastropik yang dapat mengganggu ekonomi penderita dan keluarganya. Selain itu, salah satu dampak PTM adalah terjadinya kecacatan termasuk kecacatan permanen. Secara global, regional, dan nasional pada tahun 2030 diproyeksikan terjadi transisi epidemiologi dari penyakit menular menjadi penyakit tidak menular. Berbagai faktor risiko PTM antara lain yaitu: 1. merokok dan keterpaparan terhadap asap rokok, 2. minum minuman beralkohol, 3. diet/pola makan, 4. gaya hidup yang tidak sehat, 5. kegemukan, 6. obat-obatan, dan 7. riwayat keluarga (keturunan).



Sumber: OPD Urusan Kesehatan, diolah

Gambar 2.45
Grafik Angka Morbiditas, 2013-2023

Sementara itu, Tuberkulosis (TBC) saat ini masih merupakan masalah kesehatan masyarakat baik di Indonesia maupun internasional sehingga menjadi salah satu tujuan pembangunan kesehatan berkelanjutan (SDGs). Tuberkulosis adalah suatu penyakit menular yang disebabkan oleh kuman *Mycobacterium tuberculosis*. Indonesia merupakan negara ke-2 tertinggi penderita tuberkulosis. Hal tersebut mendorong pengendalian tuberkulosis nasional terus dilakukan dengan intensifikasi, akselerasi, ekstensifikasi dan inovasi program. Angka notifikasi kasus atau *Case Notification Rate* (CNR) di wilayah Kabupaten Kebumen meningkat, semula 145 per 100.000 penduduk (2018) menjadi 209 per 100.000 penduduk (2023). Upaya penanganan TB hingga tahun 2023 terus dilakukan, ditunjukkan cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (*treatment coverage*) mencapai sebesar 95 persen serta angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (*treatment success rate*) mencapai sebesar 83 persen.

Tabel 2.20
Capaian Kinerja Pencegahan dan Penanganan Kasus Tuberculosis
Kabupaten Kebumen, Tahun 2018-2023

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Angka Notifikasi Kasus (Case Notivication Rate/CNR) Per 100.000	145	180	99	151	192	209
2	Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberculosis (treatment coverage)	n/a	n/a	n/a	79	106	95
3	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberculosis	n/a	n/a	n/a	81	77	83

Sumber: OPD Urusan Kesehatan, diolah

Pertolongan tenaga kesehatan ketika proses persalinan akan mempercepat penanganan ketika terjadi pendarahan atau infeksi sehingga bisa mengurangi risiko kematian pada ibu. Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan cenderung meningkat semula 99,70 (2016) menjadi 100 persen (2023). Walaupun demikian, Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi meningkat. Angka Kematian Ibu semula 71,84 per 100.000 Kelahiran Hidup (KH) (2013) menjadi 92,26 per 100.000 KH (2023). Angka Kematian Bayi semula 9,53 per 1.000 KH (2013) menjadi 10,82 per 100.000 KH (2023). Peningkatan Angka Kematian Ibu diantaranya dikarenakan adanya kasus kehamilan yang tidak diinginkan masih tinggi diakibatkan akses serta menyembunyikan kondisi kehamilan yang disebabkan hamil di bawah

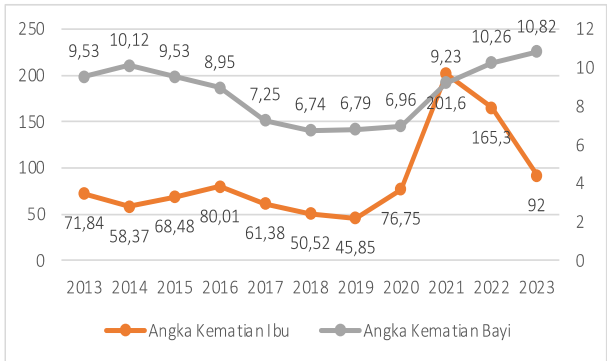
umur/diluar nikah/resti yang berdampak berbahaya bagi kesehatan ibu dan janin yang dikandungnya. Sementara peningkatan Angka Kematian Bayi diantaranya dikarenakan terdapat kematian bayi masa perinatal (1-7 hari), dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk masalah kesehatan pada ibu hamil, masalah pada plasenta, masalah pada janin, dan masalah pada persalinan dan persiapan pasca kelahiran. § Meningkatnya kasus pre eklamsi/eklamsi (keracunan kehamilan) akibat hormon kehamilan/tubuh menolak kehamilan diakibatkan pola hidup, biasanya terjadi pada trimester ketiga kehamilan.



Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Gambar 2.46

Grafik Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan, 2016-2023



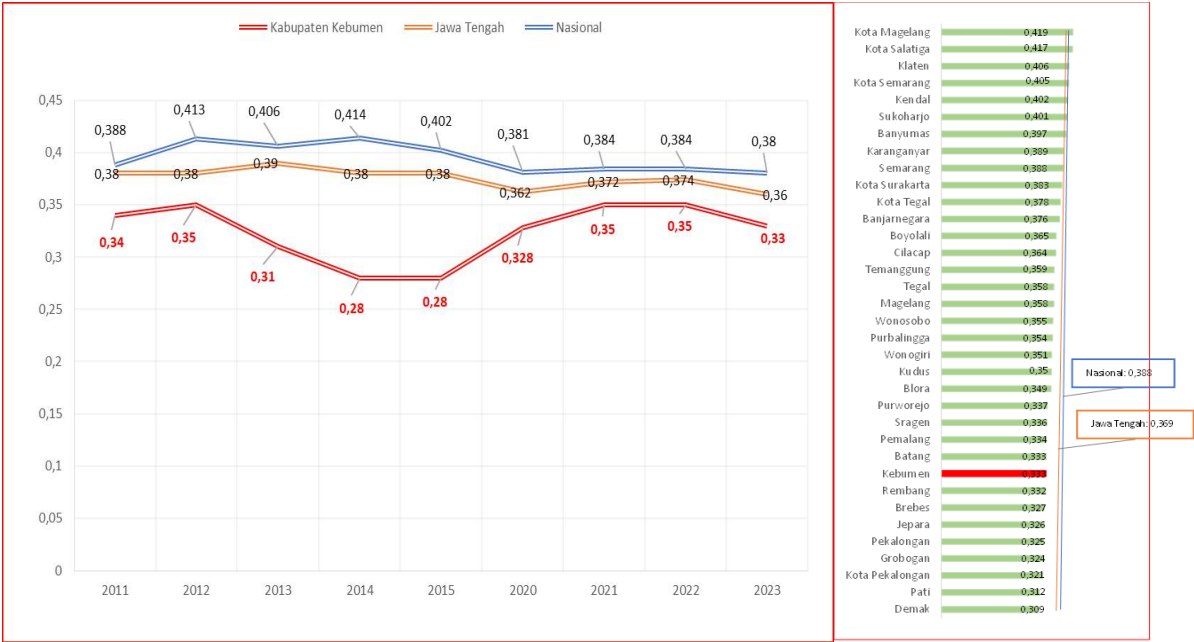
Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Gambar 2.47

Grafik Kematian Ibu dan Bayi, 2013-2023

Akses layanan kesehatan di Kabupaten Kebumen terus ditingkatkan. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional meningkat semula 60 persen (2016) menjadi 96,76 persen (2023). Pelayanan dan sarana prasarana kesehatan, jumlah rumah sakit di Kabupaten Kebumen sebanyak 11 dan telah terakreditasi. Upaya pemenuhan pelayanan dasar sesuai SPM Bidang Kesehatan terdiri dari 12 jenis layanan yang harus dipenuhi oleh kabupaten/kota. Pada indikator layanan kesehatan pada usia produktif hanya tercapai 89,09 dikarenakan pelaksanaan posbindu belum optimal dan masyarakat yang sehat enggan datang pada kegiatan *screening* kesehatan usia produktif.

Distribusi pendapatan merupakan aspek penting dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia untuk meningkatkan pengeluaran riil per kapita. Indeks Gini Kabupaten Kebumen didasarkan data SUSENAS mengenai pengeluaran rumah tangga di Kabupaten Kebumen. Capaian Indeks Gini tahun 2011 sebesar 0,34 menjadi 0,33 tahun 2023. Indeks Gini tahun 2015 sebesar 0,28 menurun tajam dibandingkan dengan empat tahun terakhir. Namun, Indeks Gini Kabumen tiga tahun terakhir sempat meningkat menjadi 0,33 pada tahun 2020 dan 0,35 pada tahun 2021 dan 2022 (termasuk ketimpangan sedang) walaupun kemudian menurun Kembali di Tahun 2023 menjadi 0,33. Posisi Indeks Gini Kabumen pada Tahun 2023 berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah (0,36) dan Nasional (0,38).

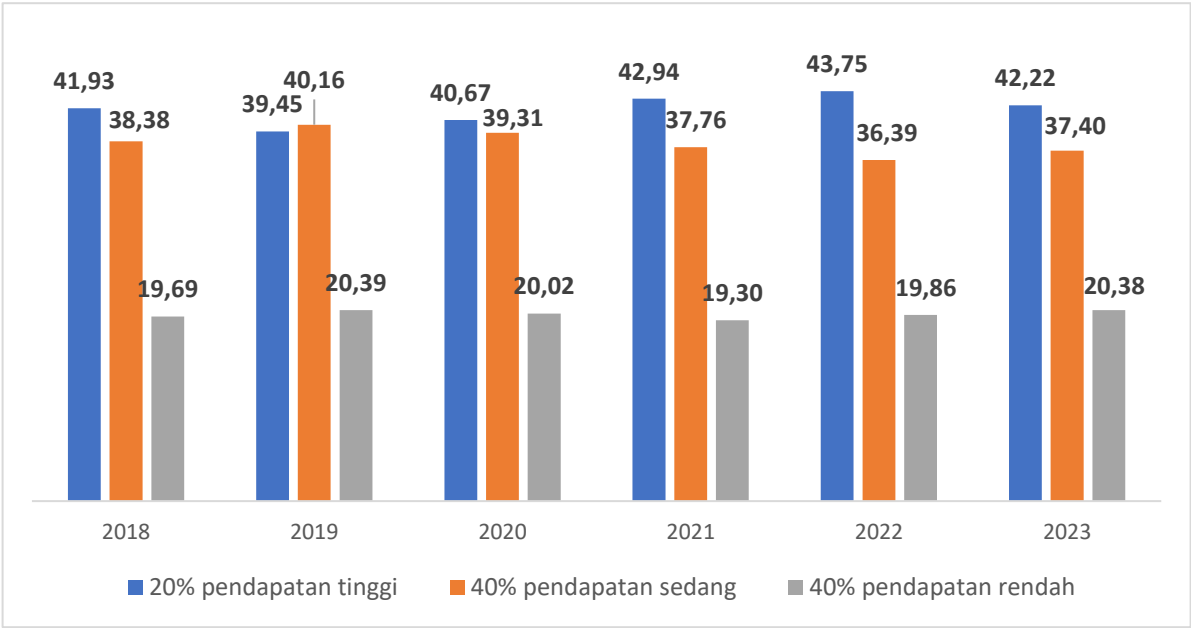


Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Gambar 2.48
Grafik Indeks Gini Kabupaten Kebumen, 2011-2023

Pola distribusi pendapatan masyarakat yang didasarkan pada hasil perhitungan indeks gini hanya bisa menggambarkan tingkat pemerataan pendapatan secara umum, tetapi belum menjelaskan besarnya porsi yang diterima oleh kelompok berpendapatan rendah/miskin dari keseluruhan pendapatan wilayah. Bank Dunia mengelompokkan penduduk ke dalam tiga kelompok sesuai dengan besarnya pendapatan yaitu 40 persen penduduk dengan pendapatan rendah, 40 persen penduduk dengan pendapatan menengah, dan 20 persen penduduk dengan pendapatan tinggi. Ketimpangan pendapatan diukur dengan persentase jumlah pendapatan dari kelompok yang berpendapatan 40 persen terendah dibandingkan total pendapatan seluruh penduduk. Bila persentase pendapatan yang diterima oleh kelompok 40% penduduk berpendapatan rendah lebih kecil dari 12%, maka dikatakan terdapat ketimpangan pendapatan tinggi. Bila persentase pendapatan yang diterima oleh kelompok 40% penduduk berpendapatan rendah antara 12% sampai dengan 17%, maka dikatakan terdapat ketimpangan pendapatan moderat/sedang/menengah. Bila persentase pendapatan yang diterima oleh kelompok 40% penduduk berpendapatan rendah lebih besar dari 17%, maka dikatakan terdapat ketimpangan pendapatan rendah.

Distribusi pendapatan Kabupaten Kebumen dilihat dari kelompok 40 persen penduduk dengan pendapatan rendah meningkat semula 19,69 persen (2018) menjadi 20,38 persen (2023). Posisi relatif ketimpangan pendapatan dari kelompok 40 persen penduduk pendapatan rendah Kabupaten Kebumen lebih baik dari Provinsi Jawa Tengah (18,74 persen), serta dari Kabupaten Banjarnegara (18,48 persen), Banyumas (17,32 persen), Cilacap (19,27 persen) dan Kabupaten Purbalingga (20,18 persen). Berdasarkan kriteria ketimpangan pendapatan menurut Bank Dunia, ketimpangan pendapatan dari kelompok 40 persen penduduk dengan pendapatan rendah Kabupaten Kebumen tergolong ketimpangan pendapatan rendah.

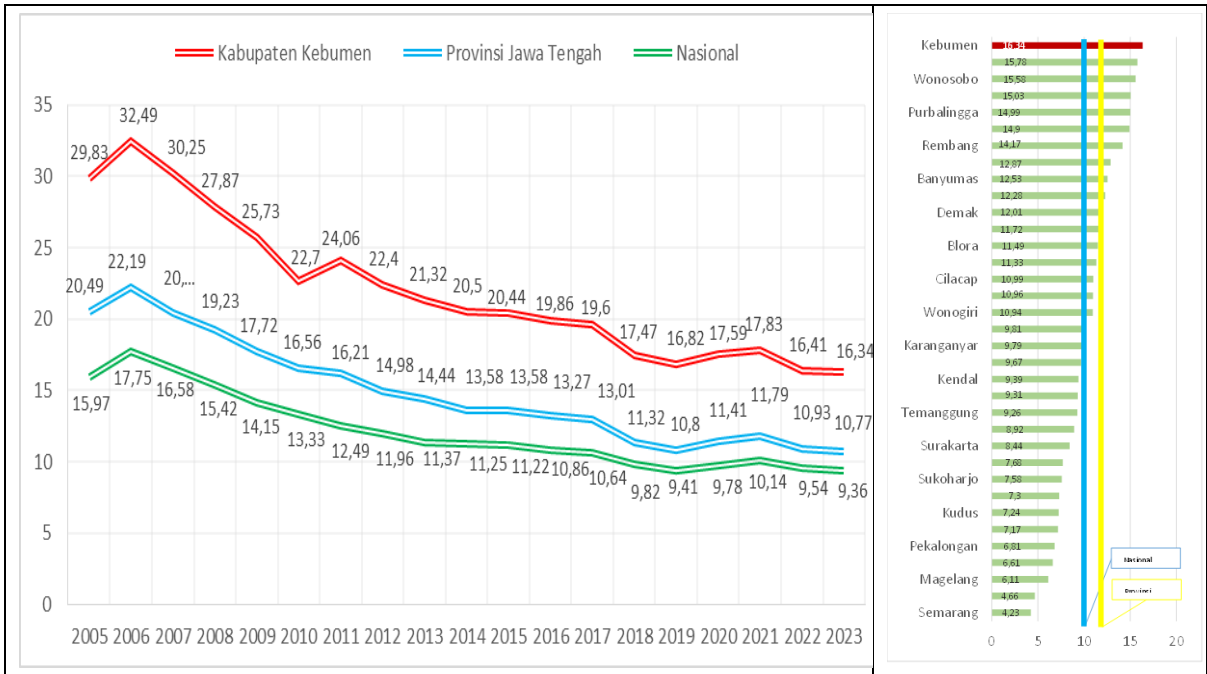


Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Gambar 2.49
Grafik Distribusi Pendapatan, 2018-2023

Program pengentasan kemiskinan Kabupaten Kebumen selama tahun 2005 hingga tahun 2023 terlihat relatif berhasil. Hal ini terlihat dari perkembangan tingkat kemiskinan selama 2005-2023 yang mengalami penurunan. Persentase penduduk miskin semula 29,83 persen (2005) menjadi 16,34 persen (2023). Akan tetapi, secara tidak langsung pandemi COVID-19 mempengaruhi peningkatan persentase penduduk miskin pada 2020 dan 2021 menjadi 17,59 persen dan 17,83 persen. Penduduk miskin dan rentan miskin yang bekerja di sektor informal merupakan penduduk yang paling terdampak dari mewabahnya pandemi COVID-19. Pembatasan kegiatan sosial dan ekonomi turut berdampak pada penurunan pendapatan masyarakat. Penurunan pendapatan ini menyebabkan kemiskinan semakin bertambah karena semakin banyak penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Upaya pemulihan ekonomi baik di tingkat nasional maupun daerah mulai membuahkan hasil dengan adanya aktivitas sosial-ekonomi yang kembali normal. Namun, posisi relatif persentase penduduk miskin Kabupaten Kebumen di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah (10,77 persen) dan Nasional (9,36 persen), serta menempati posisi tertinggi dibandingkan kabupaten/kota se-Jawa Tengah.

Kemiskinan ekstrem adalah kondisi di mana seseorang atau kelompok hidup dengan pendapatan yang sangat rendah, sehingga mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup layak, seperti makanan, air bersih, tempat tinggal, pendidikan, dan layanan kesehatan. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan tingkat kemiskinan yang sangat parah, di mana individu atau keluarga harus berjuang keras hanya untuk bertahan hidup. Kondisi kemiskinan ekstrem di Kabupaten Kebumen turun dari 4,42% (2021) menjadi 2,49% (2023). Kemiskinan ekstrem diharapkan akan dapat dihapuskan pada tahun 2030 sesuai dengan target SDGs.

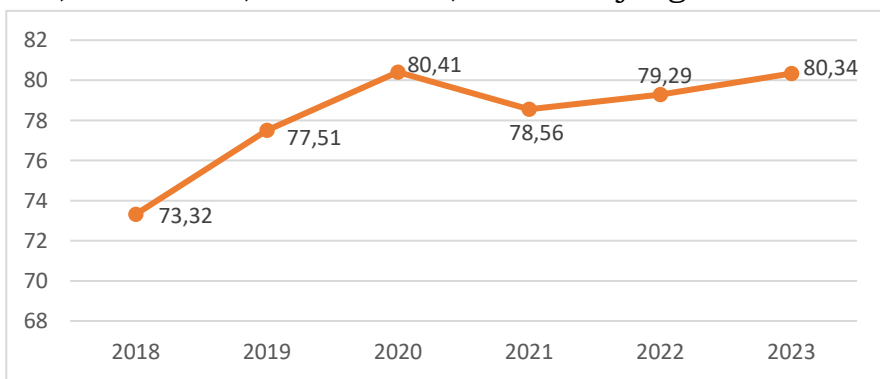


Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Gambar 2.50
Grafik Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kebumen, 2005-2023

Perlindungan sosial bagi tenaga kerja perlu ditingkatkan. Upaya perlindungan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja juga perlu terus ditingkatkan. Pada Tahun 2023 baru terdapat 169.341 peserta BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Kebumen atau sebesar 38,32% dari jumlah semesta penduduk bekerja sebesar 441.947 orang yaitu pekerja yang memiliki KTP Kebumen yang bekerja di seluruh Indonesia dan aktif menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Ke depan, kepesertaan tenaga kerja pada BPJS Ketenagakerjaan diharapkan dapat terus meningkat sebagai perlindungan sosial yang adaptif sehingga tidak menimbulkan masalah kesejahteraan sosial yang baru.

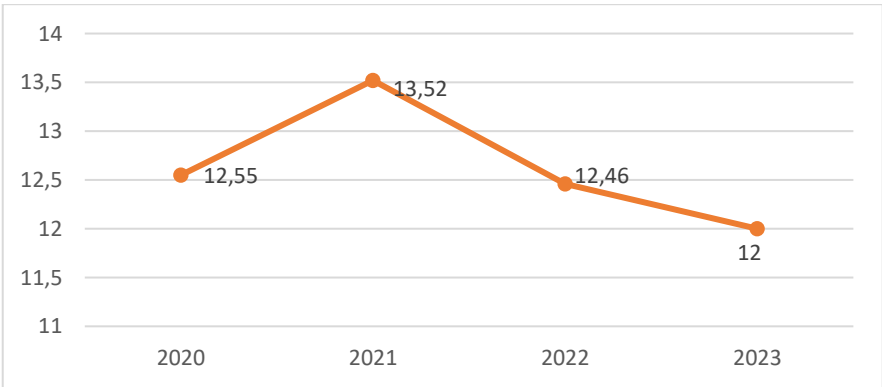
Ketahanan pangan di Kabupaten Kebumen secara umum baik. Indeks ketahanan pangan meningkat dari semula 73,32 persen (2018) menjadi 80,34 persen (2023). Hal ini menunjukkan terpenuhinya kebutuhan pangan bagi masyarakat yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik dari jumlah, mutu, keamanan, pemerataan, dan keterjangkauan.



Sumber: OPD Urusan Pangan, IKP diterbitkan oleh Kementerian Pertanian mulai tahun 2018, diolah

Gambar 2.51
Grafik Indeks Ketahanan Pangan, 2018-2023

Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan membaik semula 12,55 persen (2020) menjadi 12,00 persen (2023), Dengan semakin kecilnya prevalensi ketidakkecukupan pangan menunjukkan adanya peningkatan mutu konsumsi makanan masyarakat Kebumen yaitu semakin memenuhi tingkat energi yang dibutuhkan tubuh atau ideal secara kandungan nutrisi dan akan berpengaruh pada penanggulangan *stunting*.

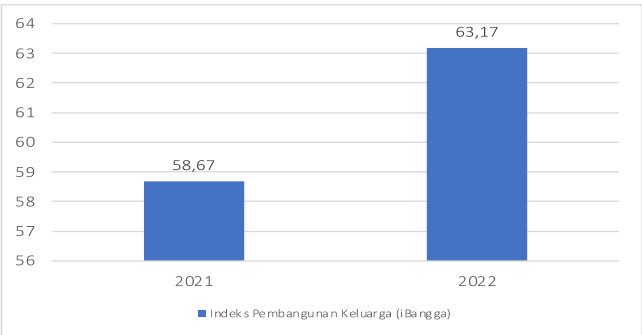


Sumber: OPD Urusan Pangan, PoU diterbitkan oleh BPS mulai tahun 2020, diolah

Gambar 2.52
Grafik Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan
(Prevalence of Undernourishment) Tahun 2020-2023 (%)

2.2.2 Kesejahteraan Sosial Budaya

Peningkatan Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif. Peningkatan kualitas keluarga, Pengarusutamaan Gender (PUG) dan inklusi sosial dalam pembangunan di Kabupaten Kebumen terus ditingkatkan untuk memastikan tidak ada satu orang pun yang tertinggal dalam pembangunan (*no one left behind*). Pada Tahun 2023 Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) mencapai 63,17 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 58,67 yang menunjukkan kualitas keluarga di Kabupaten Kebumen telah masuk kategori cukup baik atau berkembang (masuk di *range* 40-70). Sementara itu pada tahun 2023, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) sebesar 0,344 membaik jika dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 0,359.

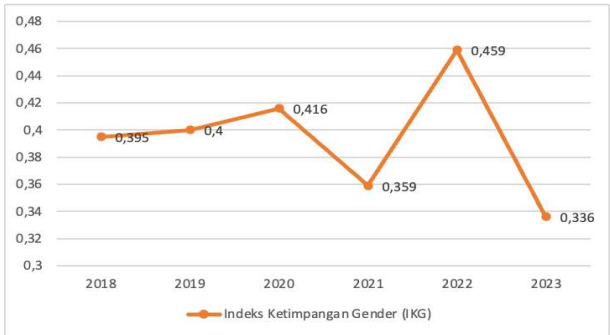


Keterangan:

*) Pengukuran Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) merujuk pada Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengukuran Keberhasilan Pembangunan Keluarga Melalui Indeks Pembangunan Keluarga, data yang dihasilkan yang tersedia sejak tahun 2021

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Gambar 2.53
Grafik Indeks Pembangunan Keluarga
(iBangga), 2016-2023



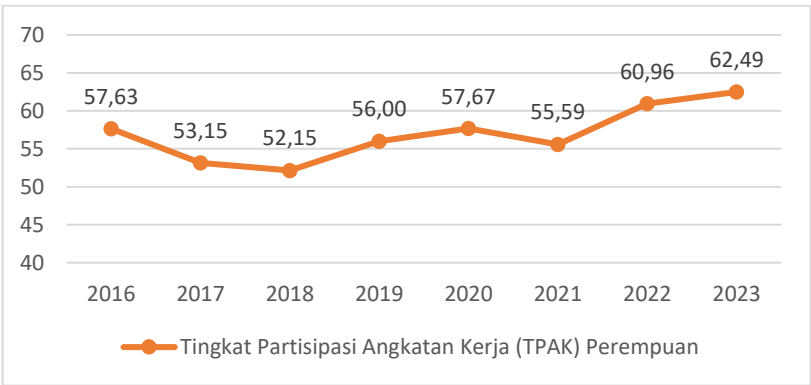
Keterangan:

*) Pengukuran Indeks Ketimpangan Gender (IKG) oleh Badan Pusat Statistik merupakan tindak lanjut kajian yang merujuk pada metodologi dari UNDP, data yang dihasilkan yang tersedia sejak tahun 2018

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Gambar 2.54
Grafik Indeks Ketimpangan Gender,
2013-2023

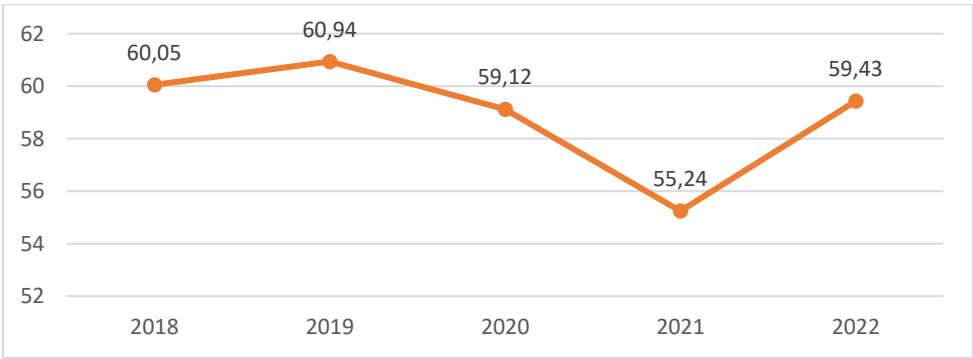
Kesempatan Kerja perempuan di Kabupaten Kebumen perlu terus dioptimalkan. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan cenderung mengalami peningkatan, dari semula 57,63 persen (2016) menjadi 62,49 persen (2023). Hal ini menunjukkan perempuan di Kabupaten Kebumen semakin mudah mendapatkan pekerjaan, termasuk terdapat tenaga kerja perempuan penyandang disabilitas yang ditempatkan sebagai operator produksi, operator giling, operator paking, operator pelipat, operator push cutter, juru masak, housekeeper, dan clerk administrator sebanyak 25 orang. Walaupun demikian, TPAK perempuan masih lebih rendah dibandingkan TPAK laki-laki sebesar 86,37 persen pada tahun 2023.



Sumber: OPD Urusan Tenaga Kerja, Badan Pusat Statistik, diolah

Gambar 2.55
Grafik Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
Perempuan, 2016-2023

Pembangunan kebudayaan memiliki peran penting dalam pembangunan pendidikan di Kabupaten Kebumen. Pemajuan kebudayaan diharapkan akan meningkatkan kualitas pendidikan karakter. Pembangunan kebudayaan terus ditingkatkan dan diimplementasikan ke dalam norma dan praktik kehidupan, karakter, dan jati diri masyarakat Kabupaten Kebumen dalam menghadapi peningkatan ancaman negatif budaya global. Kearifan lokal dan nilai budaya dioptimalkan sebagai modal dasar pembangunan masyarakat di Kabupaten Kebumen. Hal ini tercermin Indeks Pembangunan Kebudayaan Kabupaten Kebumen (data Provinsi Jawa Tengah) cenderung menurun dari 60,05 (2018) menjadi sebesar 59,43 (2022). Sebagai upaya melestarikan budaya, pada tahun 2023 tercatat sebanyak 4,01 persen cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang telah dilestarikan di Kabupaten Kebumen. Dukungan Masyarakat dalam mengapresiasi warisan budaya dan Sejarah di Kabupaten Kebumen ditunjukkan dengan jumlah kunjungan ke tempat sejarah sebesar 50.402 orang pada Tahun 2023. Selain itu Upaya pemanfaatan kesenian juga terus dilakukan dengan berbagai even yang telah diselenggarakan di Kabupaten Kebumen. Pada Tahun 2023 menunjukkan sebesar 18,33 persen kelompok kesenian aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian. Pengembangan kebudayaan juga terus dilakukan di Lembaga Pendidikan dengan terdapat 63,57 persen satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan.



Keterangan:

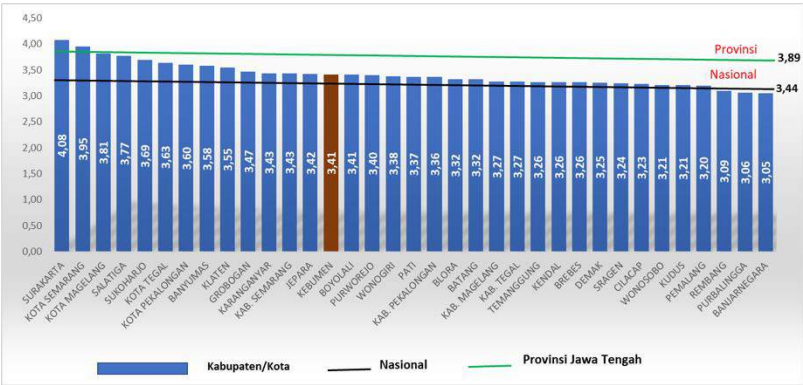
*) Pengukuran Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) merujuk pada UU No 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan data bersumber dari BPS dan Kementerian/Lembaga lainnya yang merujuk pada framework Culture Development Indicators (CDIs) yang dikembangkan oleh UNESCO, data yang dihasilkan yang tersedia sejak tahun 2018, serta data terakhir dirilis data tahun 2022. Data IPK yang tersedia hanya di tingkat Provinsi.

Sumber: OPD Urusan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, diolah

Gambar 2.56
Grafik Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK),
2018-2022

2.3. Aspek Daya Saing

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Kebumen termasuk dalam kategori tinggi. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/ kota yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Tujuan dari pengukuran IDSD ini adalah untuk memperoleh sebuah ukuran daya saing daerah yang komprehensif yang dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah. IDSD 2023 menggunakan konsep dan metode pengukuran yang baru, yaitu dengan mengadopsi kerangka pengukuran *Global Competitiveness Index* (GCI) 2019 dari World Economic Forum, yang disesuaikan dengan konteks daerah di Indonesia. Pencapaian skor Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Kebumen telah mencapai 3,41 (2023) termasuk dalam kategori tinggi. Hal ini menunjukkan adanya upaya peningkatan efisiensi dalam menciptakan produk yang berkualitas. Namun, Kabupaten Kebumen masih memiliki skor IDSD di bawah skor Provinsi Jawa Tengah (3,89) dan Nasional (3,44), serta masih lebih rendah dibandingkan wilayah sekitar yaitu Kabupaten Banyumas (3,58). Akan tetapi, skor IDSD Kabupaten Kebumen lebih tinggi dibandingkan Cilacap (3,23) Kabupaten Banjarnegara (3,05) dan Purbalingga (3,06). Kerangka pengukuran IDSD 2023 terdiri dari 4 aspek yang dielaborasi ke dalam 12 pilar daya saing. Pencapaian IDSD Kabupaten Kebumen tidak terlepas dari pencapaian 4 aspek, yaitu aspek ekosistem inovasi, aspek penguat, aspek sdm, dan aspek pasar. IDSD Kabupaten Kebumen unggul pada pilar adopsi TIK (4,72), pilar institusi (4,64), dan pilar pasar produk (4,44). Namun, perlu peningkatan pada pilar stabilitas ekonomi makro (3,02), pilar ketrampilan (3,34), pilar pasar tenaga Kerja (2,71), pilar sistem keuangan (2,28), pilar dinamisme bisnis (3,10) dan pilar kapabilitas inovasi (2,30).



Sumber: BRIN, diolah

Gambar 2.57
Grafik Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)
Kabupaten Kebumen, 2023

Berdasarkan 12 pilar daya saing, Kabupaten Kebumen telah memiliki skor lebih tinggi dari skor Provinsi Jawa Tengah pada 3 pilar yaitu institusi, pasar produk, dan adopsi TIK. Akan tetapi, Kabupaten Kebumen perlu upaya keras untuk meningkatkan skor pada 9 pilar lainnya yaitu infrastruktur, stabilitas ekonomi makro, kesehatan, keterampilan, pasar tenaga kerja, sistem keuangan, ukuran pasar, dinamisme bisnis dan kapabilitas inovasi yang memiliki skor lebih rendah dibandingkan Provinsi Jawa Tengah. Dalam subbab berikut akan dijelaskan aspek daya saing daerah berdasarkan komponen indeks daya saing daerah dan terbagi sesuai urutan sistematika pembahasan yaitu daya saing ekonomi daerah, sumber daya manusia, fasilitas/infrastruktur wilayah dan iklim investasi.



Sumber: BRIN, diolah

Gambar 2.58
Grafik Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Kebumen
Menurut Pilar IDSD, 2023

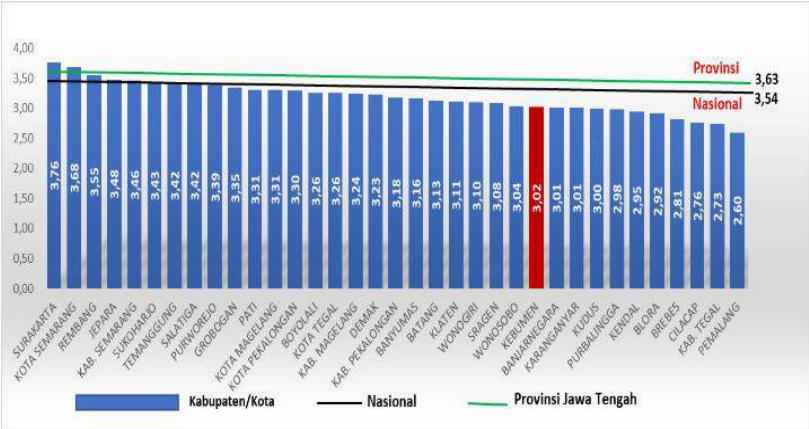
2.3.1. Daya Saing Ekonomi Daerah

Daya saing ekonomi daerah Kabupaten Kebumen harus ditingkatkan. Pilar IDSD yang menggambarkan daya saing ekonomi daerah, meliputi empat pilar, yaitu stabilitas ekonomi makro, pasar produk, sistem keuangan dan ukuran pasar. Pilar stabilitas ekonomi makro yang meliputi penciptaan nilai tambah, akumulasi kapital, tingkat konsumsi, kinerja sektoral, perekonomian, dan tingkat biaya hidup. Pilar pasar produk mendorong efisiensi di dalam sistem produksi. Pilar sistem keuangan merefleksikan kemampuan sistem finansial perbankan dan nonperbankan di daerah untuk memediasi aktivitas perekonomian, dan pilar ukuran pasar yang menguatkan struktur industri dalam menghasilkan nilai tambah akibat berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi.

Skor Pilar Stabilitas Ekonomi Makro IDSD Kabupaten Kebumen sebesar 3,02 (2023) lebih rendah dari skor Provinsi Jawa Tengah (3,63) dan skor Nasional (3,54). Pilar stabilitas ekonomi makro meliputi kapasitas fiskal daerah, pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, indeks ketahanan pangan dan nilai ICOR (investasi).

Pertama, Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Kebumen pada tahun 2023 sesuai dengan PMK Nomor: 84 Tahun 2023 adalah 0,998 termasuk dalam kategori rendah sedangkan rasio pajak daerah terhadap PDRB pada tahun 2023 sebesar 0,38 persen. Kedua, Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kebumen Tahun 2023 sebesar 5,66 persen. Pertumbuhan ekonomi akan lebih optimal jika terus meningkatnya kewirausahaan diantaranya pada Koperasi dan UMKM. persentase koperasi aktif berfluktuatif dari 84 unit pada Tahun 2019 menjadi 90 unit di Tahun 2023 dengan total omset meningkat signifikan dari Rp.461.458.055,- pada Tahun 2019 menjadi Rp.180.283.160.378,- pada Tahun 2023. Namun demikian angka ini masih sangat kecil jika diproporsikan terhadap total PDRB yaitu hanya sekitar 0,5 persen. Sementara itu, jumlah UMKM juga terus meningkat dari 45.715 unit pada Tahun 2019 menjadi 46.095 unit pada Tahun 2023 dengan UMKM yang naik kelas dari 31 unit pada Tahun 2019 menjadi 1.047 unit di Tahun 2023. Ketiga, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Kebumen sepuluh tahun terakhir cenderung meningkat semula 4,73 persen (2011) menjadi 5,11 persen (2023). Namun, TPT tahun 2023 menurun dibandingkan TPT tahun 2022 sebesar 5,92 persen. Keempat, Stabilitas harga dan peningkatan daya beli masyarakat dapat ditunjukkan dengan laju indeks implisit PDRB yang mencapai 4,28 persen 3,78 persen pada tahun 2023. Kelima, Nilai ICOR Kabupaten Kebumen belum tersedia oleh karena diproksi dengan kinerja

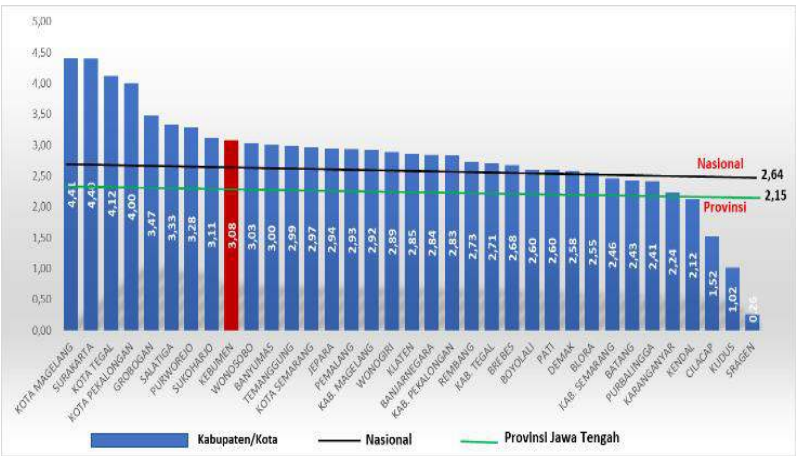
PMTB yang secara nominal pada Tahun 2023 sebesar Rp.6.729.204,56 juta atau tumbuh 3,30 persen dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp.6.022.328,52 juta. Walaupun tumbuh secara nominal, akan tetapi kontribusi PMTB terhadap PDRB pada tahun 2023 menurun yaitu sebesar 18,82 persen dibandingkan tahun 2021 sebesar 20,37 persen. Selain itu, upaya peningkatan akses permodalan di Lembaga keuangan oleh dunia usaha di Kabupaten Kebumen juga harus dilakukan. Pada Tahun 2023 menunjukkan proporsi kredit terhadap PDRB di Kabupaten Kebumen mencapai 17,99 persen. Namun sebelumnya juga perlu upaya peningkatan simpanan dana pihak ketiga atau Tabungan Masyarakat Kebumen di Lembaga perbankan dan keuangan. Pada tahun 2023 proporsi total dana pihak ketiga terhadap PDRB mencapai sebesar 17,29 persen.



Sumber: BRIN, diolah

Gambar 2.59
Grafik Skor Pilar Stabilitas Ekonomi Makro, 2023

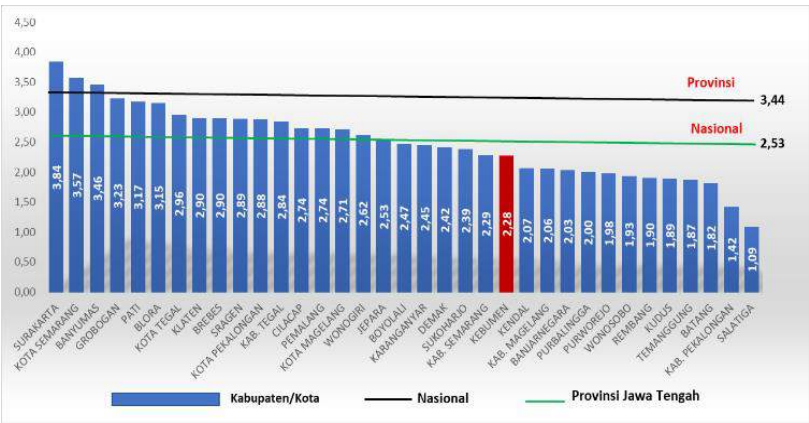
Skor pilar pasar produk (Gambar 2.62) sebesar 3,08 (2023) lebih tinggi dari skor Provinsi Jawa Tengah (2,15) dan Nasional (2,64). Pencapaian skor pasar produk menunjukkan kemampuan usaha kecil dan menengah bersaing di antara kelompok usaha sedang dan besar. Kondisi tersebut disebabkan peningkatan nilai tambah sektor pertanian tidak optimal akibat menurunnya kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB ADHB pada sektor tersier Kabupaten Kebumen Tahun 2023 sebesar 16.239.397,29 juta. Selain itu, data net ekspor barang dan jasa secara riil masih menunjukkan defisit walaupun terus mengalami perbaikan dari minus 20,06 pada tahun 2011 menjadi minus 4,56 pada tahun 2023 yang menunjukkan bahwa jumlah barang dan jasa yang masuk ke wilayah Kebumen (impor) lebih dominan dibandingkan jumlah barang dan jasa dari Kebumen yang dijual keluar wilayah (ekspor).



Sumber: BRIN, diolah

Gambar 2.60
Grafik Skor Pilar Pasar Produk, 2023

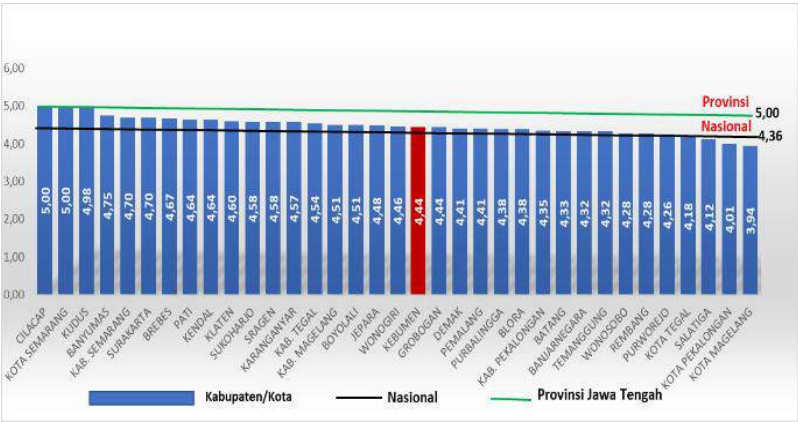
Skor pilar sistem keuangan IDSD Kabupaten Kebumen (Gambar 2.63) pada tahun 2023 sebesar 2,28 lebih rendah dari skor Provinsi Jawa Tengah (3,44) dan Nasional (2,53). Sistem keuangan merefleksikan kemampuan sistem finansial perbankan dan nonperbankan di daerah untuk memediasi aktivitas perekonomian dilihat dari persentase kredit swasta terhadap PDRB harga berlaku dan nilai akad Kredit Usaha Rakyat. Pencapaian proporsi kredit UMKM terhadap total kredit berdasarkan statistik ekonomi Bank Indonesia posisi kredit UMKM yang diberikan bank umum di Kabupaten Kebumen sebesar Rp 4.281.513 juta (2023) terdiri skala usaha Mikro Rp 2.534.141 juta, skala usaha kecil sebesar Rp 1.442.594 juta, dan skala usaha menengah sebesar Rp 304.779 juta.



Sumber: BRIN, diolah

Gambar 2.61
Grafik Skor Pilar Sistem Keuangan, 2023

Skor pilar ukuran pasar IDSD Kabupaten Kebumen (Gambar 2.64) tahun 2023 sebesar 4,44 lebih rendah dari skor Provinsi Jawa Tengah (5,00) akan tetapi lebih tinggi dari skor Nasional (4,36). Pilar ukuran pasar menguatkan struktur industri dalam menghasilkan nilai tambah akibat berkembangnya ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi. Hal ini ditunjukkan oleh pencapaian PDRB ADHK 2010 13.068.985,50 juta pada tahun 2011 menjadi 22.63. 895,33 juta pada Tahun 2023.



Sumber: BRIN, diolah

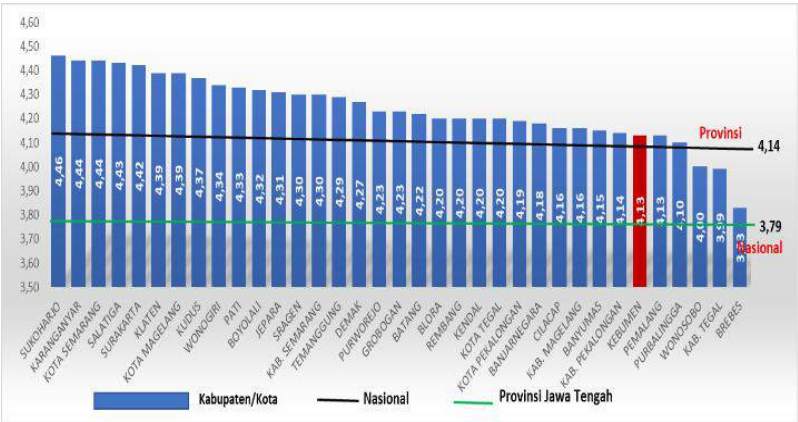
Gambar 2.62
Grafik Skor Pilar Ukuran Pasar, 2023

2.3.2. Daya Saing Sumber Daya Manusia

Daya saing sumber daya manusia Kabupaten Kebumen harus ditingkatkan. Pilar IDSD yang menggambarkan daya saing sumber daya manusia, meliputi tiga pilar, yaitu kesehatan, keterampilan, dan pasar tenaga kerja. Pilar kesehatan merepresentasikan kualitas hidup manusia yang diukur dari angka harapan hidup dan pilar keterampilan yang erat keterkaitannya dengan penciptaan tenaga kerja produktif sesuai dengan

kebutuhan dunia usaha. Pilar pasar tenaga kerja mampu menekan pengangguran dengan merangsang terciptanya kesempatan kerja.

Skor pilar Kesehatan IDSD Kabupaten Kebumen tahun 2023 (Gambar 2.65) sebesar 4,13 lebih rendah dibandingkan skor Provinsi Jawa Tengah (4,14), tetapi lebih tinggi dibandingkan skor Nasional (3,79). Pilar kesehatan menggambarkan tahun hidup masyarakat melalui angka harapan hidup yang menunjukkan peningkatan dari semula 72,36 pada tahun 2011 menjadi 74,98 pada tahun 2023. Namun, pencapaian status kesehatan masyarakat Kabupaten Kebumen belum optimal karena Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI) masih tinggi sebesar 92,26 per 100.000 KH (2023), Angka Kematian Bayi (AKB) tinggi sebesar 10,82 per 1.000 KH (2023), Angka Kesakitan masih sebesar 9,88 persen (2023), dan Prevalensi *Stunting* masih menunjukkan angka sebesar 9,87 persen (2023).



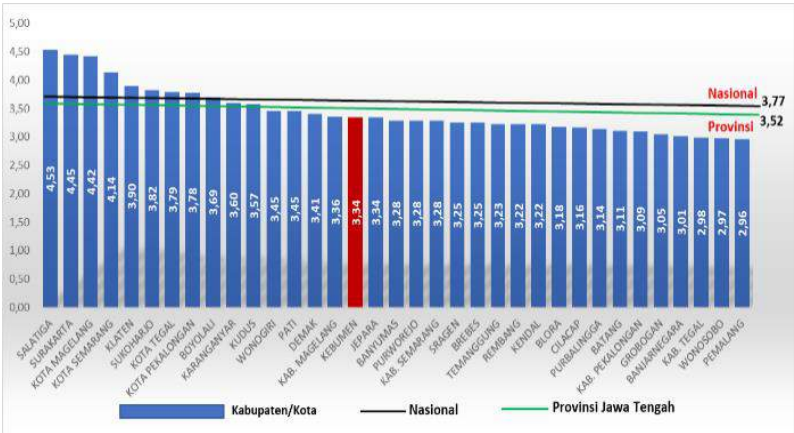
Sumber: BRIN, diolah

Gambar 2.63
Grafik Skor Pilar Kesehatan, 2023

Skor pilar Keterampilan IDSD Kabupaten Kebumen tahun 2023 (Gambar 2.66) sebesar 3,34 lebih rendah dari skor Provinsi Jawa Tengah (3,52) dan Nasional (3,77). Peningkatan pendidikan dan keterampilan tenaga kerja dalam mendukung keunggulan kompetitif saat ini maupun masa depan. Kondisi tenaga kerja saat ini dilihat dari rata-rata lama sekolah tercermin dalam RLS Kabupaten Kebumen tahun 2023 sebesar 7,86 tahun. Angka tersebut merepresentasikan bahwa penduduk Kabupaten Kebumen pada tahun 2023 rata-rata menjalani pendidikan formal setara 7,86 tahun atau hampir menamatkan Kelas VIII (SMP). Nilai tersebut masih lebih rendah dari nilai RLS Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 8,01 dan Nasional yang mencapai sebesar 8,77. ketrampilan lulusan tercermin dalam pencapaian Persentase Penduduk Bekerja di Kabupaten Kebumen sebesar 94,89 persen (2023) dan Persentase tenaga kerja ditempatkan sebesar 53,54 persen (2023). Kondisi ini tercermin juga pada Persentase Penduduk Bekerja menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) sebesar 46,03 persen, Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebesar 20,67 persen, Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar 26,09 persen, dan Perguruan Tinggi (PT) sebesar 7,2 persen.

Sedangkan untuk kondisi tenaga kerja masa depan dapat dilihat dari angka harapan sekolah Kabupaten Kebumen pada tahun 2023 adalah sebesar 13,37 tahun, lebih tinggi dari HLS di Jawa Tengah maupun Nasional. Angka tersebut mengindikasikan lamanya pendidikan yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak di Kabupaten Kebumen adalah 13,37 tahun (Diploma 2). Kedua, berpikir kritis dalam mengajar yang saat ini datanya belum tersedia. Ketiga, rasio murid-guru pendidikan dasar. Rasio Guru-Murid pada jenjang SD/MI Tahun 2023 menurun dibanding tahun sebelumnya yaitu menjadi 1:16,75. Rasio ideal guru per murid adalah satu guru untuk 20 siswa. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rasio guru

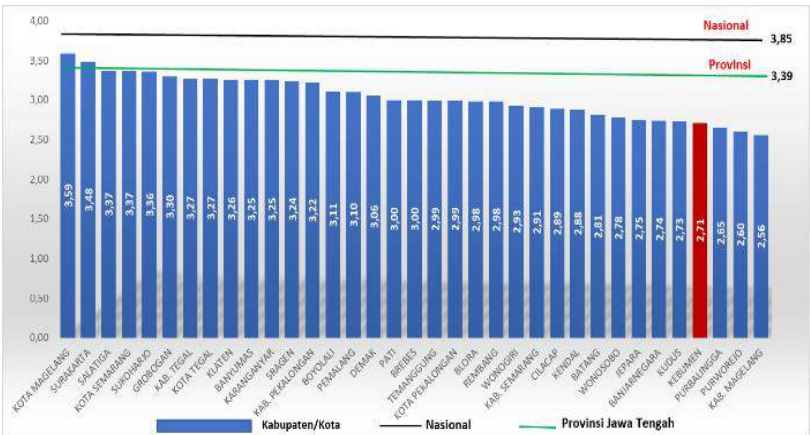
dibandingkan dengan murid di Kabupaten Kebumen untuk tiap jenjang pendidikan dasar ada pada rasio ideal yaitu rata-rata satu guru untuk 16-17 siswa.



Sumber: BRIN, diolah

Gambar 2.64
Grafik Skor Pilar Keterampilan, 2023

Skor pilar pasar tenaga kerja IDSD Kabupaten Kebumen (Gambar 2.67) sebesar 2,71 (2023) lebih rendah dari Skor Provinsi Jawa Tengah (3,39) dan Nasional (3,85). Pencapaian skor pilar pasar tenaga kerja menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen dalam menekan pengangguran dengan merangsang terciptanya kesempatan kerja dilihat dari kebijakan pasar tenaga kerja aktif, upah pekerja dan kesetaraan upah perempuan dan laki-laki. Upah pekerja mengalami perbaikan selama kurun waktu sepuluh tahun terakhir. UMK Kabupaten Kebumen Tahun 2011 sebesar Rp. 727.500, menjadi Rp. 2.035.890 pada Tahun 2023.



Sumber: BRIN, diolah

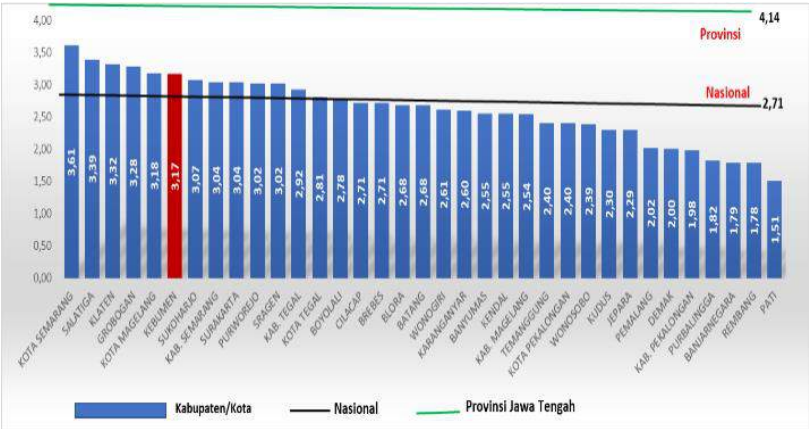
Gambar 2.65
Grafik Skor Pilar Pasar Tenaga Kerja, 2023

2.3.3. Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah

Daya saing fasilitas/infrastruktur wilayah Kabupaten Kebumen harus ditingkatkan. Pilar IDSD yang menggambarkan daya saing fasilitas/infrastruktur wilayah, meliputi dua pilar, yaitu infrastruktur dan adopsi TIK. Pilar infrastruktur yang dapat mendukung aktivitas perekonomian sedangkan pilar adopsi TIK yang merupakan faktor determinan bagi kemajuan Industri 4.0.

Skor Pilar Infrastruktur IDSD Kabupaten Kebumen (Gambar 2.68) sebesar 3,17 (2023) lebih rendah dari skor Provinsi Jawa Tengah (4,14) dan skor Nasional (2,71). Pilar infrastruktur mengukur keberadaan dan kualitas sarana dan prasarana pendukung aktivitas ekonomi di suatu daerah yang dielaborasi ke dalam 6 dimensi. Pertama, dimensi infrastruktur transportasi (jalan darat), dapat diproksi dengan pencapaian tingkat kemantapan jalan

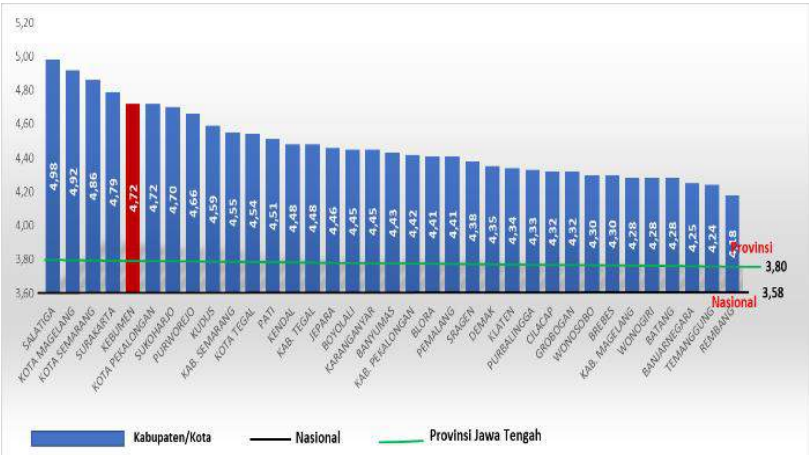
kabupaten/kota (persentase jalan kondisi mantap) sebesar 73,96 persen (2023) serta *v/c ratio* sebesar 0,35 (2023) yang menunjukkan volume lalu lintas masih berada di bawah kapasitas jalan, yang berarti aliran lalu lintas relatif lancar dan tidak terjadi kemacetan signifikan. Sementara itu kondisi moda transportasi umum hingga tahun 2023 terdapat 1 terminal tipe A, 3 terminal tipe C, 887 unit angkutan umum untuk 35 trayek. Selain itu di wilayah Kabupaten Purworejo juga terdapat 1 terminal tipe A Purworejo dan 1 terminal tipe B Kutoarjo yang telah terlayani Trans Jateng. Kedua, dimensi infrastruktur transportasi (jalur kereta api) yang diproksi dari layanan infrastruktur stasiun kereta api. Jumlah stasiun kereta api di Kabupaten Kebumen sebanyak 4 stasiun pemberhentian penumpang terdiri dari Stasiun Gombang, Stasiun Karanganyar, Stasiun Kebumen, dan Stasiun Kutowinangun. Sementara itu terdapat rencana perpanjangan trayek Kereta Api Prambanan Ekspres sampai dengan Stasiun Kebumen, yang akan semakin mengintegrasikan wilayah Kebumen dengan Kutoarjo-Purworejo bahkan Yogyakarta hingga Surakarta. Jumlah perlintasan kereta api di Kabupaten Kebumen sampai dengan tahun 2023 sebanyak 36 perlintasan kereta api. Perlintasan kereta api yang dijaga oleh PT. KAI sebanyak 18 perlintasan dimana 14 perlintasan kereta api dijaga oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen dan 3 perlintasan kereta api dijaga oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen bersama masyarakat, dan 1 Perlintasan Kereta api dijaga oleh desa. Ketiga, dimensi infrastruktur transportasi (udara). Kabupaten Kebumen mendapatkan akses layanan infrastruktur transportasi udara dari Yogyakarta International Airport. Keempat, dimensi infrastruktur transportasi (pelabuhan) dilihat dari akses layanan pelabuhan dari Pelabuhan Laut Tanjung Intan di Cilacap Kelima dimensi infrastruktur utilitas kelistrikan melalui pencapaian rasio elektrifikasi sebesar 99,67 (2021). Keenam, dimensi utilitas air minum ditunjukkan dengan persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum perpipaan di Kabupaten Kebumen masih sebesar 7 persen (2023).



Sumber: BRIN, diolah

Gambar 2.66
Grafik Skor Pilar Infrastruktur, 2023

Skor Pilar Adopsi TIK IDSD Kabupaten Kebumen (Gambar 2.69) sebesar 4,72 (2023) lebih tinggi dari skor Provinsi Jawa Tengah (3,80) dan skor Nasional (3,58). Pilar Adopsi TIK yang merupakan faktor determinan bagi kemajuan Industri 4.0 yang dielaborasi ke dalam satu dimensi. Dimensi adopsi TIK ditunjukkan dengan persentase rumah tangga dengan akses internet sebesar 74,74 persen, persentase penduduk berumur 5 tahun ke atas yang mengakses internet dalam 3 bulan terakhir masih sebesar 74,74 persen (Susenas 2023) dan persentase penduduk berumur 5 tahun ke atas yang menggunakan Hp/komputer sebesar 83,22 persen serta jangkauan jaringan 4G.



Sumber: BRIN, diolah

Gambar 2.67
Grafik Skor Pilar Adopsi TIK, 2023

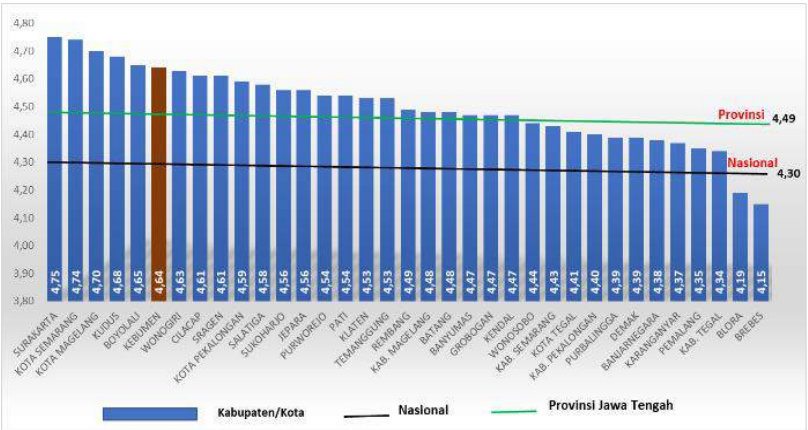
2.3.4. Daya Saing Iklim Investasi

Daya saing iklim investasi Kabupaten Kebumen harus ditingkatkan. Pilar IDSD yang menggambarkan daya saing iklim investasi, meliputi tiga pilar, yaitu institusi, dinamika bisnis dan kapabilitas inovasi. Pilar institusi yang mengukur seberapa jauh iklim sosial, politik, hukum, dan keamanan. Pilar Dinamika bisnis yang menggambarkan kemudahan entitas bisnis memulai usaha untuk penciptaan dan perluasan lapangan kerja dan pilar kapabilitas inovasi yang mengukur kemampuan daerah dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penerapannya dalam aktivitas ekonomi bernilai tambah.

Skor Pilar Institusi IDSD Kabupaten Kebumen sebesar 4,64 (2023) lebih tinggi dibandingkan skor Provinsi Jawa Tengah (4,49) dan skor Nasional (4,30). Pilar institusi yang mengukur seberapa jauh iklim sosial, politik, hukum, dan keamanan yang dielaborasi ke dalam 5 dimensi (keamanan, *check and balance*, transparansi, hak atas kepemilikan, dan orientasi masa depan pemerintah). Hal ini sejalan dengan kinerja beberapa indikator daerah yang ada sebagai berikut:

Pertama, dimensi keamanan dapat diproksi dengan masih terdapat 5 kasus kejadian SARA walaupun telah dapat tertangani semua (2023). Kedua, dimensi *check and balance* dapat diproksi dengan pencapaian SAKIP Kabupaten Kebumen sebesar 66,11 (2023). Ketiga, dimensi transparansi dapat diproksi dengan pencapaian Indeks Integritas Nasional dimana pada Tahun 2023 mencapai sebesar 78,19. Keempat, dimensi hak atas kepemilikan dimana pencapaian hak kepemilikan atas tanah belum optimal yaitu baru mencapai 70¹ persen bidang tanah di Kabupaten Kebumen yang telah bersertifikat. Kelima, dimensi orientasi masa depan pemerintah dalam pengelolaan lingkungan. Hal ini dapat diproksi dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Kebumen pada tahun 2023 mencapai sebesar 67,19.

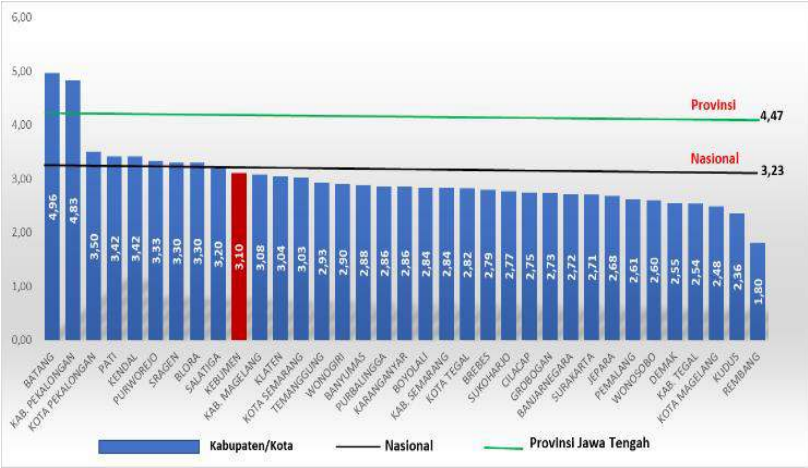
¹ <http://radarjogja.jawapos.com/jawa-tengah/652340344/baru-70-persen-tanah-di-kebumen-yang-bersertifikat>



Sumber: BRIN, diolah

Gambar 2.68
Grafik Skor Pilar Institusi, 2023

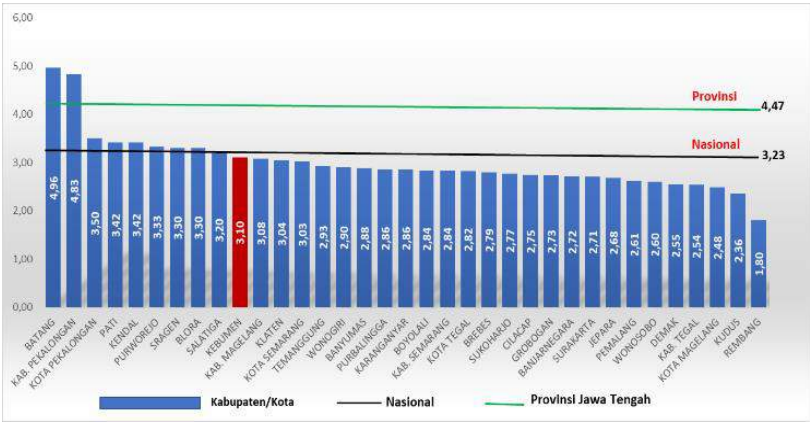
Skor dinamika bisnis IDSD Kabupaten Kebumen (Gambar 2.71) telah mencapai sebesar 3,10 (2023) berada di bawah skor Provinsi Jawa Tengah (4,47) dan skor Nasional (3,23). Hal ini dilihat dari pertumbuhan Nomor Induk Berusaha dan kinerja pelayanan publik, Jumlah perizinan berusaha yang dikeluarkan pada Tahun 2023 sebesar 21.887 dengan total nilai investasi 628,23 Miliar. Kinerja pelayanan publik dapat dilihat dari Indeks Pelayanan Publik tahun 2023 sebesar 4,55 meningkat dari tahun 2020 yang nilainya sebesar 3,23.



Sumber: BRIN, diolah

Gambar 2.69
Grafik Skor Pilar Dinamika Bisnis, 2023

Skor pilar kapabilitas inovasi IDSD Kabupaten Kebumen (Gambar 2.72) sebesar 2,30 (2023) masih dibawah skor Provinsi Jawa Tengah (4,51) dan skor Nasional (3,03). Kondisi pencapaian skor kapabilitas inovasi tercermin dari keanekaragaman tenaga kerja, publikasi ilmiah, aplikasi kekayaan intelektual, belanja riset, indeks keunggulan lembaga riset dan aplikasi merk dagang. Selain itu, pencapaian Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Kebumen sebesar 49,28 (2023) dibawah Indeks Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah sebesar 65,40.

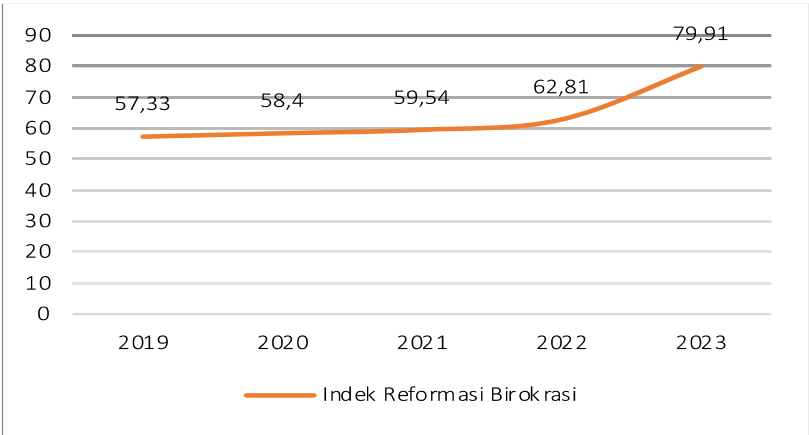


Sumber: BRIN, diolah

Gambar 2.70
Grafik Skor Pilar Kapabilitas Inovasi, 2023

2.4. Aspek Pelayanan Umum

Peningkatan tata kelola pemerintahan untuk mewujudkan birokrasi profesional. Pemerintah Kabupaten Kebumen berupaya melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*) yang ditunjukkan dengan pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi (IRB). Mendasari Peraturan Menteri PAN dan RB No 9 Tahun 2023, pelaksanaan Reformasi Birokrasi diarahkan untuk dapat memberikan kontribusi nyata khususnya pada capaian pembangunan nasional. Terdapat penajaman tujuan Reformasi Birokrasi yaitu Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan Pelayanan Publik melalui sasaran strategis general dan tematik. Periode 2019-2023 terjadi peningkatan capaian dalam mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, IRB Kabupaten Kebumen meningkat semula 57,33 (2019) menjadi 79,91 (2023). IRB sebesar 79,91 diperoleh dari 68,3 berasal dari RB General dan 11,61 dari RB Tematik. Perolehan indikator penilaian IRB yang cukup besar meliputi: Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB General (4,14), Persentase penyederhanaan Struktur organisasi (1,86), Tingkat Maturitas SPIP (2,55), SAKIP (2,64), Tingkat Digitalisasi arsip (2,18), Indeks Kualitas Kebijakan (1,7), Indeks reformasi Hukum (57,54), Indeks tata kelola pengadaan (1,84), Indeks Sistem Merit (2,47), Indeks SPBE (6,66), Capaian Indikator Non Makro (4,03), Survei Penilaian Integritas (7,82), Survei kepuasan Masyarakat (7,14).



Sumber: Sekretariat Daerah, diolah

Gambar 2.71
Grafik Indeks Reformasi Birokrasi, 2019-2023

Penguatan tata kelola pemerintahan digital Kabupaten Kebumen termasuk dalam kategori baik. Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Kebumen yang diukur melalui Indeks SPBE

meningkat semula 2,11 (2018) menjadi 3,44 (2023). SPBE Kabupaten kebumen 2023 termasuk kategori Baik. Peningkatan tata kelola pemerintahan digital dalam mewujudkan reformasi birokrasi di Kabupaten Kebumen perlu peningkatan aspek teknologi informasi dan komunikasi, penerapan manajemen SPBE, dan audit TIK.

Kemandirian keuangan daerah belum optimal dalam rangka pendanaan pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Kebumen terus berupaya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kemandirian keuangan daerah merupakan indikator untuk menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mendanai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kemandirian daerah dihitung dari rasio PAD dengan total pendapatan daerah. Semakin besar angka asio PAD terhadap total pendapatan daerah, maka kemandirian daerah semakin besar. Namun demikian, peningkatan rasio ini dapat bermakna negatif jika sumber PAD adalah pendapatan bunga yang menunjukkan besarnya dana pemerintah daerah yang disimpan di bank dan tidak dibelanjakan. Rasio/Derajat Kemandirian/Desentralisasi Fiskal Daerah dapat dilihat dari proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meningkat pada tahun 2019 dari 14,52% meningkat menjadi 17,99% pada tahun 2022, namun di tahun 2023 mengalami penurunan menjadi sebesar 15,98%. Dari data tersebut terlihat ada kecenderungan peningkatan derajat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Kebumen.

Tabel 2.21
Derajat Kemandirian Keuangan Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2019-2023 (%)

Uraian Kemandirian Keuangan Daerah	2019	2020	2021	2022	2023
Pendapatan Asli Daerah	409.163.433.329,68	403.025.963.783,80	472.017.087.115	512.346.375.475	463.650.961.705
Total Pendapatan Daerah	2.818.494.983.540,68	2.763.229.307.229,80	2.832.035.015.733	2.847.196.017.404	2.901.021.509.721
Rasio/Derajat Kemandirian/Desentralisasi Fiskal Daerah	14,52	14,59	16,67	17,99	15,98

Sumber: Dokumen LRA Audited, diolah

Terkait keberlanjutan fiskal, tantangan yang dihadapi yaitu rendahnya penerimaan daerah, terutama perpajakan yang tercermin dari rasio pajak hanya sebesar 0,38 persen dari PDRB ADHB pada tahun 2023 walaupun terus meningkat dari Tahun 2015 sebesar 0,25%. Namun demikian dengan berlakunya Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait adanya peningkatan opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan menjadi komponen pajak daerah dalam PAD, diharapkan akan terus meningkatkan kemandirian keuangan daerah maupun kapasitas fiskal daerah. Selain itu, pendapatan daerah ke depan akan sangat dipengaruhi oleh perubahan struktur ekonomi dan produktivitas penduduk. Hal tersebut berpotensi meningkatkan penerimaan daerah. Pergeseran komposisi demografi yang menuju *ageing population* akan menentukan komposisi belanja negara yang lebih didominasi oleh komponen belanja perlindungan sosial bagi penduduk usia lanjut yang tidak produktif lagi.

Upaya optimalisasi pengendalian pembangunan daerah Kabupaten Kebumen terus dilakukan. Tercermin dari maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang masing masing mengalami peningkatan. Maturitas

SPIP Kabupaten Kebumen telah mencapai level 3 sedangkan kapabilitas APIP Kabupaten Kebumen juga telah mencapai level 3. Pada Tahun 2023, Indeks Integritas Nasional untuk Kabupaten Kebumen berdasarkan Survei Penilaian Integritas telah mencapai 78,19. Sementara itu, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Opini laporan keuangan Kabupaten Kebumen sejak tahun 2017 selama 6 tahun berturut-turut memperoleh opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Hal ini mengindikasikan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar semua hal yang terkait material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Tabel 2.22
Capaian Indikator Urusan Pengawasan Kabupaten Kebumen
Tahun 2019-2023

No	Kinerja Pengawasan	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Tingkat Maturitas SPIP	Nilai 3,00	n/a	n/a	Nilai 3,13	Nilai 3,19
2.	Tingkat Kapabilitas APIP	Level 2	Level 2	Level 2	Level 3,12	Level 3,18

Sumber: Inspektorat, 2023

Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mewujudkan reformasi birokrasi Kabupaten Kebumen tergolong tinggi. Tercermin dari Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah yang relative meningkat. IKM merupakan metode mengukur tingkat kepuasan dan persepsi masyarakat terhadap pelayanan atau layanan yang diberikan oleh pemerintah, organisasi, atau lembaga tertentu. IKM menilai kualitas pelayanan yang diterima dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. IKM Kabupaten Kebumen semula 79,28 (2018) menjadi 90,16 (2023). Selain itu, indeks pelayanan publik Kabupaten Kebumen pada Tahun 2023 juga telah mencapai 4,55 atau telah mencapai kategori pelayanan prima. Kepuasan Masyarakat secara umum juga perlu didukung dengan terciptanya kondusivitas wilayah. Pada Tahun 2023 masih terdapat 5 kejadian konflik SARA yang dapat tertangani. Ke depan konflik SARA seperti ini diharapkan dapat terus diminimalisir.

2.5. Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025
Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kebumen Berdasarkan Evaluasi Terhadap Hasil Pelaksanaan RPJPD Kabupaten Kebumen 2005-2025 termasuk dalam predikat kinerja Tinggi. Rata-rata capaian kinerja pelaksanaan RPJPD Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 berdasarkan evaluasi pencapaian RPJMD Kabupaten Kebumen per perodesasi sebesar 87,29 persen termasuk dalam predikat kinerja Tinggi. Kondisi ini merupakan rata-rata capaian kinerja berdasarkan Evaluasi Pencapaian RPJMD Kabupaten Kebumen per perodesasi, yaitu: (1) RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2006-2010 sebesar 83,83 persen; (2) RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2015 sebesar 83,02 persen; (3) RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 sebesar 88,12 persen; dan (4) RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 sebesar 94,17 persen. Rekapitulasi kinerja pencapaian RPJMD Kabupaten Kebumen per perodesasi sebagai berikut:

Tabel 2.23					
Rata-rata Capaian Kinerja RPJPD Kabupaten Kebumen 2005-2025					
Predikat Kinerja	Interval Nilai Capaian Kinerja	Jumlah Indikator Tujuan dan Sasaran (Periode RPJMD Kabupaten Kebumen)			
		2006-2010	2010-2015	2016-2021	2021-2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sangat Tinggi (ST)	91% ≤ 100%	48	80	19	21
Tinggi (T)	76% ≤ 90%	10	13	3	7
Sedang (S)	66% ≤ 75%	7	6	1	0
Rendah (R)	51% ≤ 65%	2	4	1	0
Sangat Rendah (SR)	≤ 50%	9	18	2	0
Tdh	Tidak Dihitung	7	14	0	0
Jumlah Indikator		83	135	26	28
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		83,84	83,02	88,12	94,17
Rata-rata Capaian Kinerja RPJPD Kabupaten Kebumen 2005-2005 (%)		87,29			
Status		Tinggi			

Rata-rata capaian kinerja pelaksanaan RPJPD Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 berdasarkan evaluasi pencapaian sasaran pokok RPJPD Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 per tahapan jangka menengah sesuai perodesasi RPJMD Kabupaten Kebumen sebesar 85,56 persen, termasuk dalam predikat kinerja Tinggi. Kondisi ini merupakan rata-rata capaian kinerja berdasarkan Evaluasi Pencapaian sasaran pokok RPJPD Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 per tahapan jangka menengah sesuai perodesasi RPJMD Kabupaten Kebumen, yaitu: (1) Perodesasi Tahun 2006-2010 sebesar 78,79 persen; (2) Perodesasi Tahun 2010-2015 sebesar 82,60 persen; (3) Perodesasi Tahun 2016-2021 sebesar 91,18 persen; dan (4) Perodesasi Tahun 2021-2026 sebesar 89,67 persen. Rekapitulasi kinerja pencapaian sasaran pokok RPJPD Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 per tahapan jangka menengah sesuai perodesasi RPJMD Kabupaten Kebumen sebagai berikut:

Tabel 2.24					
Rata-rata Capaian Kinerja RPJPD Kabupaten Kebumen 2005-2025 (Capaian Kinerja Sampai dengan Tahun 2022) Seluruh Tahapan Jangka Menengah (Perodesasi RPJMD Kabupaten Kebumen)					
Predikat Kinerja	Interval Nilai Capaian Kinerja	Jumlah Indikator Tujuan dan Sasaran (Periode RPJMD Kabupaten Kebumen)			
		2006-2010	2010-2015	2016-2021	2021-2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sangat Tinggi (ST)	91% ≤ 100%	84	110	74	82
Tinggi (T)	76% ≤ 90%	18	15	6	18
Sedang (S)	66% ≤ 75%	18	8	6	3
Rendah (R)	51% ≤ 65%	7	5	3	3
Sangat Rendah (SR)	≤ 50%	25	24	5	8
Tdh	Tidak Dihitung	7	14	0	0
Jumlah Indikator		159	176	94	114
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		78,79	82,60	91,18	89,67
Rata-rata Capaian Kinerja RPJPD Kabupaten Kebumen 2005-2005 (%)		85,56			
Status		Tinggi			

Rekomendasi tindak lanjut peningkatan kualitas perencanaan jangka panjang Kabupaten Kebumen berdasarkan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJPD Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025. Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan jangka panjang Kabupaten Kebumen kedepan, evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJPD Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 dalam pencapaian Visi RPJPD Kabupaten Kebumen 2025-2045 dititik beratkan pada: (1) Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan; (2) Pembangunan Ekonomi yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan; (3) Pembangunan Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan; dan (4) Pembangunan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan.

Dimana strategi dan arah kebijakan dari masing-masing titik berat pembangunan jangka panjang Kabupaten Kebumen 2025-2045 memperhatikan rekomendasi tindak lanjut pencapaian sasaran pokok RPJPD Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025, sebagai berikut:

1. **Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia.** Rekomendasi tindak lanjut pencapaian sasaran pokok 1: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang pencapaiannya ditunjukkan melalui: 1) meningkatnya indeks pembangunan manusia, 2) meningkatnya indeks pembangunan gender, 3) terkendalinya laju pertumbuhan penduduk, dan 4) terbentuknya karakter budaya (jati diri) masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. **Berkurangnya Tingkat Kemiskinan Penduduk.** Rekomendasi tindak lanjut pencapaian sasaran pokok 2: Berkurangnya tingkat kemiskinan penduduk yang pencapaiannya ditunjukkan melalui: 1) terpenuhinya kebutuhan dan hak-hak dasar penduduk miskin, 2) meningkatnya tingkat pendapatan penduduk miskin, 3) meningkatnya kesempatan berusaha, kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja bagi penduduk miskin, dan 4) meningkatnya harkat hidup dan martabat penduduk miskin.
3. **Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Pelayanan Dasar Di Wilayah Strategis.** Rekomendasi tindak lanjut pencapaian sasaran pokok 3: Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur pelayanan dasar di wilayah strategis yang pencapaiannya ditunjukkan melalui: 1) terwujudnya ketersediaan sumber daya air yang handal untuk irigasi yang didukung kelembagaan dan partisipasi masyarakat; 2) terwujudnya sistem transportasi yang handal yang didukung oleh prasarana dan sarana termasuk jalan dan jembatan; 3) terwujudnya ketersediaan telekomunikasi dan informatika yang handal untuk pelayanan publik termasuk mendukung pelaksanaan *e-Government* (penyelenggaraan pemerintahan secara elektronik); 4) terwujudnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang baik termasuk pengelolaan pertambangan yang berkelanjutan; 5) terwujudnya ketersediaan energi yang bagi masyarakat yang didukung oleh pengembangan energi alternatif; 6) terwujudnya penataan ruang yang mendukung pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh untuk pemerataan dan penyerasian pembangunan wilayah; dan 7) terwujudnya pembangunan perumahan dan permukiman yang berkelanjutan yang didukung peningkatan pelayanan sanitasi dan air bersih di perkotaan dan perdesaan.
4. **Berkembangnya Agrobisnis dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Untuk Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan.** Rekomendasi tindak lanjut pencapaian sasaran pokok 4 : Berkembangnya agrobisnis dan usaha mikro, kecil dan menengah untuk mewujudkan ekonomi kerakyatan yang pencapaiannya ditunjukkan melalui: 1) meningkat dan berkembangnya usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi yang berbasis pada agrobisnis yang mendorong pendapatan perkapita, sehingga dapat bersaing dan menjadi yang terdepan diantara beberapa kabupaten/kota lain di Provinsi Jawa Tengah, 2) meningkatnya keunggulan sektor pertanian yang kompetitif, yang membentuk struktur perekonomian daerah dengan dukungan beberapa sektor lain seperti perdagangan, industri, dan pariwisata yang memiliki daya saing kuat di pasar nasional dan internasional, 3) terpenuhinya kebutuhan pangan yang cukup, bermutu aman hingga tingkat masyarakat terbawah didukung oleh swasembada pangan dan kestabilan harga pangan, 4) meningkatnya kegiatan agrobisnis yang ditopang oleh sektor perdagangan dan industri serta jasa pariwisata khususnya wilayah perdesaan, dan 5) meningkatnya diversifikasi jenis-jenis agrobisnis yang berasal dari produk pertanian

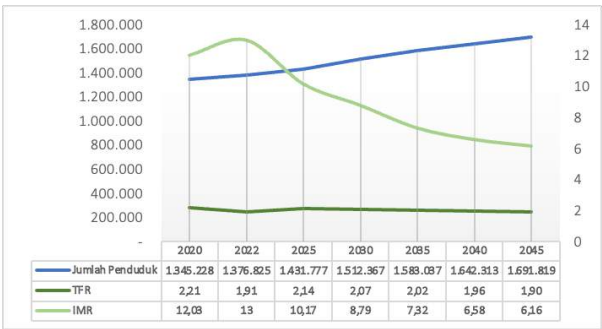
untuk menjamin keberlangsungan produk dan aksesibilitas pasar nasional dan internasional.

5. **Tercapainya Prinsip Prinsip Tata Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pembangunan Serta Di Semua Elemen Kemasyarakatan.** Rekomendasi tindak lanjut pencapaian sasaran pokok 5 : Tercapainya prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta di semua elemen kemasyarakatan yang pencapaiannya ditunjukkan melalui: 1) terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah dan pelayanan publik secara transparan, partisipatif dan akuntabel, 2) meningkatnya profesionalisme dan kompetensi aparatur, serta kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, efisien dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme, 3) meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik berlandaskan hukum, 4) meningkatnya kemampuan dan kemandirian daerah dalam mendukung pembiayaan pembangunan daerah, 5) meningkatnya kepekaan dan kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik, 6) meningkatnya kerjasama yang sinergis dan saling menguntungkan dengan berbagi pihak pada tingkat lokal/regional, nasional dan internasional, dan 7) meningkatnya komitmen Pemerintah dan pemangku kepentingan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

2.6. **Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik**

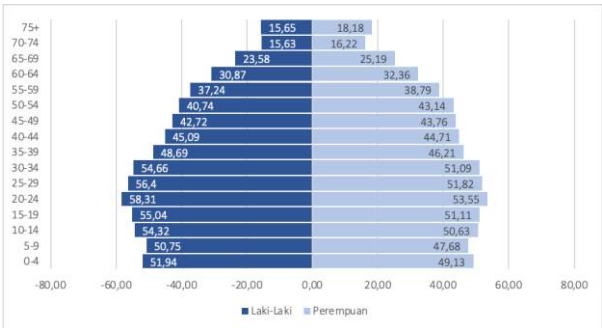
2.6.1. **Analisis Proyeksi Demografi**

Jumlah Penduduk Kabupaten Kebumen meningkat berdasarkan proyeksi demografi 2020-2045 oleh BPS. Proyeksi Penduduk Interim Tahun 2020-2023 (Pertengahan Tahun/Juni) menunjukkan Jumlah penduduk Kabupaten Kebumen meningkat menjadi 1.376.825 orang (2022) dari 1.167.092 orang (2011). Sementara berdasarkan proyeksi penduduk Kabupaten Kebumen 2020-2045 yang dilakukan oleh BPS menunjukkan akan terjadi penambahan jumlah penduduk di Kabupaten Kebumen dalam kurun waktu 25 tahun sebanyak 346.591 orang. Penduduk Kabupaten Kebumen pada tahun 2045 (Gambar 2.72) diperkirakan mencapai 1.691.819 orang, apabila parameter-parameter demografi berkembang sesuai dengan kecenderungan yang ada. Dalam hal ini TFR Kabupaten Kebumen diperkirakan akan mendekati 1,9 (2045) dan IMR mencapai 6,16 (2045). Namun demikian jika TFR terjaga dan



Sumber: BPS, Hasil Proyeksi Kependudukan, diolah

Gambar 2.72
Grafik Kependudukan Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2045



Sumber: BPS, Hasil Proyeksi Kependudukan, diolah

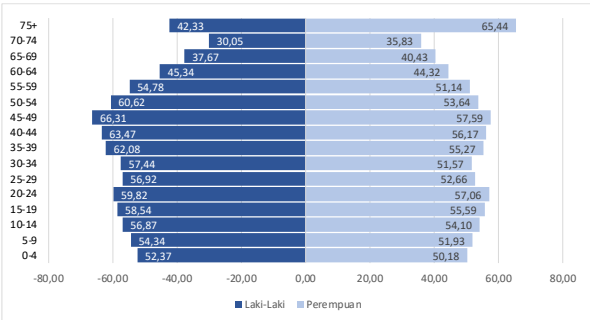
Gambar 2.73
Grafik Piramida Penduduk Kabupaten Kebumen Tahun 2020

mampu menurunkan IMR lebih cepat, maka Kabupaten Kebumen akan memiliki penduduk lebih banyak pada tahun 2045. Penurunan IMR yang lebih cepat juga berimplikasi terhadap peningkatan Angka Harapan Hidup (AHH).

Sementara itu dengan meningkatnya Indeks Keluarga Sehat, akan mendorong IMR turun, AHH naik dan jumlah kematian setiap kelompok umur akan turun. Kondisi inilah yang menyebabkan jumlah penduduk Kabupaten Kebumen bertambah hingga tahun 2045. Oleh sebab itu, diperlukan pemerataan kualitas pelayanan kesehatan dan pelayanan advokasi pembangunan keluarga.

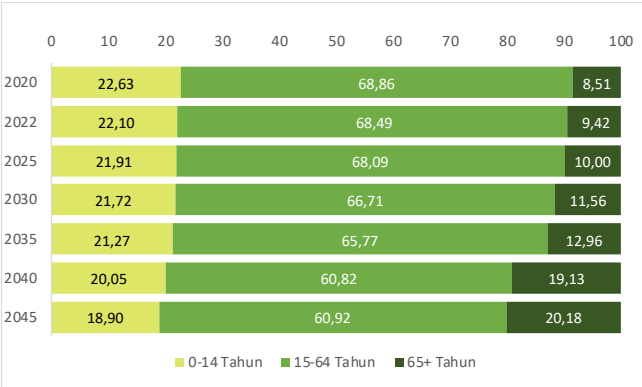
Struktur Kependudukan Kabupaten Kebumen berdasarkan proyeksi demografi 2020-2045, menghasilkan penduduk usia muda lebih rendah dan lanjut usia lebih tinggi. Perbedaan struktur penduduk/piramida penduduk (Gambar 2.74) terlihat cukup mencolok pada tahun 2045, terutama pada kelompok penduduk usia muda (0-14 tahun) dan usia tua/lanjut usia (60 tahun ke atas). Tren TFR dan IMR 2020-2045, akan menghasilkan penduduk usia muda lebih rendah dan lanjut usia lebih tinggi. Gambar 2.93, Persentase penduduk usia muda, semula 22,63 persen (2020) turun menjadi 18,90 persen (2045) dan lanjut usia, semula 8,51 persen (2020) menjadi 20,18 persen (2045) sedangkan penduduk usia produktif (15-59 tahun) menurun, semula 68,86 persen (2020) menjadi 60,92 persen (2045).

Perubahan struktur penduduk harus diimbangi dengan peningkatan kualitasnya. Perubahan struktur penduduk mempengaruhi rasio ketergantungan. Hasil proyeksi kependudukan 2020-2045 menunjukkan rasio ketergantungan Kabupaten Kebumen (Gambar 2.78) meningkat, semula 45,23 persen (2020) menjadi 51,01 persen (2045). Rasio ketergantungan pada tahun 2045, mengindikasikan setiap 100 penduduk usia produktif menanggung 51-52 penduduk usia tidak produktif.



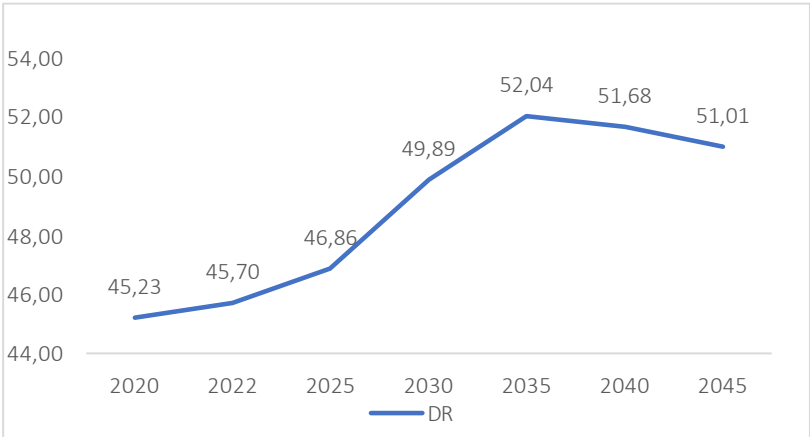
Sumber: BPS, Hasil Proyeksi Kependudukan, diolah

Gambar 2.74
Grafik Piramida Penduduk
Kabupaten Kebumen Tahun 2045



Sumber: BPS, Hasil Proyeksi Kependudukan, diolah

Gambar 2.75
Grafik Distribusi Penduduk Menurut
Kelompok Umur Produktif dan Tidak
Produktif Kabupaten Kebumen
Tahun 2045



Sumber: BPS, Hasil Proyeksi Kependudukan, diolah

Gambar 2.76
Grafik Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio/DR*)
Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2045

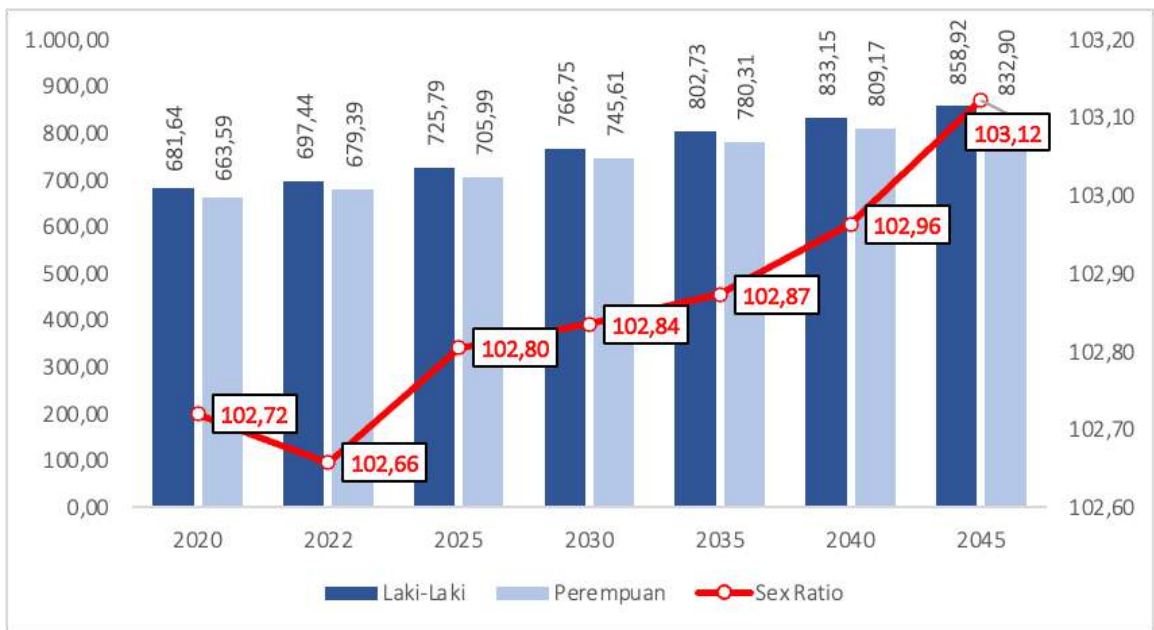
Jumlah penduduk usia muda 2045 lebih sedikit. Kelompok penduduk usia muda Kabupaten Kebumen saat ini diisi oleh Generasi Z dan Generasi Alpha. Generasi Z dengan kelahiran mulai dari 1997 hingga 2012. Post Gen Z/Alpha merupakan penduduk yang lahir setelah tahun 2013 sampai kemungkinan tahun 2028. Kedua generasi ini memiliki karakteristik cakap teknologi, kompetitif, spontan, berjiwa petualang, serta mudah mendapatkan informasi (Bappenas, 2023). Pada tahun 2023, Generasi Z berada pada usia 11- 27 tahun dan menjadi ujung tombak pembangunan ke depan. Oleh sebab itu, kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen di masa depan perlu melihat perkembangan penduduk usia ini, diantaranya terkait pencegahan stunting dan peningkatan akses dan mutu layanan Pendidikan. Selain itu juga perlu dikembangkan kurikulum pendidikan karakter dan kemampuan analisis anak didik sejak dini.

Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen fokus untuk mencetak sumber daya manusia yang produktif, kompetitif, dan berdaya saing. Kesempatan bagi Kabupaten Kebumen untuk menjadikan jumlah penduduk usia produktif yang masih cukup tinggi sebagai pendorong utama pembangunan. Dengan rasio ketergantungan di bawah 50 persen yang diperkirakan hanya akan berlangsung sampai dengan 2030, Kebumen harus segera mengoptimalkan penduduk usia produktif sebagai pelaku utama pembangunan dengan peningkatan produktivitas. Untuk itu perlu segera dilakukan upaya peningkatan *skill & technical training* bersertifikasi TK berbasis kebutuhan industri.

Disisi lain, jumlah penduduk lanjut usia yang meningkat menunjukkan Kabupaten Kebumen berpotensi mengalami *ageing population*. Komposisi penduduk lanjut usia cenderung mengalami peningkatan hingga tahun 2045. Program-program berbasis *population responsive* perlu menjadi perhatian dengan menyiapkan program jaminan sosial dan kesehatan, diantaranya layanan kesehatan *geriatri* dan penyakit *degeneratif* sehingga penduduk lanjut usia dapat produktif lebih lama.

Kabupaten Kebumen diproyeksikan mengalami Bonus Demografi sampai dengan tahun 2030. Bonus demografi Kabupaten Kebumen lebih cepat berakhir hingga tahun 2030 karena lima tahunan berikutnya hingga 2045, dilihat dari rasio ketergantungan Kabupaten Kebumen pada tahun 2035, 2040, dan 2045 sebesar lebih dari 50 persen, dikarenakan terjadi peningkatan jumlah penduduk lanjut usia (akibat IMR rendah, UHH tinggi).

Pembangunan daerah Kabupaten Kebumen responsif gender. Hasil Proyeksi Penduduk Kabupaten Kebumen 2020-2045, menunjukkan bahwa rasio jenis kelamin (*sex ratio*) meningkat, semula 102,77 persen (2020) menjadi 103,12 persen (2045). *Sex ratio* 2045 mengindikasikan terdapat 104 penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan. Memperhatikan kondisi tersebut, Kabupaten Kebumen perlu meningkatkan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender dalam mewujudkan peningkatan kualitas SDM Kabupaten Kebumen.

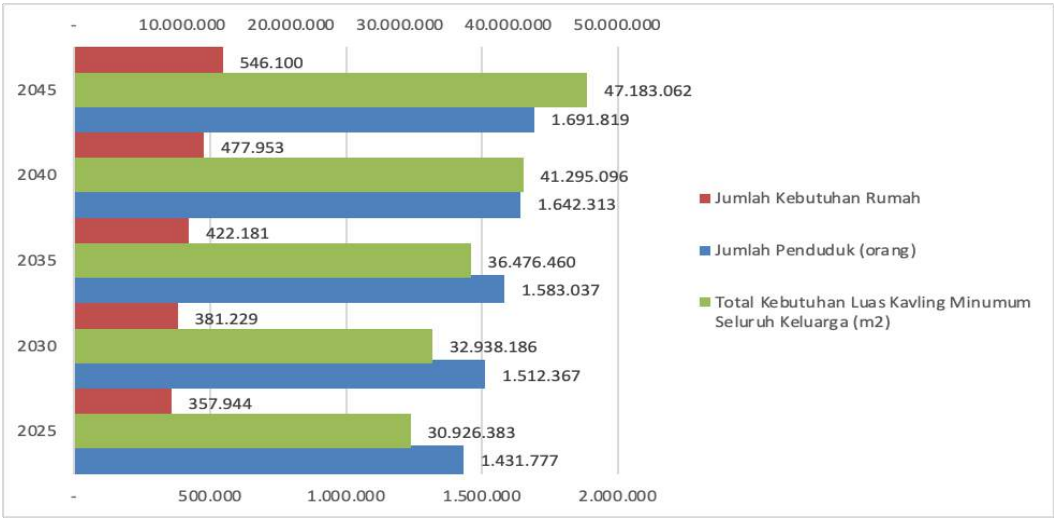


Sumber: BPS, Hasil Proyeksi Kependudukan, diolah

Gambar 2.77
Grafik Rasio Jenis Kelamin (*Sex Ratio*) Kabupaten Kebumen
Tahun 2020-2045

2.6.2. Analisis Proyeksi Kebutuhan Sarana Prasarana

Proyeksi kebutuhan rumah di Kabupaten Kebumen pada 2045 mencapai 546.100 unit. Perkembangan jumlah backlog di Kabupaten Kebumen dari tahun 2019 hingga tahun 2023 meningkat, yaitu 63.272 unit (2019); 64.093 unit (2020); 64,093 unit (2021); 64,070 unit (2022); dan 64.070 unit (2023). Kabupaten Kebumen pada tahun 2045 diperkirakan memiliki penduduk sebanyak 1.691.819 orang. Dengan asumsi rata-rata anggota keluarga Kabupaten Kebumen sebanyak 4 orang (terdiri dari 1 ayah, 1 ibu dan 2 anak) serta berdasarkan SNI 03-1733-2004 Tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan, kebutuhan Luas Kavling Minimum Per Keluarga sebesar 86,4 m², maka Total Kebutuhan Luas Kavling Minimum Seluruh Keluarga hingga tahun 2045 sebesar 47.183.062 m² atau kebutuhan rumah sebanyak 546.100 unit. Dengan jumlah rumah tahun 2023 sebanyak 354.807 unit, maka diperoleh backlog hingga 2045 sebanyak 191.293 unit dari proyeksi kebutuhan rumah di Kabupaten Kebumen pada 2045 yang mencapai 546.100 unit.



Sumber: Perhitungan Berdasarkan SNI 03-1733-2004 Tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan

Gambar 2.78
Grafik Kebutuhan Luas Kavling Minimum Seluruh Keluarga Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045

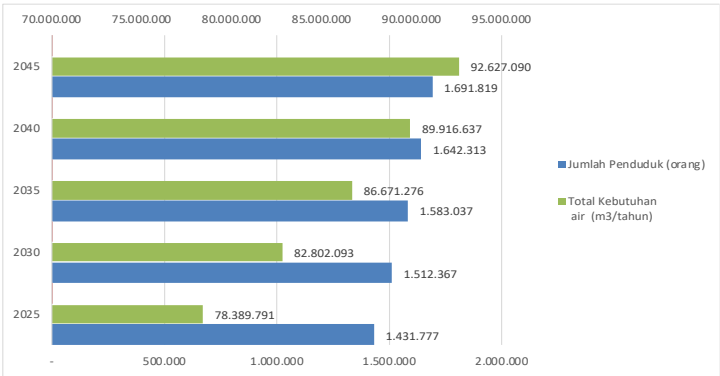
Proyeksi Kebutuhan Air Penduduk Kabupaten Kebumen 2045 mencapai 92.627.090 m3/tahun. Perkembangan ketersediaan air minum perpipaan di Kabupaten Kebumen dari tahun 2019 hingga tahun 2023 meningkat, yaitu 15,94 persen (2019); 17,54 persen (2020); 19,05 persen (2021); 19,64 persen (2022); dan 26,74 persen (2023). Berdasarkan hasil survei BPS, air bersih yang disalurkan ke pelanggan di Kabupaten Kebumen sebanyak 4.260.018 m³/tahun (2011) meningkat menjadi 6.676.221 m³/tahun (2022). Hasil survei tersebut dihitung berdasarkan kebutuhan air dari pelanggan perusahaan sehingga belum dapat menggambarkan kebutuhan air penduduk Kabupaten Kebumen secara keseluruhan.

Standar kelayakan kebutuhan air bersih adalah 49,5 liter/kapita/hari. Untuk kebutuhan tubuh manusia air yang diperlukan adalah 2,5 liter per hari. Standar kebutuhan air pada manusia biasanya mengikuti rumus 30 cc per kilogram berat badan per hari. Artinya, jika seseorang dengan berat badan 60 kg, maka kebutuhan air tiap harinya sebanyak 1.800 cc atau 1,8 liter. Sementara itu UNESCO sendiri pada tahun 2002 telah menetapkan hak dasar manusia atas air yaitu sebesar 60 liter/orang/hari (UNESCO, 2002). Sedangkan Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum (DJCK, 2001) membagi lagi standar kebutuhan air minum tersebut berdasarkan lokasi wilayah: (a.) Pedesaan dengan kebutuhan 60 liter/kapita/hari; (b.) Kota Kecil dengan kebutuhan 90 liter/kapita/hari; (c.) Kota Sedang dengan kebutuhan 110 liter/kapita/hari. (d.) Kota Besar dengan kebutuhan 130 liter/kapita/hari; (e.) Kota Metropolitan dengan kebutuhan 150 liter/kapita/hari.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Pasal 1 ayat 8 (MDN, 2006) menyatakan bahwa: “Standar Kebutuhan Pokok Air Minum adalah kebutuhan air sebesar 10 meter kubik/kepala keluarga/bulan atau 60 liter/orang/hari. Badan Standar Nasional Indonesia (2002), menetapkan kebutuhan air penduduk perkotaan sebesar 120 liter/hari/kapita atau 43,8 m³/kapita/tahun, dan kebutuhan air penduduk pedesaan sebesar 60 liter/hari/kapita atau 21,9 m³/kapita/tahun. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29 /PRT/M/2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, menyatakan bahwa Mutu Pelayanan Dasar pemenuhan kebutuhan pokok Air Minum Sehari-hari yaitu ukuran kuantitas dan kualitas air minum. Secara kuantitas, Kebutuhan pokok

minimal air minum sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari diperuntukan kepada daerah kabupaten/kota yang tidak ada sumber air baku. Untuk daerah kabupaten/kota yang memiliki sumber air baku, maka pemenuhan kebutuhan pokok minimal air minum sehari-hari dengan menyesuaikan pada penggunaan air di kawasan tersebut.

Berdasarkan telaahan standar kelayakan kebutuhan air bersih, standar kebutuhan air penduduk Kabupaten Kebumen sebesar 54,75 m³/kapita/tahun yang merupakan rata-rata kebutuhan air penduduk perkotaan dan perdesaan (BSNI, 2002). Mendasari perhitungan tersebut, kebutuhan air bersih penduduk Kabupaten Kebumen pada 2025 sebesar 78.389.791 m³/tahun, meningkat menjadi sebesar 92.627.090 m³/tahun pada tahun 2045.

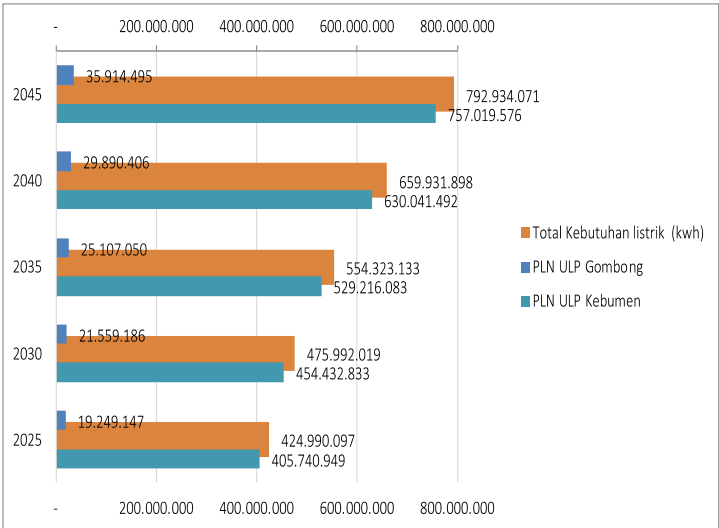


Sumber: Perhitungan Berdasarkan SNI 03-1733-2004 Tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan

Gambar 2.79
Grafik Kebutuhan Air Penduduk
Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045

Untuk memenuhi kebutuhan air bersih tersebut, Kabupaten Kebumen memiliki potensi air baku. Kapasitas air baku Bendung Pejengkolan dan Bendung Sendangdalem sebesar 800 liter/detik serta Waduk Sempor 80 liter/detik dan Sungai Lukulo-Pejagoan sebesar 50 liter/detik. Selain itu juga terdapat rencana penyaluran air baku dari Bendung Kedung Bener Purworejo sebesar 200 liter/detik. Sementara itu, jika dilihat dari hasil pengolahan air baku menjadi air minum di Kabupaten Kebumen sebesar 580 liter/detik yang terdiri dari unit IPA Jatimulyo sebesar 200 liter/det dan IPA Jembangan sebesar 250 liter/detik, Sempor sebesar 80 liter/detik dan Sungai Luk Ulo-Pejagoan sebesar 50 liter/detik. Pada tahun 2023 masih terdapat *idle capacity* dengan angka total sekitar 240,26 liter/detik yang terdiri dari Waduk Sempor sebesar 14,58 liter/detik, Sungai Luk Ulo sebesar 6,83 liter/detik dan IPA Jatimulyo sebesar 124,91 liter perdetik serta IPA Jembangan sebesar 93,94 liter/detik.

Proyeksi Kebutuhan Listrik Kabupaten Kebumen 2045 mencapai 792.934.071 kwh untuk rumah sebanyak 546.100 unit. Perkembangan pemakaian listrik PLN di Kabupaten Kebumen dari tahun 2019 hingga tahun 2022 meningkat baik pemakaian listrik di PLN ULP Kebumen dan PLN ULP Gombang. Perkembangan pemakaian listrik PLN ULP Kebumen yaitu 316.196.753 kwh (2019); 357.806.094 kwh (2020); 368.905.592 kwh (2021); dan 383.251.784 kwh (2022). Data pemakaian listrik PLN ULP Kebumen tahun 2023 per triwulan III menunjukkan sebesar 289.727.966 kwh. Perkembangan pemakaian listrik PLN ULP Gombang yaitu 15.726.105 kwh (2019); 16.832.245 kwh (2020); 17.143.583 kwh (2021); dan 17.342.989 kwh (2022). Data pemakaian listrik PLN ULP Gombang tahun 2023 per triwulan III menunjukkan sebesar 16.501.695 kwh. Jumlah pemakaian listrik PLN di Kabupaten Kebumen 2022 sebanyak 400.594.773 Kwh, dengan pemakaian listrik terbesar berasal dari PLN ULP Kebumen. Berdasarkan data BPS pada Tahun 2021 terdapat 99,67 persen rumah tangga di Kabupaten Kebumen telah menggunakan sumber penerangan utama Listrik dari PLN.

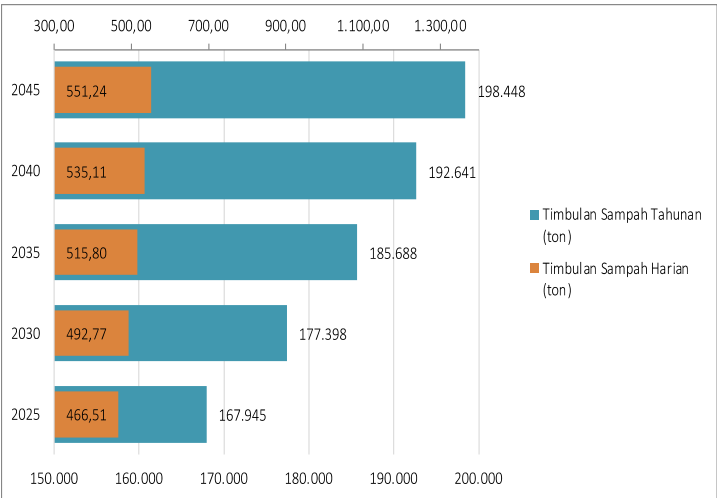


Sumber: Perhitungan Berdasarkan SNI 03-1733-2004 Tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan

Gambar 2.80
Grafik Kebutuhan Listrik
Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045

Mendasari proyeksi kebutuhan rumah Kabupaten Kebumen 2045 yang mencapai 546.100 unit dengan asumsi setiap rumah tangga telah memiliki rumah tinggal, maka dibutuhkan listrik mencapai 792.934.071 kwh dengan pemakaian pada PLN ULP Kebumen sebanyak 757.019.576 kwh (95,47 persen) dan pemakaian pada PLN ULP Gombong sebanyak 35.914.495 kwh (4,53 persen).

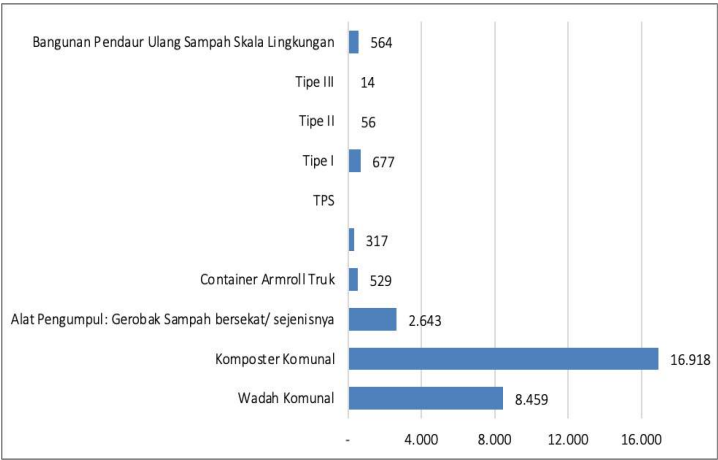
Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan Permukiman Kabupaten Kebumen perlu menjadi perhatian. Jumlah penduduk Kabupaten Kebumen tahun 2022 mencapai sebanyak 1.376.825 orang,—menghasilkan Timbulan sampah sebesar 0,33 kg/orang/hari. Berdasarkan SNI 19-3983-1995 dimana Kabupaten Kebumen masuk pada kategori sedang maka menghasilkan timbulan sampah sebesar 0,3-0,4 kg/orang/hari.



Sumber: Perhitungan Berdasarkan SNI 03-1733-2004 Tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan

Gambar 2.81
Grafik Proyeksi Persampahan
Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045

Hasil proyeksi penduduk Kabupaten Kebumen pada tahun 2045 diperkirakan sebanyak 1.691.819 orang. Dengan asumsi timbulan sampah rata-rata per penduduk sebesar 0,33 kg/orang/hari, maka timbulan sampah yang dihasilkan pada tahun 2045 akan meningkat, mencapai 551,24 ton/hari atau 198.448 ton/tahun.

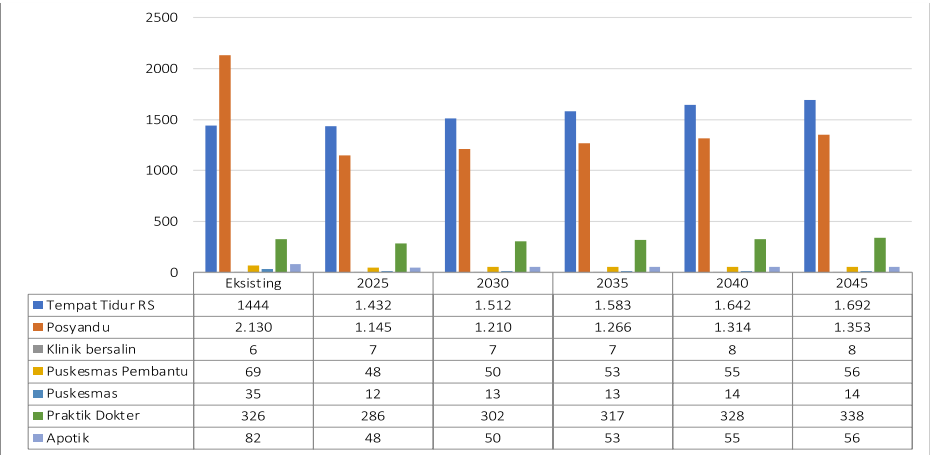


Sumber: Perhitungan Berdasarkan SNI 3242:2008 Tentang Pengelolaan Sampah Permukiman

Gambar 2.82
Grafik Kebutuhan Pengelolaan Sampah Permukiman Kabupaten Kebumen hingga Tahun 2045

Spesifikasi peralatan dan bangunan minimal dalam pengelolaan sampah permukiman (SNI 3242:2008) di Kabupaten Kebumen disesuaikan kebutuhan dan prioritas hingga 2045, yaitu wadah komunal (8.459 unit); komposter komunal (16.918 unit); alat pengumpul/gerobak sampah (2.643 unit); container armroll truk (529 unit); TPS tipe I (677 unit); TPS tipe II (56 unit); TPS tipe III (14 unit); serta bangunan pendaaur ulang sampah skala lingkungan (564 unit).

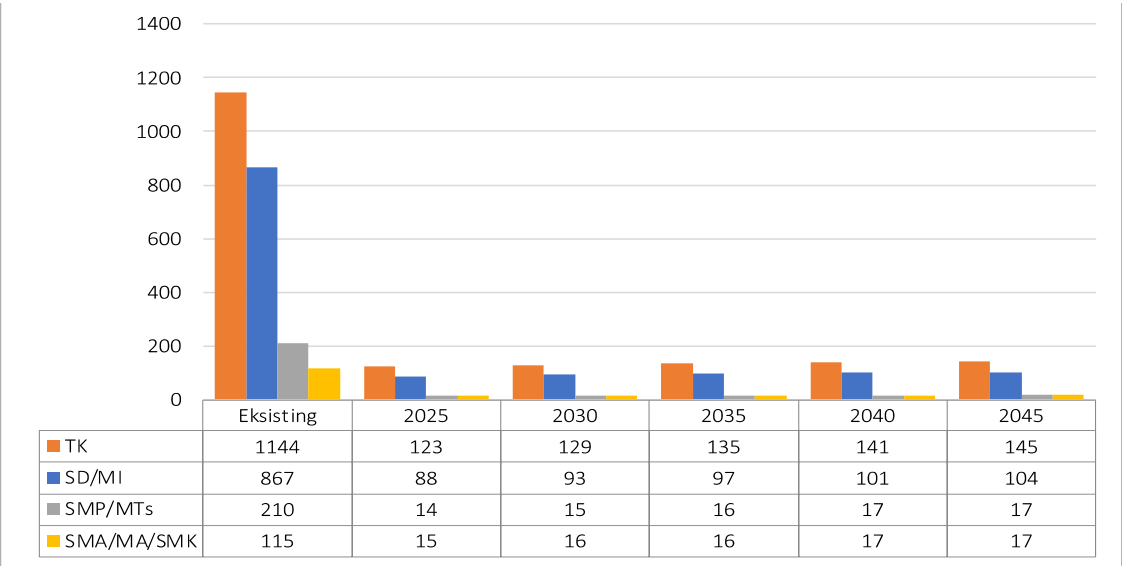
Kabupaten Kebumen perlu meningkatkan pemenuhan kebutuhan beberapa fasilitas pelayanan kesehatan hingga 2045. Angka kesakitan (*morbiditas*) di Kebumen mencapai 9,88 (2023), namun demikian angka Harapan hidup penduduk Kabupaten Kebumen mencapai 74,98 tahun (2023). Dalam rangka peningkatan kualitas SDM bidang kesehatan, pelayanan kesehatan di Kabupaten Kebumen perlu dioptimalkan, tercermin dari Rasio dokter dan penduduk Kabupaten Kebumen tahun 2023 sebesar 1: 4.459 masih jauh dari kondisi ideal rasio dokter dan penduduk yaitu 1: 2.500. Rasio ketersediaan posyandu meningkat, semula 1:25 (2018) menjadi 1:41 (2023). Rasio Puskesmas per satuan penduduk meningkat, semula 1:39.292 (2018) menjadi 1:40.767 (2023). Rasio rumah sakit per satuan penduduk meningkat, semula 1:125.020 (2018) menjadi 1:129.712 (2023). Seiring bertambahnya jumlah penduduk Kabupaten Kebumen hingga 2045 berdasarkan hasil proyeksi penduduk Kabupaten Kebumen 2020-2045 diperkirakan Kabupaten memiliki penduduk sebanyak 1.691.819 orang. Perhitungan kebutuhan fasilitas kesehatan berdasarkan SNI 03-1733-2004 Tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan hingga 2045 dan kondisi eksisting fasilitas layanan kesehatan, Pemerintah Kabupaten Kebumen perlu menambah beberapa fasilitas pelayanan kesehatan yang belum terpenuhi hingga 2045 dari kondisi eksisting (2022).



Sumber: Perhitungan Berdasarkan SNI 03-1733-2004 Tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan

Gambar 2.83
Grafik Kebutuhan Fasilitas Kesehatan Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045

Kabupaten Kebumen perlu meningkatkan kualitas penyelenggaraan layanan pendidikan. Rata-rata lama sekolah meningkat, semula 6,29 tahun (2011) menjadi 7,86 tahun (2023). Angka ini menunjukkan bahwa secara rata-rata, penduduk berusia 25 tahun ke atas telah menyelesaikan pendidikan hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP) kelas VIII. Harapan lama sekolah Kabupaten Kebumen meningkat, semula 11,65 tahun (2011) menjadi 13,37 tahun (2023), mengindikasikan penduduk usia 7 tahun ke atas diharapkan dapat menyelesaikan pendidikan hingga level perguruan tinggi tahun pertama. Rasio lembaga PAUD menurun, semula 1:118 (2018) menjadi 1:116 (2023), rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah SD/MI meningkat, semula 1:140 (2018) menjadi 1:149 (2023), rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah SMP/MTs meningkat, semula 1:311 (2018) menjadi 1:323 (2023). Kabupaten Kebumen perlu meningkatkan akses dan mutu pelayanan pendidikan. Perhitungan kebutuhan fasilitas pendidikan berdasarkan SNI 03-1733-2004 Tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan hingga 2045 dan kondisi eksisting fasilitas pendidikan di Kabupaten Kebumen menunjukkan bahwa baik PAUD/TK/RA, SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA seluruhnya sudah terpenuhi. Namun Kabupaten Kebumen perlu melakukan evaluasi dalam pemenuhan standar mutu pendidikan yang berkualitas mendukung peningkatan kualitas SDM bidang pendidikan.



Sumber: Perhitungan Berdasarkan SNI 03-1733-2004 Tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan

Gambar 2.84
Grafik Kebutuhan Fasilitas Pendidikan Kabupaten Kebumen
Tahun 2025-2045

2.7. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

Pusat-pusat pertumbuhan wilayah Kabupaten Kebumen dalam mendukung pembangunan jangka panjang daerah. Dalam mendukung fokus pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Kebumen akan mengembangkan pusat pertumbuhan wilayah yang dituangkan dalam kebijakan penataan ruang wilayah yang termuat dalam RTRW Kabupaten Kebumen 2023-2043 (Perda Kabupaten Kebumen No 1 Tahun 2024). Penataan ruang wilayah Kabupaten Kebumen bertujuan mewujudkan Kabupaten yang sejahtera, mandiri, berbasis agrobisnis, dan pariwisata yang berkelanjutan. Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten terdiri atas:

- (i) Kebijakan pengembangan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten meliputi: (a) pengembangan sistem pusat permukiman sesuai dengan hierarki dan jangkauan pelayanannya; dan (b) pengembangan sistem jaringan prasarana Wilayah yang mendukung Agrobisnis dan pariwisata.

- (ii) Kebijakan pengembangan Pola Ruang Wilayah Kabupaten terdiri atas: (a) Kebijakan pengembangan Kawasan Lindung meliputi: pengendalian dan pelestarian Kawasan Lindung untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana; dan pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan degradasi dan kerusakan lingkungan hidup; serta (b) Kebijakan pengembangan Kawasan Budi Daya meliputi: (a) pengembangan ekonomi Wilayah berbasis pemanfaatan potensi dan penciptaan nilai tambah yang berkelanjutan; dan (b) peningkatan fungsi Kawasan Pertahanan dan Keamanan.
- (iii) Kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten meliputi: (a) pengembangan dan peningkatan fungsi Kawasan Strategis Kabupaten untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang unggul dan berdaya saing; dan (b) pengembangan dan peningkatan fungsi Kawasan Strategis Kabupaten untuk mendukung kepentingan sosial dan budaya.

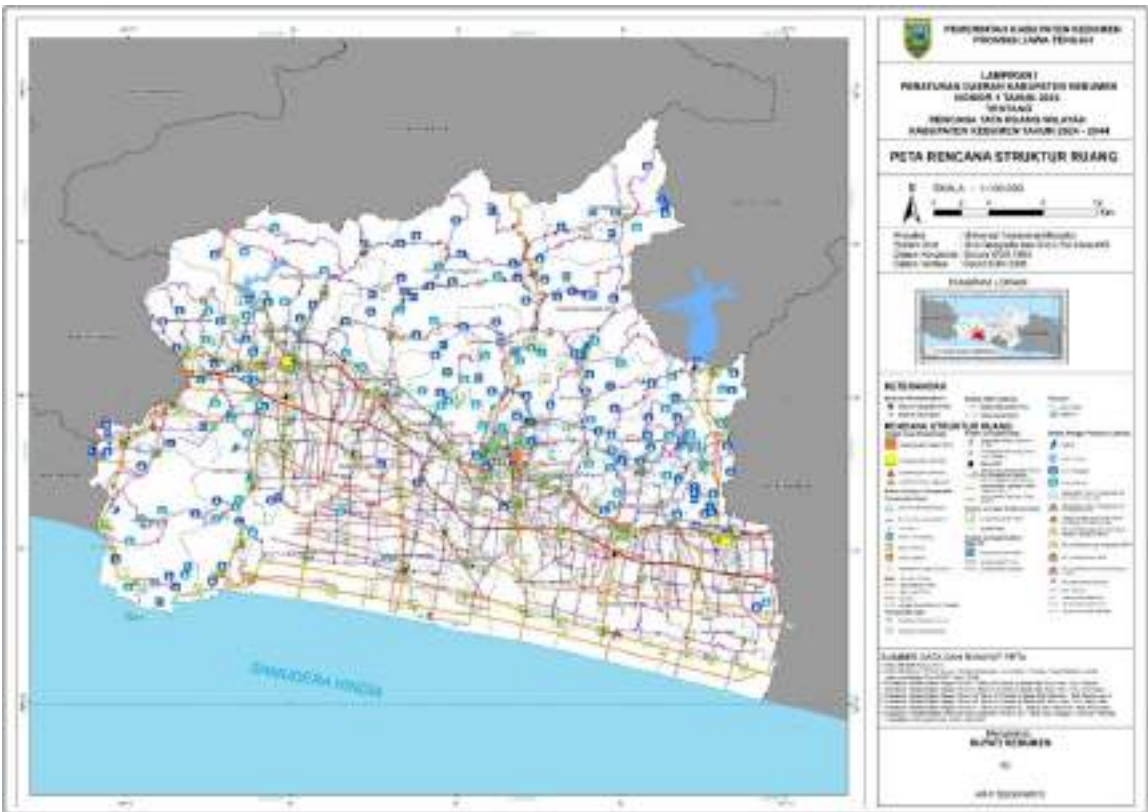
Strategi penataan ruang wilayah dalam pengembangan pusat pertumbuhan wilayah di Kabupaten Kebumen antara lain:

- (i) Strategi pengembangan sistem pusat permukiman sesuai dengan hierarki dan jangkauan pelayanannya meliputi: (a) mengembangkan kawasan perkotaan agar lebih kompetitif dan efektif dalam pengembangan Wilayah di sekitarnya; (b) mengembangkan kawasan perdesaan sebagai penyangga Kawasan Perkotaan; dan (c) meningkatkan keterkaitan antar kawasan perkotaan, antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan, serta antara kawasan perkotaan dan wilayah di sekitarnya.
- (ii) Strategi pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah yang mendukung agrobisnis dan pariwisata meliputi: (a) mengembangkan sistem jaringan transportasi secara menyeluruh; (b) mengembangkan sistem jaringan energi; (c) mengembangkan sistem jaringan telekomunikasi; (d) mengembangkan sistem jaringan sumber daya air; dan (e) mengembangkan jaringan prasarana untuk meningkatkan keterpaduan pengelolaan lingkungan.
- (iii) Strategi pengembangan ekonomi wilayah berbasis pemanfaatan potensi dan penciptaan nilai tambah yang berkelanjutan meliputi: (a) mengoptimalkan pemanfaatan ruang budi daya dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; (b) meningkatkan peran kawasan hutan produksi; (c) mengoptimalkan pemanfaatan kawasan perkebunan rakyat untuk mewujudkan nilai tambah daerah; (d) mengembangkan kawasan pertanian sebagai pusat agrobisnis; (e) menetapkan dan melestarikan kawasan pertanian pangan berkelanjutan untuk mewujudkan ketahanan dan keamanan pangan; (f) mengembangkan kawasan perikanan; (g) mengendalikan kegiatan di kawasan pembangkitan tenaga listrik; (h) mengembangkan kegiatan pada kawasan peruntukan industri yang ramah lingkungan dan berdaya saing tinggi; (i) mengembangkan kawasan pariwisata; (j) mengembangkan dan mengendalikan kawasan permukiman; (k) menyediakan pemenuhan kebutuhan ruang terbuka hijau pada kawasan perkotaan paling sedikit seluas 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan, meliputi 20% (dua puluh persen) ruang terbuka hijau publik dan 10% (sepuluh persen) ruang terbuka hijau privat; dan (l) mempertahankan keberadaan ruang terbuka hijau apabila proporsi total luas lebih besar dari 30% (tiga puluh persen).
- (iv) Strategi pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan strategis kabupaten untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang unggul dan berdaya saing meliputi: (a) menetapkan kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; (b) mengembangkan dan meningkatkan pusat perdagangan dan jasa, pariwisata, serta industri; dan (c) mengoptimalkan pusat pertumbuhan ekonomi sebagai penggerak utama pengembangan wilayah kabupaten.

- (v) Strategi pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan strategis kabupaten untuk mendukung kepentingan sosial dan budaya meliputi: (a) menetapkan kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan sosial dan budaya; dan (b) mengembangkan dan meningkatkan nilai Kawasan Kota Pusaka Gombang dengan menambah kegiatan pendukung yang sesuai.

Arahan penataan ruang Kabupaten Kebumen berdasarkan kebijakan penataan ruang dalam RTRW Kabupaten Kebumen 2023-2043, terbagi menjadi arahan pengembangan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten; pengembangan Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten.

Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Kebumen terdiri atas sistem pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana. Dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, struktur ruang didefinisikan sebagai susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Pontoh & Kustiwan (2009) menambahkan bahwa struktur ruang kota terdiri atas pusat kegiatan, kawasan fungsional, dan didukung oleh jaringan jalan yang saling berkaitan membentuk sistem spasial. Struktur ruang juga dapat berpengaruh terhadap keberlanjutan kota. Struktur ruang dapat memberi arah bagi perkembangan pola ruang yang terkait dengan pola penggunaan lahan. Kondisi struktur ruang kota juga memengaruhi pola perilaku penduduk, terutama pola pergerakan penduduk karena menyangkut jaringan pergerakan (Hakim, 2010). Perkembangan aktivitas ekonomi memengaruhi perubahan struktur ruang dilihat dari pola penggunaan lahan dan jaringan jalan (Nilayanti and Brotosunaryo, 2012). Kebijakan pengembangan struktur ruang wilayah Kabupaten Kebumen berdasarkan RTRW Kabupaten Kebumen, terdiri atas sistem pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana.



Sumber: Perda No 1 Tahun 2024, RTRW 2024-2044, 2024

Gambar 2.85
Peta Rencana Struktur Ruang Wiayah Kabupaten Kebumen

Dalam struktur ruang wilayah, pusat-pusat kegiatan berfungsi sebagai simpul atau pusat pelayanan/ pertumbuhan wilayah. Pengembangan sistem pusat permukiman di Kabupaten Kebumen terdiri dari Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL). Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sebagai kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/ kota, Pusat Kegiatan Lingkungan (PKL) sebagai kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/ kota atau beberapa kecamatan, Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan, dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa. Setiap simpul memiliki hubungan fungsional dengan simpul lainnya. Konfigurasi simpul menjadi dasar penyusunan jaringan prasarana. Simpul-simpul tersebut memiliki wilayah pelayanan atau jangkauan (Adisasmita, 2014). Lebih lanjut, keberadaan jaringan jalan yang menghubungkan antar kawasan menimbulkan simpul pergerakan atau transportasi baru untuk memicu perkembangan aktivitas di sekitarnya (Ariyanto, 2017). Lahagina et al. (2015) menjelaskan bahwa beberapa hal yang mendorong munculnya pusat pelayanan seperti faktor lokasi, ketersediaan sumber daya, aglomerasi, dan investasi pemerintah. Pusat pelayanan terletak pada lokasi yang memiliki nilai strategis karena akan berfungsi sebagai simpul kegiatan.



Sumber: Perda No 1 Tahun 2024, RTRW 2024-2044, 2024

Gambar 2.86

Peta Rencana Sistem Pusat Permukiman Kabupaten Kebumen

Di Kabupaten Kebumen beberapa pusat kegiatan telah ditentukan hierarki fungsinya dan tercantum dalam RTRW Kabupaten Kebumen karena memiliki fungsi strategis. RTRW Kabupaten Kebumen menunjukkan (i) Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) ditetapkan berupa Kawasan Perkotaan Kebumen meliputi: Kecamatan Alian, Buluspesantren, Kebumen, Klirong, dan Pejagoan. (ii) Pusat Kegiatan Lokal (PKL), ditetapkan meliputi: (a) Kawasan Perkotaan Gombong-Karanganyar meliputi Kecamatan Buayan, Kuwarasan, Rowokele, Gombong, Sempor, Adimulyo, Karanganyar, dan Sruweng; dan (b) Kawasan Perkotaan Prembun meliputi Kecamatan Ambal, Kutowinangun, Mirit, dan Prembun. (iii) Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) ditetapkan meliputi: (a)

Kawasan Perkotaan Ambal meliputi Kecamatan Ambal, Buluspesantren, Mirit, Kebumen, dan Klirong; (b) Kawasan Perkotaan Ayah meliputi Kecamatan Ayah; (c) Kawasan Perkotaan Karangsambung meliputi Kecamatan Karangsambung; dan (d) Kawasan Perkotaan Petanahan meliputi Kecamatan Petanahan, Puring, dan Klirong. (iv) Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) ditetapkan meliputi PPL Jladri di Kecamatan Buayan, PPL Karangduwur di Kecamatan Ayah, PPL Giyanti di Kecamatan Rowokele, PPL Karanggayam di Kecamatan Karanggayam, PPL Padureso di Kecamatan Padureso, PPL Poncowarno di Kecamatan Poncowarno, PPL Sadang Kulon di Kecamatan Sadang, PPL Semali di Kecamatan Sempor, PPL Sinungrejo di Kecamatan Ambal, dan PPL Tambakmulyo di Kecamatan Puring.

Tabel 2.25
Hierarki Fungsi dan Orde Kota

No.	Kecamatan	Hierarki Fungsi dan Orde Kota			
		I PKW	II PKL	III PPK	IV PPL
1.	Ayah			√	√
2.	Buayan		√		√
3.	Puring			√	√
4.	Petanahan			√	
5.	Klirong	√		√	
6.	Buluspesantren	√		√	
7.	Ambal		√	√	√
8.	Mirit		√	√	
9.	Prembun		√		
10.	Kutowinangun		√		
11.	Alian	√			
12.	Kebumen	√		√	
13.	Pejagoan	√			
14.	Sruweng		√		
15.	Adimulyo		√		
16.	Kuwarasan		√		
17.	Rowokele		√		√
18.	Sempor		√		√
19.	Gombang		√		
20.	Karanganyar		√		
21.	Karanggayam				√
22.	Sadang				√
23.	Bonorowo	X	X	X	X
24.	Padureso				√
25.	Poncowarno				√
26.	Karangsambung			√	

Sumber: Perda No 1 Tahun 2024, RTRW 2024-2044, 2024, diolah

Rencana struktur ruang sistem jaringan transportasi terdiri dari sistem jaringan jalan, sistem jaringan kereta api, dan sistem jaringan tranportasi laut. Rencana struktur ruang sistem jaringan jalan selain jalan umum (jalan arteri, jalan kolektor, dan jalan lokal) berupa jalan tol Cilacap-Yogyakarta, terminal penumpang tipe A di Kecamatan Kebumen, dan terminal penumpang tipe C di Kecamatan Karanggayam, Kebumen, dan Gombang. Rencana struktur ruang sistem jaringan kereta api meliputi sistem jaringan jalur kereta api antar kota *Double track* Jawa Selatan dan Kereta api Jakarta-Surabaya, sistem jaringan stasiun kereta api penumpang meliputi stasiun Gombang, stasiun Karanganyar, stasiun Kebumen dan stasiun Kutowinangun, sistem jaringan stasiun kereta api barang meliputi stasiun Gombang dan stasiun Kebumen, dan sistem jaringan stasiun kereta api operasi meliputi stasiun Gombang, stasiun Ijo, stasiun Karanganyar, stasiun Kebumen, stasiun Kutowinangun, stasiun Prembun, stasiun Soka, dan stasiun Wonosari.

Rencana struktur ruang sistem jaringan transportasi laut berupa pelabuhan sungai dan danau (Dermaga Waduk Sempor, Dermaga Logending, Dermaga Kademangan, Dermaga Desa Kademangan Demangsari, dan Dermaga Prasasti Waduk Wadaslintang). Selain itu, sistem jaringan transportasi laut berupa pelabuhan perikanan pantai Logending dan pangkalan pendaratan ikan (Argopeni, Karangduwur, Lembupurwo, Pasir, Rowo, Surejan, Tangelan, dan Tegalretno).

Rencana struktur ruang sistem jaringan energi meliputi jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi dan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan. Kabupaten Kebumen memiliki sistem jaringan energi yang terintegrasi yaitu jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi ke tempat penyimpanan (jalur pipa BBM Cilacap-Jogja-Teras Boyolali) dan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan berupa Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Pejengkolan, PLTA Sempor, PLTA Wadaslintang, Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Merden, Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) jalur transmisi Pedan-Kesugihan, Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Gombong-Kesugihan, SUTT Gombong-Rawalo, SUTT Kebumen-Gombong, SUTT Kebumen-Purworejo, SUTT Kesugihan-Purworejo, SUTT Purworejo-Gombong, SUTT Purworejo-Wadaslintang, SUTT Wonosobo-Wadaslintang, Gardu Induk Gombong, Gardu Induk Kebumen, dan Gardu Induk Wadaslintang.

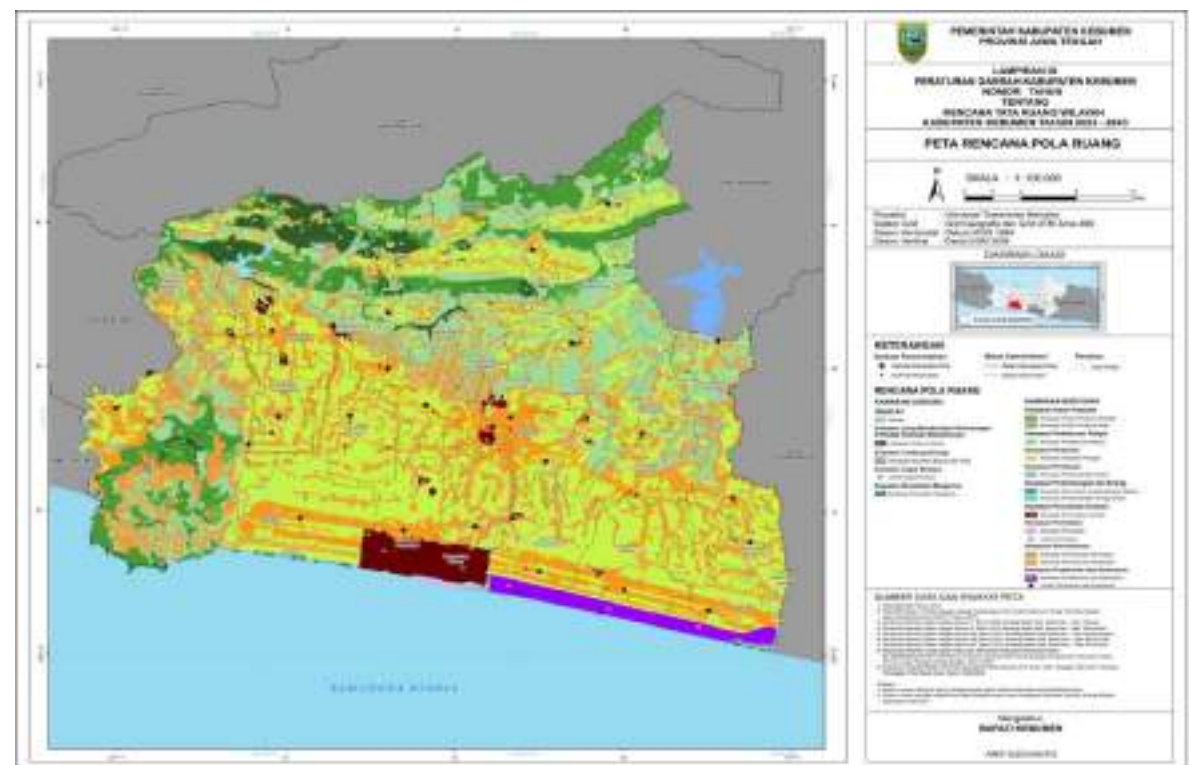
Rencana struktur ruang sistem jaringan telekomunikasi meliputi jaringan tetap dan jaringan bergerak. Jaringan tetap berada di Kecamatan Adimulyo, Alian, Ambal, Buayan, Buluspesantren, Gombong, Karanganyar, Karanggayam, Karangsambung, Kebumen, Klirong, Kutowinangun, Kuwarasan, Mirit, Pejagoan, Petanahan, Prembun, Puring, Rowokele, Sempor, dan Sruweng. Jaringan bergerak berupa Jaringan bergerak seluler berada di seluruh kecamatan di Kabupaten Kebumen.

Rencana struktur ruang sistem jaringan sumber daya air berupa prasarana sumber daya air sistem jaringan irigasi dan bangunan sumber daya air. Sistem jaringan irigasi terdiri dari jaringan irigasi primer dan jaringan irigasi sekunder. Bangunan sumber daya air berupa bendungan, embung, dan long storage meliputi Bendungan Sempor, Bendungan Wadaslintang, Bendungan Pejengkolan, Embung Banjararjo, Embung Bulurejo, Embung DAS Kalong, Embung Giritirto, Embung Kalirejo, Embung Kalisana, Embung Kedungweru, Embung Krakal, Embung Pandansari, Embung Peniron, Embung Penusupan, Embung Rahayu, Embung Sadangwetan, Embung Seboro, Embung Seling, Embung Sрати, Embung Tlepok, Embung Triwarno, Embung Tugu, Embung Wonosari, dan *Long Storage* Sidomukti.

Rencana struktur ruang sistem jaringan prasarana lainnya terdiri atas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL), Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), sistem jaringan persampahan, sistem jaringan evakuasi bencana, dan sistem drainase. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) berupa jaringan perpipaan (unit air baku, unit produksi, dan unit distribusi) dan bukan jaringan perpipaan (sumur dangkal dan sumur pompa). Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) terdiri dari SPAL Non Domestik dan SPAL Domestik. Sistem Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) meliputi pengembangan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dan pengembangan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Sistem jaringan persampahan terdiri dari Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R), Tempat Penampungan Sementara (TPS), Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST). Sistem jaringan evakuasi bencana

diperuntukan bagi jenis bencana banjir, banjir bandang, gempa bumi, tsunami, dan longsor terdiri dari jalur evakuasi bencana dan tempat evakuasi bencana. Sistem drainase terdiri dari jaringan drainase primer dan sekunder.

Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Kebumen terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budidaya. Berdasarkan RTRW Kabupaten Kebumen, kebijakan pengembangan pola ruang wilayah Kabupaten Kebumen, terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budidaya.



Sumber: Perda No 1 Tahun 2024, RTRW 2024-2044, 2024

Gambar 2.87
Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Kebumen

Rencana pola ruang kawasan lindung di Kabupaten Kebumen terdiri dari (a) Badan Air luas kurang lebih 1.415 ha; (b) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya berupa kawasan hutan lindung luas kurang lebih 3.820 ha; (c) Kawasan Konservasi berupa Kawasan Konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (taman pulau kecil) luas kurang lebih 0,5 ha; (d) Kawasan lindung geologi berupa Kawasan cagar alam geologi (Kawasan Keunikan Batuan dan Fosil) luas kurang lebih 5 ha; (e) Kawasan Cagar Budaya berada di Benteng Van Der Wijck dan DKT Gombong di Kecamatan Gombong, serta SMP N 1 Prembun di Kecamatan Prembun; dan (f) Kawasan Ekosistem Mangrove luas kurang lebih 63 ha.

Rencana pola ruang kawasan budidaya terdiri atas (1) kawasan hutan produksi berupa kawasan hutan produksi terbatas seluas 13.077 ha dan kawasan hutan produksi tetap seluas 655 ha; (2) kawasan perkebunan rakyat seluas 23.788 ha; (3) kawasan pertanian berupa kawasan tanaman pangan seluas 44.113 ha yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan seluas 43.154 ha (97,83 persen); (4) kawasan perikanan berupa kawasan perikanan budidaya seluas 241 ha; (5) kawasan pertambangan dan energi terdiri dari kawasan pertambangan mineral berupa kawasan peruntukan pertambangan batuan seluas 94 ha dan kawasan pembangkitan tenaga listrik berupa gardu induk seluas 5 ha; (6) kawasan peruntukan industri seluas 3.310 ha; (7) kawasan pariwisata seluas 172 ha (Kali Ratu, Pantai Karangbolong, Pantai Logending, Pantai Suwuk, Pantai Watubale, Waduk Wadaslintang, dan Pantai Pandan Kuning) dan lokasi pariwisata (Bukit Pentulu, Curug Sindaro, Jembatan, Gading Paradise, Goa Petruk, Goa Barat,

Goa Jatijajar, Hutan Mangrove, Pantai di sepanjang pesisir Kabupaten, Pantai Lampon, Pantai Menganti, Pemandian Air Panas Krakal, Selo Asri Seboro, Songging Waterpark, Taman Banyulangit, Tubing Sungai Padureso, Tubing Sungai Luk Ulo, Taman Reptile Adimulyo, dan Waduk Sempor); (8) kawasan permukiman perkotaan seluas 12.784 ha dan kawasan permukiman perdesaan seluas 27.620 ha; dan (9) kawasan pertahanan dan keamanan (daerah latihan TNI seluas 2.238 ha, Markas Komando Distrik Militer 0709 Kebumen dan Markas Komando Rayon Militer).

Tabel 2.26
Indikasi Program Rencana Pola Ruang Kabupaten Kebumen

No	Kecamatan	Pusat Kegiatan				Indikasi Program Rencana Pola Ruang																		
		PKW	PKL	PPK	PPL	Badan Air	Kawasan Hutan Lindung	Kawasan Konservasi (taman pulau kecil)	Kawasan Keunikan Batuan dan Fosil	Kawasan Cagar Budaya	Kawasan Ekosistem Mangrove	kawasan hutan produksi terbatas	kawasan hutan produksi tetap	kawasan perkebunan rakyat	kawasan pertanian pangan berkelanjutan	kawasan perikanan budidaya	kawasan peruntukan pertambangan batuan	kawasan pembangunan tenaga listrik (gardu induk)	Kawasan peruntukan industri	kawasan pariwisata	lokasi pariwisata	kawasan permukiman perkotaan	kawasan permukiman perdesaan	kawasan pertahanan dan keamanan
1.	Ayah			√	√	√	√	√			√	√		√	√	√	√			√	√	√	√	√
2.	Buayan		√		√	√	√					√	√	√	√		√		√	√		√	√	√
3.	Puring			√	√	√								√	√	√			√	√		√	√	√
4.	Petanahan			√											√				√	√		√	√	√
5.	Klirong	√		√		√									√				√	√		√	√	√
6.	Buluspesantren	√		√		√								√	√				√			√	√	√
7.	Ambal		√	√	√	√									√			√				√	√	√
8.	Mirit		√	√		√				√				√	√							√	√	√
9.	Prembun		√			√				√				√	√							√	√	√
10.	Kutowinangun		√			√			√					√	√		√					√	√	√
11.	Alian	√				√	√					√	√	√	√						√	√	√	√
12.	Kebumen	√		√		√								√	√				√			√	√	√
13.	Pejagoan	√				√	√					√		√	√				√		√	√	√	√
14.	Sruweng		√			√	√							√	√		√					√	√	√
15.	Adimulyo		√			√									√						√	√	√	√
16.	Kuwarasan		√			√									√			√	√			√	√	√
17.	Rowokele		√		√	√	√					√		√	√		√					√	√	√
18.	Sempor		√		√	√	√					√	√	√	√				√		√	√	√	√
19.	Gombong		√			√				√				√	√			√	√			√	√	√
20.	Karanganyar		√			√	√					√		√	√				√			√	√	√
21.	Karanggayam				√	√	√		√			√	√	√	√						√		√	√
22.	Sadang				√	√			√			√	√	√	√						√		√	√
23.	Bonorowo	X	X	X	X	√									√							√	√	√
24.	Padureso				√	√	√					√	√	√	√			√		√	√		√	√
25.	Poncowarno				√	√								√	√						√		√	√
26.	Karangsambun g			√		√	√		√			√	√	√	√						√	√	√	√

Sumber: Perda No 1 Tahun 2024, RTRW 2024-2044, 2024, diolah
Keterangan:

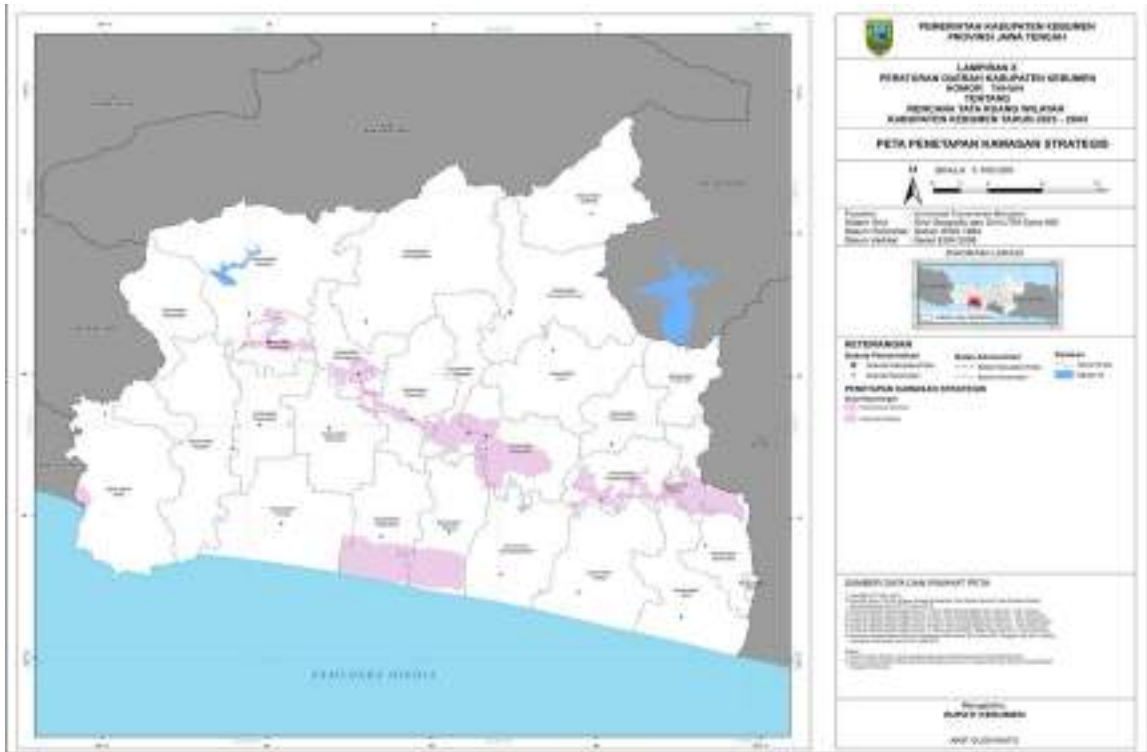
√ : Indikasi Program
 : Non Indikasi Program

Kawasan strategis Kabupaten Kebumen terdiri atas kawasan strategis provinsi di Kabupaten dan kawasan strategis Kabupaten. Berdasarkan RTRW Kabupaten Kebumen, kebijakan pengembangan kawasan strategis Kabupaten Kebumen, terdiri atas (1) Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten meliputi: (a) Kawasan Strategis Provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, (b) Kawasan Strategis Provinsi dari sudut fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, dan (c) Kawasan Strategis Provinsi dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; dan (2) Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi: (a) Kawasan industri Kebumen, (b) Kawasan ekonomi cepat tumbuh Gombong, (c) Kawasan ekonomi cepat tumbuh Karanganyar-Sruweng, (d) Kawasan ekonomi cepat tumbuh Kebumen, (e) Kawasan ekonomi cepat tumbuh Prembun-Kutowinangun, dan (f) Kawasan pariwisata terpadu pesisir Ayah.

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.

Kawasan industri Kebumen merupakan bagian dari kawasan strategis provinsi kawasan industri terpadu sedangkan kawasan pariwisata terpadu pesisir Ayah merupakan bagian dari kawasan strategis provinsi kawasan strategis pariwisata terpadu. Pengembangan kawasan industri Kebumen bertujuan mewujudkan Kawasan industri yang berdaya saing dan berkelanjutan dengan arah pengembangan industri, perdagangan dan jasa, dan permukiman. Pengembangan kawasan ekonomi cepat tumbuh Gombong bertujuan mewujudkan Kawasan ekonomi cepat tumbuh Gombong sebagai Kawasan perdagangan dan jasa dan pusat pariwisata budaya dengan arah pengembangan perdagangan dan jasa, pariwisata, dan permukiman. Pengembangan kawasan ekonomi cepat tumbuh Karanganyar-Sruweng bertujuan mewujudkan Kawasan ekonomi cepat tumbuh Karanganyar-Sruweng sebagai Kawasan pusat perdagangan dan jasa dengan arah pengembangan perdagangan dan jasa dan permukiman. Pengembangan kawasan ekonomi cepat tumbuh Kebumen bertujuan mewujudkan Kawasan ekonomi cepat tumbuh Kebumen sebagai Kawasan pusat pemerintahan yang didukung perdagangan dan jasa dan industri dengan arah pengembangan pusat pemerintahan, industri, permukiman, dan perdagangan dan jasa. Pengembangan kawasan ekonomi cepat tumbuh Prembun-Kutowinangun bertujuan mewujudkan Kawasan ekonomi cepat tumbuh Prembun-Kutowinangun sebagai Kawasan pusat perdagangan dan jasa berbasis Agrobisnis dengan arah pengembangan pertanian, permukiman, dan perdagangan dan jasa. Pengembangan kawasan pariwisata terpadu pesisir Ayah bertujuan mewujudkan Kawasan pariwisata terpadu pesisir Ayah sebagai Kawasan Pariwisata alam yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan dengan arah pengembangan pariwisata, perdagangan dan jasa, dan permukiman.

Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya berupa Kawasan Kota Pusaka Gombong. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya bertujuan mewujudkan sebagai kawasan pariwisata budaya yang berkelanjutan. Arah pengembangan Kawasan Kota Pusaka Gombong di Kecamatan Gombong adalah pengembangan pariwisata, perdagangan dan jasa, dan permukiman.



Sumber: Perda No 1 Tahun 2024, RTRW 2024-2044, 2024

Gambar 2.88
Peta Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Kebumen

Penentuan pusat kegiatan tidak hanya melihat dari aspek kebijakan tetapi juga melihat kebutuhan pengembangan wilayah. Pusat kegiatan telah ditentukan hierarki fungsinya untuk meningkatkan kinerja pusat permukiman dalam memberikan pelayanan sarana prasarana intra dan antar wilayah di Kabupaten Kebumen. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) ditetapkan berupa Kawasan Perkotaan Kebumen meliputi: Kecamatan Alian, Buluspesantren, Kebumen, Klirong, dan Pejagoan. Kawasan perkotaan Kebumen akan dikembangkan sebagai Kawasan yang memiliki nilai strategis sebagai pusat pertumbuhan wilayah seperti: pembangunan desa terpadu, pengembangan geopark, kawasan hutan produksi terbatas, kawasan hutan produksi tetap, kawasan perkebunan rakyat, kawasan tanaman pangan, produksi garam, kawasan peruntukan industri yang ramah lingkungan, Kawasan Industri Petanahan, pengembangan sentra-sentra industri, pengembangan ekspor produk unggulan, kawasan pariwisata, pengembangan lokasi pariwisata, pengembangan pariwisata budaya, peningkatan daya tarik destinasi pariwisata, Destinasi Pariwisata Kabupaten (DPK) dan ekonomi kreatif, kawasan permukiman perkotaan, pengembangan ekonomi berbasis koperasi dan UMKM, pengembangan ekonomi berbasis pesantren, Kawasan Industri Kebumen, Kawasan Pariwisata Terpadu Pesisir Ayah, kawasan strategis pertumbuhan ekonomi, pengembangan perdagangan dan jasa, dan Kawasan Kota Pusaka Gombang.

Tabel 2.27
Indikasi Program Pusat Pertumbuhan Wilayah Kabupaten Kebumen

No	PKW Kawasan Perkotaan Kebumen	Indikasi Program Pusat Pertumbuhan Wilayah Kabupaten Kebumen																							
		Pembangunan Desa Terpadu	Pengembangan Geopark	Kawasan Hutan Produksi Terbatas	Kawasan Hutan Produksi Tetap	Kawasan Perkebunan Rakyat	Kawasan Tanaman Pangan	Produksi Garam	Kawasan Peruntukan Industri yang Ramah Lingkungan	Kawasan Industri Petanahan	Pengembangan Sentra-Sentra Industri	Pengembangan Ekspor Produk Unggulan	Kawasan Pariwisata	Pengembangan Lokasi Pariwisata	Pengembangan Pariwisata Budaya	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Destinasi Pariwisata Kabupaten (DPK) dan Ekonomi Kreatif	Kawasan Permukiman Perkotaan	Pengembangan Ekonomi Berbasis Koperasi dan UMKM	Pengembangan Ekonomi Berbasis Pesantren	Kawasan Industri Kebumen	Kawasan Pariwisata Terpadu Pesisir Ayah	Kawasan Strategis Pertumbuhan Ekonomi	Pengembangan Perdagangan dan Jasa	Kawasan Kota Pusaka Gombang
1.	Klirong	✓	✓	■	■	■	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2.	Bulus pesantren	■	■	■	■	✓	✓	■	✓	■	✓	✓	■	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	■	✓	✓	✓
3.	Alian	■	■	✓	✓	✓	✓	■	■	■	■	■	■	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	■	■	✓	✓	✓
4.	Kebumen	✓	✓	■	■	✓	✓	■	✓	■	✓	✓	■	■	✓	■	■	✓	■	✓	✓	■	✓	✓	✓
5.	Pejagoan	✓	■	✓	■	✓	■	■	✓	■	✓	✓	■	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	■	✓	✓	✓

Sumber: Perda No 1 Tahun 2024, RTRW 2024-2044, 2024, diolah

Keterangan:

√

:

Indikasi Program

:

Non Indikasi Program

Keberadaan sistem jaringan transportasi yang menghubungkan antar kawasan menimbulkan simpul pergerakan atau transportasi baru untuk memicu perkembangan aktivitas disekitarnya. Rencana struktur ruang sistem jaringan transportasi terdiri dari sistem jaringan jalan, sistem jaringan kereta api, dan sistem jaringan tranportasi laut. Rencana struktur ruang sistem jaringan jalan selain jalan umum (jalan arteri, jalan kolektor, dan jalan lokal) berupa jalan tol Cilacap-Yogyakarta, serta terminal penumpang tipe A di Kecamatan Kebumen, terminal penumpang tipe C di Kecamatan Karanggayam, Kebumen, dan Gombang. Rencana struktur ruang sistem jaringan kereta api meliputi sistem jaringan jalur kereta api antar kota *Double track* Jawa Selatan dan Kereta api Jakarta-Surabaya, serta sistem jaringan stasiun kereta api penumpang meliputi Stasiun Gombang, Stasiun Karanganyar, Stasiun Kebumen, dan Stasiun Kutowinangun; sistem jaringan stasiun kereta api barang meliputi Stasiun Gombang dan Stasiun Kebumen; dan sistem jaringan stasiun kereta api operasi meliputi Stasiun Gombang, Stasiun Ijo, Stasiun Karanganyar, Stasiun Kebumen, Stasiun Kutowinangun, Stasiun Prembun, Stasiun Soka dan Stasiun Wonosari.

Rencana struktur ruang sistem jaringan transportasi laut berupa pelabuhan sungai dan danau Dermaga Waduk Sempor, Dermaga Logending, Dermaga Kademangan, Kali Ijo Kademangan Demangsari Kecamatan Ayah, dan Dermaga Prasasti Waduk Wadaslintang. Selain itu, sistem jaringan transpotasi laut berupa pelabuhan perikanan pantai Logending dan pangkalan pendaratan ikan (Argopeni Kecamatan Ayah, Karangduwur Kecamatan Ayah, Lembupurwo Kecamatan Mirit, Pasir Kecamatan Ayah, Rowo Kecamatan Mirit, Surerejan Kecamatan Puring, Tanggulangin Kecamatan Klirong, dan Tegalretno Kecamatan Petanahan).



Sumber: Perda No 1 Tahun 2024, RTRW 2024-2044, 2024

Gambar 2.89

Peta Rencana Sistem Jaringan Transportasi Kabupaten Kebumen

Sistem jaringan transportasi yang menghubungkan Pusat Kegiatan Kabupaten Kebumen (PKW, PKL, PPK, dan PPL) sebagai hubungan fungsional perkembangan wilayah dalam mendukung pencapaian fokus pembangunan daerah. Indikasi program sistem jaringan transportasi dalam melayani kebutuhan aktivitas pusat kegiatan Kabupaten Kebumen yaitu pengembangan jalan arteri primer, pengembangan jalan kolektor primer, pengembangan jalan lokal primer, pembangunan jalan tol, pembangunan jalan layang (*flyover*) di perlintasan rel kereta api, pembangunan jalan lingkar (Gombang, Karanganyar, Prembun), pengembangan terminal penumpang tipe A, pengembangan terminal penumpang tipe C, pembangunan terminal penumpang tipe C, pembangunan terminal penumpang tipe B, pembangunan terminal barang, pengembangan dan pemeliharaan jembatan, pengembangan jaringan jalur kereta api antarkota (*double track* Jawa Selatan), pengembangan jaringan jalur kereta api antarkota, pengembangan stasiun penumpang, pengembangan stasiun barang, pengembangan stasiun operasi, pengembangan dermaga, pengembangan pelabuhan perikanan pantai logending, pengembangan pangkalan pendaratan ikan, dan pembangunan tempat pelelangan ikan.

Tabel 2.28
Pusat Kegiatan dan Indikasi Program Sistem Jaringan Transportasi

No	Kecamatan	Pusat Kegiatan				Indikasi Program sistem jaringan transpotasi																			
		PKW	PKL	PPK	PPL	Pengembangan Jalan Arteri Primer	Pengembangan Jalan Kolektor Primer	Pengembangan Jalan Lokal Primer	Pembangunan Jalan Tol	Pengembangan Terminal Penumpang	Pengembangan Terminal Penumpang	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe	Pembangunan Terminal barang	Pengembangan dan Pemeliharaan	Pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota (Double Track Jawa Selatan)	Pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api	Pengembangan Stasiun Penumpang	Pengembangan Stasiun Barang	Pengembangan Stasiun Operasi	Pengembangan Dermaga	Pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai Logging	Pengembangan Pangkalan Pendaratan	Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan	
1.	Ayah			√	√		√	√	√				√									√	√	√	
2.	Buayan		√		√	√	√	√	√				√												
3.	Puring			√	√		√	√					√										√	√	
4.	Petanahan			√			√	√	√				√										√		
5.	Klirong	√		√		√	√	√	√						√								√		
6.	Buluspesantren	√		√			√	√	√				√		√									√	
7.	Ambal		√	√	√	√	√	√	√				√												
8.	Mirit		√	√			√	√	√				√										√	√	
9.	Prembun		√			√	√	√						√											
10.	Kutowinangun		√			√	√	√										√		√					
11.	Alian	√					√	√	√				√		√										
12.	Kebumen	√		√		√	√	√	√	√	√		√		√	√	√	√	√	√					
13.	Pejagoan	√					√	√	√						√				√						
14.	Sruweng		√			√		√																	
15.	Adimulyo		√				√	√	√																
16.	Kuwarasan		√			√		√	√																
17.	Rowokele		√		√	√		√	√					√						√					
18.	Sempor		√		√		√	√													√				
19.	Gombang		√			√		√			√	√		√				√	√	√					
20.	Karanganyar		√			√		√				√						√		√					
21.	Karanggayam				√		√	√			√														
22.	Sadang				√			√																	
23.	Bonorowo	X	X	X	X			√																	
24.	Padureso				√		√	√													√				
25.	Poncowarno				√		√	√																	
26.	Karangsambung			√			√	√				√													

Sumber: Perda No 1 Tahun 2024, RTRW 2024-2044, 2024, diolah

Keterangan:
√ : Indikasi Program
 : Non Indikasi Program

Analisis growth diagnostics per provinsi di Wilayah Jawa dalam RPJPN 2025-2045, hambatan pertumbuhan ekonomi (the most binding constraints) di Provinsi Jawa Tengah adalah kualitas SDM bidang pendidikan, bidang ketenagakerjaan, dan bidang kesehatan. Analisis tersebut relevan terhadap kondisi di Kabupaten Kebumen. RLS Kabupaten Kebumen masih sebesar 7,85 tahun (2022) yang menunjukkan bahwa secara rata-rata penduduk berusia 25 tahun ke atas di Kabupaten Kebumen telah menyelesaikan pendidikan hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP) kelas VIII. Penduduk berumur 15 tahun ke atas bekerja yang termasuk angkatan kerja menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan didominasi berpendidikan SD sebesar 53,86 persen, SMP sebesar 20,19 persen, SMA sebesar 19,91 persen, dan perguruan tinggi sebesar 6,04 persen. Pengangguran Kabupaten Kebumen didominasi berpendidikan SMA sebesar 54,52 persen dan hanya 5,51 persen berpendidikan perguruan tinggi. Angka Kesakitan Kabupaten Kebumen cenderung meningkat semula 13,16 persen (2018) menjadi 14,24 persen (2022). Kondisi ini tentunya perlu menjadi perhatian dalam pengembangan pusat-pusat pertumbuhan Wilayah Kabupaten Kebumen 2045.

Selain itu, pengembangan pusat-pusat pertumbuhan Wilayah Kabupaten Kebumen 2045 dalam mendukung fokus pembangunan daerah perlu memperhatikan faktor-faktor penghambat bidang ekonomi, sosial, sarana prasarana, desentralisasi, otonomi daerah, sosial budaya, dan ekologi. Faktor penghambat bidang ekonomi diantaranya kesesuaian penggunaan lahan, menurunnya kualitas lingkungan hidup, dan rendahnya penggunaan teknologi tinggi pada industri karena skala industri di Kabupaten Kebumen masih didominasi Industri Kecil. Bidang sosial diantaranya rendahnya daya saing pendidikan, tingginya kasus penyakit tidak menular, kasus stunting, insiden TB, proyeksi penduduk yang menuju ageing population sehingga pelayanan kesehatan lansia menjadi tantangan, kesenjangan kompetensi dan daya saing tenaga kerja dengan kebutuhan pasar kerja lokal maupun luar daerah, lemahnya manajemen dan rendahnya produktivitas UMKM, dan belum meratanya akses terhadap pelayanan dasar (kumuh, sanitasi aman, dan air minum aman). Bidang sarana prasarana memiliki hambatan yaitu masih tingginya kebutuhan energi pada rumah tangga dan industri, belum optimalnya pemanfaatan TIK dalam kegiatan pada sektor-sektor produktif, tingginya kebutuhan air baku dan irigasi disisi lain berkurangnya daerah tangkapan air, dan meningkatnya ekstraksi air tanah menyebabkan penurunan permukaan air tanah. Pada bidang desentralisasi dan otonomi daerah hambatan yang ditemui yaitu tingginya ekspektasi masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan yang adaptif, andal, berbasis IoT (Internet of Think), dan tuntutan peran serta masyarakat dalam pembangunan. Faktor penghambat pada bidang sosial, budaya, dan ekologi diantaranya belum optimalnya peningkatan Indeks Pembangunan Kebudayaan, masih lemahnya peran perempuan dalam pengambilan kebijakan, belum optimalnya pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), dan karakter wilayah Kabupaten Kebumen yang rawan bencana.

BAB III

Permasalahan dan Isu Strategis

Rumusan permasalahan merupakan pernyataan kondisi yang dapat disimpulkan dari kesenjangan antara capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia. Perumusan permasalahan dalam RPJPD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045 diidentifikasi berdasarkan Bab II dan Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045 serta hasil penjarangan aspirasi masyarakat. Rumusan isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa depan. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan. Perumusan isu strategis diawali dengan identifikasi isu strategis sesuai konteks (isu global, nasional, dan regional) yang dapat memengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung. Perumusan permasalahan dan isu strategis juga diidentifikasi melalui *Focus Group Discussion* (FGD) serta pembahasan dengan perangkat daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen.

3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Perumusan permasalahan pembangunan daerah disajikan berdasarkan 4 (empat) aspek pembangunan yang merupakan permasalahan pembangunan daerah dan sifatnya *crosscutting issues*, bukan permasalahan urusan penyelenggaraan pemerintahan. Perumusan permasalahan pembangunan daerah dijabarkan secara deskriptif dalam bentuk uraian kalimat, bagian demi bagian dengan sistematika berdasarkan 4 (empat) aspek pembangunan yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing serta aspek pelayanan umum.

Permasalahan yang teridentifikasi melalui proses perumusan permasalahan pembangunan daerah berdasarkan 4 (empat) aspek pembangunan dieksplorasi menggunakan tabel kerja pemetaan permasalahan pembangunan untuk menentukan hubungan sebab dan akibat dari munculnya permasalahan pembangunan sehingga ditemukan masalah pokok, masalah dan akar masalah dari masalah utama. Akar masalah merupakan hal-hal yang menjadi penyebab munculnya masalah, sedangkan masalah merupakan hal-hal yang menyebabkan munculnya masalah pokok yang akan diselesaikan melalui pembangunan jangka panjang 20 tahun ke depan.

3.1.1. Permasalahan Pembangunan Daerah pada Aspek Geografi dan Demografi

Masalah utama pembangunan daerah Kabupaten Kebumen pada aspek geografi dan demografi yaitu (1) Penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menuju *net zero emission*; dan (2) Peningkatan kualitas penduduk berumur 15 tahun ke atas yang termasuk angkatan kerja.

1. Masalah Utama penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menuju *net zero emission*

Masalah utama penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menuju *net zero emission* tercermin dari emisi GRK Kabupaten Kebumen tahun 2023 sebesar 146.155,91 tonCO₂eq. Masalah pokoknya adalah belum optimalnya peningkatan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan

iklim, dimana terdapat masalah pencapaian penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang belum optimal. Akar masalahnya meliputi: (a) Pengendalian emisi gas rumah kaca di Kabupaten Kebumen belum optimal; (b) Belum optimalnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim; (c) Daya tampung kualitas air diperkirakan akan terus menurun mengakibatkan krisis air bersih seiring meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi; (d) Masih rendahnya kesadaran seluruh pihak dalam mengurangi timbunan sampah dari aktivitas konsumsi maupun produksi; (e) Pencapaian akses terhadap sanitasi aman belum optimal (f) Kabupaten Kebumen termasuk daerah risiko bencana sedang; dan (g) Penerapan ketentuan RTRW belum optimal.

- a. **Pengendalian emisi gas rumah kaca di Kabupaten Kebumen belum optimal** ditunjukkan oleh penurunan emisi GRK yang cenderung fluktuatif dimana tahun 2023 mencapai sebesar 1.000,03 tonCO₂eq. Hal ini diakibatkan lemahnya pengendalian aktivitas masyarakat (pembakaran jerami, kotoran ternak, pemakaian bahan bakar fosil dan sebagainya), kurang optimalnya edukasi kepada masyarakat akan dampak emisi gas rumah kaca, dan belum disusunnya rencana aksi daerah penanggulangan efek gas rumah kaca. Selain itu, penerapan prinsip ekonomi sirkuler dan emisi rendah karbon juga belum optimal. Kondisi tersebut juga tercermin dalam permasalahan pembangunan berkelanjutan sebagaimana tertuang di dalam dokumen KLHS RPJPD, dimana penguatan wilayah-wilayah yang rentan terhadap perubahan iklim belum optimal.
- b. **Status daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di Kabupaten Kebumen perlu dijaga.** Pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) cenderung menurun dari 71,61 pada tahun 2018 menjadi 67,16 pada tahun 2023. Status daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup perlu dijaga. Kualitas air dan tanah diperkirakan turun akibat peningkatan aktivitas perekonomian. Indeks kualitas air menurun dari 63,33 (2019) menjadi 51,82 (2023) dan indeks kualitas tutupan lahan turun dari 70,66 (2019) menjadi 50,63 (2023). Penurunan tersebut disebabkan adanya eksploitasi SDA yang menyebabkan kerusakan lingkungan, adanya alih fungsi lahan di daerah tangkapan air dari hutan heterogen menjadi hutan homogen yang bernilai ekonomis, belum terpenuhinya persentase luas lahan terbuka minimal 30 persen untuk umum serta rendahnya kesadaran pelaku usaha skala kecil dalam pengelolaan pencemaran air. Kondisi tersebut juga tercermin dalam permasalahan pembangunan berkelanjutan sebagaimana tertuang di dalam dokumen KLHS RPJPD, dimana peningkatan pelestarian dan perlindungan sumber daya hutan dan lahan belum optimal.
- c. **Daya tampung kualitas air diperkirakan akan terus menurun mengakibatkan krisis air bersih seiring meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi.** Menurunnya kemampuan ekosistem menjaga keseimbangan siklus air disebabkan aktivitas penambangan karst ilegal yang menyebabkan sumber mata air berkurang dan penebangan hutan yang menyebabkan berkurangnya penyerapan air ke tanah. Tidak hanya itu, beban pencemaran limbah domestik berisiko mencemari badan air tanpa adanya pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), Instalasi Pengolahan Limbah Terpadu (IPLT) dan Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) yang memadai. Selain itu, pencemaran sumber daya air juga terjadi akibat kurangnya pengelolaan limbah dari industri, pertanian, maupun

pertambangan. Kondisi pencapaian indeks kualitas air Kabupaten Kebumen memengaruhi cakupan air minum perpipaan dimana persentase akses air minum aman masih sebesar 26,74 persen (2023). Kondisi tersebut juga tercermin dalam permasalahan pembangunan berkelanjutan sebagaimana tertuang di dalam dokumen KLHS RPJPD, dimana penguatan kelembagaan sumber daya air dan peningkatan akses air minum perlu dioptimalkan.

- d. **Masih rendahnya kesadaran seluruh pihak dalam mengurangi timbulan sampah dari aktivitas konsumsi maupun produksi.** Tanpa adanya intervensi, daya tampung rata-rata lahan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dapat diindikasikan akan penuh lebih cepat. Daya tampung TPS sebesar 607,75 m³ (2023) tidak seimbang dengan volume sampah yang dihasilkan sebesar 1.932,75 m³ dari Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS) sejumlah 221 unit. Sampah yang terkelola dilihat dari persentase pengolahan sampah masih sebesar 52,45 persen. Hal ini dapat berkontribusi pada *overcapacity* TPA. Kualitas air dan tanah juga diperkirakan turun akibat upaya penanganan limbah dan sampah yang tidak optimal saat aktivitas perekonomian terus meningkat. Selain itu, dengan adanya perilaku masyarakat yang membuang sampah di sungai dan belum tersedianya sarana prasarana pengelolaan Limbah Bahan Beracun Berbahaya (LB3) maka perlu upaya meningkatkan kesadaran masyarakat atas pengelolaan sampah yang ramah lingkungan melalui *Reduce, Reuse, Recycle, Recovery, Repair* (5R) dan peningkatan fasilitasi penyediaan sarana prasarana pengelolaan LB3. Prinsip menuju *zero waste* yang sedang digencarkan perlu diterapkan secara optimal dengan pelaksanaan metode pilah-kumpul-olah-manfaatkan pada sistem pengelolaan sampah/ limbah domestik dan industri disertai dengan upaya konservasi TPA sampah domestik dan penyediaan fasilitas pengolahan limbah B3 bagi industri. Kondisi tersebut juga tercermin dalam permasalahan pembangunan berkelanjutan sebagaimana tertuang di dalam dokumen KLHS RPJPD, dimana peningkatan pengelolaan sampah yang terintegrasi dari hulu sampai hilir belum optimal.
- e. **Pencapaian akses terhadap sanitasi aman belum optimal.** Penyediaan akses dasar masyarakat terhadap sanitasi aman menunjukkan peningkatan, tetapi perlu terus didorong agar mampu menjangkau seluruh penduduk dan wilayah. Pencapaian persentase akses sanitasi aman Kabupaten Kebumen masih sebesar 2,02 persen (2023) akibat terbatasnya kesadaran dan kapasitas masyarakat menggunakan jamban sehat, pengelolaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD), dan pemanfaatan IPLT. Kondisi tersebut juga tercermin dalam permasalahan pembangunan berkelanjutan sebagaimana tertuang di dalam dokumen KLHS RPJPD, dimana perlu peningkatan pemerataan akses sanitasi yang aman di masyarakat.
- f. **Kabupaten Kebumen termasuk daerah risiko bencana sedang.** Hal ini tercermin dari nilai Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Kebumen tercatat mengalami penurunan sejak tahun 2019 – 2022. Tercatat IRB Kabupaten Kebumen sebesar 131,45 (2019) mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi 110,78 (2023), menggolongkan Kabupaten Kebumen ke dalam daerah dengan risiko bencana sedang. Kondisi tersebut juga tercermin dalam permasalahan pembangunan berkelanjutan sebagaimana tertuang di dalam dokumen KLHS RPJPD, penguatan wilayah tangguh bencana terutama pada wilayah rentan belum optimal.

- g. **Penerapan ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) belum optimal.** Peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen dalam penegakan penerapan RTRW belum optimal. Pengendalian pemanfaatan ruang dalam RTRW memerlukan advokasi penyelenggaraan penataan ruang bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah mengenai unsur pengendalian pemanfaatan ruang yaitu sanksi, perizinan, dan ketentuan insentif-disinsentif. Pemerintah memiliki kewenangan penuh terhadap arah pembangunan ke depan sehingga pelaksanaan RTRW harus diwujudkan sesuai dengan kaidah-kaidah penataan ruang. Kurangnya pemahaman sumber daya manusia terhadap pengendalian pemanfaatan ruang merupakan salah satu kendala yang dihadapi. Pengendalian pemanfaatan ruang dibutuhkan instrumen yang lebih spesifik seperti *zoning regulation* yang merupakan instrumen pengendalian mikro. *Zoning regulation* dilegalkan melalui peraturan maupun keputusan bupati sebelum pembentukan peraturan daerah. Selain itu, perlu adanya pemantauan dan evaluasi integrasi pola ruang dan struktur ruang dalam RTRW pada perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kebumen (RPJPD, RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD, dan Renja Perangkat Daerah) secara berkala, seiring dengan bertambahnya penduduk dan meningkatnya kebutuhan sosial ekonomi masyarakat.

2. Masalah Utama peningkatan kualitas penduduk berumur 15 tahun ke atas yang termasuk angkatan kerja

Masalah utama peningkatan kualitas penduduk berumur 15 tahun ke atas yang termasuk angkatan kerja, tercermin dari penduduk bekerja sebagian besar masih berpendidikan SD sebesar 46,03 persen sedangkan pengangguran sebagian besar berpendidikan SMA 53,76 persen. Masalah pokoknya adalah belum optimalnya peningkatan kualitas penduduk usia produktif (15-59 tahun), dimana terdapat masalah pengurangan kesenjangan ketersediaan lapangan pekerjaan dengan pertumbuhan penduduk usia kerja belum optimal. Akar masalahnya yaitu **masih rendahnya penciptaan tenaga kerja yang kompeten, peningkatan akses kesempatan kerja perlu dimaksimalkan dengan pemanfaatan potensi lokal.**

Fasilitasi tenaga kerja dalam mengisi pasar kerja di dalam dan di luar daerah pada sektor-sektor produktif termasuk lapangan kerja hijau, biru, dan digital perlu dilakukan bagi angkatan kerja yang jumlahnya mencapai 813.172 orang (2023). Kesempatan kerja bagi penduduk masih terbatas karena jumlah lapangan kerja tidak sebanding dengan penambahan jumlah angkatan kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja meningkat dalam lima tahun terakhir, semula 70,35 persen (2011) menjadi 74,54 persen (2023). Rendahnya produktivitas penduduk yang bekerja dan rendahnya kualitas tenaga kerja yang tersedia (budaya kerja, latar belakang pendidikan, ketrampilan, dan kompetensi) mengakibatkan kesempatan kerja pada bidang dan posisi tertentu tidak dapat diakses oleh tenaga kerja asal Kebumen. Penduduk bekerja sebagian besar masih berpendidikan SD yaitu sebesar 46,03 persen (2023).

Pengangguran didominasi berpendidikan SMA sebesar 53,76 persen (2023). Selain itu, proporsi penduduk berusia 15-64 tahun (usia produktif) meningkat semula 63,77 persen (2011) menjadi 68,49 persen (2022). Selanjutnya, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami kenaikan dari 2011 sebesar 4,73 persen menjadi 5,11 persen pada tahun 2023. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) meningkat dari 70,35 persen

(2011) menjadi 74,54 persen (2023) namun tidak diimbangi dengan perluasan kesempatan kerja sehingga angka TPT masih tinggi.

3.1.2. Permasalahan Pembangunan Daerah pada Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Masalah utama pembangunan daerah pada aspek kesejahteraan masyarakat meliputi (1) Peningkatan perekonomian Kabupaten Kebumen dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat; (2) Pembangunan kualitas sumber daya manusia seutuhnya menjadi tantangan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat Kabupaten Kebumen yang sehat, berpendidikan tinggi, dan berpenghasilan layak; (3) Peningkatan kesejahteraan penduduk pada semua usia.

1. Masalah Utama peningkatan perekonomian Kabupaten Kebumen dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat

Masalah utama peningkatan perekonomian Kabupaten Kebumen dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat tercermin dari pertumbuhan ekonomi tahun 2023 yang mencapai 5,66 persen. Masalah pokoknya adalah peningkatan perekonomian daerah yang inklusif dalam kesempatan kerja dan ketersediaan lapangan pekerjaan yang sesuai potensi lokal belum optimal, dimana terdapat masalah pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dalam mendukung perekonomian daerah belum optimal. Akar masalahnya meliputi (a) Sektor produktif yang merupakan kunci pertumbuhan ekonomi perlu dioptimalkan produktivitasnya; (b) Penurunan kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan memengaruhi kesejahteraan petani dan nelayan; (c) Sektor industri pengolahan sebagai sektor berkembang yang tumbuh cepat tetapi kurang berdaya saing; (d) Tantangan deindustrialisasi memengaruhi peningkatan produktivitas sektor industri pengolahan dalam mendukung optimalisasi penyerapan tenaga kerja; (e) Sektor Koperasi dan UMKM belum optimal dalam meningkatkan produktivitas ekonomi; (f) Potensi sumber daya dan posisi strategis Kebumen belum dimanfaatkan untuk sektor produksi dan perdagangan serta peningkatan investasi dalam integrasi perekonomian daerah dengan perekonomian regional, nasional dan internasional; (g) Sektor pariwisata berpotensi dioptimalkan melalui *Global Geopark* Kebumen; (h) Belum optimalnya peningkatan pendapatan penduduk; (i) Pengendalian inflasi perlu dimaksimalkan; dan (j) Teknologi informasi dan komunikasi menciptakan tantangan maupun peluang bagi peningkatan produktivitas ekonomi.

- a. **Sektor produktif yang merupakan kunci pertumbuhan ekonomi perlu dioptimalkan produktivitasnya.** Struktur Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) Kabupaten Kebumen pada tahun 2023 didominasi oleh sektor industri pengolahan dengan kontribusi sebesar 22,24 persen (naik dari 20,3 persen pada tahun 2018). Selanjutnya, kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mencapai 20,03 persen (angka ini menurun dari tahun 2018 yang sebesar 22,63 persen). Sektor ketiga terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Kebumen adalah perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor. Sektor ini pada tahun 2023 memberikan kontribusi sebesar 14,67 persen (menurun dari 15,01 persen pada tahun 2018). Berikutnya adalah sektor jasa pendidikan, walaupun jika dibandingkan tahun 2018 menurun dari 9,72 persen. Namun, kontribusi sektor ini mampu menempati urutan ke empat terbesar pada tahun 2023 dengan kontribusi sebesar 9,06 persen. Pada posisi ke lima adalah sektor konstruksi dengan kontribusi sebesar 7,93 persen atau meningkat dari 7,2 persen pada tahun 2018.

Analisis *Location Quotient* (LQ) menunjukkan sektor-sektor tersebut merupakan sektor basis meskipun produktivitas sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 1,61 persen (2023) masih belum maksimal. Potensi sektor ini masih sangat besar untuk dikembangkan, namun dianggap tidak mampu menjamin kesejahteraan petani dan minat generasi muda pada sektor ini semakin menurun.

Berdasarkan analisis tipologi *klassen* dan analisis sektor ekonomi unggulan, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan sektor yang potensial namun tumbuh lambat dan tidak berdaya saing sehingga perlu sentuhan IPTEKIN untuk meningkatkan produktivitasnya serta menjamin keberlanjutan dan kesejahteraan pada sektor ini. Produktivitas sektor pertanian tidak optimal disebabkan oleh perubahan iklim, lambatnya regenerasi petani dan nelayan, kurangnya tingkat keterampilan petani dan nelayan, terbatasnya adopsi teknologi dan akses keuangan, belum adanya standar proses, masih lemahnya kelembagaan ekonomi petani dan nelayan yang berbadan hukum, semakin berkurangnya daya dukung lahan pertanian dan terjadinya hambatan pada perikanan budidaya karena banyaknya kasus konflik pemanfaatan air dan lahan. Pencemaran *macro, micro, nano plastic*, hujan asam, limbah industri, limbah rumah tangga, limbah pertanian, dan limbah perikanan juga memengaruhi produktivitas sektor ini. Kondisi tersebut juga tercermin dalam permasalahan pembangunan berkelanjutan sebagaimana tertuang di dalam dokumen KLHS RPJPD, dimana perlu pengembangan sektor pertanian berkelanjutan, kondisi pengairan untuk pertanian belum optimal, serta alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan terbangun. Berbagai faktor tersebut menyebabkan kontribusi sektor pertanian, perikanan dan kehutanan terus melambat.

- b. **Penurunan kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan memengaruhi kesejahteraan petani dan nelayan** dilihat dari penurunan pencapaian Nilai Tukar Petani (NTP) menjadi 103,20 persen (2022) dan pencapaian Nilai Tukar Nelayan (NTN) yang turun menjadi 170 persen (2022). Kondisi tersebut juga tercermin dalam permasalahan pembangunan berkelanjutan sebagaimana tertuang di dalam dokumen KLHS RPJPD, yaitu NTP mengalami penurunan. Meskipun demikian, sektor pertanian memiliki peran strategis untuk menjaga ketahanan pangan.
- c. **Sektor industri pengolahan sebagai sektor berkembang yang tumbuh cepat tetapi kurang berdaya saing.** Sektor industri pengolahan belum optimal dalam peningkatan kualitas produk, jaringan akses pemasaran, dan peran IPTEKIN dalam pengembangannya agar menjadi tujuan investasi pengembangan usaha, mampu melakukan ekspor, dan menciptakan lapangan kerja baru. Walaupun kontribusinya terus meningkat, pencapaian ini tidak maksimal disebabkan terbatasnya kapasitas pelaku usaha kecil dan menengah mengenai manajemen usaha, kewirausahaan, dan pemasaran termasuk inovasi produk dan digital marketing. Kapasitas Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen masih terbatas dalam fasilitasi dan pendampingan manajemen rantai pasokan bagi keberlanjutan usaha para pelaku usaha kecil dan menengah diantaranya fasilitasi akses pengembangan usaha dalam jaringan usaha dengan perbankan/lembaga keuangan serta dengan pelaku usaha sedang besar, termasuk optimalisasi pemanfaatan potensi dalam pengembangan usaha dan akses ke teknologi.

Selain itu, proses hilirisasi dari hasil sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan ataupun sektor primer lainnya untuk menjadi *input* industri pengolahan dengan juga memaksimalkan partisipasi tenaga kerja lokal belum optimal. Selain itu, peran BUMD dalam aktivitas ekonomi produktif sekaligus meningkatkan produktivitas BUMD perlu ditingkatkan karena tingkat *Return on Asset* (ROA) BUMD hingga Tahun 2023 baru mencapai 4,01 persen.

- d. **Tantangan deindustrialisasi memengaruhi peningkatan produktivitas sektor industri pengolahan dalam mendukung optimalisasi penyerapan tenaga kerja.** Gejala deindustrialisasi secara nasional juga tampak dari pertumbuhan sektor industri pengolahan yang kerap berada di bawah laju pertumbuhan ekonomi. Deindustrialisasi terjadi akibat terus menyusutnya sektor industri hingga produktivitas yang makin menurun. Selain itu, sektor jasa yang tak menghasilkan barang serta dengan produktivitas rendah terus mendominasi kegiatan perekonomian. Penambahan tenaga kerja pada sektor jasa merupakan peralihan tenaga kerja dari sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan. Hal ini juga terjadi di Kabupaten Kebumen, dimana hingga tahun 2023 industri pengolahan belum menjadi lapangan usaha utama bagi tenaga kerja. Penduduk yang bekerja di sektor industri pengolahan hanya sebesar 29,95 persen masih dibawah sektor jasa sebesar 41,32 persen walaupun sudah lebih tinggi dibandingkan bekerja di sektor pertanian sebesar 28,72 persen. Untuk itu perlu dilakukan upaya optimalisasi penyerapan tenaga kerja termasuk tenaga kerja perempuan dengan terus meningkatkan sektor-sektor ekonomi produktif.
- e. **Sektor Koperasi dan UMKM belum optimal dalam meningkatkan produktivitas ekonomi.** Peran koperasi dan UMKM dalam pemberdayaan sekaligus peningkatan produktivitas ekonomi rakyat perlu terus dikembangkan. Hal ini tercermin dari persentase koperasi aktif berfluktuasi dari 84 unit pada Tahun 2019 menjadi 90 unit di Tahun 2023 dengan total omset meningkat signifikan dari Rp461.458.055,00 pada Tahun 2019 menjadi Rp180.283.160.378,00 pada Tahun 2023. Namun demikian angka ini masih sangat kecil jika diproporsikan terhadap total PDRB yaitu hanya sekitar 0,5 persen. Sementara itu, jumlah UMKM juga terus meningkat dari 45.715 unit pada tahun 2019 menjadi 46.095 unit pada Tahun 2023 dengan UMKM yang naik kelas dari 31 unit pada Tahun 2019 menjadi 1.047 unit di Tahun 2023.
- f. **Potensi sumber daya dan posisi strategis Kebumen belum dimanfaatkan untuk sektor produksi dan perdagangan serta peningkatan investasi dalam integrasi perekonomian daerah dengan perekonomian regional, nasional dan internasional.** Dalam beberapa tahun terakhir inflasi menjadi masalah utama baik bagi perekonomian daerah, nasional maupun global. Bagi Kabupaten Kebumen sendiri pergerakan inflasi utamanya pada kebutuhan pokok akan memengaruhi perkembangan garis kemiskinan. Pergerakan harga tercermin dari laju indeks implisit PDRB Kabupaten Kebumen yang mencapai 4,28 persen pada Tahun 2022 dan 3,78 persen pada tahun 2023 cukup meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yaitu 1,76 persen pada Tahun 2020 dan 1,75 persen pada tahun 2021. Dikarenakan bukan wilayah yang dihitung tingkat inflasi oleh BPS, laju indeks implisit PDRB ini memiliki pola yang cenderung sama dengan pergerakan laju inflasi *sister city* Purwokerto di periode yang sama. Cukup *volatile* nya perkembangan harga di Kabupaten Kebumen dikarenakan banyaknya barang dan jasa

yang beredar di wilayah Kebumen berasal dari luar daerah, padahal Kebumen memiliki potensi sumber daya dalam memproduksi beberapa barang dan jasa tersebut termasuk kebutuhan pokok. Selain itu, belum banyak distributor di Kabupaten Kebumen sehingga rantai perdagangan lebih panjang dan memakan biaya lebih padahal Kebumen memiliki kemudahan akses dan posisi strategis. Selain itu, potensi sumber daya dan posisi strategis Kebumen juga belum optimal dalam upaya peningkatan investasi. Hal ini tercermin dari menunjukkan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) secara nominal meningkat dari Rp 6.022.328,52 juta (2021) menjadi Rp 6.729.204,56 juta (2023), akan tetapi proporsinya terhadap total PDRB justru menurun dari 20,37 persen pada tahun 2021 menjadi 18,82 persen pada Tahun 2023. Sementara itu, upaya peningkatan akses permodalan di Lembaga keuangan oleh dunia usaha di Kabupaten Kebumen juga belum optimal. Hal ini dikarenakan hingga Tahun 2023 menunjukkan proporsi kredit di Bank BUMD milik Pemerintah Kabupaten Kebumen terhadap PDRB Kabupaten Kebumen baru mencapai 1,43 persen. Namun sebelumnya juga perlu upaya peningkatan simpanan dana pihak ketiga atau Tabungan Masyarakat Kebumen di Bank BUMD tersebut. Hal ini dikarenakan pada tahun 2023 proporsi total dana pihak ketiga terhadap PDRB baru mencapai sebesar 1,59 persen. Secara umum belum optimalnya pemanfaatan sumber daya dan posisi strategis Kabupaten Kebumen dikarenakan masih rendahnya daya saing dan minimnya inovasi.

- g. **Sektor pariwisata belum dioptimalkan melalui *Global Geopark Kebumen*.** Kabupaten Kebumen memiliki potensi alam, budaya, kemudahan akses hingga letak yang cukup strategis dalam pengembangan pariwisata tidak hanya bagi wisatawan domestik, tapi juga wisatawan mancanegara. Walaupun jumlah kunjungan wisatawan terus meningkat dari 1.079.169 orang pada Tahun 2018 menjadi 2.151.109 pada Tahun 2023. Namun baru terdapat 11 wisatawan mancanegara mengunjungi Kabupaten Kebumen pada Tahun 2023 meningkat jika dibandingkan Tahun 2021 sebanyak 5 orang dan tahun 2022 sebanyak 9 orang. Untuk itu, pengembangan *Global Geopark Kebumen* perlu terus dioptimalkan. Sementara itu sebagai pendukung industri pariwisata juga perlu didorong pengembangan sektor penyediaan akomodasi makan dan minum yang terdiri dari restoran atau tempat makan hingga jasa catering termasuk penyediaan makan dan minum di hotel. Secara nominal PDRB sektor penyediaan akomodasi makan dan minum terus meningkat dari Rp 547 529,68 Juta pada Tahun 2018 menjadi Rp 977 529,02 Juta pada Tahun 2023. Akan tetapi, proporsi terhadap total PDRB masih cukup kecil hanya 2,73 persen pada Tahun 2023. Sektor pariwisata dan penyediaan akomodasi makan dan minum merupakan sektor padat karya dan dapat memanfaatkan sumber daya lokal.
- h. **Belum optimalnya peningkatan pendapatan penduduk.** Belum optimalnya peningkatan pendapatan penduduk tercermin dari PDRB per kapita Kabupaten Kebumen pada tahun 2022 sebesar Rp 23.680 ribu menempati posisi lebih rendah dari Cilacap (Rp60.820 ribu), Banyumas (Rp34.800 ribu), Purworejo (Rp27.430 ribu), Wonosobo (Rp24.090 ribu), dan Banjarnegara (Rp24.060 ribu). Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen perlu fokus pada peningkatan pendapatan masyarakat dalam rangka mengoptimalkan peningkatan pengeluaran per kapita, serta fokus pada peningkatan perilaku dan kualitas konsumsi pada sebagian masyarakat yang masih rendah.

- i. **Pengendalian inflasi perlu dimaksimalkan.** Inflasi Kota Purwokerto merupakan representatif inflasi Kabupaten Kebumen. Inflasi Kota Purwokerto sebesar 2,61 persen dengan IHK sebesar 117,08. Komoditas yang menjadi penyumbang utama inflasi di Kota Purwokerto yaitu beras, telur ayam ras, tarif kereta api, rokok kretek filter, dan minyak goreng. Komoditas penyumbang inflasi perlu mendapat perhatian dalam pengendalian inflasi.
- j. **Teknologi informasi dan komunikasi menciptakan tantangan maupun peluang bagi peningkatan produktivitas ekonomi.** Kemudahan akses informasi belum dimanfaatkan bagi usaha produktif masyarakat. Di era globalisasi dan keterbukaan informasi seperti saat ini, pengembangan ekonomi masyarakat dapat terus ditingkatkan melalui kemudahan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi. Berdasarkan data BPS pada Tahun 2023 menunjukkan persentase rumah tangga di Kabupaten Kebumen yang pernah menggunakan akses internet dalam 3 bulan terakhir sudah cukup besar yaitu sebesar 82,31 persen dan hal ini bisa menjadi potensi yang perlu dimanfaatkan dengan baik.

2. Masalah Utama pembangunan kualitas sumber daya manusia seutuhnya untuk mewujudkan kehidupan masyarakat Kabupaten Kebumen yang sehat, berpendidikan tinggi, dan berpenghasilan layak

Masalah utama Pembangunan kualitas sumber daya manusia seutuhnya menjadi tantangan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat Kabupaten Kebumen yang sehat, berpendidikan tinggi, dan berpenghasilan layak, tercermin dari Indeks pembangunan manusia (IPM) rata-rata meningkat sebesar 0,61 poin per tahun sejak tahun 2011 (64,05) hingga 2023 (71,88) dengan pertumbuhan peningkatan sebesar 11,42 persen perlu ditingkatkan. Masalah pokok dari masalah utama adalah pembangunan sumber daya manusia Kabupaten Kebumen belum optimal, dimana terdapat masalah Peningkatan kualitas penduduk pada aspek kesehatan, pendidikan dan ekonomi perlu ditingkatkan. Akar masalah dari masalah, meliputi (a) Peningkatan kualitas kesehatan penduduk pada semua usia belum optimal; (b) Peningkatan pendidikan yang inklusif dan berkualitas belum optimal; (c) Belum optimalnya upaya pemajuan budaya dan pendidikan karakter; (d) Kualitas keluarga dan kesetaraan gender menjadi bagian penting yang perlu menjadi perhatian dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas; (e) Belum optimalnya kesempatan kerja bagi perempuan di Kabupaten Kebumen; dan (f) Belum optimalnya peningkatan ketimpangan pendapatan antar penduduk.

- a. **Peningkatan kualitas kesehatan penduduk pada semua usia belum optimal.** Status kesehatan masyarakat Kabupaten Kebumen perlu ditingkatkan agar terus membaik. Angka harapan hidup menunjukkan peningkatan dari semula 72,36 pada tahun 2011 menjadi 74,98 pada tahun 2023. Namun, status kesehatan masyarakat Kabupaten Kebumen belum optimal disebabkan tingkat kematian ibu, tingkat kematian bayi, angka kesakitan dan stunting masih tinggi. Pencapaian status kesehatan masyarakat terutama pada sepuluh tahun terakhir Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI) menunjukkan peningkatan yang signifikan dari semula 71,84 per 100.000 KH pada tahun 2013 menjadi 92,26 per 100.000 KH pada tahun 2023. Angka Kematian Bayi (AKB) cenderung mengalami peningkatan dari 9,53 per 1.000 KH (2013) menjadi 10,82 per 1.000 KH (2023). Angka kesakitan (morbiditas) di Kabupaten Kebumen meningkat menjadi sebesar 22,39 persen (2023). Prevalensi stunting masih menunjukkan angka sebesar 9,87 persen

(2023). Angka notifikasi kasus atau *Case Notification Rate* (CNR) di wilayah Kabupaten Kebumen meningkat menjadi 209 per 100.000 penduduk (2023). Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (*treatment coverage*) mencapai sebesar 95 persen (2023) serta angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (*treatment success rate*) mencapai sebesar 83 persen (2023). Selain itu, mendasari permasalahan pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan SDM bidang kesehatan sebagaimana tertuang di dalam dokumen KLHS RPJPD perlu menjadi perhatian, yaitu peningkatan upaya pengentasan penyakit menular, terabaikan dan tidak menular, serta peningkatan derajat kesehatan manusia perlu dimaksimalkan. Peningkatan kualitas kesehatan penduduk pada semua usia di Kabupaten Kebumen perlu menjadi perhatian dalam pembangunan Kabupaten Kebumen 2045.

- b. **Peningkatan pendidikan yang inklusif dan berkualitas belum optimal.** Pembangunan pendidikan dalam peningkatan kualitas SDM di Kabupaten Kebumen menunjukkan hasil yang baik namun masih perlu ditingkatkan. Rata-rata lama sekolah menunjukkan peningkatan dari 6,29 tahun (2011) menjadi 7,86 tahun (2023) dan harapan lama sekolah juga meningkat dari 11,65 tahun (2011) menjadi 13,37 tahun (2023). Namun kualitas kurikulum pendidikan juga perlu mendapatkan perhatian, secara nasional rata-rata nilai PISA Indonesia (membaca, matematika, dan sains) menempati posisi 74 dari 79 negara (2018). Kemampuan literasi membaca dan numerasi peserta didik jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Kebumen juga perlu mendapatkan perhatian. Berdasarkan data Rapor Pendidikan pada Tahun 2023 menunjukkan kemampuan literasi membaca siswa SD di Kabupaten Kebumen sebesar 84,28 persen dan siswa SMP sebesar 87,29 persen. Sementara itu, untuk kemampuan numerasi siswa SD sebesar 73,68 persen dan siswa SMP sebesar 82,34 persen. Berdasarkan rapor Pendidikan tahun 2023 tersebut menunjukkan kemampuan literasi dan numerasi siswa SD dan SMP perlu ditingkatkan. Sementara itu, berdasarkan data BPS pada Tahun 2023 menunjukkan baru 5,94 persen Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi, untuk itu ke depan perlu ditingkatkan jumlah penduduk Kebumen yang mengenyam Pendidikan tinggi. Dalam rangka mendukung literasi juga diperlukan peningkatan pemanfaatan perpustakaan dimana jumlah kunjungan ke perpustakaan hingga tahun 2023 mencapai 290.339 orang pada 1.003 perpustakaan yang ada. Selain itu, mendasari permasalahan pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan SDM bidang pendidikan sebagaimana tertuang di dalam dokumen KLHS RPJPD perlu menjadi perhatian, yaitu peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dasar perlu dimaksimalkan.
- c. **Belum optimalnya upaya pemajuan budaya dan pendidikan karakter.** Kearifan lokal dan nilai budaya belum sepenuhnya dioptimalkan sebagai modal dasar pembangunan masyarakat di Kabupaten Kebumen. Upaya melestarikan budaya, pada tahun 2023 tercatat sebanyak 4,01 persen upaya pelestarian cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) pada Tahun 2023 tercatat baru sebesar 4,01 persen. Hal ini dikarenakan masih rendahnya pendataan warisan budaya serta tidak mudahnya aturan hingga pendanaan dalam pelestarian situs budaya utamanya yang dimiliki oleh individu perseorangan. Sementara itu, kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian pada Tahun 2023 baru sebesar 18,33 persen. Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya peningkatan aktivitas ekonomi yang tercipta sebagai hasil dari

pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan, belum optimalnya branding produk budaya asli dan budaya mencintai produk lokal Kabupaten Kebumen serta belum optimalnya kolaborasi pemerintah dengan pelaku seni. Untuk itu, Kabupaten Kebumen perlu menjamin peningkatan penyelenggaraan pembangunan kebudayaan yang terintegrasi dalam pengembangan Geopark Kebumen.

Selanjutnya, hal penting yang perlu menjadi perhatian adalah bahwa pembangunan SDM tidak dapat dipisahkan dari pembangunan karakter. SDM yang kompetitif dan unggul merupakan proses dan output dari karakter-karakter yang unggul pula. Secara sifat dan coraknya, akhlak atau karakter dibagi menjadi tiga jenis yaitu karakter religius, karakter moral, dan karakter kinerja. Karakter religius adalah karakter yang bersifat religius, terkait dengan ajaran agama dan keimanan. Karakter moral adalah karakter yang bersifat moralitas, terkait dengan ajaran dan nilai-nilai moral baik dan buruk, interaksi antar manusia dengan Tuhan dan antar manusia dengan manusia serta alam sekitar atau lingkungannya. Sedangkan karakter kinerja adalah implementasi dari nilai-nilai, pengetahuan dan budaya kerja yang ada dalam sebuah masyarakat juga agama. Biasanya semakin tinggi nilai-nilai, pengetahuan dan budaya kerja sebuah masyarakat atau sebuah bangsa, semakin kuat pula karakter kinerja tertanam dan membudaya dalam kehidupan seseorang. Oleh karena itu, pembangunan karakter menjadi aspek vital dalam pembangunan manusia yang perlu diintegrasikan ke dalam muatan lokal pendidikan baik di tingkat pendidikan dasar maupun pendidikan anak usia dini.

- d. **Kualitas keluarga dan kesetaraan gender menjadi bagian penting yang perlu menjadi perhatian dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas.** Peran dan fungsi keluarga dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sangat penting. Pada Tahun 2023 Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) mencapai 63,17 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 58,67 yang menunjukkan kualitas keluarga di Kabupaten Kebumen telah masuk kategori cukup baik atau berkembang (masuk di *range* 40-70). Keluarga perlu terus dipertahankan kualitasnya dalam ketenteraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga tersebut. Pengarusutamaan Gender (PUG) dan inklusi sosial dalam pembangunan di Kabupaten Kebumen juga perlu ditingkatkan untuk memastikan tidak ada satu orang pun yang tertinggal dalam pembangunan (*no one left behind*), dimana upaya pemerintah didukung oleh masyarakat dalam pengarusutamaan gender menunjukkan kinerja yang terus membaik. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) pada Tahun 2023 sebesar 0,344 membaik jika dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 0,359. Pembangunan daerah harus memenuhi prinsip pemenuhan hak asasi manusia dan selayaknya memberikan akses dan manfaat yang memadai bagi orang dewasa, pemuda dan anak-anak, baik perempuan maupun laki-laki, kelompok rentan seperti kaum disabilitas, untuk berpartisipasi dalam pembangunan, untuk mendapatkan akses dan memanfaatkan hasil-hasil pembangunan secara adil. Kondisi tersebut juga tercermin dalam permasalahan pembangunan berkelanjutan sebagaimana tertuang di dalam dokumen KLHS RPJPD, dimana perlu mengoptimalkan peningkatan pengendalian penduduk melalui penguatan Keluarga Berencana (KB), pemberdayaan dan perlindungan bagi perempuan, anak serta kesetaraan gender perlu dioptimalkan, serta peningkatan proporsi keterwakilan perempuan di DPR.

- e. **Belum optimalnya kesempatan kerja bagi perempuan di Kabupaten Kebumen.** Walaupun TPAK Perempuan cenderung mengalami peningkatan, dari semula 57,63 persen (2016) menjadi 62,49 persen (2023), namun masih lebih rendah dibandingkan TPAK laki-laki sebesar 86,37 persen pada tahun 2023. Untuk itu peran serta perempuan di dunia kerja harus terus ditingkatkan.
- f. **Belum optimalnya peningkatan ketimpangan pendapatan antar penduduk.** Berdasarkan kriteria ketimpangan pendapatan menurut Bank Dunia, ketimpangan pendapatan dari kelompok 40 persen penduduk dengan pendapatan rendah Kabupaten Kebumen tergolong ketimpangan pendapatan rendah. Meskipun demikian, upaya peningkatan ketimpangan pendapatan tetap harus dilakukan karena memiliki dampak luas terhadap kesejahteraan sosial, stabilitas ekonomi, dan keberlanjutan pembangunan.

3. Masalah Utama peningkatan kesejahteraan penduduk pada semua usia.

Masalah utama peningkatan kesejahteraan penduduk pada semua usia, tercermin dari Persentase penduduk miskin Kabupaten Kebumen tahun 2023 masih sebesar 16,34 persen (2023) sehingga upaya penurunan kemiskinan harus ditingkatkan. Masalah pokok dari masalah utama adalah Peningkatan upaya penanggulangan kemiskinan belum optimal, dimana terdapat masalah Pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal dalam mendukung perekonomian daerah belum optimal. Akar masalah dari masalah, meliputi (a) Pencapaian pelaksanaan penanggulangan kemiskinan daerah belum optimal; (b) Upaya-upaya penanggulangan kemiskinan pada sisi mikro seperti intervensi program terkait perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi untuk peningkatan pendapatan masyarakat, dan peningkatan akses kebutuhan dasar perlu dioptimalkan; (c) Rendahnya kualitas SDM; (d) Rendahnya akses kesempatan kerja; (e) Belum optimalnya perlindungan sosial bagi tenaga kerja; (f) Peningkatan pencapaian akses infrastruktur dasar bagi penduduk miskin perlu belum optimal; (g) Komoditas pembentuk garis kemiskinan baik makanan dan bukan makanan inflasinya perlu dijaga; dan (h) Perlunya terus meningkatkan ketahanan pangan.

- a. **Pencapaian pelaksanaan penanggulangan kemiskinan daerah belum optimal.** Penduduk miskin, rentan miskin, dan yang bekerja di sektor informal merupakan penduduk yang paling terdampak dari mewabahnya pandemi COVID-19. Berbagai pembatasan mobilitas atau kegiatan ekonomi berdampak pada penurunan pendapatan penduduk miskin. Penurunan pendapatan ini menyebabkan kemiskinan semakin bertambah karena semakin banyak penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah garis kemiskinan. Berbagai upaya pemulihan ekonomi baik di tingkat nasional maupun daerah mulai membuahkan hasil. Keberhasilan berbagai upaya pemulihan ekonomi juga tampak dari penurunan tingkat kemiskinan di Kebumen. Meskipun demikian, kemiskinan masih menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen sehingga perlu menciptakan terobosan-terobosan baru dalam penanggulangan kemiskinan, termasuk belum optimalnya inovasi dalam peningkatan jaminan akses terhadap makanan yang aman dan bergizi serta cukup sebagaimana tertuang di dalam dokumen KLHS RPJPD melalui peningkatan penanganan daerah rawan pangan serta peningkatan pencapaian Indeks Ketahanan Pangan.

- b. **Upaya-upaya penanggulangan kemiskinan pada sisi mikro seperti intervensi program terkait perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi untuk peningkatan pendapatan masyarakat, dan peningkatan akses kebutuhan dasar perlu dioptimalkan.** Selain itu, perlu memaksimalkan upaya koordinasi dan pengendalian penanggulangan kemiskinan dalam sinkronisasi program penanggulangan kemiskinan antar perangkat daerah, penetapan sasaran penanggulangan kemiskinan (menghilangkan *inclusion error* dan *exclusion error*), dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk keluar dari predikat miskin (terdapat masyarakat yang beranggapan bahwa menjadi miskin akan mendapatkan berbagai fasilitas pelayanan). Kondisi tersebut juga tercermin dalam permasalahan pembangunan berkelanjutan sebagaimana tertuang di dalam dokumen KLHS RPJPD, dimana belum optimalnya peningkatan proporsi sumber daya yang dialokasikan Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan dari berbagai sumber pendanaan.
- c. **Rendahnya kualitas SDM.** Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2023 menjadi 71,88 perlu dimaksimalkan peningkatannya pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat dan pengetahuan dan standar hidup layak.
- d. **Rendahnya akses kesempatan kerja.** TPT Kabupaten Kebumen mengalami kenaikan dari 2011 sebesar 4,73 persen menjadi 5,11 persen pada tahun 2023. Tingginya angka pengangguran menunjukkan bahwa tidak ada cukup lapangan kerja yang tersedia untuk menampung angkatan kerja yang ada.
- e. **Belum optimalnya perlindungan sosial bagi tenaga kerja.** Upaya perlindungan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja juga perlu terus ditingkatkan. Pada Tahun 2023 baru terdapat 169.341 peserta BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Kebumen atau sebesar 38,32% dari jumlah semesta penduduk bekerja sebesar 441.947 orang yaitu pekerja yang memiliki KTP Kebumen yang bekerja di seluruh Indonesia dan aktif menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Ke depan, kepesertaan tenaga kerja pada BPJS Ketenagakerjaan diharapkan dapat terus meningkat sebagai perlindungan sosial yang adaptif sehingga tidak menimbulkan masalah kesejahteraan sosial yang baru.
- f. **Peningkatan pencapaian akses infrastruktur dasar bagi penduduk miskin perlu belum optimal.** Pencapaian persentase akses sanitasi aman Kabupaten Kebumen tahun 2023 masih sebesar 2,02 persen. Pencapaian persentase akses air minum aman masih sebesar 7 persen (2023). Pencapaian rumah tangga yang memiliki akses hunian layak pada Tahun 2023 telah mencapai 93,4 persen.
- g. **Komoditas pembentuk garis kemiskinan baik makanan dan bukan makanan inflasinya perlu dijaga.** Inflasi Kota Purwokerto merupakan representatif inflasi Kabupaten Kebumen. Inflasi Kota Purwokerto sebesar 2,61 persen dengan IHK sebesar 117,08. Komoditas yang menjadi penyumbang utama inflasi di Kota Purwokerto yaitu beras, telur ayam ras, tarif kereta api, rokok kretek filter, dan minyak goreng. Komoditas penyumbang inflasi perlu mendapat perhatian dalam pengendalian inflasi. Komoditas pembentuk garis kemiskinan baik makanan dan bukan makanan inflasinya perlu dijaga.

- h. **Perlunya terus meningkatkan ketahanan pangan.** Indeks ketahanan pangan meningkat dari semula 73,72 persen (2018) menjadi 80,34 persen (2023). Hal ini menunjukkan terpenuhinya kebutuhan pangan bagi masyarakat yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik dari jumlah, mutu, keamanan, pemerataan, dan keterjangkauan. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan membaik semula 13,82 persen (2017) menjadi 12,00 persen (2023). Dengan semakin kecilnya prevalensi ketidakkecukupan pangan menunjukkan adanya peningkatan mutu konsumsi makanan masyarakat Kebumen yaitu semakin memenuhi tingkat energi yang dibutuhkan tubuh atau ideal secara kandungan nutrisi dan akan berpengaruh pada penanggulangan stunting.

3.1.3. Permasalahan Pembangunan Daerah pada Aspek Daya Saing

Masalah utama pembangunan daerah Kabupaten Kebumen pada aspek daya saing yaitu **belum optimalnya penguatan penyelenggaraan riset dan inovasi di daerah untuk meningkatkan daya saing daerah**. Masalah utama tersebut tercermin dari pencapaian Skor Pilar Kapabilitas Inovasi pada pengukuran Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Kebumen sebesar 2,30 (2023) masih dibawah skor Provinsi Jawa Tengah (4,51) dan skor Nasional (3,03). Masalah pokok dari masalah utama adalah belum optimalnya peningkatan kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi (IPTEKIN) dalam setiap aspek pembangunan daerah Kabupaten Kebumen, dimana terdapat masalah peningkatan pencapaian kapabilitas dalam mewujudkan daya saing daerah belum optimal. Akar masalah dari masalah, meliputi (a) Belum optimalnya daya saing daerah dalam menghadapi integrasi perekonomian daerah dengan perekonomian regional, nasional hingga internasional; (b) Kestabilan ekonomi makro daerah perlu dijaga dengan inovasi dalam rangka mengoptimalkan kemampuan pendanaan pembangunan; (c) Rendahnya akses infrastruktur dasar; (d) Pembangunan perdesaan belum optimal agar dapat tumbuh bersama dengan wilayah perkotaan; (e) Belum optimalnya kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi (IPTEKIN) dalam setiap aspek pembangunan daerah Kabupaten Kebumen; dan (f) Masih rendahnya rasio kewirausahaan.

- a. **Belum optimalnya daya saing daerah dalam menghadapi integrasi perekonomian daerah dengan perekonomian regional, nasional hingga internasional.** Globalisasi dan keterbukaan informasi mengharuskan setiap daerah meningkatkan inovasi dan daya saingnya dalam upaya mengintegrasikan perekonomian daerah dengan perekonomian yang lebih luas. Dalam hal ini Kabupaten Kebumen masih belum memiliki daya saing yang cukup. Hal ini terlihat dengan cukup volatile nya perkembangan harga di Kabupaten Kebumen dikarenakan banyaknya barang dan jasa yang beredar di wilayah Kebumen berasal dari luar daerah, padahal Kebumen memiliki potensi sumber daya dalam memproduksi beberapa barang dan jasa tersebut termasuk kebutuhan pokok. Selain itu, belum banyak distributor di Kabupaten Kebumen sehingga rantai perdagangan lebih panjang dan memakan biaya lebih. Hal ini tercermin dari perdagangan Kebumen yang direpresentasikan oleh transaksi ekspor dan impor. Nilai ekspor selalu lebih rendah dari nilai impor. Perdagangan Kebumen selalu menunjukkan posisi defisit 4-9 persen selama lima tahun terakhir.
- b. **Kestabilan ekonomi makro daerah perlu dijaga dengan inovasi dalam rangka mengoptimalkan kemampuan pendanaan pembangunan.** Pemerintah Kabupaten Kebumen perlu mengoptimalkan peran dan intervensinya dalam menjaga kestabilan ekonomi daerah melalui kebijakan fiskalnya. Untuk memperkuat kebijakan fiskal daerah maka yang pertama diperlukan adalah peningkatan kapasitas fiskal daerah. Hal ini tercermin

dari rasio pajak daerah terhadap PDRB pada tahun 2023 yang masih minimal yaitu sebesar 0,38 persen. Ke depan perlu terus dioptimalkan penerimaan pajak dengan cara intensifikasi, ekstensifikasi dan inovasi agar ketaatan subyek pajak terus meningkat serta kebocoran dapat diminimalisir. Selain itu dipastikan pajak tidak memberatkan atau membebani ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu salah satu permasalahan utama di sektor riil adalah permodalan.

- c. **Rendahnya akses infrastruktur dasar.** Memaksimalkan pencapaian akses infrastruktur dasar bagi penduduk miskin perlu terus dilakukan. Pencapaian persentase akses sanitasi aman Kabupaten Kebumen tahun 2023 masih sebesar 2,02 persen akibat belum optimalnya peningkatan kesadaran dan kapasitas masyarakat menggunakan jamban sehat, pengelolaan IPALD, dan pemanfaatan IPLT. Pencapaian persentase akses air minum aman masih sebesar 7 persen (2023) akibat menurunnya ketersediaan sumber air baku SPAM, belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program penyediaan air minum bersama masyarakat (PAMSIMAS), rendahnya cakupan sarana prasarana air minum perpipaan, dan rendahnya cakupan pelayanan PDAM (SR air bersih kepada masyarakat). Sementara itu, seiring dengan perkembangan jumlah penduduk tahun 2022 mencapai 1.376.825 orang (2022) dengan laju pertumbuhan penduduk mencapai 1,11 persen (2020-2022) dan kepadatan penduduk di Kabupaten Kebumen mencapai 1.075 jiwa/km². Kondisi luasan kawasan kumuh di Kabupaten Kebumen yang belum tertangani masih seluas 288,12 ha. Luasan tersebut berkurang semula 343,27 Ha (2010) walaupun rumah tangga yang memiliki akses hunian layak pada Tahun 2023 telah mencapai 93,4 persen.
- d. **Pembangunan perdesaan belum optimal agar dapat tumbuh bersama dengan wilayah perkotaan.** Hingga tahun 2023 tercatat baru 60 desa dari total 449 desa atau 13,36 persen yang telah masuk kategori desa mandiri berdasarkan data Indeks Desa Membangun. Untuk itu ke depan perlu terus ditingkatkan kemajuan dan kemandirian desa dimana menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa dinyatakan mandiri diantaranya jika memiliki ketersediaan dan akses terhadap infrastruktur yang memadai dan penyelenggaraan pemerintahan yang sudah sangat baik. Sementara itu pengembangan infrastruktur daerah perlu dioptimalkan dalam pemenuhan infrastruktur dasar dan peningkatan konektivitas antarwilayah menghubungkan desa dengan kota sebagai kluster pertumbuhan ekonomi. Hal ini tercermin dari rumah tangga yang memiliki akses hunian layak pada Tahun 2023 telah mencapai 93,4 persen, Proporsi jalan kondisi mantap di Kabupaten Kebumen meningkat semula 51,74 persen (2015) menjadi 73,96 persen (2023), serta persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan kabupaten sebesar 75,3 persen.
- e. **Belum optimalnya kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi (IPTEKIN) dalam setiap aspek pembangunan daerah Kabupaten Kebumen.** Hal ini tercermin pada kondisi pencapaian skor kapabilitas inovasi yang menggambarkan kuantitas dan kualitas riset dan inovasi daerah, dan sejauh mana lingkungan suatu daerah mendorong kolaborasi, konektivitas, kreativitas dan kapasitas daerah mengubah ide menjadi barang dan jasa baru. Pilar kapabilitas inovasi Kabupaten Kebumen pada Tahun 2023 dapat dilihat dari indikator publikasi ilmiah 3,66, aplikasi kekayaan intelektual 2,62, belanja riset 0,13, indeks keunggulan lembaga riset 1,52 dan aplikasi merk dagang 1,79.

- f. **Masih rendahnya rasio kewirausahaan.** Rasio kewirausahaan daerah merupakan perbandingan jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap di masing-masing daerah dengan total angkatan kerja daerah. Berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar adalah berusaha atas resiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh atau pekerja tetap yang dibayar. Pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap mengindikasikan adanya orientasi untuk tumbuh dengan merekrut tenaga kerja tetap. Semakin besar pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap, semakin banyak penyerapan tenaga kerja tetap oleh para pengusaha. Pada Tahun 2023 rasio kewirausahaan Kabupaten Kebumen sebesar 2,76 persen.

3.1.4. Permasalahan Pembangunan Daerah pada Aspek Pelayanan Umum

Masalah utama pembangunan daerah Kabupaten Kebumen pada aspek pelayanan umum, yaitu **peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan, dan akuntabel menjadi harapan dalam melayani dan mengayomi masyarakat.** Kabupaten Kebumen perlu menjamin penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang profesional, terpadu, dan menyeluruh. Masalah utama peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan, dan akuntabel menjadi harapan dalam melayani dan mengayomi masyarakat, tercermin dari pencapaian Indeks reformasi birokrasi Kabupaten Kebumen tahun 2023 mencapai 79,91, pencapaian ini meningkat dari semula 57,33 pada tahun 2019. Kondisi IRB tidak terlepas dari semakin membaiknya pencapaian sasaran strategis RB pada dua aspek yaitu, *hard element* dan *soft element*. Aspek *hard element* merupakan perangkat yang terkait dengan akuntabilitas, kelembagaan, tatalaksana, cara kerja, strategi, sistem, dan regulasi dalam pemerintahan, sedangkan aspek *soft element* merupakan perangkat yang terkait dengan budaya dan sumber daya manusia. Masalah pokok dari masalah utama adalah Tata Kelola Pemerintahan Daerah Kabupaten Kebumen yang lincah dan cepat (*agile bureaucracy*) perlu ditingkatkan, dimana terdapat masalah Kualitas Tata kelola pemerintahan belum optimal. Akar masalah dari masalah, meliputi (a) Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dalam memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat belum optimal; (b) Peningkatan kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran belum optimal; (c) Belum optimalnya kemandirian keuangan daerah sebagai sumber pendanaan pembangunan daerah; (d) Belum optimalnya penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi dalam rangka optimalisasi pelayanan publik yang mengikuti perkembangan jaman; dan (e) Peningkatan kondusivitas wilayah untuk perwujudan ketentraman dan ketertiban belum optimal.

- a. **Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dalam memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat belum optimal.** Kinerja pelayanan publik perangkat daerah Kabupaten Kebumen semakin baik. Hal ini tercermin skor indeks pelayanan publik Kabupaten Kebumen sebesar 4,55 (2023) dan telah masuk kategori pelayanan prima. Walaupun demikian, penyelenggaraan pelayanan publik harus terus ditingkatkan. Di masa mendatang diharapkan setiap instansi dan lembaga pemerintahan mampu melakukan inovasi dalam pelayanan publik. Bahkan, sampai ke tingkat kecamatan, Unit Pelaksana Teknis (UPT), kelurahan, hingga desa juga dituntut untuk memiliki inovasi pelayanan publik yang semakin meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Standar pelayanan publik juga terus dituntut untuk lebih ramah, lebih mudah dijangkau, lebih cepat dan efisien.

- b. **Peningkatan kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran belum optimal.** Peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen semakin baik. Hal ini tercermin dengan pencapaian Indeks Integritas Nasional untuk Kabupaten Kebumen berdasarkan Survei Penilaian Integritas telah mencapai 78,19. Akan tetapi, Pemerintah Kabupaten Kebumen perlu meningkatkan upaya reformasi hukum yaitu upaya penataan regulasi yang berkualitas bersih dan akuntabel. Hal ini tercermin dari Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Kebumen pada Tahun 2023 masih pada angka 57,54 yang menunjukkan masih pada kategori cukup. Kondisi tersebut juga tercermin dalam permasalahan pembangunan berkelanjutan sebagaimana tertuang di dalam dokumen KLHS RPJPD, dimana peningkatan kinerja pemerintah daerah dan tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan perlu dioptimalkan.
- c. **Belum optimalnya kemandirian keuangan daerah sebagai sumber pendanaan pembangunan daerah.** Pemerintah Kabupaten Kebumen harus terus berupaya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Terkait keberlanjutan fiskal, tantangan yang dihadapi yaitu rendahnya penerimaan daerah, terutama perpajakan yang tercermin dari rasio pajak hanya sebesar 0,38 persen dari PDRB ADHB pada tahun 2023 walaupun terus meningkat dari Tahun 2015 sebesar 0,25 persen. Pendapatan daerah ke depan akan sangat dipengaruhi oleh perubahan struktur ekonomi dan produktivitas penduduk. Hal tersebut berpotensi meningkatkan penerimaan daerah. Pergeseran komposisi demografi yang menuju *ageing population* akan menentukan komposisi belanja negara yang lebih didominasi oleh komponen belanja perlindungan sosial bagi penduduk usia lanjut yang tidak produktif lagi.
- d. **Belum optimalnya penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi dalam rangka optimalisasi pelayanan publik yang mengikuti perkembangan jaman.** Penerapan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen semakin baik. Hal ini ditunjukkan nilai Indeks SPBE semula sebesar 2,11 kategori cukup (2018) menjadi 3,44 kategori baik (2023). Belum optimalnya pencapaian nilai Indeks SPBE tersebut disebabkan oleh belum efektif dan efisiennya manajemen SPBE di Kabupaten Kebumen, nilai penerapan manajemen SPBE dan TIK masih sebesar 1,00 (2022) dikarenakan belum seluruh aplikasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen terintegrasi, kompetensi SDM pengelola/pengguna SPBE belum merata, lemahnya pelaksanaan audit/monev SPBE, dan belum optimalnya pelaksanaan kebijakan/regulasi penerapan SPBE seperti masterplan pelaksanaan SPBE. Sementara itu, infrastruktur IT dengan kecepatan tinggi di Kabupaten Kebumen belum menjangkau seluruh instansi pemerintah, dengan kata lain kapasitas server storage dan jaringan pengembangan kapasitas internal masih rendah. Kondisi tersebut juga tercermin dalam permasalahan pembangunan berkelanjutan sebagaimana tertuang di dalam dokumen KLHS RPJPD, dimana peningkatan akses pelayanan publik berbasis teknologi informasi perlu dioptimalkan.
- e. **Peningkatan kondusivitas wilayah untuk perwujudan ketentraman dan ketertiban belum optimal.** Hal ini tercermin dari masih terdapat 5 kejadian konflik SARA pada Tahun 2023. Walaupun dapat tertangani, ke depan konflik SARA seperti ini diharapkan dapat terus diminimalisir bahkan tidak terjadi kembali. Untuk itu perlu peningkatan karakter masyarakat (solidaritas sosial, kerjasama, keadilan, toleransi, dan

ketertiban) di Kabupaten Kebumen dalam hal penguatan keamanan dan ketertiban, internalisasi dan aktualisasi nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat, dan edukasi kohesi sosial sejak dini.

3.2. Isu Strategis

Perumusan isu strategis disajikan berdasarkan isu strategis sesuai konteks (isu global, nasional, dan regional). Perumusan isu strategis dijabarkan secara deskriptif dalam bentuk uraian kalimat, bagian demi bagian dengan sistematika berdasarkan konteks (isu global, nasional, dan regional). Isu strategis yang teridentifikasi melalui proses perumusan isu strategis merupakan isu strategis yang berpotensi muncul dalam pembangunan jangka panjang 20 tahun ke depan.

3.2.1. Isu Strategis Global

Perkembangan pembangunan Kabupaten Kebumen 2045 bisa terbawa dalam arus isu strategis internasional. Isu strategis internasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025-2045 dikenal dengan 10 (sepuluh) kecenderungan besar (*global megatrend*) meliputi (1) demografi global, (2) geopolitik dan geoekonomi, (3) disrupsi teknologi, (4) urbanisasi dunia, (5) perdagangan internasional, (6) keuangan internasional, (7) kelas menengah, (8) persaingan sumber daya alam, (9) perubahan iklim, dan (10) pemanfaatan luar angkasa.

Perkembangan demografi global merupakan faktor penting yang memengaruhi perkembangan ekonomi dan sosial dunia. Perkembangan demografi global 2050 yaitu peningkatan populasi penduduk global hingga 2050, tingginya pertumbuhan penduduk global, laju pertumbuhan penduduk global terus melambat, bertambahnya kelompok penduduk usia tua (*ageing population*) dan tingginya jumlah penduduk usia muda. Demografi pada skala mikro, perubahan struktur dan bentuk keluarga, perkembangan teknologi digital, dan penetrasi global memengaruhi kualitas keluarga. Selain itu, kecenderungan penduduk dunia akan terkonsentrasi di kawasan Asia dan Afrika, serta terjadi urbanisasi yang berdampak pada peningkatan jumlah penduduk perkotaan dan ukuran kota, serta peningkatan pelayanan masyarakat dan kegiatan ekonomi secara menyeluruh.

Perkembangan geopolitik dapat berdampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan dan tatanan global yang memengaruhi pergolakan di kawasan maupun tatanan global akibat eskalasi persaingan antar negara adidaya yang meluas serta memunculkan kekuatan baru. Ketidakstabilan geopolitik dapat menimbulkan krisis energi dan pangan yang memicu ketidakpastian geoekonomi global.

Kecepatan perubahan teknologi telah menimbulkan disrupsi teknologi di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Perkembangan teknologi digital telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat seperti *Internet of Things (IoT)*, *blockchain*, *Hyper Connection*, *Artificial Intelligence (AI)*, *Distributed Ledger Technology (DLT)*, *Production Lifecycle Management*, *Robotic Process Automation (RPA)*, *Edge Computing*, *Auto Robotic System*, *3D*, dan *Future Technologies*.

Pergeseran peningkatan peranan negara berkembang dalam perdagangan internasional yang berpusat di kawasan Asia-Afrika, serta beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan digital, memanfaatkan hilirisasi sumber daya alam dan mineral untuk memproduksi produk yang lebih kompleks dan berkelanjutan, berpeluang semakin memiliki peran penting dalam rantai nilai perdagangan global. Kerja sama Kawasan menciptakan hub perdagangan

strategis yang mendorong ketersediaan rantai pasok global, investasi, inovasi, dan teknologi.

Desain kebijakan fiskal global dan nasional pada tahun 2045 sangat dipengaruhi oleh perubahan struktur ekonomi dan demografi, serta perkembangan inovasi teknologi telah membawa perubahan yang signifikan pada industri jasa keuangan. Pertumbuhan kelas menengah yang pesat mengalami pergeseran dari sebelumnya yang didominasi oleh kawasan Eropa dan Amerika Serikat, bergeser ke kawasan Asia terutama Tiongkok dan India menciptakan peluang ekonomi serta tantangan pada aspek sosial dan politik.

Kelangkaan dan persaingan akses Sumber Daya Alam/SDA (energi, air, dan pangan) di tingkat global diproyeksikan meningkat, mendorong terjadinya kompetisi dan persaingan geopolitik di berbagai wilayah di masa mendatang. Perubahan iklim, kerusakan lingkungan, polusi, dan kehilangan keanekaragaman hayati secara global (tiga krisis global - *The Triple Planetary Crisis*) diperkirakan akan terus berlangsung dan tidak dapat dihindari sehingga berdampak pada berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, masyarakat perlu melakukan perubahan secara signifikan, beralih ke aktivitas ekonomi yang lebih rendah emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di berbagai sektor, dan penerapan ekonomi sirkular. Tren pertumbuhan ekonomi hijau dan rendah karbon menjadi kebijakan dan strategi global, serta pemanfaatan energi baru dan terbarukan akan menjadi sumber energi utama di dunia.

Tantangan pembangunan global yang dapat memengaruhi pembangunan Kabupaten Kebumen 2045. Pembangunan Kabupaten Kebumen 2045 perlu memperhatikan tantangan pembangunan global dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025-2045, meliputi (1) Tingginya kebutuhan hidup masyarakat akan ketersediaan sumber daya alam dan lahan, serta kebutuhan terhadap pangan, energi, dan air. Selain itu, pemenuhan perlindungan sosial dan pembukaan lapangan pekerjaan; (2) Menurunnya tingkat kematian dan meningkatnya angka harapan hidup saat lahir; (3) Adanya fenomena tidak memiliki anak (*childfree*), menunda pernikahan, dan perilaku kehidupan sesama jenis, serta perkawinan di bawah umur; (4) Tidak terkendalinya akses terhadap media digital; (5) Meningkatnya daya tarik investor di kawasan Asia; (6) Tekanan inflasi global yang tinggi serta adanya krisis energi dan pangan, akibat perang antara Rusia dan Ukraina; (7) Nilai strategis Kawasan Indo-Pasifik yang diproyeksikan akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru dunia; (8) Pendapatan per kapita negara-negara maju tetap lebih tinggi dari negara berkembang; (9) Sektor komoditas tidak lagi menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi negara berkembang; (10) Kebijakan yang tepat dalam peningkatan pertumbuhan sektor industri manufaktur, peningkatan pertumbuhan sektor jasa, serta kebijakan perdagangan internasional yang terbuka, iklim usaha dan perbaikan investasi memberikan peluang negara berkembang mengejar ketertinggalan teknologi dan ekonomi dari negara maju; (11) Kemampuan adaptasi masyarakat dalam memanfaatkan berbagai bentuk disrupsi teknologi perlu ditopang dengan kemampuan literasi dan pola pikir yang baik; (12) Pelaku usaha seperti UMKM dan koperasi mengembangkan digitalisasi usaha untuk menjaga keberlangsungan proses bisnis; (13) Tingkat pemanfaatan teknologi digital dalam operasional usaha masih terbatas dan belum merata karena faktor sumber daya manusia, permodalan, dan infrastruktur penunjang; (14) Perubahan teknologi di sebagian besar aktivitas industri (sektor manufaktur) mencakup percepatan otomatisasi, inovasi mesin multifungsi, serta teknologi hijau, termasuk untuk penyediaan energi baru terbarukan; dan (15) Inovasi pengajaran dan pembelajaran yang berbasis *artificial intelligence* (AI) dapat berlangsung kontinu, tanpa terbatas ruang dan waktu, serta penyelenggaraan pendidikan akan menjadi lebih efisien, efektif, transparan, dan ekonomis.

Selanjutnya tantangan pembangunan global yang dapat memengaruhi pembangunan Kabupaten Kebumen 2045, yaitu (16) Beberapa jenis pekerjaan dapat tergantikan oleh teknologi, seperti menulis artikel dan membuat karya seni grafis, industri media, serta aspek kreatif (seni dan hiburan); (17) Peluang di sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dengan munculnya Pekerjaan jarak jauh (*remote working*) dan pola *work from anywhere* (WFA); (18) Membuka peluang baru dalam pembangunan ekonomi, mendorong inovasi dan transformasi tata kelola melalui peningkatan kinerja pelayanan publik, pembuatan kebijakan berbasis bukti, serta efisiensi sumber daya; (19) Penduduk perkotaan masih tinggal di kawasan pemukiman tanpa pelayanan dasar seperti air, drainase, sanitasi, listrik, dan jalan yang memadai; (20) Perubahan guna lahan pertanian menjadi tempat bermukim dan kawasan perdagangan/jasa; (21) Terjadi perubahan aktivitas penduduk ke arah dominasi sektor industri, jasa, dan perdagangan dari sisi ekonomi; (22) Kolaborasi produksi bersama internasional (*global production networks/GPN*) dan rantai pasok global (*global value chain/GVC*) semakin menguat dan terdiversifikasi. Sementara itu, Kawasan Asia Timur dan ASEAN akan berkembang sebagai pusat GVC dunia seiring dengan infrastruktur yang memadai, pangsa pasar yang substansial, dan kompetensi SDM industri yang berkualitas, khususnya dalam memproduksi barang manufaktur berorientasi ekspor; (23) Perdagangan internasional akan semakin dipengaruhi oleh kecepatan perubahan teknologi dan digital, dan keberlanjutan yang terus berkembang; (24) Kerja sama kawasan menciptakan hub perdagangan strategis; (25) Pendapatan negara ke depan akan sangat dipengaruhi oleh perubahan struktur ekonomi dan produktivitas penduduk. Hal tersebut berpotensi meningkatkan penerimaan negara secara signifikan. Terjadi pergeseran komposisi demografi menuju *aging society* pada tahun 2045 sehingga menentukan komposisi belanja negara yang lebih didominasi oleh komponen belanja perlindungan sosial dan pensiun. Tren ke depan juga akan sejalan dengan pendalaman pasar keuangan dan arah kebijakan moneter global yang ditransmisikan melalui jalur suku bunga serta aliran likuiditas di pasar uang dan pasar modal; (27) Tren penggunaan *Central Bank Digital Currency* (CBDC) yang merupakan bentuk digital dari mata uang fiat suatu negara; (28) Puluhan juta pekerjaan pada jasa keuangan akan menghilang, tetapi akan tergantikan dengan pekerjaan baru dengan kemampuan (*skill*) yang baru. Sementara itu, munculnya perusahaan teknologi finansial (*financial technology*) seperti bank digital dan keuangan terdesentralisasi telah meningkatkan efisiensi dan perluasan akses ke layanan keuangan, sekaligus sebagai pesaing industri keuangan; (29) Proporsi kelas menengah yang semakin meningkat mendorong penciptaan jenis dan lapangan pekerjaan baru dan kebutuhan konsumsi yang lebih beragam termasuk kebutuhan gaya hidup baru (*new life style*). Jenis pekerjaan baru yang diperkirakan berkembang di masa mendatang antara lain pekerjaan terkait dengan teknologi tinggi, pekerjaan melalui *virtual-metaverse*, dan pekerjaan lain yang bersifat fleksibel dengan mobilitas tinggi; (30) Tingkat persaingan Sumber Daya Alam/SDA (energi, air, dan pangan) global ke depan akan bergantung pada ketatnya faktor permintaan dan penawaran diantaranya efektivitas pengelolaan dan upaya konservasi sumber daya alam, pengembangan teknologi baru, dan perubahan pola konsumsi dan pola produksi; (31) *Triple planetary crisis* mendorong peralihan ke aktivitas ekonomi yang lebih rendah emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di berbagai sektor, seperti sektor energi, industri, lahan, kelautan dan pesisir, pangan dan pertanian, dan limbah dan penerapan ekonomi sirkular; (32) Target *net zero emission* pada tahun 2060. Pelaksanaan jalur pembangunan yang lebih hijau melalui penerapan ekonomi hijau dan pembangunan rendah karbon merupakan arah pembangunan global di masa mendatang. Stimulus hijau dan paket-paket stimulus lainnya menjadi tren kebijakan global ke depan; (33) Pemanfaatan energi baru dan terbarukan akan menjadi sumber energi utama di dunia.

3.2.2. Isu Strategis Nasional

Isu strategis nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025-2045 meliputi (1) Produktivitas rendah, (2) IPTEKIN dan riset lemah, (3) Deindustrialisasi dini, (4) Pariwisata di bawah potensinya, (5) Ekonomi laut belum optimal, (6) Kontribusi UMKM dan koperasi kecil, (7) Integrasi domestik terbatas, (8) Kualitas SDM yang makin rendah, (9) Kemiskinan, (10) Kesenjangan Jawa dan Luar Jawa, (11) Pembangunan belum berkelanjutan, (12) Tata kelola pemerintahan belum optimal, (13) Infrastruktur dan literasi digital rendah, dan (14) Kapasitas dan penegakan hukum masih lemah.

Tantangan pembangunan jangka panjang Nasional dapat memengaruhi pembangunan Kabupaten Kebumen 2045. Pembangunan Kabupaten Kebumen 2045 perlu memperhatikan tantangan pembangunan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025-2045 meliputi (1) Tingkat produktivitas dalam persaingan global; (2) Produktivitas tenaga kerja; (3) Kapasitas Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN); (4) Kuantitas dan kualitas SDM peneliti; (5) Deindustrialisasi dini; (6) Produktivitas sektor pertanian; (7) Pemanfaatan potensi pariwisata; (8) Pengembangan dan pemanfaatan ekonomi laut; (9) Penciptaan nilai tambah ekonomi sektor UMKM dan koperasi; (10) Peningkatan integrasi dan kerjasama ekonomi domestik antar wilayah; (11) Pengembangan kawasan perkotaan terhadap pertumbuhan ekonomi; (12) Kualitas SDM bidang pendidikan; (13) Akses pelayanan kesehatan, jaminan sosial dan jaminan ketenagakerjaan untuk pekerja informal; (14) Akses dan kualitas sektor kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial dalam penanggulangan kemiskinan; dan (15) Pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhan.

Selanjutnya tantangan pembangunan jangka panjang Nasional dapat memengaruhi pembangunan Kabupaten Kebumen 2045, yaitu (16) Pemanfaatan konektivitas laut dan penyeberangan serta konektivitas udara sekitar Kebumen dalam peningkatan angkutan barang dan penumpang; (17) Pembangunan yang menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan; (18) Pengurangan pencemaran dan kerusakan lingkungan untuk mencapai ekonomi hijau; (19) Ketahanan ekologi; (20) Pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan; (21) Peningkatan akses energi; (22) Penggunaan energi terbarukan; (23) Efisiensi energi; (24) Peningkatan kualitas dan harmonisasi regulasi; (25) Reformasi birokrasi; (26) Intervensi politik dalam birokrasi, khususnya di pemerintah daerah; (27) Kebijakan fiskal pro-pertumbuhan; (28) Konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, konsistensi antara perencanaan pembangunan nasional, Kementerian/Lembaga, daerah serta konsistensi pencapaian sasaran jangka panjang; (29) Kapasitas pembiayaan dalam percepatan prioritas pembangunan dari sektor publik pusat dan daerah, serta non publik masih terbatas; (30) Perkembangan teknologi digital, infrastruktur dan literasi digital; (31) Transformasi digital di tingkat pemerintahan daerah; (32) Kepastian hukum dan penegakan hukum yang berkeadilan; (33) Integritas partai politik dalam pembangunan; (34) Partisipasi masyarakat sipil dalam pembangunan dan demokratisasi; (35) Pancasila sebagai landasan ke dalam norma dan praktik kehidupan, pembentukan karakter dan jati diri bangsa menghadapi ancaman budaya global, serta kearifan lokal dan nilai budaya sebagai modal dasar pembangunan masyarakat.

3.2.3. Isu Strategis Wilayah Jawa

Isu strategis Wilayah Jawa dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025-2045 meliputi (i) Wilayah Jawa sebagai pusat kegiatan ekonomi Indonesia. Wilayah Jawa memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, angkatan kerja usia muda yang berkualitas, ketersediaan sarana dan prasarana, serta pasar domestik yang luas dan tumbuh secara cepat menjadi faktor keunggulan Wilayah Jawa. Kontribusi sektor industri pengolahan, perdagangan dan jasa, serta industri teknologi informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi memunculkan adanya simpul-simpul produksi dan distribusi yang berkembang menjadi kota-kota dengan segala fasilitasnya, serta potensi kontribusi sektor pertanian masih signifikan. (ii) Wilayah Jawa diandalkan untuk mendorong pertumbuhan industri baik dalam jangka menengah maupun jangka panjang. Saat ini, Wilayah Jawa telah menjadi pusat pertumbuhan bagi industri padat modal dan padat karya seperti industri tekstil, logam, besi, alat angkutan, makanan, minuman, elektronik, yang ditunjang oleh konektivitas serta sarana dan prasarana yang memadai. Hal tersebut didukung pula dengan fasilitas pendidikan paling lengkap dan beragam, serta menjadi pusat penelitian dan pengembangan berbagai ilmu pengetahuan dasar dan terapan. (iii) Wilayah Jawa memiliki keunggulan pusat-pusat pertumbuhan wilayah yaitu (1) Berbatasan langsung dengan ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia); (2) Telah diterapkan rintisan *Smart City*, *Creative Financing*, dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kreatif, dan (3) Banyak perguruan tinggi negeri berkualitas baik. (iv) Wilayah Jawa memiliki potensi pariwisata dengan keanekaragaman budaya, kuliner, dan bentang alam yang didukung oleh aksesibilitas serta teknologi yang cukup maju. Potensi pariwisata yang ada saat ini tercermin dari banyaknya jumlah taman nasional, obyek pariwisata berbasis alam, maupun kebudayaan, peningkatan jumlah wisatawan dari tahun ke tahun, serta peningkatan penyerapan tenaga kerja pada sektor pariwisata dan sektor pendukungnya.

Tantangan pembangunan wilayah Jawa perlu disikapi dalam isu pembangunan daerah Kabupaten Kebumen. Wilayah Jawa berkontribusi pada perekonomian Indonesia sebesar 56,5 persen pada tahun 2022. Selanjutnya, berdasarkan proyeksi Wilayah Jawa berpotensi tumbuh rata-rata sekitar 5,9-6,5 persen per tahun dengan kontribusi wilayah pada kisaran 48,3 persen pada tahun 2045. Kontribusi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen pada perekonomian wilayah Jawa sebesar 5,79 persen (2022) dipengaruhi oleh peningkatan nilai Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) 2010 menjadi Rp 21.425.793,42 juta (2022). Kenaikan PDRB ADHK 2010 murni disebabkan oleh meningkatnya produksi di seluruh kategori dan tidak dipengaruhi inflasi. Kontribusi sektor dalam PDRB ADHB menurut lapangan usaha didominasi oleh sektor industri pengolahan sebesar 21,78 persen, pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 20,38 persen, dan perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 14,74 persen. Hanya saja, berdasarkan analisis tipologi Klassen dan analisis sektor ekonomi unggulan, sektor-sektor yang menjadi basis pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen diantaranya sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan sektor yang tumbuh lambat, tak berdaya saing, dan merupakan sektor potensial. Sektor industri pengolahan merupakan sektor yang tumbuh cepat, tak berdaya saing, dan merupakan sektor berkembang. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan wilayah Kabupaten Kebumen seperti pembangunan desa terpadu, pengembangan geopark, kawasan hutan produksi terbatas, kawasan hutan produksi tetap, kawasan perkebunan rakyat, kawasan tanaman pangan, produksi garam, kawasan peruntukan industri yang ramah lingkungan, kawasan industri Petanahan, pengembangan sentra-sentra industri,

pengembangan ekspor produk unggulan, kawasan pariwisata, pengembangan lokasi pariwisata, pengembangan pariwisata budaya, peningkatan daya tarik destinasi pariwisata, Destinasi Pariwisata Kabupaten (DPK) dan ekonomi kreatif, kawasan permukiman perkotaan, pengembangan ekonomi berbasis koperasi dan UMKM, pengembangan ekonomi berbasis pesantren, kawasan industri Kebumen, kawasan pariwisata terpadu pesisir ayah, kawasan strategis pertumbuhan ekonomi, pengembangan perdagangan dan jasa, dan kawasan Kota Pusaka Gombong, menyikapi hal ini Pemerintah Kabupaten Kebumen perlu mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang ada dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Dalam perencanaan pembangunan jangka panjang Nasional dalam RPJPN terdapat arah kebijakan wilayah Jawa perlu menjadi perhatian dalam pembangunan daerah Kabupaten Kebumen 2045. Pada tahun 2045 sebagian besar wilayah Jawa akan menjadi kawasan perkotaan yang diproyeksikan menjadi tempat tinggal bagi kurang lebih 70 persen penduduk di wilayah Jawa. Kawasan strategis aglomerasi penduduk tersebut menjadi suatu kekuatan pasar yang sangat potensial dan menjadi demand generator bagi kawasan lainnya. Aglomerasi penduduk juga memungkinkan terjadinya diversifikasi aktivitas ekonomi secara signifikan dengan aktivitas ekonomi penumpu utamanya adalah sektor jasa. Kawasan perkotaan juga menjadi tempat interaksi multikultural yang harus diiringi dengan penguatan ketahanan sosial. Signifikansi peran kawasan perkotaan dan pesatnya aktivitas ekonomi perkotaan tersebut perlu diperkuat dan didukung dengan tetap menjaga kualitas lingkungan dan memperkuat ketahanan kawasan perkotaan terhadap bencana dan perubahan iklim. Pada konsep kawasan strategis, kawasan fungsional perkotaan di Jawa tumbuh secara generik menjadi 3 (tiga) jenis yaitu megapolitan, metropolitan, dan pusat aglomerasi.

Wilayah Jawa telah tumbuh sejak lama menjadi kawasan strategis bagi industri skala nasional karena kekuatan pasarnya. Industri yang tumbuh pesat di Jawa adalah industri manufaktur dan *consumer goods*, agroindustri, petrokimia, dan material/metalurgi. Modal basis industri ini tetap perlu diperkuat melalui pengembangan multi-infrastructure, maritime backbone, dan pelabuhan internasional yang handal guna menurunkan biaya produksi produksi dan logistik sekaligus meningkatkan daya saing industri di Jawa. Selain itu, pengembangan industri di Jawa perlu ditransformasikan menuju industri hijau yang memanfaatkan energi dan teknologi ramah lingkungan.

Pembangunan jangka panjang wilayah Jawa diarahkan menjadi wilayah “Megalopolis yang Unggul, Inovatif, Inklusif, Terintegrasi, dan Berkelanjutan” melalui 5 (lima) prioritas sebagai berikut: Pertama, pengembangan sumber daya manusia berdaya saing global (bertalenta global) dan percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem pada kawasan afirmasi 3T. Kedua, pengembangan kawasan pusat pertumbuhan seperti kawasan strategis perkotaan, industri ramah lingkungan, industri berbasis inovasi riset dan teknologi, pariwisata, dan pertanian yang mendukung kemandirian pangan. Ketiga, percepatan pembangunan berbasis pembangunan hijau dan sirkular, serta penguatan kawasan konservasi strategis pada kawasan lindung dan geopark, termasuk optimalisasi potensi energi baru dan terbarukan, guna menjamin ketahanan energi, air, dan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan; Keempat, pengembangan infrastruktur pendukung, seperti pengembangan infrastruktur konektivitas *multi-infrastructure backbone and feeder*, serta *maritime backbone* yang menginterkoneksi antar kawasan strategis, pengembangan jalur konektivitas antar wilayah dan jalur khusus logistik, pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan dan digital, penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan, serta peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar. Kelima, penuntasan

RDTR kabupaten/kota dan perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana terutama mitigasi risiko pada wilayah perkotaan dan perdesaan, serta penguatan ketangguhan bencana dan perubahan iklim terutama pada kawasan-kawasan perkotaan dan kawasan strategis.

3.2.4. Isu Strategis Jawa Tengah

Isu strategis daerah Provinsi Jawa Tengah dua puluh tahun ke depan sebagai berikut: (1) Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan; (2) Penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas dan ramah lingkungan; (3) Keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta penanggulangan bencana; (4) Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia; (5) Kekuatan budaya sebagai karakter dan jatidiri Masyarakat; dan (6) Tata kelola pemerintahan yang dinamis.

Tantangan pembangunan jangka panjang Provinsi Jawa Tengah dapat memengaruhi pembangunan Kabupaten Kebumen 2045. Pembangunan Kabupaten Kebumen 2045 perlu memperhatikan tantangan pembangunan Provinsi Jawa Tengah dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 meliputi (1) Transisi demografi menuju penduduk usia tua; (2) SDM yang berdaya saing dan berkarakter (pembangunan keluarga dan kesetaraan gender); (3) Penerapan ekonomi hijau yang meliputi transisi energi, pembangunan rendah karbon, ekonomi sirkulan, dan pengembangan pembiayaan hijau; (4) Hilirisasi, komoditas unggulan dan industri pada karya terampil, padat teknologi dan inovasi, serta berorientasi ekspor; (5) Kedaulatan pangan dan alih fungsi lahan; (6) Kemiskinan; (7) Ketimpangan antar wilayah (pembangunan pusat pertumbuhan yang memengaruhi pola migrasi dan mobilitas); (8) Dampak perubahan iklim; (9) Tata kelola pemerintahan yang dinamis; dan (10) Kondusivitas wilayah.

3.2.5. Isu Lingkungan Strategis Kabupaten Kebumen

Isu pembangunan berkelanjutan (lingkungan strategis) dalam KLHS RPJPD Kabupaten Kebumen, yaitu (1) Transformasi ekonomi melalui potensial daerah yang berkelanjutan; (2) Pengentasan kemiskinan dan Penguatan Sosial yang Inklusif; (3) Kualitas SDM perlu ditingkatkan; (4) Akses sanitasi dan air bersih perlu ditingkatkan; (5) Perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang belum berkelanjutan; dan (6) Tata kelola pemerintah yang akuntabel dan berbasis teknologi informasi belum optimal.

3.2.6. Isu Strategis Kabupaten Kebumen

Isu strategis Kabupaten Kebumen dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kebumen tahun 2025-2045 mendasari pada isu strategis dan tantangan pembangunan secara global, Nasional, wilayah Jawa dan daerah Provinsi Jawa Tengah, serta permasalahan, potensi daerah, dan lingkungan strategis Kabupaten Kebumen, yaitu (1) Pembangunan berbasis demografi; (2) Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas; (3) Pengembangan kawasan dan penggunaan lahan sesuai peruntukannya dalam RTRW Kabupaten Kebumen; (4) Peningkatan Kesejahteraan bagi semua; (5) Mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam dalam rangka peningkatan nilai tambah berbasis UMKM; (6) Penerapan ekonomi berkelanjutan; (7) Peningkatan kualitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja; (8) Tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan, akuntabel, melayani, dan mengayomi masyarakat; (9) Memperkuat riset dan inovasi daerah untuk meningkatkan daya saing daerah; dan (10) Perubahan iklim.

1. Pembangunan berbasis demografi; Proyeksi Penduduk Interim Tahun 2020-2023 (Pertengahan Tahun/Juni) menunjukkan Jumlah penduduk Kabupaten Kebumen meningkat, serta proyeksi penduduk Kabupaten Kebumen 2020-2045 yang dilakukan oleh BPS menunjukkan akan terjadi penambahan jumlah penduduk di Kabupaten Kebumen dalam kurun waktu 25 tahun hingga tahun 2045. Kualitas kesehatan penduduk yang semakin meningkat mendorong IMR turun, AHH naik dan jumlah kematian setiap kelompok umur akan turun sehingga diperlukan pemerataan kualitas pelayanan kesehatan dan pelayanan advokasi pembanguana keluarga. Perbedaan struktur kependudukan Kabupaten Kebumen berdasarkan proyeksi demografi 2020-2045, proyeksi tren TFR dan IMR 2020-2045 menghasilkan penduduk usia muda lebih rendah dan lanjut usia lebih tinggi, sedangkan penduduk usia produktif (15-59 tahun) menurun. Perubahan struktur penduduk memengaruhi rasio ketergantungan. Hasil proyeksi kependudukan 2020-2045 menunjukkan rasio ketergantungan Kabupaten Kebumen meningkat. Perubahan struktur penduduk Kabupaten Kebumen harus diimbangi dengan peningkatan kualitasnya. Jumlah penduduk usia muda 2045 yang lebih sedikit perlu adanya kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen di masa depan perlu melihat perkembangan penduduk usia ini, diantaranya terkait pencegahan stunting dan peningkatan akses dan mutu layanan Pendidikan. Selain itu juga perlu dikembangkan kurikulum pendidikan karakter dan kemampuan analisis anak didik sejak dini. Selain itu, pembangunan berbasis demografis perlu memperhatikan kebutuhan sarana prasarana untuk dua puluh tahun ke depan yang dirinci per lima tahun, minimal untuk kebutuhan sarana prasarana rumah/tempat tinggal, air minum, energi/listrik, persampahan, fasilitas kesehatan, dan fasilitas pendidikan.

2. Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas; Pembangunan aksesibilitas dan konektivitas Kabupaten Kebumen perlu melibatkan berbagai aspek seperti pembangunan infrastruktur, pola spasial, dan faktor ekonomi. Pembangunan aksesibilitas dan konektivitas Kabupaten Kebumen perlu memperhatikan Peraturan Daerah tentang RTRW Daerah. Pembangunan aksesibilitas dan konektivitas sangat penting untuk meningkatkan standar hidup, pertumbuhan ekonomi, dan daya saing regional. Wilayah perdesaan yang menghadapi tantangan karena hambatan geografis dan ketimpangan sosial ekonomi, membutuhkan pendekatan komprehensif untuk meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas sosial ekonomi. Peningkatan evaluasi aksesibilitas berdasarkan faktor sosial dan ekonomi dalam

mengungkapkan pola spasial dan kebutuhan untuk meningkatkan jaringan jalan untuk memperkuat hubungan antar dan intra wilayah, serta implementasi teknologi informasi dan komunikasi yang efektif di daerah pedesaan sangat penting untuk meningkatkan aksesibilitas informasi dan pemanfaatan data. Faktor-faktor tersebut, perlu dikembangkan dalam perencanaan strategis untuk meningkatkan aksesibilitas regional dan konektivitas untuk pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan.

- 3. Pengembangan kawasan dan penggunaan lahan sesuai peruntukannya dalam RTRW Kabupaten Kebumen;** Peraturan Daerah tentang RTRW Daerah memainkan peran penting dalam memandu pembangunan dan penggunaan lahan kawasan strategis. Keberadaan RTRW Kabupaten Kebumen berfungsi sebagai fondasi untuk pembangunan daerah, memastikan bahwa penggunaan lahan selaras dengan rencana tata ruang sesuai dengan peruntukannya. Tantangan muncul ketika perubahan penggunaan lahan, hal ini juga berpotensi yang mengarah pada konflik yang membutuhkan penyelesaian. RTRW tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi tetapi juga mempertimbangkan perspektif sosial budaya dan lingkungan, bertujuan untuk pembangunan berkelanjutan di kawasan strategis. Perencanaan strategis dalam pengelolaan lahan melibatkan pendekatan sistematis berdasarkan faktor ekologi, sosial, dan ekonomi, menekankan pentingnya penggunaan lahan sesuai peruntukannya sebagai dasar teritorial untuk kegiatan sosial ekonomi dan pembangunan kawasan perkotaan baru.
- 4. Peningkatan kesejahteraan bagi semua;** Meningkatkan kesejahteraan untuk semua melibatkan penanganan berbagai masalah pembangunan, seperti pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, infrastruktur dasar, ketahanan pangan, dan sosial. Tantangan dalam intervensi dalam peningkatan kesejahteraan untuk semua yang masih menjadi persoalan, yakni data yang akurat, dalam hal ini data by name by address penduduk dengan status kesejahteraan 0-100 persen (desil 1-10). Sumber data yang digunakan oleh daerah masih beragam, tergantung dari kebijakan dari setiap upaya intervensi. Dimana setiap data dari berbagai sumber data masih terdapat kesalahan data (*inclusion dan exclusion error*). Upaya perbaikan data-data tersebut melalui proses verifikasi dan validasi (*verval*) tidak dilakukan secara berkala dan kejelasan mekanisme. Dimana dalam hal kejelasan mekanisme, sering kali hasil data yang telah *diverval* oleh daerah dan dikirim/dilaporkan ke kementerian/lembaga serta kemudian ditetapkan dengan peraturan menteri/kepala dan dikirim kembali ke daerah, hasilnya sama dengan data sebelum *verval*, kondisi ini menimbulkan konflik pada tingkat masyarakat terutama kepala rumah tangga dan individu penerima manfaat (kelompok sasaran intervensi). Selain itu, belum sepenuhnya perangkat daerah dan stakeholders menggunakan dan memanfaatkan data-data tersebut dalam menentukan upaya intervensi dan kelompok sasaran intervensi. Perangkat daerah dan stakeholders tidak mengetahui adanya data tersebut, serta masih lemah menentukan upaya intervensi dan kelompok sasaran intervensi sesuai dengan kewenangan dan permasalahan pembangunan kesejahteraan, terutama dalam menjawab kebijakan penanggulangan kemiskinan dalam 3 strategi utama, yaitu 1) mengurangi beban pengeluaran; 2) meningkatkan pendapatan; dan 3) menurunkan jumlah kantong kemiskinan. Pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi terhadap setiap pelaksanaan upaya intervensi agar diketahui ketepatan upaya intervensi dan kelompok sasaran intervensi sehingga perangkat daerah memahami pentingnya kesejahteraan, pentingnya manfaat upaya intervensi, dan merencanakan peningkatan kesejahteraan secara strategis. Secara keseluruhan, pendekatan komprehensif yang melibatkan seluruh perangkat daerah dan

stakeholders sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan bagi semua.

- 5. Mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam dalam rangka peningkatan nilai tambah berbasis UMKM;** Pemanfaatan potensi sumber daya alam sangat penting untuk pembangunan berkelanjutan dan pertumbuhan ekonomi. Penekanan pengurangan dampak negatif terhadap lingkungan hidup juga menjadi sangat penting dalam pengelolaan potensi sumber daya alam. Penggunaan potensi sumber daya alam yang efisien tidak hanya meningkatkan produktivitas ekonomi tetapi juga mengurangi kerusakan lingkungan, seperti degradasi lahan dan polusi. Dalam konteks pertambangan, eksploitasi sumber daya yang berkelanjutan sangat penting untuk kelangsungan hidup jangka panjang, membutuhkan pendekatan yang harmonis untuk pemanfaatan sumber daya alam dan sosial. Pemanfaatan potensi sumber daya alam, khususnya eko-inovasi, penguatan kapasitas sumber daya manusia, sumber daya teknologi, dan manajemen sumber daya manusia yang baik dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan produktivitas UMKM. Eko-inovasi/inovasi lingkungan merupakan penerapan konsep pembangunan berkelanjutan ke dalam produktivitas, penting bagi negara-negara yang mengandalkan sumber daya alam seperti Indonesia. Penguatan sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, dan diversifikasi bisnis berdampak positif pada produktivitas dan keberlanjutan UKM. Akses ke sumber daya informasi dan teknologi berkontribusi pada peningkatan kinerja bisnis dan peningkatan produktivitas. Selain itu, manajemen sumber daya manusia yang efektif oleh Pemerintah Daerah mempercepat pengembangan UKM dengan mendorong adopsi teknologi baru. Secara keseluruhan, dalam pemanfaatan potensi sumber daya alam melibatkan antara produktivitas UMKM, meminimalisir dampak lingkungan, dan mempromosikan pembangunan berkelanjutan.
- 6. Penerapan ekonomi berkelanjutan;** Penerapan ekonomi hijau memprioritaskan keberlanjutan lingkungan dalam pembangunan ekonomi. Konsep ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi risiko kerusakan lingkungan. Penerapan ekonomi hijau dalam penerapan circular economy secara bertahap dengan mentransformasikan dari brown industry menuju green industry baik untuk perusahaan besar, menengah, UMKM dan IKM, dengan mengadopsi prinsip-prinsip *circular economy* (R0-R9), yang dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu: a) membuat dan menggunakan produk dengan lebih cerdas (R0: *refuse*, R1: *rethink*, R2: *reduce*); b) memperpanjang usia pakai produk (R3: *reuse*, R4: *repair*, R5: *refurbish*, R6: *remanufacture*, R7: *repurpose*); dan c) mengambil manfaat dari material (R8: *recycle*, R9: *recover*). Selain itu, penerapan ekonomi hijau perlu dilakukan dengan penerapan konservasi energi agar lebih efisien dan mendorong transisi energi ke sumber energi terbarukan yang dicapai melalui pembangunan infrastruktur EBT, gerakan penghematan energi, desa mandiri energi berbasis potensi lokal yang terjangkau, inklusif, dan pendampingan energi. Penerapan ekonomi hijau dalam sistem transportasi perlu dikembangkan sistem transportasi umum massal yang andal, berkualitas, merata, terintegrasi dan terjangkau serta rendah emisi secara bertahap untuk meningkatkan peralihan penggunaan kendaraan pribadi ke transportasi umum untuk mendukung peningkatan efisiensi penggunaan energi. Selain itu, Penerapan ekonomi hijau dalam pengelolaan hutan lestari, lahan pertanian, lahan budidaya perikanan dan kelautan serta produk-produk turunannya secara berkelanjutan untuk meningkatkan produktivitas dan mendukung hilirisasi sektor pertanian, serta pengembangan *green financing* dan penerapan carbon pricing untuk mendukung investasi dan produk-produk hijau. Inovasi teknologi seperti

kecerdasan buatan, *blockchain*, dan *Internet of Things* memainkan peran penting dalam memajukan ekonomi hijau dan mempromosikan pembangunan berkelanjutan. Penerapan ekonomi hijau perlu melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan pers/media, bekerja sama dalam model Penta Helix untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Secara keseluruhan, penerapan prinsip-prinsip ekonomi hijau membutuhkan upaya bersama dari semua sektor untuk beralih ke praktik dan kebijakan ramah lingkungan.

- 7. Peningkatan kualitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja;** Meningkatkan kualitas, kompetensi, dan produktivitas tenaga kerja sangat penting untuk pembangunan ekonomi. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja meliputi sertifikasi, pelatihan, dan pengembangan keterampilan yang berkelanjutan. Kualitas tenaga kerja secara langsung berdampak pada kelangsungan ekonomi dan daya saing suatu daerah. Meningkatkan kualitas tenaga kerja melibatkan kemampuan beradaptasi terhadap kemajuan teknologi dan tantangan lingkungan sehingga meningkatkan produktivitas dalam kondisi sosial ekonomi modern. Motivasi dan lingkungan kerja yang kondusif berdampak positif pada kualitas dan produktivitas tenaga kerja, sementara kompetensi saja mungkin tidak meningkatkan kinerja. Menyeimbangkan faktor-faktor ini sangat penting untuk meningkatkan efektivitas tenaga kerja. Meningkatkan sistem pendidikan profesional untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja, kompetensi, dan produktivitas, penting untuk pembangunan sosial ekonomi dan daya saing suatu daerah. Menerapkan pendekatan berbasis kompetensi dalam sistem remunerasi dapat meningkatkan produktivitas dengan menghargai kompetensi individu dan mendorong pertumbuhan modal intelektual. Secara keseluruhan, berinvestasi dalam kualitas tenaga kerja melalui sertifikasi, pelatihan, dan remunerasi berbasis kompetensi sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi dan daya saing yang berkelanjutan.
- 8. Tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan, akuntabel, melayani, dan mengayomi masyarakat;** Tata kelola yang efektif mencakup prinsip-prinsip efisien, bersih, transparansi, akuntabilitas, orientasi layanan, dan pelayanan publik. Tata kelola yang efektif menciptakan sistem yang responsif, terbuka, dan efisien dalam memberikan layanan publik dengan menegakkan hak-hak sipil dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Tata kelola yang baik menekankan pentingnya sumber daya manusia aparatur yang memainkan peran kunci dalam menciptakan pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel. Selain itu, penggunaan teknologi, seperti kecerdasan buatan, dalam tata kelola memerlukan pertimbangan yang cermat untuk memastikan praktik etis, integritas, dan keselarasan dengan nilai-nilai yang ada didalam masyarakat. Tata kelola yang efektif bertujuan untuk mencapai tujuan nasional jangka panjang, memecahkan masalah utama, dan mampu beradaptasi sehingga efisien secara ekonomi dan berdampak pada pembangunan daerah. Pada akhirnya, tata kelola yang efektif, efisien, bersih, transparan, akuntabel, melayani, dan mengayomi masyarakat sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial ekonomi, dan pembangunan manusia.
- 9. Memperkuat riset dan inovasi daerah untuk meningkatkan daya saing daerah;** Riset dan inovasi daerah memainkan peran penting dalam meningkatkan daya saing daerah, serta memainkan peran penting dalam mempromosikan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Aglomerasi kolaboratif riset dan inovasi memegang peranan penting dalam meningkatkan daya saing daerah. Kerangka riset dan inovasi bertanggung

jawab untuk menyelaraskan inovasi teknologi dengan nilai-nilai sosial ekonomi masyarakat membantu dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial melalui kemitraan antara berbagai pemangku kepentingan. Penguatan riset dan inovasi daerah untuk meningkatkan daya saing daerah perlu didukung oleh lingkungan kelembagaan yang kondusif sehingga meningkatkan kemampuan riset dan inovasi daerah yang mengarah pada pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan.

- 10. Perubahan iklim;** Perubahan iklim di Indonesia merupakan isu mendesak yang memengaruhi berbagai aspek pembangunan. Indonesia telah mengalami perubahan suhu, pola curah hujan, dan penggunaan lahan karena dampak perubahan iklim. Kenaikan suhu dan perubahan pola curah hujan telah memengaruhi ketersediaan air di daerah aliran sungai, yang menyebabkan potensi bahaya seperti banjir dan kekeringan. Selain itu, peningkatan gas rumah kaca, khususnya karbon dioksida dari aktivitas manusia telah berkontribusi pada skenario perubahan iklim di daerah. Selain itu, Indonesia telah melihat peningkatan kasus litigasi terkait perubahan iklim, menunjukkan meningkatnya kesadaran dan respons hukum terhadap isu-isu iklim di dalam negeri. Perubahan iklim di Indonesia menggarisbawahi kebutuhan mendesak akan praktik dan kebijakan berkelanjutan untuk mengurangi dampak perubahan iklim di daerah.

Tantangan pembangunan jangka panjang Kabupaten Kebumen 2045.

Mengoptimalkan potensi sebagai tantangan dalam pembangunan Kabupaten Kebumen kedepan. Beberapa potensi yang perlu diakomodir dalam perencanaan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Kebumen sehingga dapat dioptimalkan dalam pencapaian pembangunan daerah Kabupaten Kebumen diantaranya potensi agrobisnis Kabupaten Kebumen. Sektor pertanian dalam arti luas tidak hanya dimanfaatkan sebagai sektor primer saja, tetapi juga untuk dikembangkan sebagai sektor sekunder melalui pengembangan produk olahan pertanian oleh UMKM serta sektor tersier melalui agrowisata hingga pemasaran/perdagangan produk pertanian primer maupun sekunder. Selain agrobisnis, pemerintah Kabupaten Kebumen juga melakukan pengembangan sektor pariwisata seperti pengembangan Obyek Wisata Pandan Kuning dan pengembangan kawasan wisata strategis khususnya di wilayah selatan yang memiliki garis pantai yang panjang dan beragam. Kawasan wisata selatan memiliki letak yang strategis dengan adanya Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) serta cukup dekat dengan Yogyakarta International Airport yang menjadi pintu masuk utama dari berbagai wilayah Indonesia bahkan mancanegara.

Selain itu, potensi keberadaan Geopark Kebumen yang diajukan sebagai UNESCO Global Geopark yang memiliki 42 geosite memiliki potensi *geodiversity*, *biodiversity*, dan *cultural diversity* yang perlu dikembangkan dengan prinsip konservasi, edukasi, dan pembangunan perekonomian masyarakat, termasuk mengembangkannya sebagai destinasi pariwisata yang berkelanjutan. Keberadaan infrastruktur transportasi di sekitar Kabupaten Kebumen seperti Bandara YIA, Pelabuhan Laut Tanjung Intan, Jalur Pantai Selatan, Jalur Jawa Selatan, dan keberadaan jalur KAI belum dimanfaatkan secara maksimal untuk menjadikan Kabupaten Kebumen sebagai daerah tujuan wisata maupun daerah tujuan bisnis setelah Yogyakarta, Magelang, dan Banyumas. Infrastruktur transportasi merupakan salah satu komponen yang berperan sebagai sarana ekonomi dalam sistem transportasi. Pembangunan rute jalan tol Cilacap-Yogyakarta dengan panjang jalan tol di Kebumen mencapai 57 kilometer dan memiliki entry point dan exit point tol di Kabupaten Kebumen akan memunculkan sentra ekonomi baru seperti pompa

bensin, rumah makan, dan permukiman. Selain itu, rest area dapat dijadikan sebagai tempat penjualan produk UMKM sehingga dampaknya akan dirasakan oleh pelaku UMKM lokal, khususnya di bidang kuliner. Sumber daya manusia terutama pada kelompok umur produktif sebagai pendorong utama pembangunan melalui peningkatan produktivitas yang berkualitas, serta mengoptimalkan pembangunan sesuai indikasi program RTRW Kabupaten Kebumen tahun 2023-2043 dalam perwujudan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan kawasan strategis Kabupaten Kebumen bertujuan mewujudkan Kabupaten yang sejahtera, mandiri, berbasis agrobisnis dan pariwisata yang berkelanjutan.

BAB IV

Visi dan Misi Daerah

4.1.Visi Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Visi RPJPD adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka panjang 20 (dua puluh) tahun. Visi RPJPD harus dapat menunjukkan gambaran masa depan yang ideal bagi masyarakat/ daerah dan merupakan suatu pernyataan umum yang menjadi dasar bagi semua pemangku kepentingan dalam operasionalisasi perencanaan pembangunan daerah. Visi RPJPD menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal di masa depan yang ingin dicapai berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai. Visi RPJPD menggambarkan arah yang jelas tentang kondisi masa depan yang ingin dicapai dalam 20 (dua puluh) tahun mendatang untuk menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang perlu diselesaikan dalam jangka panjang. Perumusan pokok-pokok visi dilakukan dengan mencari inti dari berbagai isu strategis ke dalam kata tertentu. Perumusan visi Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045 dapat digambarkan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1
Perumusan Visi Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045

No.	Masalah Utama	Pokok-Pokok Visi	Rumusan Visi
1.	Peningkatan perekonomian Kabupaten Kebumen dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat	Maju	Kebumen Sumunar 2045: Kebumen Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan
2.	Peningkatan kualitas Penduduk berumur 15 tahun ke atas yang termasuk angkatan kerja		
3.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan, dan akuntabel		
4.	Penguatan penyelenggaraan riset dan inovasi di daerah untuk meningkatkan daya saing daerah		
5.	Pembangunan kualitas sumber daya manusia seutuhnya menjadi tantangan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat Kabupaten Kebumen yang sehat, berpendidikan tinggi, dan berpenghasilan layak	Sejahtera	
6.	Peningkatan kesejahteraan penduduk pada semua usia		
7.	Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menuju net zero emission	Berkelanjutan	

Visi Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045 adalah:

“Kebumen Sumunar 2045: Kebumen Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan”

Visi Kabupaten Kebumen 2025-2045 sebagai upaya untuk mempercepat terwujudnya sumber daya manusia berkualitas, tata kelola pemerintahan yang handal, berdaya saing tinggi, terkoneksi antar wilayah, perekonomian yang tumbuh inklusif dan merata, infrastruktur dasar yang berkualitas, lingkungan hidup yang lestari, dan memiliki kebudayaan yang beradab untuk mensejahterakan masyarakat dengan memperhatikan isu strategis, serta memperhatikan Visi Indonesia Emas 2045: Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan serta memperhatikan Visi Jawa Tengah 2045: Jawa Tengah Sebagai Penumpu Pangan dan Industri Nasional yang Maju, Sejahtera, Berbudaya, dan Berkelanjutan.

Kebumen Sumunar 2045

Kebumen Sumunar adalah daerah agraris dan bahari yang memiliki ketahanan pangan, ekonomi dan ketangguhan budaya sebagai pusat kegiatan wilayah di selatan Jawa Tengah, yang akan bersinar ditandai dengan masyarakatnya yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan pada tahun 2045.

Kebumen

Kebumen menurut Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010, Kebumen merupakan suatu daerah otonom (selanjutnya disebut Daerah) yakni suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kebumen menunjukkan identitas wilayah dan masyarakat Kebumen yang bangga dengan daerahnya sendiri yang memiliki keragaman potensi geologi, keanekaragaman hayati, dan keberagaman budaya serta ekosistemnya.

Maju

Kebumen Maju adalah Kebumen sebagai daerah yang memiliki perekonomian berdaya saing tinggi berbasis riset, modern dengan tingkat peradaban tinggi dalam penguasaan teknologi, serta inovatif, mandiri dengan tidak ketergantungan, tangguh, didukung dengan wilayah yang kondusif (aman) dan mampu menjadi pusat kegiatan wilayah di selatan Jawa Tengah. Perekonomian Kabupaten Kebumen terus tumbuh, stabil dan inklusif dalam mendukung tantangan perekonomian nasional untuk mencapai posisi nomor lima terbesar di dunia, serta tantangan Jawa Tengah sebagai kontributor perekonomian nasional. Kebumen Maju didukung tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan akuntabel mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas serta infrastruktur yang mantap melalui penguatan kolaborasi dan inovasi seluruh aspek pembangunan.

Daya Saing: Kabupaten Kebumen maju berdaya saing diwujudkan dengan peningkatan kapasitas perekonomian daerah dan struktur ekonomi daerah berbasis kewirausahaan sebagai salah satu upaya untuk mendukung integrasi ekonomi domestik dan global, serta peningkatan produktivitas dan nilai tambah ekonomi dengan mengoptimalkan potensi lokal dan peningkatan kemandirian desa untuk semakin memperkuat pembangunan perdesaan dalam pemerataan pembangunan ekonomi daerah. Tumbuhnya perekonomian juga didukung dengan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan kualifikasi yang mampu bersaing dengan sumber daya manusia daerah lainnya. Daya saing

perekonomian daerah juga akan meningkat didukung dengan peningkatan kualitas, kapasitas dan pemerataan infrastruktur; keterpaduan dan integrasi antar moda transportasi, pelayanan transportasi yang andal, nyaman, selamat, terjangkau dan berkelanjutan guna meningkatkan kelancaran perjalanan orang, distribusi barang dan jasa, serta mengurangi ketimpangan antarwilayah. Kebumen berdaya saing diwujudkan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan yang memperhatikan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup serta penerapan ekonomi hijau.

Modern: Kabupaten Kebumen maju modern dengan sumber daya manusia yang adaptif terhadap pemanfaatan teknologi dan layanan berbasis digital terkini untuk memenuhi kebutuhannya. Kebumen maju modern didukung infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang modern yang menjangkau seluruh wilayah di Kabupaten Kebumen serta memungkinkan masyarakat Kebumen terhubung dengan global.

Inovatif: Kabupaten Kebumen maju inovatif dengan sumber daya manusia yang memiliki kapasitas menciptakan riset dan inovasi, serta kemampuan digital di semua sektor yang berdaya saing tinggi di pasar global maupun nasional untuk memperkuat perekonomian daerah. Kemampuan inovatif ini juga menjadi penting dalam menghadapi segala persoalan dan tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan global dan nasional.

Mandiri: Kabupaten Kebumen maju mandiri dengan kapasitas daerah yang berdaya saing berdasarkan kekuatan dan sumber daya yang dimiliki agar terhindar dari jebakan ketergantungan dengan pihak eksternal. Kabupaten Kebumen mandiri juga kemampuan dalam mengeksplorasi seluruh potensi ekonomi, politik, sosial, dan budaya untuk meningkatkan kekuatan sendiri, dengan tidak mengingkari realitas globalisasi atau mengisolasi diri dan menutup peluang kerja sama dengan berbagai pihak. dan dilakukan dengan kerja sama para pihak, dalam dan luar negeri. Kemandirian daerah salah satunya dengan kemandirian dalam penyediaan pangan, energi, dan produk-produk ekonomi lainnya.

Tangguh: Kabupaten Kebumen yang maju juga digambarkan sebagai Kebumen yang tangguh, mampu menghadapi tantangan dan krisis dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun budaya.

Aman: Kabupaten Kebumen maju aman menciptakan kondisi lingkungan Kabupaten Kebumen yang kondusif dalam mewujudkan perekonomian akan semakin meningkat. Kebumen aman yang dirasakan oleh masyarakat sebagai implikasi dari lingkungan yang kondusif akan mampu mendorong masyarakat lebih berkembang, produktif, dan mampu berkontribusi pada pembangunan daerah.

Sejahtera

Kebumen Sejahtera adalah Kebumen sebagai kabupaten dimana kehidupan sosial ekonomi masyarakatnya telah terpenuhi secara berimbang yang didukung oleh stabilitas keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Sejahtera merupakan suatu perwujudan kondisi keadaan dimana masyarakat terpenuhi kebutuhan dasarnya, baik kebutuhan lahir maupun batin, secara merata. Setiap individu hidup dalam keadaan makmur, sehat dan damai berlandaskan kualitas sumber daya manusia dan lingkungannya.

Berkelanjutan

Kebumen Berkelanjutan adalah Kebumen sebagai kabupaten yang memiliki kekuatan dalam menjaga, melestarikan dan meningkatkan daya dukung, dan daya tampung lingkungan yang terintegrasi dengan keragaman geologi, keanekaragaman hayati, dan ekosistem seiring dengan tuntutan pembangunan ekonomi yang semakin meningkat untuk membangun daerah Kabupaten Kebumen dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kebumen berkelanjutan memiliki kemampuan dalam peningkatan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim.

4.2. Sasaran Visi Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045

Dalam rangka mencapai Visi Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045 yaitu “Kebumen Sumunar 2045: Kebumen Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan”, terdapat 5 (lima) sasaran visi yang juga selaras dengan Sasaran Visi Nasional dan Sasaran Visi Provinsi Jawa Tengah. Kelima sasaran visi dirumuskan untuk melihat dan mengukur ketercapaian Visi Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045. Sasaran Visi merupakan arahan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 000.7/0002940 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota Dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045. Sesuai amanah Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 600.1/176/SJ dan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, penyelarasan RPJPD dengan RPJPN Tahun 2025-2045 dilakukan secara berjenjang, dimana RPJPD Provinsi diselaraskan secara imperatif dengan RPJPN, dan RPJPD Kabupaten/Kota diselaraskan dengan RPJPD Provinsi. Dalam rangka upaya penyelarasan RPJPD Kabupaten/Kota dengan RPJPD Provinsi, maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 000.7/0002940 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota Dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045.

Pencapaian Kebumen Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan tercermin dalam lima sasaran visi, yaitu: (1) Peningkatan daya saing sumber daya manusia; (2) Kepemimpinan dan pengaruh di lingkungan Nasional meningkat; (3) Pertumbuhan Ekonomi, yang Stabil dalam rangka Peningkatan Pendapatan per Kapita; (4) Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan; dan (5) Penurunan emisi GRK menuju *net zero emission*.

Sasaran pertama, peningkatan daya saing sumber daya manusia, mendukung pencapaian sasaran nasional daya saing sumber daya manusia yang meningkat Indeks Modal Manusia menjadi sebesar 0,73 pada tahun 2045 dan sasaran Provinsi Jawa Tengah ditunjukkan dengan Indeks Modal Manusia menjadi sebesar 0,7 pada tahun 2045. Sasaran ini didukung dengan mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas melalui peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan, pemajuan kebudayaan dan peningkatan pendidikan karakter serta peningkatan kualitas keluarga, dan pengarusutamaan gender. Sasaran tersebut di Kabupaten Kebumen diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia menjadi sebesar 81,00-82,00 pada tahun 2045.

Sasaran kedua, kepemimpinan dan pengaruh di lingkungan nasional meningkat, sejalan dengan sasaran visi nasional kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat ditunjukkan dengan *Global Power Index* peringkat 15 dan sasaran visi Provinsi Jawa Tengah ditunjukkan dengan indikator kapasitas

institusi menjadi sebesar 4,84 pada tahun 2045. Sasaran ini didukung melalui peningkatan tata kelola pemerintahan serta peningkatan inovasi dan daya saing daerah. Sasaran visi ini diukur dengan Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) menjadi sebesar 80,00 pada tahun 2045 dan Kapabilitas Inovasi (bagian dari IDSD) menjadi sebesar 2,47-2,50 pada tahun 2045.

Sasaran ketiga, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen yang stabil dalam rangka peningkatan pendapatan perkapita. Indikator sasaran visi ini yaitu pertumbuhan ekonomi yang stabil dengan rata-rata pertumbuhan mencapai sekitar 5,00-5,50 persen hingga tahun 2045. Dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil diharapkan dapat meningkatkan pendapatan per kapita yang ditunjukkan dengan PDRB per kapita mencapai sekitar 128,57-151,00 juta rupiah pada tahun 2045 sebagai dukungan terhadap pencapaian sasaran visi nasional yaitu meningkatkan pendapatan per kapita setara negara maju dan pencapaian sasaran visi pendapatan per kapita Provinsi Jawa Tengah mencapai sekitar 230,77-276,24 juta rupiah pada tahun 2045. Sasaran visi ini didorong oleh peningkatan pembangunan sektor industri melalui upaya peningkatan produktivitas, nilai tambah, pemanfaatan potensi lokal, hilirisasi yang dimulai dan melibatkan Koperasi dan UMKM, pengembangan ekonomi wilayah serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Pembangunan sektor tersebut di Kabupaten Kebumen ditunjukkan dengan pencapaian indikator Pertumbuhan Ekonomi menjadi sebesar 5,00-5,50 pada tahun 2045.

Sasaran keempat, pengentasan kemiskinan dan ketimpangan, sejalan dengan meningkatnya pendapatan per kapita, maka diharapkan kemiskinan dan ketimpangan di Kabupaten Kebumen akan semakin menurun. Sasaran Visi ini ditunjukkan dengan indikator tingkat kemiskinan Kabupaten Kebumen yang semakin menurun pada kisaran 0,00-0,67 persen sebagai dukungan terhadap pencapaian sasaran visi nasional menuju kemiskinan 0 persen dan sasaran visi Provinsi Jawa Tengah kemiskinan mencapai 0,00-0,50 persen. Sebagai upaya mengentaskan kemiskinan, maka sasaran visi ini akan didukung utamanya dengan menjaga ketimpangan pendapatan yang rendah. Hal ini diukur dengan indikator Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia yang mengacu pada 40% kelompok pendapatan terendah sebesar 22,00-29,18 persen pada hingga tahun 2045. Dengan 40% kelompok pendapatan rendah memiliki proporsi pengeluaran $\geq 17\%$, sesuai kriteria Bank Dunia, maka telah masuk pada kategori ketimpangan pendapatan rendah. Hal ini mendukung pencapaian sasaran visi nasional yaitu ketimpangan yang berkurang dan sasaran visi Provinsi Jawa Tengah ketimpangan yang berkurang ditunjukkan dengan rasio gini yang semakin rendah berkisar antara 0,301-0,345. Sasaran visi ini akan didukung melalui akselerasi dan integrasi program penanggulangan kemiskinan, pemerataan pendapatan, perlindungan sosial dan ketahanan pangan, dan ditunjukkan dengan pencapaian indikator Tingkat Kemiskinan menjadi sebesar 0,67-0,00 pada tahun 2045.

Sasaran kelima, penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) menuju *net zero emission*, mendukung sasaran visi Provinsi Jawa Tengah ditunjukkan dengan indikator penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) menjadi sebesar 82,75 persen pada tahun 2045 dalam rangka mendukung sasaran visi nasional pencapaian *net zero emission* pada tahun 2060. Sasaran kelima ini merupakan gambaran komitmen Kabupaten Kebumen untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan sekaligus ramah lingkungan dalam kerangka ekonomi hijau, serta peningkatan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim. Sasaran ini diukur dengan indikator penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) menjadi sebesar 17.748.644,94 TonCO₂eq pada tahun 2045 dalam rangka mendukung pencapaian *net zero emission* tingkat nasional pada tahun 2060. Sasaran visi ini akan didukung melalui peningkatan kualitas lingkungan hidup, mitigasi dan adaptasi terhadap bencana dan perubahan iklim serta ketahanan air.

Tabel 4.2
Sasaran Visi, Indikator dan Target Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045

Sasaran Visi	Indikator	Proyeksi Baseline 2025	Target			
			2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia (Angka)	72,45	74,00-75,00	77,00-78,00	79,00-80,00	81,00-82,00
2. Kepemimpinan dan pengaruh di lingkungan Nasional meningkat	a. Indeks Reformasi Birokrasi (Angka)	79,92	79,94	79,96	79,98	80
	b. Kapabilitas Inovasi (Angka)	2,32	2,32-2,36	2,37-2,41	2,42-2,46	2,47-2,50
3. Pertumbuhan Ekonomi yang Stabil dalam rangka Peningkatan Pendapatan per Kapita	Pertumbuhan Ekonomi (Persen)	5,40-6,30	5,00-5,50	5,00-5,50	5,00-5,50	5,00-5,50
4. Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan	Tingkat Kemiskinan (Persen)	13,90-14,71	10,43-11,20	6,95-7,69	3,48-4,18	0,00-0,67
5. Penurunan emisi GRK menuju <i>net zero emission</i>	Penurunan emisi GRK (TonCO2eq)	206.765,97	4.592.235,71	8.977.705,455	13.363.175,2	17.748.644,94

4.3.Misi Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045

Berangkat dari Visi dan Sasaran Visi yang dijelaskan sebelumnya, serta memperhatikan Misi (agenda) pembangunan yang tertuang dalam RPJPN 2025-2045, yaitu: (1) Transformasi Sosial; (2) Transformasi Ekonomi; (3) Transformasi Tata Kelola; (4) Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Ketangguhan Diplomasi; (5) Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi; (6) Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan; (7) Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan; dan (8) Kestinambungan Pembangunan dan memperhatikan Misi Provinsi Jawa Tengah 2025-2045, yaitu (1) Transformasi Sosial; (2) Transformasi Ekonomi; (3) Transformasi Tata Kelola; (4) Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah; (5) Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi; (6) Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan; (7) Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan; dan (8) Kestinambungan Pembangunan; Misi Kabupaten Kebumen 2025-2045 disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan Visi Kabupaten Kebumen 2025-2045 “Kebumen Sumunar 2045: Kebumen Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan”.

Dalam rangka mewujudkan Visi Kabupaten Kebumen 2025-2045 ditetapkan 6 (enam) Misi Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045 terdiri atas (1) Mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing; (2) Mewujudkan pelayanan prima berdasarkan prinsip *good and clean governance*; (3) Mewujudkan daerah yang kompetitif dan inovatif; (4) Mewujudkan perekonomian daerah yang memiliki produktivitas tinggi dan berbasis potensi lokal; (5) Mewujudkan kesejahteraan sosial; dan (6) Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas. Berikut rumusan Misi dalam rangka mencapai Visi Kabupaten Kebumen 2025-2045.

Tabel 4.3
Perumusan Misi Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045

No.	Masalah Utama	Rumusan Visi	Masalah Pokok	Rumusan Misi
1.	Peningkatan perekonomian Kabupaten Kebumen dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat	Kebumen Sumunar 2045: Kebumen Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan	Peningkatan perekonomian daerah yang inklusif dalam kesempatan kerja dan ketersediaan lapangan pekerjaan yang sesuai potensi lokal belum optimal	Mewujudkan perekonomian daerah yang memiliki produktivitas tinggi dan berbasis potensi lokal
2.	Peningkatan kualitas Penduduk berumur 15 tahun ke atas yang termasuk angkatan kerja		Belum optimalnya peningkatan kualitas penduduk usia produktif (15-59 tahun)	
3.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan, dan akuntabel		Tata Kelola Pemerintahan Daerah Kabupaten Kebumen yang lincah dan cepat (agile bureaucracy) perlu ditingkatkan	Mewujudkan pelayanan prima berdasarkan prinsip <i>good and clean governance</i>
4.	Penguatan penyelenggaraan riset dan inovasi di daerah untuk meningkatkan daya saing daerah		Belum optimalnya peningkatan kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi (IPTEKIN) dalam setiap aspek pembangunan daerah Kabupaten Kebumen	Mewujudkan daerah yang kompetitif dan inovatif
5.	Pembangunan kualitas sumber daya manusia seutuhnya menjadi tantangan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat Kabupaten Kebumen yang sehat, berpendidikan tinggi, dan berpenghasilan layak		Pembangunan sumber daya manusia Kabupaten Kebumen belum optimal	Mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing
6.	Peningkatan kesejahteraan penduduk pada semua usia		Peningkatan upaya penanggulangan kemiskinan belum optimal	Mewujudkan kesejahteraan sosial
7.	Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menuju net zero emission		Belum optimalnya peningkatan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim	Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas

Misi Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing.

Misi Mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing diperlukan dalam rangka menjamin tercukupinya kebutuhan dasar masyarakat sehingga tercapai manusia Kabupaten Kebumen yang sehat, cerdas, kreatif dan berdaya saing, serta memberikan dukungan terhadap kebijakan transformasi sosial. Mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing dilakukan dengan memastikan penyediaan layanan dasar secara merata, terutama penyediaan akses pendidikan dan kesehatan untuk semua.

Modernisasi dan globalisasi memiliki implikasi terhadap kehidupan masyarakat, seperti munculnya nilai-nilai baru yang tidak sejalan dengan budaya asli masyarakat Kebumen. Peran dan fungsi agama menjadi penting untuk menempatkan dalam konteks membangun ketahanan budaya. Keberadaan pesantren dan pendidikan keagamaan dengan kekuatan tradisi kekhasannya telah memberikan kontribusi yang besar dalam mendidik, mempersiapkan santri/peserta didik untuk dapat menjalankan perannya dengan menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan mengamalkan ajaran agamanya. Pesantren dan pendidikan keagamaan mempunyai peran yang sangat penting dalam pendidikan karakter, karena tidak hanya mengajarkan aspek akademis, tetapi juga pembentukan moral dan etika. Pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan menanamkan nilai-nilai keagamaan yang kuat seperti kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab dan kepedulian sosial yang menjadi fondasi penting bagi karakter individu. Nilai keagamaan memiliki peran penting dalam membentuk dan memperkuat kesalehan sosial. Kesalehan sosial merupakan pondasi dalam membangun masyarakat yang harmonis dan berkelanjutan, karena mengajarkan individu untuk bertindak berdasarkan nilai-nilai moral dan etika dalam interaksi sosial mereka. Dengan menumbuhkan kesalehan sosial, setiap anggota masyarakat didorong untuk bertanggung jawab, berbuat baik, dan menunjukkan empati serta kepedulian terhadap kesejahteraan orang lain.

Ketahanan budaya menjadi hal penting untuk menjaga karakter masyarakat Kebumen pada identitas dan jati diri yang sesuai dengan budaya luhur. Pentingnya ketahanan keluarga sebagai pondasi pembentukan karakter masyarakat sejak dini, serta budaya literasi dalam berbagai aspek. Selain itu membangun kesadaran dalam pelestarian kesenian dan budaya menjadi langkah strategis dalam mempertahankan karakter masyarakat Kabupaten Kebumen. Ketahanan sosial budaya yang kuat dan kokoh akan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi masyarakat, selain itu sebaliknya ketahanan sosial dan budaya akan tercapai apabila didukung dengan kondisi lingkungan wilayah yang kondusif yang akan menjamin lancar dan amannya semua pihak dalam proses pembangunan daerah.

Pentingnya ketahanan keluarga sebagai pondasi pembentukan karakter masyarakat sejak dini. Keluarga juga berperan dalam membentuk ketrampilan sosial dan kemampuan beradaptasi yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat dan dunia kerja. Penguatan peran dan fungsi keluarga ditujukan untuk menciptakan ketenteraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga.

Pembangunan berbasis gender adalah salah satu aspek penting dalam pembangunan sumber daya manusia karena memastikan bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Dengan mengintegrasikan perspektif

gender dalam setiap kebijakan dan program pembangunan, kita dapat menciptakan lingkungan yang mendukung semua individu untuk mencapai potensi maksimal mereka. Pembangunan berbasis gender mengakui peran penting perempuan dalam keluarga, komunitas, dan ekonomi, serta mendorong kesetaraan akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan partisipasi politik.

2. Mewujudkan pelayanan prima berdasarkan prinsip *good and clean governance*

Misi mewujudkan pelayanan prima berdasarkan prinsip *good and clean governance* dilakukan melalui pemerintahan yang dinamis, adaptif, responsif, kolaboratif dan bersih. Misi ini mengarah pada tata kelola pemerintahan yang dinamis dengan memperkuat pemerintahan yang semakin adaptif dan kolaboratif, gerak cepat, tanggap dalam menghadapi situasi maupun gejolak apapun dan dapat langsung beradaptasi pada segala bentuk perubahan yang terjadi (lebih *agile*) dengan tetap menjaga integritas semakin kuat.

Birokrasi yang dinamis tercermin dari pelayanan publik yang semakin berkualitas, manajemen organisasi dan proses bisnis yang semakin adaptif dan berorientasi pada hasil, kelembagaan yang efektif, digitalisasi tata kelola pemerintahan, manajemen sumber daya aparatur yang efektif dan efisien, regulasi, pengawasan yang independen dan berintegritas, pengembangan budaya kerja, pola pikir birokrasi, serta komitmen. Birokrasi yang responsif tercermin dari pemerintahan yang cepat tanggap, efektif, dan efisien dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dengan mengutamakan pelayanan publik yang berkualitas, prosedur yang sederhana dan mudah diakses. Birokrasi yang responsif menjadi kunci untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan memastikan bahwa layanan publik benar-benar bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Birokrasi kolaboratif juga menjadi hal penting untuk diwujudkan dalam konteks membangun tata kelola pemerintahan yang dinamis. Birokrasi kolaboratif menekankan pentingnya kerja sama antara berbagai pihak termasuk lembaga pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat dan masyarakat untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik.

Pemerintahan yang bersih menekankan pada transparansi, akuntabilitas, integritas, dan efisiensi. Dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip etika dan moral, akan memastikan bahwa segala kebijakan dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Melalui keterbukaan informasi dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, akan tercipta lingkungan yang adil dan responsif terhadap kebutuhan publik. Penegakan hukum yang konsisten dan adil melindungi hak dan kewajiban setiap warga negara, membangun kepercayaan publik, dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan serta kesejahteraan bagi semua.

Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih berkontribusi langsung terhadap terciptanya keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Keamanan daerah yang tangguh akan menciptakan ketentraman dan ketertiban umum, rasa aman dan nyaman, serta wilayah yang kondusif bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Kebumen. Keamanan daerah yang tangguh mampu menciptakan stabilnya kondisi ekonomi makro daerah sehingga memberikan kemudahan bagi masyarakat dan usaha kecil menengah dalam mengakses layanan keuangan, mendorong pertumbuhan inklusif dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Dengan terciptanya kondisi tersebut, diharapkan akan mendukung implementasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, menarik investasi,

menciptakan pekerjaan yang layak, dan mengalokasikan sumber daya secara efektif.

3. Mewujudkan daerah yang kompetitif dan inovatif.

Misi mewujudkan daerah yang kompetitif dan inovatif dilakukan melalui proses hilirisasi yang andal dengan dukungan digitalisasi ekonomi, serta ekosistem riset dan inovasi yang kuat dalam menggerakkan produktivitas sektor-sektor unggulan daerah. Terwujudnya daerah yang kompetitif dan inovatif diharapkan akan menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah harus mampu mewujudkan ekosistem riset dan inovasi yang kuat dalam rangka meningkatkan kapabilitas inovasi daerah dengan meningkatkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan, konektivitas, kreativitas untuk mampu mengubah ide kreatif dan inovatif menjadi barang jasa baru yang memiliki nilai tambah dan bersaing di pasar global.

4. Mewujudkan perekonomian daerah yang memiliki produktivitas tinggi dan berbasis potensi lokal.

Misi mewujudkan perekonomian daerah yang memiliki produktivitas tinggi dan berbasis potensi lokal ditunjukkan dengan meningkatkan produktivitas sektor-sektor ekonomi yang masih rendah dan menggerakkan sektor-sektor unggulan daerah. Sektor unggulan daerah yang sampai saat ini memberikan kontribusi cukup besar pada perekonomian daerah yaitu sektor pertanian (dalam arti luas), sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, dan sektor pariwisata. Pengembangan Geopark Kebumen erat kaitannya dengan sektor pariwisata yang diharapkan menjadi salah satu lokomotif ekonomi daerah dan menumbuhkan pusat-pusat perekonomian baru di kawasan geopark. Pengembangan sektor unggulan harus saling terintegrasi dalam proses hilirisasi yang mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal untuk menghasilkan barang/jasa yang memiliki nilai tambah dan daya saing di pasar global.

Upaya mendukung kebijakan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan dilakukan dengan mendorong pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Hal ini dilakukan melalui penguatan implementasi penataan ruang terutama dalam perwujudan struktur ruang serta memperhatikan perencanaan wilayah mendasarkan rencana arah pengembangan wilayah Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Purworejo (Keburejo).

Transformasi digital menjadi pendorong utama dalam percepatan pertumbuhan ekonomi. Perkembangan teknologi tidak hanya mengubah cara manusia berinteraksi dan bekerja, namun memberikan peluang bagi inovasi bisnis yang lebih cepat dan efisien. Adopsi teknologi digital secara luas dapat meningkatkan produktivitas, menciptakan lapangan kerja dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat.

Perwujudan struktur ekonomi daerah yang berdaya saing berbasis kewirausahaan dapat dilakukan melalui peningkatan pengembangan sektor UMKM dan koperasi. Iklim usaha yang kondusif akan mendukung berkembangnya kewirausahaan daerah yang diharapkan mampu mendukung penyerapan tenaga kerja, menarik investasi, mendorong terciptanya inovasi baru dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Sumber pembiayaan pemerintah, baik itu melalui pajak, utang atau penerimaan negara lainnya, memainkan peran penting dalam memastikan stabilitas ekonomi makro. Pembiayaan yang sehat dan berkelanjutan

memungkinkan pemerintah untuk menjalankan fungsi-fungsi seperti pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan publik dan program kesejahteraan sosial, tanpa menimbulkan tekanan inflasi yang berlebihan. Ketika pemerintah mengelola sumber pembiayaannya dengan baik termasuk menjaga defisit anggaran pada tingkat yang aman dan utang publik yang terkendali, akan meningkatkan kepercayaan investor dan pasar, menurunkan biaya pinjaman serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang stabil.

5. Mewujudkan kesejahteraan sosial.

Dalam mendukung transformasi sosial, misi mewujudkan kesejahteraan sosial diperlukan dalam rangka menjamin kecukupan ekonomi masyarakat sehingga tercapai masyarakat Kabupaten Kebumen yang semakin sejahtera melalui integrasi program penanggulangan kemiskinan, optimalisasi partisipasi dan kolaborasi seluruh *stakeholder* dalam penanggulangan kemiskinan, menjaga pemerataan pendapatan, memastikan penyediaan jaminan perlindungan sosial secara merata termasuk penyediaan fasilitas publik yang inklusif, serta meningkatkan ketahanan pangan yang lebih terjangkau, beragam, bergizi seimbang dan aman. Percepatan penanggulangan kemiskinan akan mendukung terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat Kabupaten Kebumen.

6. Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas.

Pembangunan daerah tidak terlepas dari kebutuhan akan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup yang baik. Oleh karena itu, ketahanan sumber daya alam dan ekologi harus diperkuat dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung Kabupaten Kebumen dan kelestarian sumber daya alam dalam menjaga keberlanjutan pembangunan daerah. Ketahanan ekologi difokuskan pada pemantapan ketahanan sumber daya lahan dan pesisir, ketahanan air, ketahanan pangan, ketahanan energi, ketahanan sumber daya mineral, kualitas lingkungan hidup, penataan ruang, ketahanan perubahan iklim, ketangguhan bencana serta penerapan prinsip ekonomi hijau untuk mengurangi risiko kerusakan lingkungan. Terjaganya sumber daya alam dan lestarinya lingkungan hidup akan dapat mengurangi potensi terjadinya bencana.

BAB V

Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok

5.1. Arah Kebijakan Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045

Kerangka kerja pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Kebumen tahun 2025-2045 dijabarkan dalam empat tahapan arah kebijakan dalam rangka pencapaian visi dan misi daerah. Arah kebijakan lima tahunan dalam pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Kebumen 2025-2045 dilakukan secara terukur dan konsisten diarahkan guna penekanan prioritas pembangunan yang ditetapkan secara berkesinambungan antara satu periode dengan periode berikutnya.

Arah Kebijakan Periode 2025-2029

Tahapan pertama, arah kebijakan dari pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Kebumen Periode 2025-2029 adalah **Penguatan Landasan Pembangunan Kabupaten Kebumen**. Pada tahap ini dilakukan dengan penguatan landasan dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing, pelayanan prima berdasarkan prinsip *good and clean governance*, daerah yang kompetitif dan inovatif, perekonomian daerah yang memiliki produktivitas tinggi dan berbasis potensi lokal, peningkatan kesejahteraan sosial, serta lingkungan hidup yang berkualitas.

Misi 1: Mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing, diarahkan pada penguatan landasan dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing merupakan tahapan kebijakan peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan untuk semua dan pendidikan yang berkualitas termasuk pendidikan karakter dan literasi, pemajuan budaya, peningkatan pengarusutamaan gender serta kualitas keluarga untuk peningkatan produktivitas sumber daya manusia. Penguatan landasan dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing difokuskan pada peningkatan pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan, serta peningkatan kualitas hidup keluarga untuk membentuk SDM yang produktif, berkarakter, adaptif dan tangguh.

Misi 2: Mewujudkan pelayanan prima berdasarkan prinsip *good and clean governance*, diarahkan pada penguatan landasan dalam mewujudkan pelayanan prima berdasarkan prinsip *good and clean governance* merupakan tahapan kebijakan penguatan reformasi birokrasi menuju birokrasi yang dinamis, pelayanan publik yang berintegritas, adaptif, kolaboratif dan berbasis teknologi informasi serta perwujudan kondusivitas wilayah. Penguatan landasan dalam mewujudkan pelayanan prima berdasarkan prinsip *good and clean governance* difokuskan pada peningkatan perbaikan kelembagaan pemerintah daerah, peningkatan kualitas pengelolaan manajemen ASN berbasis merit, penerapan manajemen risiko perencanaan dan pengendalian pembangunan, penguatan kapasitas masyarakat sipil, dan penguatan kebijakan pembangunan berbasis *big data* dan *artificial intellegent*, serta perbaikan tata kelola fiskal dan optimalisasi pembiayaan pembangunan non pemerintah.

Misi 3: Mewujudkan daerah yang kompetitif dan inovatif, diarahkan pada penguatan landasan dalam mewujudkan daerah yang kompetitif dan inovatif, merupakan tahapan kebijakan pengembangan jaringan riset dan inovasi daerah dan penguatan ekosistem riset dan inovasi daerah untuk meningkatkan kapabilitas inovasi. Penguatan landasan dalam mewujudkan daerah yang

kompetitif dan inovatif difokuskan pada peningkatan jejaring riset dan inovasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan daerah.

Misi 4: Mewujudkan perekonomian daerah yang memiliki produktivitas tinggi dan berbasis potensi lokal, diarahkan pada penguatan landasan dalam mewujudkan perekonomian daerah yang memiliki produktivitas tinggi dan berbasis potensi lokal merupakan tahapan kebijakan penguatan produksi dan hilirisasi melalui peningkatan nilai tambah berbasis potensi unggulan yang saling terintegrasi dan berdaya saing di pasar domestik maupun global, peningkatan kewirausahaan dan kompetensi tenaga kerja, mendorong pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, peningkatan infrastruktur dan transformasi digital, serta stabilitas ekonomi makro daerah. Penguatan landasan dalam mewujudkan perekonomian daerah yang memiliki produktivitas tinggi dan berbasis potensi lokal difokuskan pada peningkatan produktivitas sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja tinggi untuk pemerataan pendapatan, serta peningkatan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru didukung peningkatan sistem transportasi antar wilayah dan penerapan ekonomi hijau.

Misi 5: Mewujudkan kesejahteraan sosial, diarahkan pada penguatan landasan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial merupakan tahapan kebijakan peningkatan integrasi dan kolaborasi dalam upaya penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan perlindungan sosial, peningkatan daya beli, pengurangan beban pengeluaran, perbaikan pola konsumsi, peningkatan ketahanan pangan serta pemerataan pendapatan. Penguatan landasan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial difokuskan pada peningkatan pendapatan dan ketahanan pangan, serta peningkatan upaya perlindungan sosial.

Misi 6: Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas, diarahkan pada penguatan landasan dalam mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan merupakan tahapan kebijakan perbaikan kualitas lingkungan hidup, manajemen pengelolaan lingkungan, serta peningkatan mitigasi dan adaptasi bencana. Penguatan landasan dalam mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan difokuskan pada peningkatan kapasitas sumber daya air dan energi, serta pemenuhan akses air minum dan sanitasi aman memperhatikan tata ruang dan kelestarian lingkungan.

Arah Kebijakan Periode 2030-2034

Tahapan kedua, Arah Kebijakan dari pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Kebumen Periode 2030-2034 adalah **Akselerasi Pembangunan Kabupaten Kebumen**. Pada tahap ini dilakukan dengan akselerasi dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing, pelayanan prima berdasarkan prinsip *good and clean governance*, daerah yang kompetitif dan inovatif, perekonomian daerah yang memiliki produktivitas tinggi dan berbasis potensi lokal, peningkatan kesejahteraan sosial, dan lingkungan hidup yang berkualitas.

Misi 1: Mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing, diarahkan pada akselerasi dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing merupakan tahapan kebijakan akselerasi pemerataan akses dan kualitas pelayanan kesehatan untuk semua dan Pendidikan yang berkualitas meliputi pendidikan karakter dan literasi termasuk penguasaan IPTEK, pelestarian budaya, akselerasi pengarusutamaan gender serta kualitas keluarga untuk peningkatan produktivitas sumber daya manusia. Akselerasi dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing difokuskan pada

penguatan pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan, dan peningkatan kualitas hidup keluarga untuk percepatan pembangunan SDM yang berkualitas.

Misi 2: Mewujudkan pelayanan prima berdasarkan prinsip *good and clean governance*, diarahkan pada akselerasi dalam mewujudkan pelayanan prima berdasarkan prinsip *good and clean governance* merupakan tahapan kebijakan akselerasi penguatan reformasi birokrasi menuju birokrasi yang dinamis, akselerasi kualitas pelayanan publik yang berintegritas, adaptif, kolaboratif dan berbasis teknologi informasi serta perwujudan kondusivitas wilayah. Akselerasi dalam mewujudkan pelayanan prima berdasarkan prinsip *good and clean governance* difokuskan pada penguatan kelembagaan pemerintah daerah, penguatan pengelolaan manajemen ASN berbasis merit, pengembangan manajemen risiko perencanaan dan pengendalian pembangunan, penguatan partisipasi masyarakat sipil, dan peningkatan kebijakan pembangunan berbasis *big data* dan *artificial intellegent*, serta optimalisasi kapasitas fiskal daerah, dan peningkatan pembiayaan non pemerintah.

Misi 3: Mewujudkan daerah yang kompetitif dan inovatif, diarahkan pada akselerasi dalam mewujudkan daerah yang kompetitif dan inovatif, dititikberatkan pada dititikberatkan pada penguatan jaringan riset dan inovasi daerah dan penguatan ekosistem riset dan inovasi daerah untuk akselerasi kapabilitas inovasi. Akselerasi dalam mewujudkan daerah yang kompetitif dan inovatif difokuskan pada pembudayaan riset dan inovasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan daerah.

Misi 4: Mewujudkan perekonomian daerah yang memiliki produktivitas tinggi dan berbasis potensi lokal, diarahkan pada akselerasi dalam mewujudkan perekonomian daerah yang memiliki produktivitas tinggi dan berbasis potensi lokal,—merupakan tahapan kebijakan akselerasi penguatan produksi dan hilirisasi melalui peningkatan produktivitas dan nilai tambah berbasis potensi unggulan yang saling terintegrasi dan berdaya saing di pasar domestik maupun global, peningkatan kewirausahaan dan kompetensi tenaga kerja, pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, peningkatan infrastruktur dan literasi digital, serta stabilitas ekonomi makro daerah. Akselerasi dalam mewujudkan perekonomian daerah yang memiliki produktivitas tinggi dan berbasis potensi lokal difokuskan pada peningkatan produktivitas sektor-sektor yang memiliki nilai tambah tinggi serta peningkatan pemanfaatan sistem transportasi antar wilayah untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan serta penerapan ekonomi hijau.

Misi 5: Mewujudkan kesejahteraan sosial, diarahkan pada akselerasi dalam mewujudkan kesejahteraan sosial merupakan tahapan kebijakan akselerasi penanggulangan kemiskinan dalam penguatan integrasi dan kolaborasi seluruh stakeholder melalui upaya peningkatan jaminan sosial, penguatan daya beli, pengurangan beban pengeluaran, perbaikan pola konsumsi, penguatan ketahanan pangan serta pemerataan pendapatan. Akselerasi dalam mewujudkan kesejahteraan sosial difokuskan pada penguatan peningkatan pendapatan dan ketahanan pangan, serta penguatan upaya perlindungan sosial.

Misi 6: Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas, diarahkan pada akselerasi dalam mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan merupakan tahapan kebijakan akselerasi penguatan kualitas lingkungan hidup, manajemen pengelolaan lingkungan, serta peningkatan mitigasi dan adaptasi bencana, dan resiliensi terhadap bencana dan perubahan

iklim. Akselerasi dalam mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan difokuskan pada penguatan kapasitas sumber daya air dan energi baru terbarukan, serta peningkatan pemenuhan akses air minum dan sanitasi aman memperhatikan tata ruang dan kelestarian lingkungan.

Arah Kebijakan Periode 2035-2039

Tahapan ketiga, arah kebijakan dari pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Kebumen Periode 2035-2039 adalah **Pemantapan Pembangunan Kabupaten Kebumen**. Pada tahap ini dilakukan dengan pemantapan dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing, pelayanan prima berdasarkan prinsip *good and clean governance*, daerah yang kompetitif dan inovatif, perekonomian daerah yang memiliki produktivitas tinggi dan berbasis potensi lokal, meningkatkan kesejahteraan social dan lingkungan hidup yang berkualitas.

Misi 1: Mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing, diarahkan pada pemantapan dalam mewujudkan sumber daya yang berdaya saing merupakan tahapan kebijakan pemantapan akses dan kualitas pelayanan kesehatan untuk semua dan pendidikan yang berkualitas termasuk pendidikan karakter dan literasi, pelestarian budaya, serta pengarusutamaan gender serta kualitas keluarga. Pemantapan dalam mewujudkan sumber daya yang berdaya saing difokuskan pada pemantapan pembangunan SDM menjadi semakin berkualitas menuju SDM yang berdaya saing.

Misi 2: Mewujudkan pelayanan prima berdasarkan prinsip *good and clean governance*, diarahkan pada pemantapan dalam mewujudkan pelayanan prima berdasarkan prinsip *good and clean governance* merupakan tahapan kebijakan pemantapan kualitas birokrasi yang dinamis, kualitas pelayanan publik yang berintegritas, adaptif, kolaboratif dan berbasis teknologi informasi serta pemantapan kondusivitas wilayah. Pemantapan dalam mewujudkan pelayanan prima berdasarkan prinsip *good and clean governance* difokuskan pada optimalisasi pemantapan kelembagaan pemerintah daerah berbasis teknologi informasi yang didukung oleh SDM yang kompetitif, pemantapan manajemen risiko perencanaan dan pengendalian pembangunan, pemantapan partisipasi masyarakat sipil, dan pemantapan kebijakan pembangunan berbasis *big data* dan *artificial intellegent*, serta perluasan cakupan sektor pada pembiayaan non pemerintah.

Misi 3: Mewujudkan daerah yang kompetitif dan inovatif, diarahkan pada pemantapan dalam mewujudkan daerah yang kompetitif dan inovatif merupakan tahapan kebijakan optimalisasi kualitas riset dan inovasi daerah dan pemantapan ekosistem riset dan inovasi daerah untuk meningkatkan kapabilitas inovasi. Pemantapan dalam mewujudkan daerah yang kompetitif dan inovatif difokuskan pada peningkatan pembudayaan riset dan inovasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan daerah.

Misi 4: Mewujudkan perekonomian daerah yang memiliki produktivitas tinggi dan berbasis potensi lokal, diarahkan pada pemantapan dalam mewujudkan perekonomian daerah yang memiliki produktivitas tinggi dan berbasis potensi lokal merupakan tahapan kebijakan pemantapan produksi dan hilirisasi melalui optimalisasi produktivitas dan nilai tambah berbasis pada potensi unggulan yang saling terintegrasi dan berdaya saing di pasar domestik maupun global, kompetensi tenaga kerja, pusat pertumbuhan ekonomi yang mantap baik di perkotaan dan perdesaan, peningkatan infrastruktur dan literasi digital, serta stabilitas ekonomi makro daerah. Pemantapan dalam mewujudkan perekonomian daerah yang memiliki produktivitas tinggi dan berbasis potensi lokal difokuskan pada peningkatan daya saing sektor-sektor

yang memiliki nilai tambah tinggi serta optimalisasi pemantapan sistem transportasi antar wilayah untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan, serta pemantapan penerapan ekonomi hijau.

Misi 5: Mewujudkan kesejahteraan sosial, diarahkan pada pemantapan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial merupakan tahapan kebijakan optimalisasi penanggulangan kemiskinan dengan pemantapan integrasi dan kolaborasi seluruh *stakeholder* melalui upaya penguatan daya beli, pengurangan beban pengeluaran, pemantapan kualitas konsumsi dan ketahanan pangan serta pemerataan pendapatan. Pemantapan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial difokuskan pada peningkatan pemerataan pendapatan dan ketahanan pangan, serta penguatan upaya perlindungan sosial.

Misi 6: Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas, diarahkan pada pemantapan dalam mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas merupakan tahapan kebijakan pemantapan kualitas lingkungan hidup, kualitas mitigasi dan adaptasi bencana, manajemen pengelolaan lingkungan, serta pemantapan resiliensi terhadap bencana. Pemantapan dalam mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas difokuskan pada optimalisasi pemantapan kapasitas sumber daya air dan energi baru terbarukan, serta peningkatan pemenuhan akses air minum dan sanitasi aman memperhatikan tata ruang dan kelestarian lingkungan.

Arah Kebijakan Periode 2040-2045

Tahapan keempat, Arah Kebijakan dari pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Kebumen Periode 2040-2045 adalah **Perwujudan Kabupaten Kebumen yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan**. Pada tahap ini dilakukan dengan perwujudan sumber daya manusia Kabupaten Kebumen yang berdaya saing, pelayanan prima berdasarkan prinsip *good and clean governance*, daerah yang kompetitif dan inovatif, perekonomian daerah yang memiliki produktivitas tinggi dan berbasis potensi lokal, Kabupaten Kebumen yang sejahtera, dan lingkungan hidup yang berkualitas.

Misi 1: Mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing, diarahkan pada perwujudan sumber daya manusia yang berdaya saing, merupakan tahapan kebijakan perwujudan sumber daya manusia yang sejahtera, adaptif, berbudaya maju, berdaya saing dengan layanan kesehatan dan pendidikan untuk semua dan berkualitas, seni dan budaya yang lestari, masyarakat yang berkarakter, kesetaraan gender dan keluarga yang berkualitas. Perwujudan sumber daya manusia yang berdaya saing difokuskan pada perwujudan SDM yang sejahtera, berdaya saing dan berbudaya.

Misi 2: Mewujudkan pelayanan prima berdasarkan prinsip *good and clean governance*, diarahkan pada perwujudan pelayanan prima berdasarkan prinsip *good and clean governance*, merupakan tahapan kebijakan perwujudan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan dinamis dan wilayah yang terjaga kondusivitasnya. Perwujudan pelayanan prima berdasarkan prinsip *good and clean governance* difokuskan pada perwujudan tata kelola Pemerintahan Daerah Kabupaten Kebumen berbasis digital yang efektif lincah dan kolaboratif didukung budaya birokrasi yang berorientasi pada pelayanan akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif, dan partisipasi masyarakat sipil yang mandiri dalam pembangunan daerah, serta sinergitas pendanaan pemerintah dan non pemerintah semakin meningkat.

Misi 3: Mewujudkan daerah yang kompetitif dan inovatif, diarahkan pada perwujudan daerah yang kompetitif dan inovatif, merupakan tahapan kebijakan perwujudan kapabilitas inovasi yang tinggi serta ekosistem riset dan inovasi daerah yang kuat. Perwujudan daerah yang kompetitif dan inovatif difokuskan perwujudan pembudayaan riset dan inovasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan daerah

Misi 4: Mewujudkan perekonomian daerah yang memiliki produktivitas tinggi dan berbasis potensi lokal, diarahkan pada perwujudan perekonomian daerah yang memiliki produktivitas tinggi dan berbasis potensi lokal merupakan tahapan kebijakan perwujudan peningkatan produktivitas dan nilai tambah ekonomi dengan mengoptimalkan potensi lokal, pusat pertumbuhan baik di kota maupun desa, peningkatan infrastruktur dan literasi digital, stabilitas ekonomi makro, perekonomian daerah yang terintegrasi dengan perekonomian regional, nasional dan internasional, serta struktur ekonomi daerah berbasis kewirausahaan. Perwujudan perekonomian daerah yang memiliki produktivitas tinggi dan berbasis potensi lokal difokuskan pada perwujudan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta perwujudan sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan.

Misi 5: Mewujudkan kesejahteraan sosial, diarahkan pada perwujudan kesejahteraan sosial, merupakan tahapan kebijakan perwujudan kesejahteraan masyarakat dengan pemerataan pendapatan, perlindungan sosial dan ketahanan pangan. Perwujudan kesejahteraan sosial difokuskan pada perwujudan pemerataan pendapatan, sistem perlindungan sosial dan sistem pangan yang adaptif sesuai kerentanan, berkeadilan dan inklusif.

Misi 6: Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas, diarahkan pada perwujudan lingkungan hidup yang berkualitas, merupakan tahapan kebijakan perwujudan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan, resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim serta ketahanan air. Perwujudan lingkungan hidup yang berkualitas difokuskan pada perwujudan pemantapan kapasitas sumber daya air dan energi baru terbarukan yang mudah diakses dan berkelanjutan, serta perwujudan pemenuhan akses air minum dan sanitasi aman yang berkelanjutan dan inklusif memperhatikan tata ruang dan kelestarian lingkungan.

Tabel 5.1.
Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045

Visi	Misi	Arah Kebijakan Tahun Ke-			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
Kebumen Sumunar 2045: Kebumen Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan		Penguatan Landasan Pembangunan Kabupaten Kebumen	Akselerasi Pembangunan Kabupaten Kebumen	Pemantapan Pembangunan Kabupaten Kebumen	Perwujudan Kabupaten Kebumen yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan
	Misi 1: Mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing	Peningkatan pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan, serta peningkatan kualitas hidup keluarga untuk membentuk SDM yang produktif, berkarakter, adaptif dan tangguh	Penguatan pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan, dan peningkatan kualitas hidup keluarga untuk percepatan pembangunan SDM yang berkualitas	Pemantapan pembangunan SDM menjadi semakin berkualitas menuju SDM yang berdaya saing	Perwujudan SDM yang sejahtera, berdaya saing dan berbudaya

Visi	Misi	Arah Kebijakan Tahun Ke-			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
	Misi 2: Mewujudkan pelayanan prima berdasarkan prinsip <i>good and clean governance</i>	Peningkatan perbaikan kelembagaan Pemerintahan Daerah, peningkatan kualitas pengelolaan manajemen ASN berbasis merit, penerapan manajemen risiko perencanaan dan pengendalian pembangunan, penguatan partisipasi masyarakat sipil, dan peningkatan kapasitas masyarakat sipil, dan penguatan kebijakan pembangunan berbasis <i>big data</i> dan <i>Artificial Intellegent</i> , serta perbaikan tata kelola fiskal dan optimalisasi pembiayaan pembangunan non pemerintah	Penguatan kelembagaan Pemerintahan Daerah, penguatan pengelolaan manajemen ASN berbasis merit, Pengembangan manajemen risiko perencanaan dan pengendalian pembangunan, penguatan partisipasi masyarakat sipil, dan peningkatan kebijakan pembangunan berbasis <i>big data</i> dan <i>Artificial Intellegent</i> , serta optimalisasi kapasitas fiskal daerah, dan peningkatan pembiayaan non pemerintah	Optimalisasi pemantapan kelembagaan Pemerintahan Daerah berbasis teknologi informasi yang didukung oleh SDM yang kompetitif, pemantapan manajemen risiko perencanaan dan pengendalian pembangunan, pemantapan partisipasi masyarakat sipil, dan pemantapan kebijakan pembangunan berbasis <i>big data</i> dan <i>Artificial Intellegent</i> , serta perluasan cakupan sektor pada pembiayaan non pemerintah	Perwujudan tata kelola Pemerintahan Daerah Kabupaten Kebumen berbasis digital yang efektif lincah dan kolaboratif didukung budaya birokrasi yang berorientasi pada pelayanan akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif, dan partisipasi masyarakat sipil yang mandiri dalam pembangunan daerah, serta sinergitas pendanaan pemerintah dan non pemerintah semakin meningkat
	Misi 3: Mewujudkan daerah yang kompetitif dan inovatif	Peningkatan jejaring riset dan inovasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan daerah	Pembudayaan riset dan inovasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan daerah	Peningkatan pembudayaan riset dan inovasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan daerah	Perwujudan pembudayaan riset dan inovasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan daerah
	Misi 4: Mewujudkan perekonomian daerah yang memiliki produktivitas tinggi dan berbasis potensi lokal	Peningkatan produktivitas sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja tinggi untuk pemerataan pendapatan, serta peningkatan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru didukung peningkatan sistem transportasi antar wilayah dan penerapan ekonomi hijau	Peningkatan produktivitas sektor-sektor yang memiliki nilai tambah tinggi serta peningkatan pemanfaatan sistem transportasi antar wilayah untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan serta penerapan ekonomi hijau	Peningkatan daya saing sektor-sektor yang memiliki nilai tambah tinggi serta optimalisasi pemantapan sistem transportasi antar wilayah untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan, serta pemantapan penerapan ekonomi hijau	Perwujudan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta perwujudan sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan
	Misi 5: Mewujudkan kesejahteraan sosial	Peningkatan pendapatan dan ketahanan pangan, serta peningkatan upaya perlindungan sosial	Penguatan peningkatan pendapatan dan ketahanan pangan, serta penguatan upaya perlindungan sosial	Peningkatan pemerataan pendapatan dan ketahanan pangan, serta penguatan upaya perlindungan sosial	Perwujudan pemerataan pendapatan, sistem perlindungan sosial dan sistem pangan yang adaptif sesuai kerentanan, berkeadilan dan inklusif

Visi	Misi	Arah Kebijakan Tahun Ke-			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
	Misi 6: Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas	Peningkatan kapasitas sumber daya air dan energi, serta pemenuhan akses air minum dan sanitasi aman memperhatikan tata ruang dan kelestarian lingkungan	Penguatan kapasitas sumber daya air dan energi baru terbarukan, serta peningkatan pemenuhan akses air minum dan sanitasi aman memperhatikan tata ruang dan kelestarian lingkungan	Optimalisasi pemantapan kapasitas sumber daya air dan energi baru terbarukan, serta peningkatan pemenuhan akses air minum dan sanitasi aman memperhatikan tata ruang dan kelestarian lingkungan	Perwujudan pemantapan kapasitas sumber daya air dan energi baru terbarukan yang mudah diakses dan berkelanjutan, serta perwujudan pemenuhan akses air minum dan sanitasi aman yang berkelanjutan dan inklusif memperhatikan tata ruang dan kelestarian lingkungan

5.2. Sasaran Pokok Kabupaten Kebumen 2025-2045

Sasaran pokok RPJPD Tahun 2025-2045 merupakan gambaran rangkaian kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya visi RPJPD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045 pada setiap tahapan dan diukur dengan menggunakan indikator utama pembangunan daerah Kabupaten Kebumen yang bersifat progresif. Sasaran pokok RPJPD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045 memperhatikan arah pembangunan, arah kebijakan transformasi dan Indikator Utama Pembangunan (IUP) pembangunan jangka panjang Nasional 2025-2045 serta pembangunan jangka panjang Provinsi Jawa Tengah 2025-2045 untuk dilakukan penyelarasan dalam rangka berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang Nasional termasuk penyelarasan terhadap arahan arah pembangunan, arah kebijakan transformasi dan Indikator Utama Pembangunan (IUP) Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, dalam rangka berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang Provinsi Jawa Tengah. Dalam rangka mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Kebumen 2025-2045 terdapat 19 (Sembilan Belas) Sasaran Pokok dan 19 (Sembilan Belas) Arah Pembangunan Kabupaten Kebumen 2025-2045 yang akan memberikan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang Nasional dan Provinsi Jawa Tengah, yaitu:

Sasaran Pokok Pada Misi 1: Mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing

Pencapaian Misi 1: Mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing dilakukan dengan perwujudan sasaran pokok terwujudnya peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan untuk seluruh masyarakat Kabupaten Kebumen, terwujudnya peningkatan kualitas pendidikan, terwujudnya pemajuan kebudayaan dan pendidikan karakter, dan terwujudnya keluarga berkualitas dan kesetaraan gender. Sasaran pokok tersebut dilakukan untuk memastikan tercapainya perwujudan sumber daya manusia Kabupaten Kebumen yang berdaya saing. Dalam rangka mewujudkan sasaran pokok tersebut difokuskan pada arah pembangunan beserta arah kebijakan sebagai berikut.

Sasaran Pokok 1: Terwujudnya peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan untuk seluruh masyarakat Kabupaten Kebumen

Arah Pembangunan 1: Kesehatan untuk semua

Pembangunan kesehatan untuk semua diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, mandiri, dan produktif dalam perlindungan sosial yang berkesinambungan. Pelayanan kesehatan yang paripurna dilaksanakan sebagai perwujudan kesehatan untuk semua. Pelayanan kesehatan yang paripurna akan dicapai jika prasyaratnya dipenuhi yaitu tersedianya sumber daya kesehatan yang adekuat, terlaksananya upaya kesehatan yang komprehensif, tersedianya regulasi untuk mendukung penyempurnaan sistem kesehatan, serta tersedianya ekosistem yang mampu memfasilitasi tumbuhnya industri kesehatan. Dampak peningkatan derajat kesehatan masyarakat harus dirasakan oleh seluruh kelompok masyarakat secara merata di seluruh wilayah. Penerapan *health in all policies*, pemerataan kapasitas daerah, serta partisipasi masyarakat menjadi strategi kunci untuk menjamin pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh penduduk.

Arah kebijakan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan untuk seluruh masyarakat Kabupaten Kebumen dua puluh tahun ke depan adalah: 1) perluasan upaya promotif preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat; 2) pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal; 3) peningkatan kualitas dan penyediaan sarana prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan; 4) pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya; 5) penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan; 6) peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan; 7) pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan; 8) penguatan tata kelola, organisasi dan regulasi tenaga kerja Kesehatan; 9) pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi tenaga kader kesehatan yang berkualitas; 10) percepatan penuntasan stunting dan pencegahan *stunting*; 11) peningkatan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; 12) percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan; 13) penyediaan sistem informasi kesehatan yang terintegrasi; 14) penguatan riset, data, dan informasi, serta penerapan inovasi dan teknologi di bidang kesehatan; dan 15) penguatan sistem pengawasan obat dan makanan.

Sasaran Pokok 2: Terwujudnya peningkatan kualitas pendidikan

Arah Pembangunan 2: Pendidikan berkualitas

Pembangunan pendidikan berkualitas menjadi hal penting yang berperan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta menciptakan sumber daya manusia yang berakhlak, inovatif dan berdaya saing sehingga dapat terwujud masyarakat yang lebih sejahtera. Dalam mewujudkan kondisi tersebut, arah kebijakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Kebumen dua puluh tahun ke depan adalah: 1) percepatan wajib belajar 13 tahun, yang difokuskan pada pemerataan akses pendidikan menengah dan khusus melalui: (a) perluasan bantuan pembiayaan pendidikan, (b) penyediaan sarana prasarana sesuai standar dan aman bencana, (c) prioritas pada daerah terpencil dan area blankspot layanan pendidikan lainnya untuk distribusi dan pemberian insentif guru dan tenaga kependidikan, (d) pengembangan sekolah virtual dan kelas jauh berbasis digital, serta e) penguatan sekolah *boarding* dan semi *boarding*; 2) penyelenggaraan pendidikan berkualitas yang difokuskan pada: (a) penguatan kurikulum pendidikan menengah secara adaptif berbasis softskill dan karakter, digital dan teknologi informasi, STEAM (*Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics*)

dan potensi lokal daerah (termasuk potensi bencana), serta (b) peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan; 3) solidasi penyelenggaraan pendidikan melalui penguatan kelembagaan dan peningkatan partisipasi serta pemberdayaan masyarakat.

Sasaran Pokok 3: Terwujudnya pemajuan kebudayaan dan pendidikan karakter

Arah Pembangunan 3: Pemajuan kebudayaan dan pendidikan karakter

Pembangunan pemajuan kebudayaan dan pendidikan karakter dalam ketahanan sosial budaya harus diwujudkan dalam proses pembangunan Kabupaten Kebumen selama dua puluh tahun ke depan di tengah modernisasi dan globalisasi yang dapat memberikan ancaman terhadap pola pikir, perilaku, identitas, dan karakter masyarakat. Membangun ketahanan sosial budaya setidaknya ada beberapa hal yang harus dimiliki oleh masyarakat. Pertama, kemampuan memelihara sistem nilai budaya Jawa yang dianut karena budaya adalah endapan dari perilaku manusia. Kedua, kemampuan masyarakat untuk beradaptasi dengan dunia yang berubah dengan cepat. Ketiga, adanya fungsi integrasi semua unsur masyarakat yang beraneka ragam secara menerus. Keempat, masyarakat harus memiliki tujuan bersama dari masa ke masa. Dalam rangka mewujudkan sasaran pokok meningkatnya pelestarian dan pemanfaatan budaya difokuskan pada arah kebijakan meliputi: 1) peningkatan strategi pemajuan kebudayaan; 2) penguatan penanaman nilai-nilai budaya Jawa/lokal sejak dini dengan edukasi budaya Jawa mulai dari dalam keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat terkecil, 3) optimalisasi ekspresi dan pemanfaatan budaya dan seni, serta 4) optimalisasi pengembangan Geopark Kebumen terkait *cultural diversity*.

Pembangunan pemajuan kebudayaan dan pendidikan karakter dalam ketahanan sosial budaya untuk mencegah berbagai dampak negatif pengaruh global yang berpotensi memberikan dampak negatif kepada masyarakat. Dalam rangka mewujudkan sasaran pokok meningkatnya karakter dan jatidiri masyarakat difokuskan pada arah kebijakan meliputi: 1) internalisasi kurikulum kebudayaan Jawa/lokal di semua jenjang pendidikan, disertai peningkatan kualitas tenaga pendidik dalam implementasi budaya Jawa/lokal pada anak-anak sekolah; 2) edukasi di keluarga dilakukan oleh orang tua kepada anak-anaknya untuk mengajarkan identitas Jawa Tengah terutama identitas Kabupaten Kebumen melalui tutur kata sehari-hari, termasuk melakukan *parenting* untuk para orang tua terkait pembelajaran karakter masyarakat Kabupaten Kebumen dalam kehidupan sehari-hari; 3) pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya, kearifan lokal, tradisi, kesenian sebagai salah satu sumber perekonomian daerah, dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat; 4) penguatan komitmen pemerintah dalam memperkuat pembentukan karakter masyarakat Jawa Tengah terutama karakter masyarakat Kabupaten Kebumen yang salah satunya tercermin dari politik kebudayaan untuk memprioritaskan pendidikan kebudayaan dan kesenian untuk masyarakat Kabupaten Kebumen.

Sasaran Pokok 4: Terwujudnya keluarga berkualitas dan kesetaraan gender

Arah Pembangunan 4: Keluarga berkualitas dan kesetaraan gender

Pembangunan keluarga berkualitas, kesetaraan gender dalam rangka mewujudkan pengarusutamaan gender (PUG) dan inklusi sosial dalam pembangunan daerah Kabupaten Kebumen dengan prinsip pemerataan (*no one left behind*), arah kebijakan dalam dua puluh tahun ke depan meliputi: 1) pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia,

melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan; dan 2) penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan. Arah kebijakan dalam rangka mewujudkan keluarga yang berkualitas di Kabupaten Kebumen dalam dua puluh tahun ke depan meliputi: 1) peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal; dan 2) pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.

Sasaran Pokok Pada Misi 2: Mewujudkan pelayanan prima berdasarkan prinsip *good and clean governance*

Pencapaian Misi 2: Mewujudkan pelayanan prima berdasarkan prinsip *good and clean governance* dilakukan dengan perwujudan sasaran pokok terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan dinamis, dan terwujudnya kondusivitas wiayah. Sasaran pokok tersebut dilakukan untuk memastikan tercapainya perwujudan pelayanan prima berdasarkan prinsip *good and clean governance*. Dalam rangka mewujudkan sasaran pokok tersebut difokuskan pada arah pembangunan beserta arah kebijakan sebagai berikut.

Sasaran Pokok 5: Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan dinamis

Arah Pembangunan 5: Regulasi dan tata kelola yang berintegritas, adaptif, dan kolaboratif

Sasaran pokok perwujudan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan dinamis dalam rangka mendorong pemerintah daerah sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah untuk bekerja lebih efektif dan akuntabel, serta mampu memberikan pelayanan publik lebih optimal. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan dinamis mendukung kebijakan transformasi tata kelola. Pembangunan regulasi dan tata kelola yang berintegritas, adaptif, dan kolaboratif untuk mewujudkan kebijakan meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam memenuhi kebutuhan masyarakat (responsif dan partisipatif) di Kabupaten Kebumen dalam dua puluh tahun ke depan diarahkan pada: 1) penguatan manajemen pemerintahan yang semakin adaptif, partisipatif, dan berorientasi pada hasil, berbasis riset, dan risiko; 2) akselerasi peningkatan kompetensi ASN melalui penguatan manajemen ASN dan manajemen talenta secara efektif dan efisien; 3) penguatan kelembagaan yang efektif; dan 4) penguatan pendapatan asli daerah dan sumber-sumber pembiayaan alternatif lainnya.

Pembangunan regulasi dan tata kelola yang berintegritas, adaptif, dan kolaboratif untuk mewujudkan kebijakan peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (transparansi dan akuntabel) dalam rangka mendorong pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan untuk bekerja lebih efektif dan akuntabel, serta mampu memberikan pelayanan publik lebih optimal difokuskan pada arah kebijakan meliputi: 1) penyederhanaan regulasi dan penguatan penegakan hukum; 2) penguatan kolaborasi dan kerja sama antardaerah, antara daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka perwujudan cita-cita pembangunan daerah; 3) penguatan manajemen pengawasan yang independen dan berintegritas dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi; dan 4) penguatan integritas setiap penyelenggara pemerintahan dan masyarakat termasuk partai politik.

Dalam rangka mewujudkan *smart governance* (dinamis, adaptif, dan kolaboratif) dalam pembangunan regulasi dan tata kelola yang berintegritas,

adaptif, dan kolaboratif dalam rangka mendorong pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan untuk bekerja lebih efektif dan akuntabel, serta mampu memberikan pelayanan publik lebih optimal difokuskan pada arah kebijakan meliputi: 1) penguatan pelayanan publik yang cepat, tepat, berbasis digital, serta keterbukaan pelayanan pengaduan masyarakat (*open government*); dan 2) digitalisasi tata kelola pemerintahan.

Sasaran Pokok 6: Terwujudnya kondusivitas wiayah

Arah Pembangunan 6: Ketentraman dan ketertiban

Pembangunan ketentraman dan ketertiban dalam rangka mewujudkan sasaran pokok Terwujudnya kondusivitas wiayah untuk mencegah berbagai dampak negatif pengaruh global yang berpotensi memberikan dampak negatif kepada masyarakat, arah kebijakannya dalam dua puluh tahun ke depan meliputi: 1) penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas; 2) penegakan hukum yang berkeadilan; 3) penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat; 4) penguatan integritas partai politik; 5) penguatan internalisasi dan aktualisasi nilai-nilai agama sebagai landasan spiritual, etika, dan moral dalam kehidupan masyarakat; dan 6) pemantapan kohesi sosial melalui edukasi tentang keberagaman, toleransi, spiritualisme, dan kewarganegaraan kepada seluruh lapisan masyarakat sejak dini.

Sasaran Pokok Pada Misi 3: Mewujudkan daerah yang kompetitif dan inovatif

Pencapaian Misi 3: Mewujudkan daerah yang kompetitif dan inovatif dilakukan dengan perwujudan sasaran pokok meningkatnya kapabilitas inovasi dengan memperkuat ekosistem riset dan inovasi daerah. Sasaran pokok tersebut dilakukan untuk memastikan tercapainya perwujudan Kabupaten Kebumen yang kompetitif dan inovatif. Dalam rangka mewujudkan sasaran pokok tersebut difokuskan pada arah pembangunan beserta arah kebijakan sebagai berikut.

Sasaran Pokok 7: Meningkatnya kapabilitas inovasi

Arah Pembangunan 7: Kapabilitas Inovasi

Pembangunan kapabilitas inovasi dalam rangka mewujudkan sasaran pokok meningkatnya kapabilitas inovasi sebagai salah satu upaya perwujudan daerah yang kompetitif dan inovatif akan terus didorong dalam dua puluh tahun ke depan melalui arah kebijakan meliputi: 1) sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional melalui riset dan inovasi; 2) penerapan pembangunan daerah berbasis pada hasil penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian untuk mendorong Inovasi sebagai upaya peningkatan produktivitas pembangunan, kemandirian, dan daya saing daerah melalui: (a) alih teknologi, (b) intermediasi teknologi, (c) Difusi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan (d) komersialisasi teknologi; 3) Pengembangan Inovasi dan Inovasi dalam fasilitasi pemanfaatan, adopsi, inkubasi, kemitraan, penguatan kawasan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan kesiapan dan keunggulan daerah, promosi, dan pemanfaatan hasil Inovasi dan Inovasi dalam program pembangunan secara berkelanjutan; 4) Penguatan kawasan ilmu pengetahuan dan teknologi meliputi pendirian, pengelolaan, dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; 5) peningkatan mekanisme koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan riset dan inovasi; 6) penguatan dan pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi; dan 7) pengembangan produk unggulan daerah yang berdaya saing.

Sasaran Pokok Pada Misi 4: Mewujudkan perekonomian daerah yang memiliki produktivitas tinggi dan berbasis potensi lokal

Pencapaian Misi 4: Mewujudkan perekonomian daerah yang memiliki produktivitas tinggi dan berbasis potensi lokal dilakukan dengan perwujudan sasaran pokok terwujudnya peningkatan produktivitas dan nilai tambah ekonomi dengan mengoptimalkan potensi lokal, terwujudnya perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, terwujudnya peningkatan infrastruktur dan literasi digital, terwujudnya stabilitas ekonomi makro daerah, terintegrasinya perekonomian daerah dengan perekonomian regional, nasional dan internasional, dan struktur ekonomi daerah yang berdaya saing berbasis kewirausahaan. Sasaran pokok tersebut dilakukan untuk memastikan tercapainya perwujudan perekonomian daerah Kabupaten Kebumen yang memiliki produktivitas tinggi dan berbasis potensi lokal. Dalam rangka mewujudkan sasaran pokok tersebut difokuskan pada arah pembangunan beserta arah kebijakan sebagai berikut.

Sasaran Pokok 8: Terwujudnya peningkatan produktivitas dan nilai tambah ekonomi dengan mengoptimalkan potensi lokal

Arah Pembangunan 8: Produktivitas dan nilai tambah ekonomi

Pembangunan produktivitas dan nilai tambah ekonomi dalam rangka mewujudkan sasaran pokok terwujudnya peningkatan produktivitas dan nilai tambah ekonomi dengan mengoptimalkan potensi lokal sebagai salah satu upaya perwujudan perekonomian yang berdaya saing adalah meningkatkan produktivitas sektor-sektor unggulan daerah dan memberikan nilai tambah produksi agar mampu lebih bersaing di pasar domestik, nasional maupun global. Peningkatan produktivitas sektor-sektor unggulan daerah diantaranya meliputi pengembangan pertanian, industri pengolahan dan pariwisata.

Pengembangan sektor pertanian (dalam arti luas) menjadi salah satu sektor unggulan daerah Jawa Tengah yang sampai dua puluh tahun ke depan masih akan menjadi unggulan untuk menopang perekonomian Jawa Tengah dengan dukungan pengembangan sektor pertanian di Kabupaten Kebumen. Sektor pertanian yang saat ini masih berfokus pada peningkatan produksi dan produktivitas, peningkatan nilai tambah produk, dan peningkatan kesejahteraan pelaku usaha pertanian. Kebijakan peningkatan produktivitas dan hilirisasi sektor pertanian menjadi salah satu kebijakan penting dalam pembangunan produktivitas dan nilai tambah ekonomi untuk mendukung transformasi ekonomi Jawa Tengah yang diharapkan akan berdampak pada kesejahteraan pelaku sektor pertanian terutama petani/nelayan. Arah kebijakan jangka panjang pengembangan sektor pertanian meliputi: 1) peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian dalam arti luas yang terintegrasi hulu-hilir melalui pengembangan kawasan strategis pertanian dengan mendorong hilirisasi yang didukung digitalisasi ekonomi, dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan, sekaligus upaya peningkatan kesejahteraan petani dalam arti luas; 2) peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui implementasi teknologi (*smart farming, smart agriculture, smart fishing, logitic system, geomembrane*, teknologi sensor, modifikasi cuaca) dan modernisasi dalam pembangunan sektor pertanian berbasis riset, teknologi, dan inovasi baik di sisi hulu maupun hilir; 3) penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global; 4) pengembangan pertanian dalam arti luas yang berkelanjutan melalui penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan terjangkau (termasuk untuk pengembangan aktivitas perikanan budidaya); 5) peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi

pelaku usaha pertanian dalam arti luas guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang implementatif (pengetahuan nilai dan musim komoditas, pengetahuan metode pengembangbiakan dan perawatan, pengetahuan jenis tanah, cuaca, dan iklim, pengetahuan pengendalian hama dan pemupukan, teknologi pascapanen, dan pemasaran pertanian melalui digital *marketplace/platform*); 6) perluasan akses pembiayaan kredit usaha pertanian dalam arti luas, pengembangan closed loop model pertanian melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta kolaborasinya dengan pasar dan bank, perluasan diversifikasi pertanian, regenerasi pelaku usaha sektor pertanian, penguatan sistem distribusi produk pertanian, serta perlindungan terhadap pelaku usaha sektor pertanian; 7) penyediaan infrastruktur esensial terintegrasi yang mendukung produktivitas pertanian dalam arti luas dan daya saing produk pertanian dalam arti luas; 8) modernisasi kapal dan sarana produksi perikanan dan pengembangan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah, pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan dengan memanfaatkan teknologi monitoring, penginderaan jauh, dan pelaporan nelayan berbasis digital, disertai penerapan insentif dan disinsentif.

Sektor industri pengolahan menjadi salah satu sektor penyumbang terbesar pada perekonomian Jawa Tengah, termasuk perekonomian Kabupaten Kebumen. Untuk itu, arah kebijakan peningkatan produktivitas sektor ini menjadi penting dalam upaya akselerasi peningkatan perekonomian daerah yang memiliki daya saing global maupun nasional dalam dua puluh tahun ke depan meliputi: 1) penguatan industri kecil dan menengah berbasis potensi lokal agar memiliki nilai tambah tinggi; 2) pengembangan industri berbasis teknologi, riset dan inovasi, dan ramah lingkungan (*green investment*); 3) pengembangan industri bahan baku lokal; 4) hilirisasi industri; 5) penguatan integrasi rantai pasok antarindustri didukung dengan ketersediaan infrastruktur konektivitas dan logistik pendukung industri; 6) peningkatan penyediaan infrastruktur pendukung industri pengolahan ramah lingkungan; 7) penguatan kapasitas dan kompetensi pelaku usaha industri pengolahan agar lebih produktif, inovatif, dan kreatif; 8) digitalisasi industri pengolahan; 9) penciptaan iklim usaha yang sehat dan iklim kemitraan yang mendorong produktivitas industri pengolahan; dan 10) peningkatan penumbuhan kawasan industri/kawasan peruntukan industri baru.

Kabupaten Kebumen memiliki potensi pariwisata yang cukup tinggi yang mampu menarik kunjungan wisatawan sehingga mampu memberikan dampak pada peningkatan pendapatan masyarakat dan mendorong perekonomian daerah. Untuk itu, pembangunan pariwisata ke depan menjadi penting dalam pembangunan produktivitas dan nilai tambah ekonomi untuk mendukung transformasi ekonomi Jawa Tengah. Arah kebijakan pembangunan pariwisata Kabupaten Kebumen dalam dua puluh tahun ke depan meliputi: 1) *city beautification*; 2) peningkatan kualitas destinasi wisata berbasis klaster dengan perbaikan sarana prasarana destinasi wisata; 3) penguatan integrasi antardestinasi wisata; 4) penguatan kapasitas SDM pelaku pariwisata termasuk pelaku UMKM pariwisata; 5) penguatan fasilitasi kemitraan untuk pengembangan destinasi pariwisata; 6) pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dan berkelanjutan; 7) penguatan diversifikasi daya tarik pariwisata sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah seperti pemanfaatan keragaman sumber daya alam, budaya, kreativitas, dan olahraga berbasis digital; 8) penguatan promosi pariwisata berbasis digital; dan 9) peningkatan infrastruktur konektivitas antardestinasi wisata. Perwujudan sasaran pokok Terwujudnya peningkatan produktivitas dan nilai tambah ekonomi dengan mengoptimalkan potensi lokal dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Kabupaten Kebumen dalam dua puluh tahun kedepan diarahkan dengan menerapkan prinsip ekonomi hijau yang bertujuan

meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial sekaligus mengurangi risiko kerusakan lingkungan dalam hal ini yaitu pengembangan Geopark Kebumen.

Selain itu, pengembangan sektor pariwisata dapat didorong melalui pengembangan sektor ekonomi kreatif dalam mewujudkan sasaran pokok terwujudnya struktur ekonomi daerah yang berdaya saing berbasis kewirausahaan. Pengembangan sektor ekonomi kreatif saat ini menjadi salah satu sektor ekonomi yang mampu menjadi kekuatan baru untuk peningkatan perekonomian daerah. Sektor ekonomi kreatif dapat menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen. Pengembangan sektor ekonomi kreatif akan mampu menciptakan nilai tambah tinggi berbasis ide yang lahir dari kreativitas sumber daya manusia dan berbasis ilmu pengetahuan, termasuk warisan budaya dan teknologi. Arah kebijakan pengembangan sektor ekonomi kreatif meliputi: 1) peningkatan kualitas sumber daya manusia ekonomi kreatif; 2) pengembangan dan penguatan sistem kelembagaan ekonomi kreatif dan jejaringnya sampai tingkat desa; 3) peningkatan pemasaran dan promosi produk ekonomi kreatif; 4) pengembangan sistem pembiayaan dan pendanaan bagi pengembangan ekonomi kreatif; 5) penyediaan infrastruktur fisik dan nonfisik yang memadai dan terjangkau untuk mendukung pengembangan kreativitas; 6) peningkatan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan sumber daya alam dan warisan budaya lokal sebagai bahan baku usaha ekonomi kreatif; 7) pengembangan sistem regulasi yang mendukung pengembangan ekonomi kreatif; 8) peningkatan apresiasi masyarakat terhadap kreativitas dan perlindungan hak kekayaan intelektual; 9) pengembangan dan penguatan jejaring kabupaten/kota kreatif; 10) pengembangan dan penguatan desa kreatif terutama pada produk kreatif unggulan; 11) mengembangkan ekonomi kreatif yang mendukung industri pariwisata melalui penciptaan iklim yang kondusif; dan 12) mengembangkan riset ekonomi kreatif.

Pembangunan produktivitas dan nilai tambah ekonomi juga harus didukung dengan peningkatan kualitas SDM tenaga kerja yaitu melalui: 1) penyediaan tenaga kerja yang memiliki kemampuan/keahlian yang tersertifikasi, memiliki spesialisasi dan sesuai dengan perkembangan teknologi, otomasi dan AI melalui pendidikan dan pelatihan yang berkualitas dan tersertifikasi; 2) pengarusutamaan penyediaan tenaga kerja perempuan yang memiliki kemampuan/ keahlian yang tersertifikasi, memiliki spesialisasi dan sesuai dengan perkembangan teknologi, otomasi dan AI melalui pendidikan dan pelatihan yang berkualitas dan tersertifikasi; 3) Penyediaan informasi pasar kerja dalam jangkauan luas berbasis digital terintegrasi dengan dunia usaha dunia industri; serta 4) penguatan revitalisasi dan relevansi pendidikan vokasi dengan Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI) berbasis potensi dan keunggulan daerah, teknologi serta berorientasi pada kompetensi STEAM (*Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics*).

Sasaran Pokok 9: Terwujudnya perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi

Arah Pembangunan 9: Perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi

Pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dalam rangka perwujudan sasaran pokok terwujudnya perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dilakukan melalui peningkatan kemandirian desa. Memperkuat pembangunan perdesaan terutama dalam upaya mewujudkan desa yang mandiri sebagai salah satu upaya untuk mendukung pemerataan pembangunan ekonomi daerah adalah

pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi menuju kota dan desa maju, dan berkelanjutan sehingga arah kebijakan dalam dua puluh tahun ke depan meliputi: 1) peningkatan kapasitas aparaturnya pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas SDM lokal; 2) pemenuhan dan pemerataan kebutuhan akses layanan dasar perdesaan; 3) penguatan peran lembaga perekonomian desa melalui optimalisasi potensial lokal desa; 4) penguatan kerjasama kawasan perdesaan sebagai upaya pemerataan pusat pertumbuhan; dan 5) penguatan peran supra desa dalam penyelarasannya pembangunan desa sesuai pembagian kewenangan.

Peningkatan infrastruktur wilayah dalam pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dilakukan untuk mendukung konektivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah dalam pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi menuju kota dan desa maju, dan berkelanjutan sehingga arah kebijakan dalam dua puluh tahun ke depan meliputi: pemantapan jalan dan jembatan sesuai standar merata di seluruh wilayah guna memperlancar distribusi barang dan jasa.

Peningkatan kuantitas dan kualitas hunian layak serta permukiman sehat bagi masyarakat dalam pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi untuk mendukung kebijakan untuk mendukung pemerataan pembangunan ekonomi daerah dan percepatan penanggulangan kemiskinan, arah kebijakan meliputi dalam dua puluh tahun ke depan meliputi: 1) penguatan pemenuhan dan pemerataan perumahan dan kawasan permukiman yang layak; 2) peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau untuk mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan sesuai dengan karakteristik wilayah; 3) perluasan kapasitas layanan listrik dalam rangka mendorong pusat-pusat pertumbuhan ekonomi; dan 4) penguatan implementasi penataan ruang (RTRW dan RDTR) terutama dalam perwujudan struktur ruang, serta memperhatikan perencanaan wilayah berdasarkan rencana arah pengembangan wilayah Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Purworejo (Keburejo), diarahkan pengembangannya untuk : a) Perwujudan perkotaan Kebumen sebagai Pusat Kegiatan Wilayah serta menyelaraskan pembangunan Kawasan Perkotaan Purworejo-Kutoarjo dengan kawasan Bandar Udara Internasional Yogyakarta (YIA) di Kabupaten Kulon Progo sebagai koridor pengembangan ekonomi; b) Pengembangan wisata diarahkan pada koridor Kebumen-Purworejo-Borobudur-Magelang dan koridor wisata pantai-Geopark Kebumen-KSPN Dieng sebagai pengembangan potensi wisata keunikan geologi dan pantai disertai dengan peningkatan aksesibilitas; dan c) Kawasan industri diprioritaskan di Kabupaten Kebumen yang terintegrasi dengan Kawasan Otoritas Borobudur dengan fokus pada pengembangan industri manufaktur dan pengolahan hasil pertanian, perikanan dan kehutanan dengan tetap mempertimbangkan kelestarian alam dan pengembangan wilayah serta upaya mitigasi bencana alam meliputi gempa bumi, tsunami dan gerakan tanah.

Sasaran Pokok 10: Terwujudnya peningkatan infrastruktur dan literasi digital

Arah Pembangunan 10: Transformasi Digital

Pembangunan transformasi digital dalam mewujudkan sasaran pokok terwujudnya peningkatan infrastruktur dan literasi digital dalam mendukung kebijakan transformasi digital yang adaptif, memberdayakan, berdaulat, dan berkelanjutan dengan membangun ekosistem digital tangguh sehingga arah kebijakan dalam dua puluh tahun ke depan meliputi: 1) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh

pelosok; 2) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis; dan 3) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital).

Sasaran Pokok 11: Terwujudnya stabilitas ekonomi makro daerah

Arah Pembangunan 11: Stabilitas ekonomi makro daerah

Pembangunan Stabilitas ekonomi makro daerah dalam rangka mewujudkan sasaran pokok terwujudnya stabilitas ekonomi makro daerah akan terus didorong dalam dua puluh tahun ke depan melalui arah kebijakan meliputi: 1) peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui inovasi dan optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah dan peningkatan kualitas belanja daerah; 2) inovasi dan penguatan potensi pembiayaan alternatif dan kreatif daerah; dan 4) perluasan dan inovasi pemanfaatan layanan jasa keuangan masyarakat untuk menumbuhkan perekonomian yang merata dan berkualitas.

Sasaran Pokok 12: Terintegrasinya perekonomian daerah dengan perekonomian regional, nasional dan internasional

Arah Pembangunan 12: Integrasi ekonomi domestik dan global

Pembangunan integrasi ekonomi domestik dan global dalam rangka mewujudkan sasaran pokok terintegrasinya perekonomian daerah dengan perekonomian regional, nasional dan internasional untuk mendukung peningkatan kapasitas perekonomian daerah yang berdaya saing, serta mendukung pemerataan pembangunan ekonomi daerah akan terus didorong dalam dua puluh tahun ke depan melalui arah kebijakan meliputi: 1) inovasi dan penguatan ekspor produk unggulan daerah; 2) pengurangan ketergantungan impor; 3) inovasi dan penguatan standarisasi produk-produk unggulan daerah sehingga mampu bersaing di pasar global dan nasional; 4) peningkatan kapasitas dan kompetensi pelaku sektor perdagangan untuk mampu menciptakan produk yang berdaya saing tinggi dan memasarkannya di pasar global maupun nasional; 5) inovasi dan penguatan iklim kemitraan pasar produk unggulan daerah; 6) inovasi dan penguatan sistem distribusi produk perdagangan; 7) penyederhanaan regulasi, penguatan kapasitas hukum, persaingan persaingan usaha, termasuk kelembagaan persaingan usaha. Kebijakan ini didukung dengan kebijakan percepatan penyediaan infrastruktur transportasi dan logistik yang handal yang akan mendorong penguatan keterkaitan nilai tambah antarwilayah secara lebih terintegrasi; dan 8) peningkatan keselamatan perjalanan transportasi, efisiensi sistem logistik dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, dan pemantapan kualitas pelayanan transportasi terutama angkutan umum massal (termasuk di kawasan aglomerasi perkotaan dan lintas wilayah pengembangan) untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah, serta penerapan transportasi ramah lingkungan.

Peningkatan daya beli masyarakat Kabupaten Kebumen dilakukan dalam mendukung pembangunan integrasi ekonomi domestik dan global, serta stabilitas ekonomi makro daerah dalam mendorong perekonomian daerah Kabupaten Kebumen lebih produktif dan tumbuh semakin optimal, sehingga kebijakan dalam dua puluh tahun ke depan diarahkan pada: 1) pengendalian harga dalam upaya mengendalikan tingkat inflasi yang dapat memengaruhi tingkat daya beli masyarakat; dan 2) inovasi dan penguatan pengendalian inflasi daerah.

Sasaran Pokok 13: Terwujudnya struktur ekonomi daerah yang berdaya saing berbasis kewirausahaan

Arah Pembangunan 13: Struktur ekonomi daerah yang berdaya saing berbasis kewirausahaan

Pembangunan inovasi dalam pengembangan kewirausahaan dalam rangka mewujudkan sasaran pokok terwujudnya struktur ekonomi daerah yang berdaya saing berbasis kewirausahaan dapat dilakukan melalui pengembangan sektor UMKM dan koperasi. Perekonomian daerah mampu tumbuh dan berkembang salah satunya ditopang oleh sektor UMKM dan koperasi yang dinilai mampu menghadapi goncangan pasar global dan nasional maupun dinamika global lainnya. Sektor ini juga mampu banyak menyerap tenaga kerja yang baik yang berpendidikan rendah sampai berpendidikan tinggi. Untuk itu, agar sektor ini ke depan tetap mampu berkontribusi tinggi pada perekonomian daerah didorong untuk lebih meningkatkan produktivitas agar memiliki nilai tambah lebih dan mampu bersaing secara global dan nasional. Arah kebijakan pengembangan sektor UMKM dan koperasi meliputi: 1) penguatan koperasi produksi sebagai konsolidator UMKM terutama bagi usaha mikro kecil; 2) perbaikan mekanisme pengawasan dan penjaminan koperasi simpan pinjam; 3) peningkatan kelembagaan dan kualitas sumber daya manusia koperasi; 4) mengoptimalkan peran koperasi, UMKM dan IKM dalam peningkatan dan pengembangan industri pengolahan melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah; 5) peningkatan kualitas produk unggulan UMKM dan IKM berbasis riset, inovasi, dan teknologi; 6) fasilitasi perluasan akses pasar, kemitraan, modal/pembiayaan inovatif, kemasan, standar produk, dan manajemen usaha; 7) akselerasi digitalisasi dan penggunaan teknologi bagi pelaku UMKM dan IKM disertai dengan penyediaan akses internet dan teknologi yang memadai dan terjangkau; 8) pengembangan wirausaha baru; 9) peningkatan kapasitas dan kompetensi pelaku UMKM dan IKM untuk mampu mengembangkan produk UMKM dan IKM yang memiliki standar pasar, berbasis riset, inovasi, dan teknologi; dan 10) peningkatan produktivitas BUMD.

Pembangunan inovasi dalam pengembangan kewirausahaan juga dilakukan dengan kebijakan penguatan riset dan inovasi sebagai salah satu upaya perwujudan perekonomian yang berdaya saing adalah meningkatkan produktivitas sektor-sektor unggulan daerah dan memberikan nilai tambah produksi agar mampu lebih bersaing di pasar domestik, nasional maupun global. Peningkatan produktivitas sektor-sektor unggulan daerah salah satunya dengan mendorong hilirisasi produk berbasis riset, teknologi, dan inovasi, serta didukung dengan digitalisasi ekonomi yang memadai dan terjangkau. Dalam rangka mewujudkan sasaran pokok Terwujudnya struktur ekonomi daerah yang berdaya saing berbasis kewirausahaan dapat dilakukan melalui peningkatan ekosistem inovasi daerah dengan didukung dinamisme bisnis dan kapabilitas inovasi sebagai salah satu faktor pendukung untuk meningkatkan produktivitas sektor-sektor ekonomi dan memperkuat struktur ekonomi jangka panjang. Penguatan riset dan inovasi akan terus didorong dalam dua puluh tahun ke depan melalui arah kebijakan meliputi: 1) penguatan peran dan kapasitas pusat riset dan inovasi di semua lembaga dan perusahaan, serta perguruan tinggi mitra pemerintah; 2) penguatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia riset dan inovasi di semua sektor; 3) penguatan tata kelola kelembagaan riset dan inovasi; 4) penguatan relevansi dan produktivitas hasil riset dan inovasi di semua sektor pembangunan; 5) penguatan kerja sama riset dan inovasi antarpelaku usaha, swasta, dan pemerintah; dan 6) penguatan inkubasi hasil riset dan inovasi, serta fasilitasi hak kekayaan intelektual dan hak paten atas hasil riset dan inovasi.

Sasaran Pokok Pada Misi 5: Meningkatnya kesejahteraan sosial

Pencapaian Misi 5: Meningkatnya kesejahteraan sosial dilakukan dengan perwujudan sasaran pokok terwujudnya pemerataan pendapatan masyarakat, terwujudnya perlindungan sosial, dan terwujudnya ketahanan pangan yang lebih terjangkau, beragam, bergizi seimbang dan aman. Sasaran pokok tersebut dilakukan untuk memastikan tercapainya perwujudan kesejahteraan sosial Kabupaten Kebumen. Dalam rangka mewujudkan sasaran pokok tersebut difokuskan pada arah pembangunan beserta arah kebijakan sebagai berikut.

Sasaran Pokok 14: Terwujudnya pemerataan pendapatan masyarakat

Arah Pembangunan 14: Distribusi pendapatan

Pembangunan distribusi pendapatan dalam rangka mewujudkan sasaran pokok terwujudnya pemerataan pendapatan masyarakat untuk mendukung kebijakan kesejahteraan sosial serta perekonomian daerah Kabupaten Kebumen lebih produktif dan tumbuh semakin optimal, sehingga kebijakan dalam dua puluh tahun ke depan diarahkan pada: 1) peningkatan akses terhadap aset. Modal, manajemen, dan pasar; 2) peningkatan *start up* wirausaha baru; 3) pemberdayaan kelompok usaha pertanian; 4) peningkatan ketrampilan dan kompetensi tenaga kerja berkelanjutan serta 5) fasilitasi pengembangan usaha perdesaan.

Sasaran Pokok 15: Terwujudnya perlindungan sosial

Arah Pembangunan 15: Perlindungan sosial

Pembangunan perlindungan sosial dalam rangka mewujudkan sasaran pokok terwujudnya perlindungan sosial yang diperuntukkan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Kebumen tanpa terkecuali sesuai tingkat kerentanan dengan prinsip berkeadilan. Perlindungan sosial ditujukan untuk mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, kemiskinan ekstrem ditargetkan akan dapat dihapuskan pada tahun 2030. Arah kebijakan sasaran pokok terwujudnya perlindungan sosial dalam dua puluh tahun ke depan meliputi: 1) perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem Regsosek agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien; 2) perluasan penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, bantuan pemasangan instalasi listrik bersubsidi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat; 3) perluasan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat; 4) pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan; 5) percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi; 6) percepatan eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga; dan 7) peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah.

Sasaran Pokok 16: Terwujudnya ketahanan pangan yang lebih terjangkau, beragam, bergizi seimbang dan aman

Arah Pembangunan 16: Ketahanan pangan

Pembangunan ketahanan pangan dalam rangka mewujudkan sasaran pokok terwujudnya ketahanan pangan yang lebih terjangkau, beragam, bergizi seimbang dan aman serta mendukung kebijakan kemandirian pangan, arah kebijakan meliputi dalam dua puluh tahun ke depan meliputi: 1) pemenuhan hak dasar atas pangan yang cukup, beragam, bergizi, seimbang, dan aman secara berkelanjutan, penguatan sistem rantai pasok, dan penguatan pengendalian harga pangan untuk menjamin aksesibilitas pangan; 2) penyediaan pangan lokal secara mandiri dan berkelanjutan; 3) pencegahan pemborosan pangan (*food loss and waste*); dan 4) peningkatan ketahanan pangan dan gizi hingga tingkat individu.

Sasaran Pokok Pada Misi 6: Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas

Pencapaian Misi 6: mewujudkan lingkungan hidup dengan daya dukung memadai dan lestari dilakukan dengan perwujudan sasaran pokok terwujudnya lingkungan hidup berkualitas dan berkelanjutan, terwujudnya peningkatan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim, dan terwujudnya peningkatan ketahanan air. Sasaran pokok tersebut dilakukan untuk memastikan tercapainya perwujudan lingkungan hidup yang berkualitas. Dalam rangka mewujudkan sasaran pokok tersebut difokuskan pada arah pembangunan beserta arah kebijakan sebagai berikut.

Sasaran Pokok 17: Terwujudnya lingkungan hidup berkualitas dan berkelanjutan

Arah Pembangunan 17: Kualitas lingkungan hidup

Pembangunan kualitas lingkungan hidup dalam rangka mewujudkan sasaran pokok terwujudnya lingkungan hidup berkualitas dan berkelanjutan, arah kebijakan dalam dua puluh tahun ke depan, meliputi: 1) penguatan pengelolaan keanekaragaman hayati, sumber daya hutan, pesisir dan laut yang berkelanjutan; 2) penguatan penyediaan sarana sanitasi aman bagi masyarakat; 3) percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan sanitasi untuk mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan; 3) pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, pengelolaan sampah terintegrasi hulu hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah; 4) penguatan aksi pembangunan rendah karbon dan upaya adaptasi perubahan iklim; 5) pengoptimalan ruang terbuka hijau; dan 6) Penerapan prinsip ekonomi hijau untuk mengurangi risiko kerusakan lingkungan diharapkan pertumbuhan ekonomi daerah tetap tinggi dan tetap sejalan dengan meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup agar tetap lestari dan berkelanjutan. Pembangunan kualitas lingkungan hidup dalam penerapan ekonomi hijau dapat dilakukan dengan: 1) penerapan *circular economy* secara bertahap dengan mentransformasikan dari *brown industry* menuju *green industry* baik untuk perusahaan besar, menengah, UMKM dan IKM, dengan mengadopsi prinsip-prinsip *circular economy* (R0-R9), yang dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu: a) membuat dan menggunakan produk dengan lebih cerdas (R0: *refuse*, R1: *rethink*, R2: *reduce*); b) memperpanjang usia pakai produk (R3: *reuse*, R4: *repair*, R5: *refurbish*, R6: *remanufacture*, R7: *repurpose*); dan c) mengambil manfaat dari material (R8: *recycle*, R9: *recover*); 2) penerapan konservasi energi agar lebih efisien dan mendorong transisi energi ke sumber energi terbarukan yang dicapai melalui

pemanfaatan potensi energi baru terbarukan yang ada di daerah seperti biogas, sinar matahari dan angin, gerakan penghematan energi, desa mandiri energi berbasis potensi lokal yang terjangkau, inklusif, dan pendampingan energi; 3) pengembangan sistem transportasi umum massal yang andal, berkualitas, merata, terintegrasi dan terjangkau serta rendah emisi secara bertahap untuk meningkatkan peralihan penggunaan kendaraan pribadi ke transportasi umum untuk mendukung peningkatan efisiensi penggunaan energi; 4) pengelolaan hutan lestari, lahan pertanian, lahan budidaya perikanan dan kelautan serta produk-produk turunannya secara berkelanjutan untuk meningkatkan produktivitas dan mendukung hilirisasi sektor pertanian; dan 5) pengembangan *green financing* dan penerapan *carbon pricing* untuk mendukung investasi dan produk-produk hijau.

Sasaran Pokok 18: Terwujudnya peningkatan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim

Arah Pembangunan 18: Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim

Pembangunan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim dalam rangka mewujudkan sasaran pokok terwujudnya peningkatan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim, arah kebijakan dalam dua puluh tahun ke depan, meliputi: 1) pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, 2) kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya, 3) mengembangkan mitigasi struktural dan nonstruktural di daerah rawan bencana tinggi, serta penguatan aksi pembangunan rendah karbon dan upaya adaptasi perubahan iklim, serta 4)

Sasaran Pokok 19: Terwujudnya peningkatan ketahanan air

Arah Pembangunan 19: Ketahanan air

Pembangunan ketahanan air dalam rangka mewujudkan sasaran pokok terwujudnya peningkatan ketahanan air dalam peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan sumber daya air, arah kebijakan meliputi dalam dua puluh tahun ke depan meliputi: 1) penguatan penyediaan sarana air minum aman bagi masyarakat terutama air minum perpipaan; 2) percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum untuk mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan; 3) penguatan pengelolaan sumber daya air; serta 4) optimalisasi dan pemerataan jaringan irigasi didukung aspek penggunaan teknologi tepat guna, modernisasi irigasi, peningkatan infrastruktur, konservasi air, manajemen berbasis data dan pendekatan partisipatif melalui optimalisasi fungsi petani pemakai air. Dalam rangka pencapaian target akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan hingga mencapai 100 persen pada Tahun 2045 akan dilakukan melalui pengembangan unit air baku, unit produksi dan unit distribusi serta peningkatan kelayakan dan keamanan konsumsi untuk air minum perpipaan yang akan dilakukan oleh PDAM dan SPAM Regional Keburejo. Selain itu juga akan dilakukan peningkatan sosialisasi untuk mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam mengakses air minum perpipaan. Sementara dalam rangka pencapaian target rumah tangga dengan akses sanitasi aman akan dilakukan melalui peningkatan pengolahan limbah domestik IPLT menjadi IPAL, layanan sedot lumpur tinja terjadwal, pendampingan pengolahan IPAL Komunal di masyarakat, penambahan armada penyedot (truk dan motor roda tiga), pemanfaatan Information Management System (IMS) dalam pelayanan, serta edukasi dan promosi terhadap sanitasi aman.

Tabel 5.2.
Visi, Sasaran Visi, Misi, Sasaran Pokok dan Arah Pembangunan RPJPD Kabupaten Kebumen 2025-2045

Visi, Sasaran Visi, IUP Sasaran Visi dan Misi,	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	IUP Sasaran Pokok	Proyeksi Baseline	Target			
				2025	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
Visi:								
Kabumian Sumunar 2045: “Kebumen Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan”								
Sasaran Visi: Peningkatan daya saing sumber daya manusia								
Indikator Sasaran Visi:				72,45	74,00-75,00	77,00-78,00	79,00-80,00	81,00-82,00
Indeks Pembangunan Manusia/IPM (Angka)								
Misi 1 : Mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing	1. Terwujudnya peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan untuk seluruh masyarakat Kabupaten Kebumen	1. Kesehatan untuk Semua	1. Usia Harapan Hidup (UHH) (Tahun)	75,20	76,71	78,23	79,74	81,25
			2. Jumlah Kasus Kematian Ibu (Kasus)	14	13	12	11	10
			3. Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (Persen)	9,10	9,00	7,95	6,90	5,26
			4. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>) (Persen)	95,00	96,00	96,50	97,50	100,00
			5. Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>) (Persen)	90,00	92,25	93,50	94,00	95,00
			6. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (Persen)	98,21	98,58	98,88	99,18	99,50
	2.Terwujudnya peningkatan kualitas pendidikan	2. Pendidikan Berkualitas	7. Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (Tahun)	7,89	8,09	8,40	8,72	9,03

Visi, Sasaran Visi, IUP Sasaran Visi dan Misi,	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	IUP Sasaran Pokok	Proyeksi Baseline	Target				
				2025	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
			8. Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,86	14,56	15,27	15,97	16,67	
			9. Persentase Siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (seluruh jenjang) (Persen):						
			a) Literasi Membaca						
			- SD	84,29	86,29	88,79	91,79	95,29	
			- SMP	87,30	89,30	91,80	94,80	98,30	
			b) Numerasi						
			- SD	73,69	75,69	78,69	82,69	86,69	
			- SMP	82,35	84,35	86,85	89,85	93,35	
			10. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (Persen)	7,96	9,15	10,34	11,52	12,71	
			11. Angka Partisipasi Sekolah 5-6 Tahun (Persen)	85,85	88,58	91,31	94,04	96,77	
			12. Tingkat pemanfaatan Perpustakaan (Persen)	0,28	1,45	2,62	3,79	4,96	
			3. Terwujudnya pemajuan kebudayaan dan pendidikan karakter	3. Pemajuan Kebudayaan dan Pendidikan Karakter	13. Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan (Persen)	11,22	11,23-17,95	17,96-24,66	24,67-31,37
	14. Jumlah pengunjung tempat bersejarah (Orang)	53.800			57.800	62.300	67.300	78.300	
	15. Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir (Persen)	20,40			22,50	24,60	26,60	28,70	
	16. Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan (Persen)	64,07			65,82	68,07	70,82	74,07	

Visi, Sasaran Visi, IUP Sasaran Visi dan Misi,	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	IUP Sasaran Pokok	Proyeksi Baseline	Target				
				2025	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
			17. Indeks Kesalehan Sosial (Angka)	82,41	83,91	85,41	86,91	88,41	
			18. Cakupan Pelestarian Adat Istiadat dan Ritus (Persen)	85,43	85,44-89,13	89,14-92,83	92,84-96,52	96,53-100,00	
			19. Jumlah Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang Mendapatkan Fasilitas Anggaran (Angka)	176	424	689	954	1218	
			20. Jumlah Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang Mendapatkan Fasilitas Pendampingan (Angka)	98	220	435	750	865	
	4. Terwujudnya keluarga berkualitas dan kesetaraan gender	4. Keluarga Berkualitas dan Kesetaraan Gender	21. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (Angka)	0,32	0,28-0,24	0,24-0,20	0,20-0,16	0,16-0,11	
			22. Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga) (Angka)	64,60-65,18	65,50-66,90	67,00-68,50	68,55-69,90	70,00-71,00	
Sasaran Visi: Kepemimpinan dan pengaruh di lingkungan Nasional meningkat									
Indikator Sasaran Visi:				79,92	79,94	79,96	79,98	80,00	
Indeks Reformasi Birokrasi/IRB (Angka)									
Misi 2 : Mewujudkan pelayanan prima berdasarkan prinsip <i>good and clean governance</i>	5. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas dan Dinamis	5. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas, Adaptif, dan Kolaboratif	23. Indeks Pelayanan Publik (Angka)	4,59	4,70	4,81	4,92	5,00	
			24. Indeks Reformasi Hukum (Angka)	60	65,00	75,00	83,00	90,00	
			25. Indeks Integritas Nasional (Angka)	79,81	80,00-84,00	84,01-88,00	88,01-92,00	92,01-96,10	
			26. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Angka)	3,90	4,20	4, 50	4,80	5,00	
	6. Terwujudnya kondusivitas wilayah	6. Ketentraman dan Ketertiban	27. Jumlah Kejadian Konflik SARA (Kali)	5	3	2	1	0	

Visi, Sasaran Visi, IUP Sasaran Visi dan Misi,	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	IUP Sasaran Pokok	Proyeksi Baseline	Target			
				2025	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
Indikator Sasaran Visi :								
Kapabilitas Inovasi (Angka)				2,32	2,32-2,36	2,37-2,41	2,42-2,46	2,47-2,50
Misi 3 : Mewujudkan Daerah yang Kompetitif dan Inovatif	7. Meningkatnya kapabilitas inovasi dengan memperkuat ekosistem riset dan inovasi daerah.	7. Kapabilitas Inovasi	28. Kapabilitas Inovasi (Angka)	2,32	2,32-2,36	2,37-2,41	2,42-2,46	2,47-2,50
Sasaran Visi: Pertumbuhan Ekonomi yang Stabil dalam rangka Peningkatan Pendapatan per Kapita								
Indikator Sasaran Visi:				5,40-6.30	5,00-5.50	5,00-5.50	5,00-5.50	5,00-5.50
Pertumbuhan Ekonomi (Persen)								
Misi 4 : Mewujudkan perekonomian daerah yang memiliki produktivitas tinggi dan berbasis potensi lokal,	8. Terwujudnya peningkatan produktivitas dan nilai tambah ekonomi dengan mengoptimalkan potensi lokal	8. Produktivitas dan Nilai Tambah Ekonomi	29. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita Kabupaten/Kota (Juta Rupiah)	27,68-27,87	49,20-54,16	74,00-78,96	98,80-103,76	128,57-151,00
			30. Rasio PDRB Industri Pengolahan (Persen)	22,7	23,50-24,25	25,00-25,80	26,50-27,35	28,00-28,90
			31. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (Persen)	2,82	3,54-3,72	4,44-4,62	5,33-5,51	6,23-6,41
			32. <i>Return on Aset</i> (ROA) BUMD (Persen)	4,08	4,09-4,58	4,59-5,08	5,09-5,58	5,59-6,08
			33. Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Orang)	25	27-30	42-45	57-60	72-75
			34. Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)	4,98-4,55	4,30-4,16	3,62-3,48	2,94-2,80	2,26-1,96
			35. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (Persen)	62,21	65,40-66,20	69,39-70,19	73,38-74,18	77,37-78,17

Visi, Sasaran Visi, IUP Sasaran Visi dan Misi,	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	IUP Sasaran Pokok	Proyeksi Baseline	Target			
				2025	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
	9. Terwujudnya perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi	9. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	36. Persentase Desa Mandiri (Persen)	2,45	4,45	8,46	15,15	22,05
			37. Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota (Persen)	74,36	76,36	78,36	80,36	82,36- 90,00
			38. Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota (Persen)	79,78	89,21	90,70	92,18	93,97
			39. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak (Persen)	93,48	95,11	96,13	98,13	100,00
	10. Terwujudnya peningkatan infrastruktur dan literasi digital	10. Transformasi Digital	40. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet (Persen)	75,00	78,75	82,50	86,25	90,00
	11. Terwujudnya Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	11. Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	41. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (Persen)	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62
			42. Total Dana Pihak Ketiga Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB (Persen)	1,60	1,60-1,64	1,64-1,67	1,67-1,70	1,70-1,73
			43. Total Kredit Pada Bank Milik Kabupaten/ Kota per PDRB (Persen)	1,44	1,44-1,48	1,49-1,53	1,54-1,58	1,59-1,64
	12. Terintegrasinya perekonomian daerah dengan perekonomian regional, nasional dan internasional	12. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	44. Pembentukan Modal Tetap Bruto (persen PDRB) (Persen)	19,03	19,53	20,03	20,52	21,02
			45. Disparitas Harga (Persen)	±10	±10	±10	±10	±10
	13. Terwujudnya struktur ekonomi daerah yang berdaya saing berbasis kewirausahaan	13. Struktur Ekonomi Daerah yang Berdaya Saing Berbasis Kewirausahaan	46. Rasio Kewirausahaan Daerah (Persen)	3,84	5,00-6,00	6,00-7,00	7,00-8,00	8,00-10,76
			47. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (Persen)	1,17	1,50-1,57	1,87-1,94	2,24-2,31	2,68-7,37
	Sasaran Visi: Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan							

Visi, Sasaran Visi, IUP Sasaran Visi dan Misi,	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	IUP Sasaran Pokok	Proyeksi Baseline	Target			
				2025	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
Indikator Sasaran Visi:				14,71-13,90	11,20-10,43	7,69-6,95	4,18-3,48	0,67-0,00
Tingkat Kemiskinan (Persen)								
Misi 5 : Mewujudkan kesejahteraan sosial	14. Terwujudnya pemerataan pendapatan masyarakat	14. Distribusi Pendapatan	48. Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia (Persen)	20,98-21,48	20,98-21,48	20,98-21,48	20,98-21,48	22,00-29,18
	15. Terwujudnya perlindungan sosial	15. Perlindungan Sosial	49. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Persen)	41,32	47,32	54,82	62,32	71,32
			50. Cakupan Fasilitas Publik yang Inklusif (Persen)	4,34	33,91	55,94	77,97	100,00
	16. Terwujudnya ketahanan pangan yang lebih terjangkau, beragam, bergizi seimbang dan aman	16. Ketahanan Pangan	51. Indeks Ketahanan Pangan (IKP) (Angka)	80,86	81,79-82,02	82,94-83,17	84,10-84,33	85,26-85,49
			52. Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>) (Persen)	9,31	9,30-7,57	7,56-5,84	5,83-4,11	4,10-2,38
Sasaran Visi: Penurunan emisi GRK menuju net zero emission								
Indikator Sasaran Visi:				206.765,97	4.592.235,71	8.977.705,46	13.363.175,20	17.748.644,94
Penurunan intensitas emisi GRK (TonCO2eq)								
Misi 6: Mewujudkan Lingkungan Hidup yang berkualitas	17. Terwujudnya lingkungan hidup berkualitas dan berkelanjutan	17. Kualitas Lingkungan Hidup	53. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (Angka)	74,71	74,89	75,16	75,61	76,14
			54. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (Persen)	5,93	6,00-29,99	30,00-59,99	60,00-80,99	81,00-85,93
			55. Timbunan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (Persen)	54,09 - 57,53	57,54 - 62,20	62,21 - 67,27	67,28 - 73,97	73,98 – 90,00
	18. Terwujudnya peningkatan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	18. Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	56. Indeks Risiko Bencana (IRB) (Angka)	97,60-95,40	90,18-84,32	82,76-73,23	75,34-62,15	67,92-51,06

Visi, Sasaran Visi, IUP Sasaran Visi dan Misi,	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	IUP Sasaran Pokok	Proyeksi Baseline	Target			
				2025	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
	19. Terwujudnya peningkatan ketahanan air	19.Ketahanan Air	57. Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (Persen)	17,00	17,00-34,99	35,00-54,99	55,00-74,99	75,00-100,00
			58. Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota (Angka)	58,00	58,00-61,00	61,00-65,00	65,00-72,00	72,00-80,00

BAB VI

Penutup

6.1 Kaidah Pelaksanaan

Konsistensi Perencanaan dan Pendanaan. Konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan serta sinkronisasinya dengan kebijakan pendanaan diperlukan untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal. Perencanaan yang berkualitas merupakan kunci bagi pelaksanaan pembangunan untuk mencapai tujuan secara berkelanjutan. Perencanaan yang berkualitas juga diperlukan untuk memberikan pedoman yang jelas bagi seluruh pelaku pembangunan, baik pemerintah daerah, maupun pelaku nonpemerintah. Upaya menjamin konsistensi perencanaan dan pendanaan juga perlu didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas. Hal tersebut dilakukan, khususnya untuk menentukan prioritas pembangunan daerah sampai dengan level proyek/keluaran, serta memastikan pelaksanaannya. Penguatan mekanisme proses utamanya dilakukan dengan penekanan pada kolaborasi dan partisipasi aktif seluruh pelaku pembangunan.

Keterkaitan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Provinsi. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), memiliki posisi tertinggi dalam perencanaan pembangunan nasional, menjadi pedoman bagi dokumen perencanaan turunannya yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Dokumen perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dokumen perencanaan tersebut harus menjadi pedoman bagi penyusunan anggaran di tingkat daerah (APBD).

Konsistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen perencanaan pusat dan provinsi adalah sebagai berikut:

1. Periodisasi RPJPD mengikuti periodisasi RPJPN yaitu tahun 2025-2045.
2. Substansi visi dan delapan misi (agenda) pembangunan berikut upaya transformatif prioritas dalam RPJPN dan visi dan misi RPJPD provinsi menjadi bagian dari muatan utama RPJPD.
3. Penentuan arah kebijakan, sasaran pokok dan indikator pembangunan RPJPD mengacu pada Arah (Tujuan) Pembangunan dan indikator dalam RPJPN, serta arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Provinsi.
4. Dokumen RPJPD menjadi pedoman dalam penyusunan visi, misi, dan program bagi pasangan calon Kepala daerah dan wakil Kepala daerah.
5. Penyusunan tujuan, sasaran, indikator, arah kebijakan dan program RPJMD mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok dan indikator kinerja RPJPD, dan berpedoman pada RPJMN dan RPJMD Provinsi, dan memperhatikan RTRW dan KLHS RPJMD.
6. Penyusunan tujuan, sasaran, indikator dan program, kegiatan dan sub kegiatan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tujuan, sasaran, indikator dan program RPJMD, sasaran dan indikator prioritas pembangunan nasional pada RPJMN, sasaran dan indikator strategis/program pada Rencana Strategis K/L (Renstra K/L), serta tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi.
7. Penyusunan prioritas, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan RKPD mengacu pada strategi dan arah kebijakan tahunan yang tercantum dalam RPJMD, sasaran dan indikator prioritas pembangunan nasional pada RKP, serta prioritas dan sasaran RKPD Provinsi.

8. Penyusunan prioritas, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan Renja Perangkat Daerah mengacu pada tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan Renstra Perangkat daerah dan prioritas, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan RKPD.
9. Dokumen RPJPD, dokumen RPJMD, dan dokumen RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan sektoral seperti rencana induk/ *Master Plan/ Grand Design*, strategi daerah, peta jalan, atau sebutan lainnya terkait perencanaan pembangunan.

Penerapan Prinsip Kerangka Kerja Logis dalam Perencanaan Pembangunan. Penyusunan RPJPD dan dokumen perencanaan turunannya (termasuk RPJPD) menerapkan prinsip Kerangka Kerja Logis (KKL) pembangunan. Pemanfaatan KL ditujukan agar intervensi kebijakan relevan dengan tujuan pembangunan yang telah direncanakan. Penyusunan KL juga mendukung pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan. Penggunaan KL dilakukan dengan menerapkan pendekatan Tematik, Spasial, Holistik, dan Integratif.

1. Tematik adalah penentuan tema-tema prioritas dalam suatu jangka waktu perencanaan, serta mampu menjawab tujuan pembangunan.
2. Spasial adalah penjabaran beberapa program pembangunan terkait dalam satu kesatuan wilayah.
3. Holistik adalah penjabaran tematik program pembangunan ke dalam perencanaan yang komprehensif, mulai dari hulu sampai ke hilir dalam suatu rangkaian kegiatan dengan memperhatikan pengarusutamaan pembangunan, yang mencakup: pengarusutamaan gender dan inklusi sosial, ekonomi hijau, transformasi digital, tujuan pembangunan berkelanjutan, serta kebencanaan.
4. Integratif adalah keterpaduan pelaksanaan program dari berbagai pemangku kepentingan pembangunan (kementerian/lembaga/daerah/pemangku kepentingan lainnya) serta keterpaduan berbagai sumber pendanaan.

Sebagai alat ukur ketercapaian sasaran pembangunan daerah, dalam dokumen perencanaan pembangunan dilengkapi indikator kinerja pada setiap tingkatannya. Pemilihan indikator kinerja setidaknya menerapkan kriteria *Specific, Measurable, Achievable, Result- Oriented/Relevant*, dan *Time-Bound* (SMART), sehingga mampu menjamin kesinambungan indikator dalam dokumen perencanaan pembangunan. Dalam memastikan kesinambungan pembangunan, seluruh indikator RPJPD harus menjadi bagian dari RPJMD, dan seluruh indikator RPJMD harus menjadi bagian dari Renstra Perangkat Daerah.

Skema Pendanaan dan Penganggaran. Keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan dalam RPJPD, RPJMD, dan RKPD perlu didukung dengan konsistensi dan sinkronisasi perencanaan dan pendanaan pembangunan. Sebagai upaya menjamin pencapaian sasaran pembangunan, perlu dilakukan optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber pendanaan pembangunan, baik yang bersumber dari pemerintah maupun nonpemerintah secara lebih inovatif, integratif, dan tepat sasaran. Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan sumber pendanaan pembangunan, dilakukan peningkatan kualitas belanja dan pembiayaan prioritas pembangunan yang sesuai dengan tahapan pembangunan. Selain melakukan efisiensi dan peningkatan efektivitas dalam belanja, pemerintah juga dapat memanfaatkan pendanaan pembangunan yang bersumber dari pinjaman, dan hibah, untuk penganggaran pencapaian prioritas pembangunan secara berkelanjutan.

Kerangka Pengendalian. Dalam menjamin pencapaian sasaran pembangunan, perlu pengendalian secara kontinu dan partisipatif dengan memanfaatkan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan. Pengendalian dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dan manajemen risiko yang dilakukan pada tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Aktivitas pengendalian didukung oleh sistem elektronik yang terintegrasi dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Sistem elektronik terpadu juga diintegrasikan dengan tata kelola data pembangunan yang mendorong kebijakan pembangunan berbasis bukti. Pengendalian RPJPD dilaksanakan melalui

pengendalian jangka menengah dan jangka pendek yang hasilnya disampaikan kepada Bupati. Berdasarkan tahapan pelaksanaannya, ruang lingkup pengendalian pembangunan terbagi menjadi dua bagian.

Pengendalian perencanaan. Pengendalian pada tahap perencanaan bertujuan memastikan konsistensi perencanaan pembangunan, meningkatkan kualitas desain proyek prioritas pembangunan, serta menjamin ketersediaan alokasi anggaran, baik dari pemerintah maupun nonpemerintah. Pengendalian ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi perencanaan jangka menengah dan jangka pendek. Pengendalian jangka menengah mencakup: (i) penjabaran perencanaan RPJPD ke RPJMD, dokumen RPJMD ke dokumen Renstra Perangkat Daerah; (ii) kesiapan desain proyek prioritas pembangunan dan penetapan ukuran keberhasilan; (iii) konsistensi perencanaan dan penganggaran; dan (iv) identifikasi risiko perencanaan pembangunan dan mitigasinya. Pengendalian jangka pendek mencakup: (i) penjabaran perencanaan RPJMD ke dokumen RKPD, dokumen RKPD ke dokumen Renja Perangkat Daerah; (ii) kesiapan desain proyek prioritas pembangunan dan penetapan ukuran keberhasilan; (iii) konsistensi perencanaan dan penganggaran; dan (iv) identifikasi risiko perencanaan pembangunan dan mitigasinya.

Pengendalian pelaksanaan. Pengendalian pada tahap pelaksanaan bertujuan untuk menjamin implementasi pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengendalian ini dilaksanakan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek. Pemantauan dan evaluasi tersebut mencakup: (i) pemantauan pelaksanaan proyek prioritas pembangunan; (ii) pemantauan mitigasi risiko pembangunan; (iii) evaluasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan; dan (iv) evaluasi pencapaian sasaran kinerja utama dan program Pemerintah Daerah yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan. Pengendalian pembangunan tersebut perlu didukung dengan tatanan regulasi agar pelaksanaannya berjalan dengan efektif. Tatanan regulasi tersebut menyinergikan regulasi terkait pemantauan, evaluasi, pengendalian, manajemen pembangunan, dan manajemen kinerja. Sinergi regulasi diperlukan untuk konsistensi pelaksanaan pengendalian dengan kinerja terkait yang akan menjadi salah satu dasar pengaturan sistem manajemen kinerja pemerintah. Kerangka kelembagaan pengendalian yang komprehensif juga diperlukan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik. Dalam hal ini, diperlukan kelembagaan pengendalian yang mengoordinasikan pengendalian lintas dan internal daerah.

Sistem Insentif. Keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan memerlukan partisipasi aktif dari seluruh pelaku pembangunan. Pelaku pembangunan dimaksud meliputi unsur pemerintah/pemerintah daerah, non pemerintah, seperti dunia usaha, LSM, Lembaga Penelitian dan Kelompok masyarakat lainnya. Untuk mendorong partisipasi aktif semua unsur pelaku pembangunan, perlu diciptakan sistem insentif yang baik. Sistem insentif ini diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan pelaku pembangunan secara luas dan partisipatif sehingga dapat mempercepat capaian sasaran prioritas pembangunan. Untuk pelaku pembangunan unsur pemerintah, sistem insentif diintegrasikan di dalam sistem manajemen kinerja dan sistem manajemen anggaran. Pemberian insentif dilaksanakan berdasarkan kinerja terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah. Kinerja diukur antara lain dari aspek konsistensi perencanaan, konsistensi perencanaan dan pendanaan, pencapaian indikator kerangka ekonomi makro, pencapaian indikator-indikator kinerja utama lainnya, dan pencapaian program prioritas. Untuk pelaku pembangunan nonpemerintah, sistem insentif dapat berupa dukungan regulasi dan fasilitas kemudahan lainnya.

Mekanisme Perubahan. Dokumen perencanaan yang adaptif memerlukan ruang penyesuaian atas faktor yang tidak dapat dikendalikan. Dalam keadaan kahar (*force majeure*) yang meliputi perubahan geopolitik, geoekonomi, dan bencana, serta penyimpangan pencapaian sasaran pembangunan yang signifikan dari tahapan-tahapan sebelumnya sehingga tidak memungkinkan pencapaian

sasaran pembangunan jangka panjang, target RPJPD dapat dimutakhirkan melalui RPJMD. Pemutakhiran target ini dilakukan berdasarkan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Penerapan kaidah pelaksanaan didukung oleh pemanfaatan transformasi digital melalui penggunaan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan pada seluruh tahapan siklus pembangunan. Sistem elektronik terpadu tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan ketangkasan proses bisnis perencanaan dan pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045. Adapun tata kelola data bertujuan untuk meningkatkan kualitas kebijakan melalui pemanfaatan data referensi yang sama.

Komunikasi Publik. Komunikasi publik sangat penting untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang dinamis, transparan, responsif, dan komunikatif. Dengan komunikasi publik yang baik, diharapkan kebijakan dan program pemerintah dapat dengan mudah dipahami oleh publik dan dapat mengundang partisipasi publik dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian kebijakan pembangunan. Prinsip dasar komunikasi publik terdiri dari tiga hal pokok, yaitu: (i) struktur dan tata kelola komunikasi lintas sektor dan daerah yang objektif, akuntabel, inovatif, dan profesional; (ii) penyediaan informasi yang akurat, transparan, tepat waktu, menarik, dan dapat dimanfaatkan oleh para pihak secara mudah dan murah; serta (iii) keterlibatan semua kelompok masyarakat secara demokratis berbasis data yang valid dengan metode komunikasi yang sesuai kebutuhan publik yang beragam.

Komunikasi publik RPJPD 2025-2045 berprinsip "tidak ada yang tertinggal" (*no one left behind*) dan partisipasi yang bermakna (*meaningful participation*). Komunikasi publik melibatkan tiga pemangku kepentingan utama, yaitu Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Komunikasi kepada Kementerian/Lembaga (K/L) dilakukan melalui musyawarah atau rapat koordinasi agar KL/ dapat memberikan masukan terhadap prioritas pembangunan, sedangkan komunikasi kepada pemerintah daerah dilakukan secara berjenjang mulai dari musyawarah desa/kelurahan, kabupaten, dan provinsi untuk membangun pemahaman dan partisipasi. Selanjutnya, komunikasi kepada masyarakat umum termasuk swasta, media, akademisi, organisasi masyarakat sipil, diaspora, pemuda dan kelompok rentan, seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas dan lansia dilakukan berpartisipasi dalam pembangunan dengan memberikan masukan, kritik, atau dukungan. Komunikasi publik dilaksanakan dengan mengutamakan keterbukaan, menjamin akses yang luas, jelas, tepat, cepat, dan objektif. Dengan demikian komunikasi publik dapat mendorong partisipasi publik yang lebih bermakna dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pembangunan.

6.2 Pembiayaan Pembangunan

Upaya untuk mewujudkan Visi pembangunan jangka panjang memerlukan kapasitas pembiayaan yang memadai. Peningkatan kapasitas pembiayaan dilakukan melalui pengembangan inovasi pembiayaan, baik berupa perluasan sumber-sumber pembiayaan, penerapan skema atau mekanisme pelaksanaan yang baru, hingga optimalisasi peran sektor keuangan. Peningkatan kapasitas pembiayaan sektor publik dilakukan melalui perluasan sumber-sumber dan pengembangan inovasi skema pembiayaan yang mencakup:

- (i) penguatan perencanaan pembiayaan yang meliputi: penataan regulasi dan pembentukan kelembagaan yang adaptif, pemanfaatan teknologi digital dalam proses bisnis, dan pengembangan inovasi mekanisme pelaksanaan (*delivery mechanism*) yang mendukung ruang gerak untuk mendapatkan skema pembiayaan yang berdampak (*impact investment*);
- (ii) perluasan kerja sama bilateral, multilateral dan kerja sama keuangan lainnya untuk mengembangkan sumber-sumber pembiayaan, terutama pembiayaan inovatif dengan syarat dan ketentuan yang paling menguntungkan, dan yang mendukung kerja sama ekonomi lainnya;

- (iii) penguatan dan perluasan berbagai instrumen dalam kerangka kerja sama pemerintah dan badan usaha, khususnya pada aspek regulasi, tata kelola dan kelembagaan menuju model *private financial initiative* yang mencakup sektor infrastruktur publik, utilitas dan infrastruktur sosial;
- (iv) penerapan skema-skema pembiayaan yang mendukung pemberdayaan industri dalam negeri dan mendorong alih teknologi;
- (v) optimalisasi pemanfaatan aset melalui sekuritisasi aset (*asset securitization*), daur ulang aset (*asset recycling*), tukar guling aset (*asset offset*) hingga pemanfaatan peningkatan nilai aset (*asset value capture*) yang dihasilkan dari investasi, aktivitas, dan kebijakan lain pada suatu kawasan yang ada dapat digunakan secara optimal.

Selain itu juga perlu dilakukan peningkatan pembiayaan di luar pemerintah yaitu melalui pengembangan kerjasama pemerintah daerah dengan masyarakat dan swasta/badan usaha dalam rangka mendapatkan alternatif sumber pendapatan yang baru. Upaya ini dapat dilakukan dengan mengoptimalkan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan, filantropi, badan-badan sosial, komunitas, dan organisasi yang ada di Kabupaten Kebumen termasuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan daerah serta investasi sosial.

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO